

**KONSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM
MENJADIKAN IDEOLOGI SEBAGAI ORIENTASI
(Studi Terhadap Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



Oleh :

Anatoli Kasparov Putu Abdullah

NIM : 05401241040

JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2011

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Konsistensi Konsistensi Partai Politik di Indonesia Dalam
Menjadikan Ideologi Politik Sebagai Orientasi
(Studi Terhadap Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN)” ini telah
disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 22 September 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Cholisin', is written over a horizontal blue line.

Cholisin, M.Si

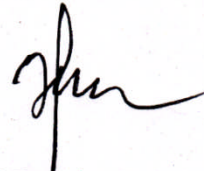
NIP.19550801 198503 1002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “KONSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM MENJADIKAN IDEOLOGI POLITIK SEBAGAI ORIENTASI (STUDI TERHADAP PARTAI DEMOKRAT, PARTAI GOLKAR, PDIP, PKS, PAN)” ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 5 Oktober 2011 dan dinyatakan lulus.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Cholisin, M.Si.	Ketua Penguji	
Nasiwan, M.Si.	Penguji Utama		20.10.2011
Dr. Samsuri, M.Ag.	Sekretaris Penguji		31.10.2011

Yogyakarta,
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

MOTTO

Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran
(Al Ashr/ Waktu Ayat 1-3)

Hai orang yang berselimut, Bangunlah..... (Al Muzzammil/ Orang Yang Berselimut: Ayat 1-2)

Jangan hanya bisa mencela kegelapan, nyalakan lilin sekarang juga (Anies Baswedan)

Al QURAN adalah rumus hidupku, imani, perdalam, pertajam, pahami isinya, dan amalkan... ☆ (Penulis)

Setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan alkhlaq yang sejalan dengan AL QURAN ☆ (Penulis)

Hidup adalah kumpulan segala peristiwa. besar kecilnya nama kami, bergantung pada besar kecilnya peristiwa yang kami tuliskan di lembar kehidupan... ☆

Semangat belajar ! Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkanlah hatimu serendah mutiara di dasar lautan... ☆

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah atas pertolongan dan izin Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini, penulis persembahkan untuk:

☆ Bapak, Ibu dan Adek (Bulan Bintang) tercinta. Terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang tanpa pamrih yang diberikan kepada Penulis.

☆ Kakek dan Nenek tersayang

☆ Temen-temen seperjuangan di Winning Eleven Team, anak-anak kontrakan Rantau Jaya, Al Ishlah, Tutorial, Takmir Al mujahidin, Forum Jurusan. Terimakasih atas motivasi, ejekan kalian yang akhirnya menjadi penggerak utama penulis menyelesaikan skripsi ini.

☆ Seluruh Aktivis Pergerakan UNY

☆ Seluruh mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan berbagai nikmat yang tidak terhingga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi (TAS) dengan judul “Konsistensi Partai Politik di Indonesia Dalam Menjadikan Ideologi Sebagai Orientasi (Studi Terhadap Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN)”. Penyusunan Tugas Akhir Skripsi (TAS) ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir Skripsi (TAS) ini dapat terselesaikan dengan bantuan, dukungan, serta partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY yang telah berkenan memberikan izin penelitian penulisan tugas akhir skripsi ini.

3. Bapak Anang Priyanto, M. Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yang telah memberikan izin dan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak Cholisin, M.Si selaku Pembimbing Skripsi sekaligus Ketua Penguji yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis, memberikan saran, kepercayaan, memotivasi dan menumbuhkan rasa percaya diri penulis, serta membekali penulis dengan nasihat-nasihat yang membangun.
5. Bapak Nasiwan M, Si selaku narasumber sekaligus Penguji Utama yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Samsuri, M.Ag. selaku Penguji Pendamping merangkap sekretaris yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Murdiono, M. Pd selaku Penasehat Akademik yang sering memberikan motivasi serta meluangkan waktu untuk membuka layanan konsultasi bagi mahasiswa PKN dan Hukum 2005.
8. Bapak Halili Hasan S.Pd selaku Dosen Pembimbing Kemahasiswaan yang sering memotivasi mahasiswa untuk berkarya, serta memberikan pencerahan-pencerahan yang menggugah kesadaran penulis tentang pentingnya tradisi intelektual.
9. Bapak Idham Samawi selaku Ketua Bidang Kaderisasi DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah berkenan menjadi narasumber

wawancara, serta memberikan bantuan data-data yang diperlukan penulis sebagai bahan penelitian.

10. Bapak Widi Pratomo selaku Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber wawancara, serta memberikan bantuan data-data yang diperlukan penulis sebagai bahan penelitian.
11. Bapak Jhon Serang Keban selaku Ketua Bidang Pembinaan dan Pengkaderan DPD Partai Golongan Karya (P Golkar) Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber wawancara, serta memberikan bantuan data-data yang diperlukan penulis sebagai bahan penelitian.
12. Bapak Paryanto Rohmah selaku Ketua Bidang Pengkaderan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber wawancara, dan bersedia memberikan bantuan berupa informasi-informasi yang diperlukan peneliti.
13. Bapak Ali Muhti selaku Ketua II DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Bidang Kebijakan Publik yang telah berkenan menjadi narasumber wawancara, serta memberikan bantuan data-data yang diperlukan penulis sebagai bahan penelitian.
14. Bapak Agus Purnomo selaku anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang telah berkenan menjadi narasumber wawancara.
15. Bapak Darul Falah selaku Anggota Majelis Syuro Pusat PKS yang telah berkenan menjadi narasumber wawancara.

16. Bapak Pongki selaku Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pengkaderan DPD Partai Demokrat Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber wawancara, serta memberikan bantuan berupa informasi-informasi yang diperlukan peneliti.
17. Bapak Kuskrido Ambardi, P.Hd. selaku Dosen UGM yang telah berkenan menjadi narasumber wawancara, serta telah memberikan bantuan berupa informasi-informasi yang diperlukan peneliti.
18. Bapak Dr. Ari Dwipayana selaku Dosen UGM yang telah berkenan menjadi narasumber wawancara, serta telah memberikan bantuan berupa informasi-informasi yang diperlukan peneliti.

Atas bantuan, dukungan, bimbingan dan pengorbanannya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik. Semoga karya tulis ini memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1432 H/ 21 Agustus 2011

Penulis

Anatoli Kasparov P.A.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN MOTTO.....	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Identifikasi Masalah.....	
C. Pembatasan Masalah.....	
D. Rumusan Masalah.....	
E. Tujuan Penelitian.....	
F. Manfaat Penelitian.....	
G. Batasan Pengertian	

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik
2. Asal-usul Partai Politik... ..
3. Fungsi Partai Politik.....
4. Tipologi Partai Politik
5. Pelembagaan Partai Politik.....
6. Pergeseran Ideologi Partai Politik.....
7. Sistem Kepartaian.....
8. Koalisi Partai Politik.....
9. Perkembangan Partai Politik di Indonesia.....

B. Tinjauan Tentang Keputusan Politik.....

1. Pengertian Keputusan Politik.....
2. Pengertian Kebijakan Publik.....
3. Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....
4. Isi Kebijakan Publik.....
5. Faktor-Faktor Kebijakan Publik.....
6. Bentuk dan Tipe Kebijakan Publik.....
7. Pembuat Keputusan Politik.....
8. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....

	9. Model Analisis Kebijakan
	10. Partai Politik dan Kebijakan Publik.....
C.	Tinjauan Tentang Ideologi
	1. Pengertian Ideologi
	2. Sejarah Lahirnya Ideologi.....
	3. Dimensi-Dimensi Ideologi Politi.....
	4. Macam-macam Ideologi di Dunia.....
D.	Pemikiran Pemikiran yang Berkembang Di Indonesia.....
E.	Hubungan Ideologi dan Partai Politik.....
F.	Sosialisasi Politik.....
G.	Pendidikan Politik.....
H.	Budaya Politik.....
I.	Kerangka Berfikir.....

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Desain Penelitian.....
B.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....
C.	Subjek Penelitian.....
D.	Metode Pengumpulan Data.....
E.	Instrumen Penelitian
F.	Teknik Analisis Data
G.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Tentang Partai Politik

1. Gambaran Umum Tentang Partai Demokrat (PD).....
2. Gambaran Umum Tentang Partai Golongan Karya (GOLKAR)....
3. Gambaran Umum Tentang PDIP
4. Gambaran Umum Tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....
5. Gambaran Umum Tentang Partai Amanat Nasional (PAN).....

B. Strategi Partai Politik Dalam Mensosialisasikan Ideologi Politik Kepada Kader-Kader Partai

1. Partai Demokrat (PD)
2. Partai Golongan Karya (P Golkar).....
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5. Partai Amanat Nasional (PAN).....
6. Analisa Strategi Sosialisasi Partai Politik.....

C. Diskripsi Koalisi Partai Politik

1. Peta Koalisi Partai Politik.....
 - a. Peta Koalisi Pemilihan 1999
 - b. Peta Koalisi Pemilihan 2004.....
 - c. Peta Koalisi Pemilihan 2009.....
2. Analisa Koalisi Partai Politik Pemilu 1999- 2009.....

D. Konsistensi Partai Politik Dalam Mengelaborasi
Ideologi Partai Politik ke Dalam Kebijakan Publik
(Undang-Undang Sisidiknas No 20 Tahun 2003).....

E. Pergeseran Ideologi Partai Politik di Indonesia

F. Implikasi Terhadap Pengembangan Pendidikan Politi.....

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kandidat kepala daerah dari <i>Incumbent</i>	
2. Daftar nama anggota partai yang terjerat korupsi.....	
3. Perbandingan sistem kepartaian.....	
4. Sistem Kepartaian Berdasar Jarak Ideologi.....	
5. Model-model koalisi.....	
6. Hasil pemilu anggota DPR tahun 1955.....	
7. Hasil pemilu anggota Konstituante tahun 1955.....	
8. Hasil perolehan suara partai politik pemilu 1971.....	
9. Hasil perolehan suara partai politik pemilu 1977.....	
10. Hasil perolehan suara partai politik pemilu 1982.....	
11. Hasil perolehan suara partai politik pemilu 1987.....	
12. Hasil perolehan suara partai politik pemilu 1992.....	
13. Hasil perolehan suara partai politik pemilu 1997.....	
14. Perolehan suara Golkar dari 1971-2009.....	
15. Strategi idelogisasi partai politik kepada kader.....	
16. Partai politik peserta pemilu 1999.....	
17. Perolehan suara dan perolehan kursi partai politik pemilu 1999.....	
18. Distribusi kursi DPR dan MPR periode 1999-2004.....	
19. Hasil pemilihan Presiden dalam Sidang Umum MPR 1999.....	
20. Calon Wakil Presiden periode 1999-2004.....	
21. Komposisi kabinet Abdurrahman Wahid.....	
22. Komposisi kabinet Abdurrahman Wahid pasca perombakan.....	
23. Peta koalisi Pilpres 2004 putaran I.....	
24. Peta koalisi Pilpres 2004 putaran II.....	
25. Peta koalisi pemilihan pimpinan DPR.....	

26. Peta koalisi pemilihan pimpinan MPR.....	
27. Peta koalisi pendukung KIB jilid I.....	
28. Partai politik peserta pemilu 2009.....	
29. Partai peserta pemilu 2009 yang lolos ke DPR.....	
30. Pasangan Capres dan Cawapres 2009.....	
31. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.....	
32. Model-model koalisi.....	
33. Hasil Pilpres putaran II.....	
34. Distribusi Menteri dari partai politik.....	
35. Ideologi partai politik yang menjadi bagian KIB jilid I.....	
36. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2009.....	
37. Pandangan awal fraksi terhadap rancangan UU Sisdiknas.....	
38. Pandangan akhir fraksi terhadap RUU Sisdiknas.....	
39. Faksi idelogis di Konstituante.....	
40. Pandangan awal fraksi terhadap amandema UUD 1954 pasal 29.....	
41. Pandangan akhir fraksi terhadap amandema UUD 1954 pasal 29.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
42. Konvergensi Ideologi kiri/kanan dalam masyarakat.....	
43. Kebijakan publik sebagai ujung ideologi.....	
44. Triologi Pancasila.....	
45. Peta Aliran Pemikiran Politik.....	
46. Kerangka berikir.....	
47. Peta ideologi partai politik pada pemilu 1955.....	
48. Peta ideologi partai politik pada pemilu 1999.....	
49. Peta ideologi partai politik pada pemilu 2004.....	
50. Pergeseran ideologi politik Indonesia sekarang.....	

**Konsistensi Partai Politik di Indonesia
Dalam Menjadikan Ideologi Politik Sebagai Orientasi
(Studi Terhadap Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN)**

**Oleh
Anatoli Kasparov Putu Abdullah
NIM. 05401241040**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui apakah partai-partai politik di Indonesia konsisten dalam menjadikan ideologi sebagai orientasi. 2) Bagaimana pembinaan ideologi (*ideologisasi*) terhadap para kader. 3) Apakah orientasi partai politik dalam memilih mitra koalisi. 4) Bagaimana konsistensi P. Golkar, PDIP, PKS, PAN menjabarkan ideologi ke dalam proses pembuatan UU Sisdiknas Tahun 2003. 4) Bagaimana pergeseran ideologi partai politik di Indonesia. 5) Bagaimana dampak terhadap pendidikan politik masyarakat.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan naturalistik. Subjek penelitian dilakukan secara purposive, meliputi: Ketua Kaderisasi DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sekjen DPD Partai Demokrat Yogyakarta, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Partai Demokrat, Ketua Pembinaan Kader DPD Partai Golkar Yogyakarta, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anggota Majelis Suro PKS, Ketua Kaderisasi DPW PAN Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi, wawancara. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber. Analisis data meliputi reduksi data, unitisasi kategorisasi, display data kemudian diambil kesimpulan.

Hasil Penelitian ini: 1) strategi sosialisasi ideologi partai terhadap kader dilakukan dengan pendidikan politik langsung secara tatap muka di dalam ruangan, dan pengalaman lapangan. Metode pendidikan langsung secara tatap muka dilakukan dengan memberikan training-training terhadap kader. Partai politik yang menggunakan training sebagai cara sosialisasi ideologi dilakukan oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN. Untuk PKS melakukan sosialisasi dengan cara *liqo*, yaitu pertemuan rutin seminggu sekali antara *mutarobbi* (peserta didik) yang berjumlah sekitar 5-12 orang dengan seorang *murobbi* (Pendidik). Sedangkan metode pengalaman lapangan digunakan oleh PDIP, yaitu dengan cara memberikan pengalaman langsung kepada kadernya melalui kerja-kerja ideologis. 2) Koalisi yang dilakukan partai politik tidaklah berorientasi pada ideologi atau kebijakan. 3) Dalam mengelaborasi kebijakan publik yaitu UU Sisdiknas tahun 2003, partai tidak sepenuhnya berorientasi ideologi. 4) Pergeseran ideologi partai politik cenderung menuju ke posisi tengah, yaitu mulai melonggarnya ikatan-ikatan ideologi partai. 5) Sedangkan terhadap dampak pendidikan politik, saat ini partai

politik belum memberikan dampak yang positif terhadap pendidikan politik masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan (Ichlasul, 1996: XV). Pengertian tersebut menunjukkan pentingnya ideologi bagi partai politik. Ideologi dijadikan sebagai rujukan untuk membuat keputusan-keputusan politik, menjadi karakter bagi anggota-anggota partai, sebagai acuan didalam membuat program kerja dan menentukan tujuan dari sebuah partai politik (Ramlan Surbakti, 1992: 115). Selain itu ideologi juga digunakan sebagai pembeda antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lain (*positioning*) (Andy ramses, dkk, 2009: 159). Dengan pentingnya ideologi bagi partai politik, semestinya setiap partai politik konsisten menjadikan ideologi sebagai orientasi dalam aktivitasnya.

Menurut Cornelis Lay (Kompas 24/3/ 2010), terdapat tiga orientasi partai politik, yaitu: pertama, partai politik sebagai mesin politik pengumpul suara (*electoral machine*), dimana partai berfungsi sepenuhnya sebagai pemburu suara (*voter seeker*); kedua, partai sebagai sarana pencapaian kekuasaan dan jabatan (*power seeking* atau *office seeking*) atau kendaraan bagi perebutan jabatan politik dan jabatan publik; ketiga, partai politik sebagai

sarana pencapaian cita-cita ideologis yang dicapai melalui kontrol atas kekuasaan politik dan memberi pengaruh atas kebijakan negara (*policy seeking*).

Dari ketiga orientasi kepartaian di atas, partai politik di Indonesia saat ini nampak tidak lagi memiliki orientasi sebagai sarana pencapaian cita-cita ideologi. Namun lebih pada sarana untuk pengumpul suara (*electoral machine*), atau sebagai sarana pencapaian kekuasaan dan jabatan (*power seeking* atau *office seeking*). Kecenderungan itu terlihat dari beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini: (a) partai-partai politik cenderung bekerja secara pragmatis; (b) terjadinya dinastokrasi dan oligarki partai politik; (c) partai politik berorientasi pada kekuasaan, bukan dibangun dari kedekatan ideologi; (d) partai politik belum secara maksimal dalam membumikan ideologi kedalam kebijakan publik.

Kecenderungan partai politik tidak konsisten terhadap ideologi dan bekerja secara pragmatis nampak dari rekrutmen calon kepala daerah yang lebih mementingkan kepopuleran tokoh daripada kedekatan secara ideologi. Partai politik cenderung menggunakan *incumbent* ataupun keluarga *incumbent* sebagai calon yang diusung, karena lebih populer dan memiliki modal uang dari pada kesamaan atau kedekatan ideologi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Sparingga:

Politik berbasis dinasti ini disebabkan ideologi yang dimiliki partai politik saat ini sangat kering, tidak disentuh, palsu, atau tidak bisa diwujudkan. Semestinya, partai politik sebagai sublimasi untuk mencapai cita-cita mulia

secara sistematis akan mendapatkan bentuk jelas bila ideologi hadir. Demokrasi sebagai tradisi juga hanya tumbuh subur apabila dituntun cita-cita mulia yang dibentuk ideologi dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat (*civil society*) di Indonesia menjadi sangat lemah karena ketiadaan ideologi dan memberi peluang politik berbasis dinasti tumbuh subur” (Jurnal Prisma vol 28 Juni 2009. Hlm.87-98).

Maraknya politik dinasti nampak dari tabel berikut:

Tabel 1. Kandidat Kepala Daerah Dari Keluarga Incumbent.

No	Nama	Prov/Kab/Kota	Hubungan dg incumbent	Partai Pengusung
1	Haryanti S	Kediri Jawa Timur	Istri Bubati Kediri	PAN,PDIP,PKNU,PP
2	Nurlaila	Kediri Jawa Timur	Istri Bubati Kediri	PAN,Gerindr, PDP,Partai Patriot
3	Oni Anwar H	Ngawi Jawa Timur	Anak Bupati Ngawi	PDIP, Partai Golkar, PKS, PAN
4	Sri Surya Widati	Malang Jawa Timur	Isrti Bupati Bantul	PAN, GOLKAR, PKPB
5	Anna Sophana	Indramayu Jawa Barat	Istri Bupati Indramayu	Partai Golkar
6	Aida Zulaikha	Riau	Istri Gubernur Riau	Golkar, PPP, PKB, PDS, Pelopor,
7	Ruwaida Mile	Bone, Gorontalo	Istri Bupati Bone	PKNU
8	Adlina T Milwan	Labuhanbatu, SuMut	Istri Bupati Labuhanbatu	Golkar, PD, PDIP, PAN, PBR, PBB

Sumber: Kompas 18/ 01/ 2011

Data di atas memperlihatkan gagalnya fungsi kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik saat ini, akibatnya rekrutmen calon kepala daerah tidak mempertimbangkan kedekatan secara ideologi, tetapi hanya melihat dari segi popularitas calon. Partai politik hanya mengusung calon-calon yang populer dan memiliki modal uang. Rerkrutmen pejabat publik yang dilakukan oleh partai politik cenderung melalui jalur pintas, seperti halnya merekrut dari keluarga *incumbent* dan juga kalangan artis, tanpa mempertimbangan pada orientasi

ideologi tetapi hanya mempertimbangan kepopuleran. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik cenderung bersikap pragmatis. Dampaknya adalah partai politik kurang memperhitungkan kualitas calon kepala daerah yang diusungnya. Fenomena tersebut terlihat dari banyaknya kepala daerah, dan anggota legislatif tingkat nasional yang tersangkut masalah korupsi. Fakta ini menguatkan opini publik bahwa pejabat publik yang tersangkut berbagai kasus pidana tidak memiliki visi mulia yang ada dalam ideologi partai (Daniel Dhakidae, Jurnal Prisma vol 28 Juni 2009. Hlm.87-98).

Menurut Gamawan Fauzi (Kompas, 18/ 01/ 2011), terdapat 155 kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi, bahkan hampir setiap pekan ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, data tersebut belum termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga tersangkut masalah korupsi. Data berikut menunjukkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terjerat masalah korupsi:

Tabel 2. Daftar Nama Anggota Partai Yang Terjerat Kasus Korupsi.

No	Nama	Status Hukum	Jabatan	Partai
1	Sarjan Tahrir	4,5 th penjara (PK MA 17/11/2009)	Anggota DPR RI 2004-2009	PD
2	Saleh Djasit	4 Th penjara (PK MA 2/62009)	Anggota DPR RI 2004-2009	Golkar
3	Jarot Subiyantoro	5 Th penjara (PN Sleman 12/3/2009)	Ketua DPRD Sleman 1999-2004	PDIP
4	Yusuf Erwi Faisal	4,5 Th Penjara (P.tipikor 6/4/2009)	Anggota DPR RI 2004-2009	PKB
5	Al Amin N	8 Th Penjara (Kasasi MA 16/92009)	Anggota DPR RI 2004-2009	PPP
6	Abdul Hadi J	3 Th (P. Tipikor 30/10/2009)	Anggota DPR RI 2004-2009	PAN
7	Bulyan Royan	6 Th Penjara (P.Tipikor 18/3/2009)	Anggota DPR RI 2004-2009	PBR
8	Hilman Hindra	Ditahan KPK (17/2/2010)	Anggota DPR RI 2004-2009	PBB
9	Misbakhun	Terdakwa	Anggota DPR RI 2009-2014	PKS

Sumber: Kompas 12/ 4/ 2010

Pada tahun 2011 tercatat setidaknya ada 24 politisi partai politik yang ditahan karena kasus korupsi. Sebagaimana survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia yang menyatakan bahwa selama tahun 2003-2008 menempatkan partai politik dan parlemen pada peringkat ketiga lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia (Kompas, 12/ 04/ 09). Padahal partai politik seharusnya memberikan fungsi pendidikan dan rekrutmen politik yang nantinya akan menghasilkan lulusan berupa pemimpin-pemimpin berkualitas untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Pendapat senada juga disampaikan Bima Arya (2010: 71).

Ada indikasi yang kuat bahwa reformasi ditingkat kelembagaan dan prosedural yang telah digulirkan selama hampir satu dasawarsa di negeri ini, nyaris tidak disertai dengan perbaikan yang signifikan pada jalur kepemimpinan politik. Publik seolah masih dipaksa untuk memberikan ruang di panggung politik bagi aktor-aktor lama. Sementara ironisnya, sebagian survei yang dilakukan menunjukkan kerinduan publik atas tampilnya figur pemimpin alternatif.

Maraknya perilaku amoral seperti korupsi yang dilakukan para Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta politisi partai mengisyaratkan bahwa partai politik cenderung meninggalkan ideologinya. Cita-cita mulia ideologi sudah tidak lagi menjadi hal yang penting bagi partai politik, tetapi lebih menonjolkan kepentingan jangka pendek. Seperti halnya kekuasaan, uang, serta citra. Partai politik saat ini cenderung membentuk kartel dengan tujuan untuk berburu *rente* (Kuskrido Ambardi, 2009). Sebagaimana dulu juga pernah disampaikan J Kristiadi (Kompas, 15/ 12/ 2004), “bahwa apa yang disebut sebagai ideologi oleh partai-partai baru sebatas rumusan dan belum merupakan nilai-nilai yang diinternalisasikan ke para kader”. Padahal semestinya ideologi memiliki tujuan mulia yang wajib diperjuangkan oleh para penganutnya termasuk juga kader-kader dari partai politik.

Partai politik yang tidak konsisten terhadap ideologi juga nampak dari bagaimana partai politik mencari mitra koalisi. Saat ini koalisi yang dibangun oleh partai politik hanya berorientasi pada kekuasaan dan bukan berorientasi ideologi. Hal tersebut nampak pada koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dibangun dari unsur partai-partai dengan ideologi berbeda. Koalisi yang dibangun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat

ini beranggotakan: Partai Demokrat serta Partai Golkar yang bercorak nasionalis. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bercorak Islam. Sedangkan untuk Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara formal berideologi nasionalis namun secara basis masa condong ke Islam.

Dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setidaknya terdapat dua warna atau corak ideologi: partai yang berideologi nasionalis diusung Partai Golkar (P.Golkar) dan Partai Demokrat (PD) serta ada partai yang berideologi Islam diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah berideologi nasionalis namun berbasis pemilih Islam (Kuskrindo Ambardi, 2009).

Ideologi seharusnya dapat dielaborasi ke dalam keputusan-keputusan politik yang diproduksi oleh partai politik melalui orang-orang partai yang ada di legislatif maupun eksekutif. Sebagaimana pengertian dari partai politik, yaitu suatu organisasi didirikan guna mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu, melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan (Ichlasul, 1996: XV).

Ketidakmampuan partai politik untuk konsisten menjadikan ideologi sebagai pedoman dalam membuat kebijakan publik juga tergambar dari bagaimana pandangan partai politik terhadap kebijakan publik, pernyataan politik, pola atau arah perundang-undangan yang diperjuangkan perwakilan

partai politik di legislatif maupun eksekutif. Dalam hal ini, Ramlan Surbakti (Andy Ramses dkk, 2009: 139) berpendapat:

...ideologi suatu partai politik ataupun ideologi yang dianut politisi dapat dilihat pada pola dan arah kebijakan dalam pembuatan APBN/APBD, pada pernyataan yang dikemukakan untuk menanggapi persoalan yang dihadapi negara-bangsa, pada respon yang diberikan terhadap aspirasi yang diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat, pada pola dan arah peraturan perundang-undangan yang diajukan, pada sosok dan *profile* orang-orang yang diusulkan atau dipilihnya untuk menduduki berbagai jabatan kenegaraan di pusat dan daerah, dan pada perilakunya sehari-hari dalam kehidupan publik.

Selain itu, ketidakmampuan partai politik untuk konsisten menjadikan ideologi sebagai pedoman dalam membuat keputusan-keputusan politik juga nampak dari homogennya kebijakan publik yang dihasilkan oleh setiap rezim yang berkuasa. Meskipun partai yang berkuasa sudah berganti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpindah ke Partai Demokrat (PD), namun kebijakan publik yang dihasilkan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono tidak jauh berbeda dengan kebijakan publik yang dihasilkan semasa pemerintahan dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Dampaknya adalah *positioning* partai politik sangat lemah, partai-partai politik jika dilihat dari kebijakan publik yang dihasilkan sulit untuk dibedakan.

Dalam ranah legislatif kondisinya tidak jauh berbeda, munculnya dukungan partai politik yang berideologi nasionalis terhadap agenda-agenda Islamisme, seperti halnya yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) dengan menerima rancangan undang-undang sisdiknas menjadi UU No 20 Tahun 2003 memberikan indikasi bahwa ideologi partai politik bergerak

secara sentripetal kearah tengah atau menuju *konvergensi* pada titik tengah, dengan lebih fleksibel terhadap ideologi guna kepentingan pragmatis. Sebagaimana ciri khas partai tengah adalah minimnya kejelasan dan beban ideologi (Kompas, 14/04/10). Menurut Sunny Tanuwidjaja (Kompas, 14 /04 10), pada pemilu pertama pasca Orde Baru ditandai persaingan partai nasionalis dan partai agamis, namun dalam dua pemilu selanjutnya pada tahun 2004 dan 2009 partai-partai berebut mengisi spektrum tengah. Selain isu tentang agama, isu tentang liberalisasi juga sering mewarnai proses pembuatan suatu undang-undang, sebagaimana pembuatan undang-undang sisdiknas dan undang-undang penanaman modal asing (Kuskrrido Ambardi, 2009).

Ideologi merupakan unsur penting bagi partai politik, karena ideologi menjadi pedoman dan tujuan bagi partai politik dalam pembuatan keputusan-keputusan politik. Sebagaimana pendapat Ramlan Surbakti, bahwa setiap partai politik mesti memiliki ideologi yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas pemersatu, tetapi juga sebagai tujuan partai (Ramlan Surbakti, 1992:115). Namun hal tersebut nampak paradoks dengan perilaku partai politik saat ini. Partai politik jika dilihat dari fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas memperlihatkan perilaku yang cenderung tidak konsisten terhadap ideologi, dan cenderung pragmatis. Dengan perilaku partai politik yang cenderung pragmatis dan meninggalkan nilai-nilai ideologi akan berdampak pada pendidikan politik masyarakat. Masyarakat tidak dibiasakan untuk memiliki idealitas, karena yang dikejar hanyalah keuntungan jangka pendek. Sebagaimana maraknya praktik

money politic dalam pemilu merupakan contoh pragmatisme yang terjadi dimasyarakat.

Pemasalahan terkait pragmatisme partai politik yang dipaparkan di atas menjadi isu utama dalam kepartaian Indonesia saat ini, oleh karena itu menarik diketahui lebih mendalam. Dengan alasan itu, maka peneliti melakukan penelitian mengenai konsistensi partai politik di Indonesia dalam menjadikan ideologi sebagai orientasi. Studi dilakukan terhadap partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P. Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan:

1. Rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan partai politik tidak berorientasi pada ideologi, namun lebih mementingkan popularitas dan modal uang yang dimiliki calon pejabat publik.
2. Kurangnya pembinaan yang dilakukan partai politik dalam melakukan internalisasi ideologi bagi para kader-kader partai.
3. Koalisi yang dibangun oleh partai politik bukanlah koalisi yang didasarkan ideologi, namun hanya untuk kepentingan pragmatis kekuasaan.
4. Banyaknya kepala daerah dan politisi partai yang terjerat kasus korupsi.

5. Ideologi partai politik di Indonesia cenderung bergerak sentripetal ke arah tengah, atau terjadi konvergensi ideologi, akibatnya partai politik cenderung bersikap pragmatis.
6. Kecenderungan partai politik dalam membuat kebijakan publik belum berdasarkan pada ideologi partai.
7. Kaderisasi yang dilakukan partai politik tidak berjalan dengan baik, khususnya dalam hal mempersiapkan kader-kadernya untuk menduduki pejabat publik.
8. Proses rekrutmen pejabat publik tidak berorientasi pada ideologi. Dalam memilih calon pejabat publik, partai politik tidak mempertimbangkan kedekatan ideologi calon pejabat publik yang akan dicalonkan.
9. Terjadinya dinasti politik didalam sistem politik di Indonesia.
10. Adanya korupsi politik yang dilakukan oleh para pejabat publik.

C. Pembatasan Masalah

Terdapat tiga orientasi kepartaian menurut Cornelis Lay (Kompas 24/ 3/ 2010), yaitu: Pertama, partai politik sebagai mesin politik pengumpul suara (*electoral machine*), dimana partai berfungsi sepenuhnya sebagai pemburu suara (*voter seeker*); kedua, partai sebagai sarana pencapaian kekuasaan dan jabatan (*power seeking* atau *office seeking*) atau kendaraan bagi perebutan jabatan politik dan jabatan publik; ketiga, partai politik sebagai sarana pencapaian cita-cita ideologi yang dicapai melalui kontrol atas kekuasaan politik dan memberi pengaruh atas kebijakan negara (*policy seeking*).

Dalam penelitian ini dikaji mengenai orientasi kepartaian di Indonesia pasca Orde Baru. Kajian dilakukan terhadap terhadap Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN). Dipilih lima partai tersebut karena merupakan pemenang pemilu legislatif tahun 2009 dan lolos *parliamentary threshold* (PT). Dengan lolos *parliamentary threshold* (PT) serta sebagai lima besar pemenang pemilu maka kelima partai tersebut memiliki kursi yang signifikan di parlemen. Dengan perolehan kursi yang signifikan maka kedepan dimungkinkan kebijakan publik yang dihasilkan akan banyak diwarnai oleh ideologi dari kelima partai tersebut. Selain itu, dengan menjadi pemenang, lima partai itu tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam perpolitikan di Indonesia.

Selain itu, secara historis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar selalu masuk kedalam dua besar. Partai Amanat Nasional (PAN) dari semenjak tahun 1999 sampai saat ini mendapatkan suara yang konsisten. Sedangkan untuk PKS meskipun awalnya berdiri (PK) tidak mendapatkan suara signifikan, namun dari segi konsistensi ideologi dikenal sebagai partai ideologis. Partai Demokrat merupakan *rulling party* semenjak tahun 2004 dan menjalankan pemerintahan sampai saat ini. Pada pemilu 2009 Partai Demokrat (PD) mendapat kursi terbanyak di parlemen. Dengan menjadi *rulling party* kebijakan publik akan seharusnya dipengaruhi oleh Partai Demokrat. Semestinya juga akan terjadi pertarungan ideologi diantara kelima

partai tersebut, jika kelima partai konsisten dalam menjalankan ideologinya. Hal itu dikarenakan setiap partai membawa ideologi masing-masing. Meskipun demikian Partai Demokrat (PD) didirikan pada tahun 2001 dan tidak mengikuti kontestasi pada pemilu 1999. Untuk itu penelitian terhadap Partai Demokrat (PD) dimulai semenjak pemilu 2004.

Dalam mengkaji masalah tersebut, peneliti menggunakan teori orientasi kepartaian dari Cornelis Lay, yaitu apakah partai politik di Indonesia termasuk kedalam: *electoral machine*, *power seeking* atau *office seeking/ policy seeking*. Penelitian dilakukan dengan mengkaji secara mendalam permasalahan partai politik yang sekiranya dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat orientasi partai. Pengkajian dilakukan terhadap usaha partai politik dalam menginternalisasikan ideologi kepada para kader. Masalah koalisi partai politik yang terjadi pasca Orde Baru, yaitu apa yang menjadi pertimbangan partai dalam melakukan koalisi dengan partai lain. Kajian juga dilakukan terhadap sejauh mana partai politik mengelaborasi ideologi dalam kebijakan publik yang dihasilkan. Dalam hal ini akan melihat proses pembuatan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya akan dikaji apakah partai-partai politik di Indonesia terjadi peristiwa *de-ideologisasi* atau pergeseran secara *sentripetal* kearah tengah, yaitu melonggarnya pengaruh ideologi bagi partai politik. Dari proses pengidentifikasian tersebut, kemudian akan dilihat implikasinya terhadap pendidikan politik masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui secara khusus pembatasan masalah, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sehatara (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dalam melakukan sosialisasi politik terhadap anggota-anggotanya sebagai upaya internalisasi ideologi partai?
2. Apakah partai politik di Indonesia menggunakan pertimbangan ideologi dalam memilih mitra atau *partner* dalam berkoalisi, dilihat dari Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sehatara (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN)?
3. Bagaimana konsistensi partai politik di Indonesia dalam mengelaborasi ideologi ke dalam kebijakan publik yang berupa Undang-Undang Sisdiknas UU No 20 Tahun 2003, dilihat dari Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sehatara (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) ?
4. Bagaimana pergeseran ideologi kepartaian di Indonesia dilihat dari Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dari tahun 1999 sampai sekarang?

5. Bagaimana implikasi partai politik dalam menerapkan ideologi politik terhadap pengembangan pendidikan politik?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui strategi Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sehatara (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dalam melakukan sosialisasi ideologi partai terhadap kader.
2. Mengetahui orientasi partai politik di Indonesia dalam memilih mitra atau *partner* dalam berkoalisi, dilihat dari Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sehatara (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN).
3. Mengetahui orientasi kepartaian di Indonesia dalam mengelaborasi ideologi partai politik ke dalam kebijakan publik yang berupa Undang-Undang Sisdiknas UU No 20 Tahun 2003, dilihat dari Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sehatara (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN).
4. Mengetahui pergeseran ideologi kepartaian di Indonesia dilihat dari Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dari tahun 1999 sampai sekarang.
5. Mengetahui implikasi orientasi partai politik terhadap pengembangan pendidikan politik.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi khasanah kepustakaan dan wawasan ilmu pengetahuan di bidang politik khususnya, yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu sarana berfikir ilmiah dan penerapan keilmuan untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam rangka mengembangkan dan membandingkan beberapa kajian teori yang diperoleh dengan berbagai realita yang terjadi dilapangan sehingga mampu menggambarkan sejauh mana kesesuaian teori-teori yang ada tersebut dengan kondisi yang berkembang di masyarakat yang semakin dinamis.

b) Bagi Partai Politik

Penelitian ini dapat menjadi masukan evaluasi terhadap partai politik di Indonesia dalam melaksanakan peran-perannya supaya tidak terjebak pada kepentingan-kepentingan pragmatis. Sekaligus sebagai upaya untuk mendorong penyehatan partai politik.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penyajian data ilmiah atas kondisi kepartaian di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik masyarakat.

G. Batasan Pengertian

Batasan pengertian ini dimaksudkan untuk memberi ilustrasi berupa diskripsi yang jelas tentang maksud dari judul guna menghindari kesalah pahaman terhadap masalah yang diteliti. Untuk itu diberikan batasan pengertian sebagai berikut:

1. Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan (Ichlasul, 1996: Pengantar XV).
2. Pelembagaan partai politik ialah proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya.
3. Partai kader adalah partai yang didominasi oleh sekelompok anggota partai yang berkualitas dan terpilih, memiliki kemampuan dan kecakapan politik yang handal. Partai kader memiliki keketatan organisasi dan kedisiplinan bagi anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan sangat ketat, kaderisasi berjenjang dan cukup intensif serta adanya penegakan disiplin yang konsisten.

4. Partai ideologi adalah partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan yang kongkrit sebagai penjabaran dari ideologi partai.
5. Ideologi adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan metode untuk menyebarkannya.
6. Platform ialah program yang dimiliki atau ditawarkan partai kepada rakyat, berupa dokumen yang merefleksikan visi, misi, program, dan sikap partai terhadap berbagai persoalan di Indonesia.
7. Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi sejumlah partai politik.
8. Pemilu adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.
9. Rekrutmen politik yaitu seleksi dan pengangkatan seorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran di dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.
10. Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap atau arah.
11. Konsistensi adalah perbuatan yang taat asas atau kondisi yang tetap atau tidak berubah-ubah.
12. Pendidikan politik adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati

betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun.

13. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, yang "*weltanschauung*" yang dimiliki seseorang atau kelompok orang, atas dasar dalam menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya serta menentukan tingkah laku politiknya.

14. PD adalah Partai Demokrat.

15. PAN adalah Partai Amanat Nasional.

16. PKS adalah Partai Keadilan Sejahtera.

17. PDIP adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

18. GOLKAR adalah Golongan Karya.

19. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti (2007: 113), partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan umum yang mereka susun. Definisi ini mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Mark N Hagopian, menurutnya partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan (Ichlasul ,1996: XV).

Definisi diatas memperlihatkan bahwa partai politik merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk merealisasikan ideologi melalui kekuasaan. Dalam mendapatkan kekuasaan partai politik harus memenangkan pemilihan umum. Sebagaimana pendapat Ramlan Surbakti (2007:113), partai politik mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan melalui pemilu guna melaksanakan kebijakan umum. Partai politik menempatkan wakil-wakilnya yang terpilih melalui pemilu sebagai pejabat-pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan

publik. Dengan itu partai politik dapat mengelaborasi ideologinya dalam kebijakan-kebijakan publik melalui wakil-wakilnya yang duduk di legislatif dan eksekutif.

Sedangkan Ranney dan Kendal (Firmanzah, 2008: 68) mengibaratkan partai politik sebagai group atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan. Senada dengan pengertian tersebut, Leon D. Epstein (Cholisin 2005: 94) mendefinisikan partai politik sebagai satu kelompok pengejar kedudukan pemerintahan yang secara bersama terikat pada identitas atau label yang dimilikinya. Selain pengertian yang telah diuraikan para ahli di atas, terdapat definisi partai politik menurut UU No 2 Tahun 2011, yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara atas dasar kesamaan kehendak, cita-cita, dan untuk membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, dengan cara mempengaruhi

kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan ideologi tertentu melalui pejabat-pejabat publik yang menjadi wakilnya melalui proses pemilihan umum.

2. Asal Usul Partai Politik

Partai politik dilihat dari asal usulnya dapat dijelaskan melalui tiga teori. Ketiga teori tersebut yaitu, teori kelembagaan, teori situasi historis, dan teori pembangunan (Ramlan Surbakti, 2007: 113-114). Ketiga teori dijelaskan sebagai berikut:

a. Teori Kelembagaan

Teori ini melihat ada hubungannya parlemen awal dengan dengan timbulnya partai politik. Kalangan anggota parlemen yang diangkat memerlukan dukungan dari masyarakat, maka dibentuklah partai politik. Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik ini biasanya dibentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai yang dibentuk oleh pemerintah tidak mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

b. Teori Situasi Historis

Teori situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern

yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan seperti penambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi, dan harapan-harapan munculnya gerakan-gerakan baru. Perubahan-perubahan itu menimbulkan tiga macam krisis, yakni: legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Perubahan-perubahan mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah, menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai bangsa, dan akhirnya mengakibatkan timbulnya tuntutan-tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka dibentuklah partai politik.

c. Teori Pembangunan

Teori pembangunan melihat timbulnya partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Modernisasi sosial ekonomi melahirkan berbagai peningkatan dalam kehidupan, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan

melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi.

3. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi. Jika partai gagal memerintah karena tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemilu, maka partai politik dapat menjalankan fungsinya sebagai oposisi (Cholisin, 2005: 95). Disamping itu partai politik juga mempunyai fungsi sebagai sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, artikulasi kepentingan, pemadu kepentingan, komunikasi politik, manajemen konflik, kontrol politik, persuasi, represi, pembuatan kebijakan. Lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi partai politik dijelaskan sebagai berikut (Cholisin, 2005: 96-99):

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik menurut Kennet P Langton (Cholisin, 2005) adalah bagaimana masyarakat dalam mentransmisikan budaya dari generasi ke generasi yang lain. Menurut Dawson dan Prewitt (Cholisin, 2005), sosialisasi politik merupakan proses pengembangan lewat mana seseorang warga negara menjadi matang secara periodik. Dari kesimpulan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses transmisi orientasi politik budaya politik bangsanya

(sistem politik nasional) agar warga negara memiliki kematangan politik, sadar akan hak dan kewajibannya sesuai yang ditentukan dalam sistem politik nasional.

b. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik yaitu seleksi dan pengangkatan seorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Terdapat dua jenis jabatan mesti diisi oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat melalui rekrutmen politik, yaitu jabatan politik dan jabatan birokrasi (Suharno, 2004:116). Rekrutmen politik merupakan tahap awal untuk dapat berfungsinya suatu sistem politik. Jika proses rekrutmen politik berjalan dengan baik, maka dimungkinkan sistem politik akan berjalan dengan baik pula. Proses rekrutmen politik merupakan hal yang sangat penting di dalam sistem politik sebuah negara. Hal ini dikarenakan orang-orang yang akan melaksanakan fungsi-fungsi sistem politik dipilih lewat proses rekrutmen politik melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Jadi bisa dikatakan baik buruknya sistem politik akan banyak dipengaruhi dari proses rekrutmen politik.

Terdapat dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu *pertama*, rekrutmen politik model terbuka yaitu semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik dll. mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki

posisi-posisi yang sama di dalam lembaga negara atau pemerintah. *Kedua*, sistem rekrutmen politik dengan model tertutup yaitu semua warga negara tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi di dalam lembaga negara atau pemerintah (Suharno, 2004).

Selain itu, terdapat bentuk-bentuk rekrutmen politik yang lain (Suharno, 2004): (a) bentuk rekrutmen politik melalui pemilihan serta ujian khusus serta latihan; (b) bentuk rekrutmen politik dengan penyortiran atau penarikan undian; (c) Bentuk rekrutmen politik dengan rotasi atau pergiliran; (d) bentuk rekrutmen politik dengan perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan kekerasan; (e) bentuk rekrutmen politik dengan *patronage* yaitu bagian dari sistem penyuaipan dan korupsi yang rumit; (f) Bentuk rekrutmen politik dengan koopsi, yaitu pemilihan anggota-anggota baru atau pemilihan seseorang kedalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum, dan ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan.

d. Artikulasi kepentingan

Artikulasi kepentingan merupakan kegiatan partai politik untuk membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan dari rakyat kepada

pemerintah. Misalnya, partai bertemu atau mengundang berbagai kelompok kepentingan untuk menyatakan tuntutan dan keinginan mereka berkaitan dengan suatu kebijakan publik.

e. Pemadu Kepentingan

Pemadu kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang diajukan atau dilancarkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis, partai politik merumuskan program dan menyampaikan usul-usul kepada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan dengan cara mengadakan tawar-menawar dengan kelompok kepentingan. Maksudnya adalah bahwa di dalam masyarakat terdapat macam-macam kepentingan dan saling bertentangan, kepentingan tersebut perlu ditampung, dianalisis, dan dipadukan guna menjadi kebijakan publik.

f. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.

g. Manajemen Konflik

Pengendalian konflik adalah fungsi pengendalian konflik dengan cara dialog, menampung dan memadukan berbagai aspirasi kepentingan, dan

membawa permasalahannya ke badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan keputusan politik.

h. Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pelaksanaan kontrol politik semestinya berdasarkan tolok ukur yang jelas agar bersifat objektif.

i. Represi

Fungsi represi adalah partai politik melalui pemerintah atau secara langsung mengenakan sanksi baik kepada anggota maupun bukan anggota, mengendalikan asosiasi dan partai politik lain, serta berusaha menuntut ketaatan, membentuk pikiran dan loyalitas anggota dengan cara tidak mengizinkan oposisi dan pembangkang.

j. Persuasi

Fungsi persuasi adalah kegiatan partai politik yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul-usul kebijakan agar memperoleh dukungan bagi kegiatan tersebut.

k. Pembuatan Kebijakan

Keterlibatan dalam pembuatan kebijakan terutama dilakukan oleh partai yang berkuasa, yaitu partai yang menguasai mayoritas parlemen. Sedangkan partai yang berada diluar pemerintah berfungsi sebagai

pengkritik kebijakan pemerintah. Namun dalam pemerintahan yang otoriter atau dimana birokrasi tingkat tinggi sangat dominan, maka kecenderungan partai lebih sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daripada sebagai pembuat kebijakan pemerintah.

1. Pendidikan Politik

Partai politik juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang apa itu politik dan bagaimana menyuarakannya.

4. Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik ialah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan (Cholisin 2005: 96-100). Tipologi partai politik dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Tipologi partai politik berdasarkan kriteria: Komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan

1) Partai Proto

Partai proto yaitu faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat. Partai ini belum memiliki ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern.

2) Partai Kader

Partai kader adalah partai yang secara ketat membatasi anggotanya terbatas pada golongan menengah keatas. Ideologi yang dianut *konservatisme* ekstrim atau maksimal reformisme moderat.

3) Partai Massa

Partai massa merupakan partai yang dibentuk diluar lingkungan parlemen dan berorientasi pada basis pendukung yang luas dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa.

4) Partai Diktatorial

Partai diktatorial merupakan sub tipe partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal.

5) Partai *Cath all*

Partai *cath all* merupakan gabungan dari partai kader dan massa. Riswanda Imawan mengajukan tipe *cath all* yang berideologi (Cholisin, 2005: 100).

b. Tipologi partai politik berdasarkan sumber dukungan yaitu :

a. Partai Komprehensif

Partai komprehensif berorientasi pada pengikut.

b. Partai Sektarian

Partai sektarian memakai kelas, daerah atau ideologi sebagai daya tarik.

c. Tipologi partai politik berdasarkan organisasi internal yaitu:

1) Partai Tertutup

Partai tertutup adalah partai yang keanggotanya bersifat terbatas.

2) Partai Terbuka

Partai terbuka adalah partai yang kualifikasi keanggotangannya longgar.

d. Tipologi partai politik berdasarkan cara-cara tindakannya dan fungsi yaitu:

1) Partai *Diffused*

Partai *Diffused* adalah partai yang menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi.

2) Partai *Specialized*

Partai *Specialized* adalah partai yang menekankan keterwakilan, agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijakan, partisipasi serta kontrol pemerintah untuk maksud terbatas dan periode tertentu.

e. Tipologi partai politik berdasarkan basis sosial yaitu:

1) Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas menengah, atas dan bawah.

2) Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha.

3) Partai politik yang anggota kelompoknya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha.

4) Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, daerah tertentu.

f. Tipologi partai politik berdasarkan berdasarkan tujuan yaitu :

1) Partai Perwakilan Kelompok

Partai perwakilan kelompok yakni partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen. Contoh: Partai Barisan Nasional di Malaysia.

2) Partai Pembinaan Bangsa

Partai pembinaan bangsa yakni partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit. Contoh: Partai Aksi Rakyat Singapura.

3) Partai Mobilisasi

Partai mobilisasi yaitu partai yang memobilisasi masyarakat kearah yang ditetapkan oleh pimpinan partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Contoh: Partai Komunis.

g. Tipologi partai politik berdasarkan berdasarkan asas dan orientasi yaitu:

1) Partai Pragmatis

Partai pragmatis adalah partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku oleh suatu doktrin dan ideologi tertentu.

2) Partai Doktriner

Partai Doktriner adalah partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkrit sebagai penjabaran ideologi.

3) Partai Kepentingan

Partai kepentingan adalah partai yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama dan lingkungan hidup.

Selain itu, menurut Cornelis Lay (Kompas 24/ 3/ 2010) terdapat tiga orientasi kepartaian, yaitu: Pertama, partai sebagai mesin politik pengumpul suara (*electoral machine*) dimana partai berfungsi sepenuhnya sebagai pemburu suara (*voter seeker*); kedua, partai sebagai sarana pencapaian kekuasaan dan jabatan (*power seeking* atau *office seeking*) atau kendaraan bagi perebutan jabatan politik dan jabatan publik; ketiga, partai sebagai sarana pencapaian cita-cita ideologis (*partai ideologis*) yang dicapai melalui kontrol atas kekuasaan politik dan memberi pengaruh atas kebijakan negara (*policy seeking*).

5. Pelembagaan Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti (Andy ramses dkk, 2009), pelembagaan partai politik ialah proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya. Kemudian proses pelembagaan partai politik mengandung dua aspek, yaitu: (a) aspek internal-

eksternal; (b) aspek struktural dan kultural. Maka jika kedua aspek tersebut dipersilangkan akan tampak tabel empat sel, yaitu (a) derajat kesisteman (*systemness*) suatu partai dengan hasil persilangan aspek internal dan struktural, (b) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai politik sebagai hasil persilangan aspek internal dan kultural, (c) derajat otonomi suatu partai dalam membuat keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan antara aspek eksternal dengan struktural, (d) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural. Selanjutnya Ramlan Surbakti menjelaskan keempat sel pelembagaan partai politik sebagai berikut (Andy ramses dkk. 2009):

a. Derajat Kesisteman (*systemness*)

Derajat kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi derajat kesisteman apabila AD ART yang telah dibuat secara komprehensif dan rinci tersebut mampu memberikan kaidah dan prosedur penuntun tindakan partai politik guna melaksanakan fungsi-fungsinya.

b. Derajat Identitas Nilai (*value infusion*)

Derajat identitas nilai terkait dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau *platform* partai. Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai apabila partai politik tersebut telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial), karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan apabila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai politik melainkan karena orientasi politiknya sesuai dengan ideologi atau *platform* partai tersebut.

c. Derajat Otonomi (*decisional autonomy*)

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan terkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi derajat otonomi apabila keputusan-keputusan yang dibuat partai politik tidak didikte oleh pihak luar, melainkan diputuskan sendiri dengan atau tanpa konsultasi dengan pihak luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung partai.

d. Derajat Pengetahuan atau Citra Publik (*reification*)

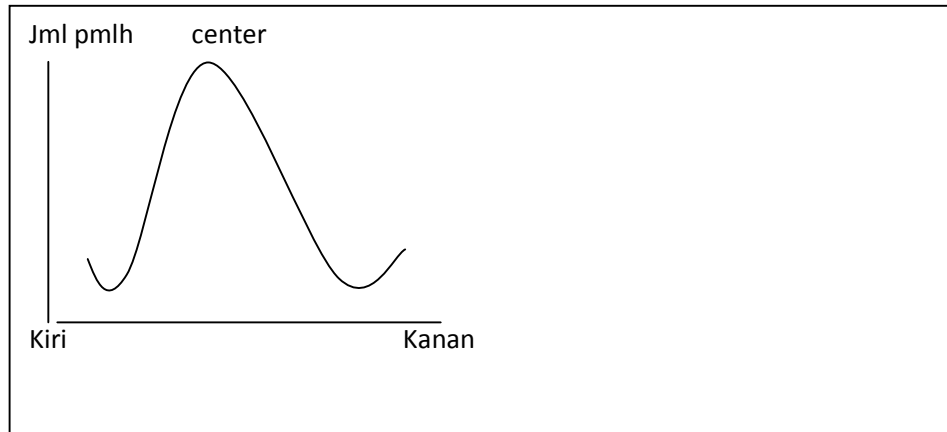
Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajenasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik jika masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai (*platform*) partai. Sehingga masyarakat pun dapat memahami (meski belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain. Perlu dibedakan secara jelas antara mengetahui sosok dan kiprah suatu partai sesuai yang dimaksudkan partai itu dengan sikap setuju atau tidak setuju terhadap sosok dan kiprah partai itu.

6. Pergeseran Ideologi Partai Politik

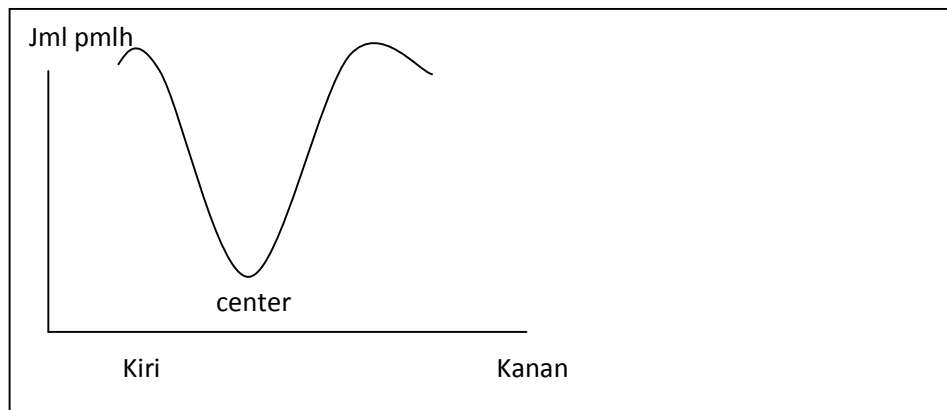
Dalam sejarah perkembangan partai politik di dunia barat, partai politik lahir di luar parlemen. Partai politik ini lahir dengan bersandar dari asas atau ideologi tertentu seperti Sosialisme, Fasisme, Komunisme, dan Liberalisme. Salah satu ciri yang menonjol dari partai-partai semacam ini adalah disiplin partai terlalu ketat, kemurnian dari doktrin partai dijaga dari penyimpangan yang dilakukan oleh anggotanya, pendidikan politik untuk kader sangat diutamakan, jenjang pengkaderan dilaksanakan secara disiplin (Miriam Budiardjo, 2008: 399).

Pada perang dunia pertama berkembang klasifikasi partai politik “kiri” dan partai politik “kanan”. Partai “kiri” dicirikan dengan adanya campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara total, kesejahteraan untuk lapisan bawah. Sedangkan partai “kanan” dicirikan dengan pasar bebas secara total, kesejahteraan untuk lapisan atas (Miriam Budiardjo, 2008:400). Perkembangan kepartaian di negara-negara barat menjelang perang dunia kedua mengalami perkembangan baru. Partai-partai politik mulai meninggalkan tradisi membedakan antara berbagai jenis partai, seperti patronage *versus* ideologi, massa *versus* kader, “kiri” versus “kanan”. Menurut Anthony Downs, dengan terjadinya konvergensi ini akan mempengaruhi jumlah pemilih, yaitu lebih banyak konvergensi akan menghasilkan kenaikan pemilih, sedangkan lebih sedikit konvergensi mengakibatkan penurunan pemilih (Miriam Budiardjo, 2008:400). Pendapat tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Gambar 1. Konvergensi Ideologi Kiri/ Kanan dalam Masyarakat



Dalam masyarakat mapan konvergensi (titik temu) ideologi kiri dan kanan terjadi dicenter



Dalam masyarakat terpolarisasi tidak ada konvergensi kiri dan kanan, tetap ekstrem

Sumber : Miriam Budiardjo, 2008: 401

Dalam konteks negara Indonesia, Syamsudi Haris (Suara Pembaruan, 31 Mei 2010), mengemukakan bahwa partai politik di Indonesia cenderung tidak lagi menjadi partai “kanan” dan “kiri” tetapi mulai menjadi partai tengah, dengan beberapa ciri khas seperti: ideologi

yang moderat, longgar, dan tanpa identifikasi primordial seperti agama, etnik, ras, ataupun golongan tertentu, dengan demikian orientasi partai tengah biasanya tidak bertolak dari identitas kultural-ideologis tertentu, melainkan mencoba menjadi simpul bagi keekaragaman itu sendiri.

Menurut Sunny Tanuwidjaja (Kompas, 14/ 04/ 10), partai tengah memiliki lima ciri utama: (a) minimnya kejelasan dan beban ideologi; (b) menguatnya elite partai *vis-a-vis* anggota partai; (c) menurunnya jumlah dan peran keanggotaan partai; (d) bervariasinya pemilih suatu partai dari aspek kelas ataupun agama; (e) semakin banyaknya kepentingan eksklusif yang berusaha diwakilkan oleh partai demi kepentingan finansial ataupun elektoral yang berujung pada kontradiksi kebijakan dan kontradiksi program.

Miriam Budiardjo (2008), menjelaskan bahwa ada kecenderungan partai-partai kiri maupun kanan mulai bergeser secara sentripetal ke sisi tengah dan tidak lagi bersifat ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Fenomena ini diistilahkan dengan konvergensi kiri dan kanan. Sedangkan Otto Kircheimer menamakan fenomena ini sebagai *deideologisasi* partai-partai (Miriam Budiardjo, 2008). Konvergensi tersebut memunculkan sebuah partai politik modern yang disebut oleh Otto Kircheimer sebagai *catch all party*, yaitu partai yang ingin menghimpun semaksimal mungkin dukungan dari berbagai macam-macam kelompok masyarakat dan dengan sendirinya menjadi lebih inklusif (Miriam Budiardjo, 2008).

7. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik (Ramlan Surbakti, 2007: 124). Sedangkan Cholisin (2005), menyebutkan bahwa sistem kepartaian dapat digolongkan berdasarkan: jumlah, integratif-kompetitif, serta jarak ideologi, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Kepartaian Dengan Berdasarkan Jumlah

Berdasarkan jumlah partai politik maka dikenal tiga sistem kepartaian yaitu:

1) Sistem Partai Tunggal

Sistem partai tunggal merupakan sistem kepartaian dimana jumlah partai didalam sistem itu terdapat satu partai yang dominan dan mendapat dukungan terus menerus.

2) Sistem Dwi Partai

Sistem dwi partai adalah sistem kepartaian dimana jumlah partai didalam sistem itu terdapat dua partai yang saling bersaing untuk mendapat kewenangan memerintah melalui pemilu. Partai yang kalah akan menjadi oposisi dan partai pemenang akan mendapatkan kekuasaan untuk menduduki pemerintahan.

3) Multipartai

Sistem multipartai terdapat dua partai yang dominan, sistem ini berkembang pada masyarakat yang pluralis dalam budaya maupun sosial-ekonomi.

b. Sistem Kepartaian Berdasarkan Integratif dan Kompetitif

Terdapat beberapa ciri-ciri dari sistem kepartaian integratif dan sistem kepartaian kompetitif, ciri tersebut digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Antara Sistem Kepartaian Integratif Dengan Sistem Kepartaian Kompetitif

	Integratif	Kompetitif
Dukungan	Sektarian (eksklusif, regional, kelas, sangat ideologis)	Komprehensif (berorientasi klien, pragmatis)
keorganisasian	Tertutup (otoriter, aksi langsung, represif)	Terbuka (serba membolehkan, permissive, representatif)
Cara-cara kegiatan dan fungsi	<i>Diffused</i> (menyebar)	Terspesialisasi (agregatif, representatif)

Sumber: Cholisin, 2005: 104.

c. Sistem Kepartaian Berdasarkan Jarak Ideologi

Sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi dikarenakan: adanya jumlah kutup (*polar*), jarak diantara kutup-kutup tersebut (*polarisasi*), dan arah perilaku politiknya (Ramlan Surbakti, 2007: 127). Giovanni Sartori (Ramlan Surbakti, 2007: 127), mengklasifikasikan sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi menjadi tiga, yaitu

pluralisme sederhana, pluralisme moderate, dan pluralisme ekstrim.

Dalam tabel dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Sistem Kepartaian Berdasarkan Jarak Ideologi.

Sistem Partai	Kutub	Polaritas	Arah
Pluralisme sederhana	Bipolar	Tidak ada	Sentripetal
Pluralisme Moderat	Bipolar	Kecil	Sentripetal
Pluralisme Ekstrim	Multipolar	Besar	Sentrifugal

Sumber : Ramlan Surbakti, 2007: 127

8. Koalisi Partai Politik

Menurut Lili Romli, koalisi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertama, *policy blind coalition* yaitu koalisi yang tidak didasarkan pada pertimbangan kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan. Kedua, *policy based coalition* yaitu koalisi yang berdasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasi (*policy seeking*) (Lili Romli dkk, 2009:257). Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel:

Tabel 5 . Model-Model Koalisi.

<i>Policy Blind Coalitions Theory</i>	<i>Policy Based Coalitions Theory</i>
Menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi	Menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan
<i>Minimal winning coalitions</i>	<i>Minimal connected coalitions</i>
Asumsi partai bertujuan “ <i>office seeking</i> ” (memaksimalkan kekuasaan)	Asumsi partai bertujuan “ <i>policy seeking</i> ” (mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai)
Loyalitas peserta koalisi sulit dijamin	Loyalitas peserta koalisi secara minimal diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan
Sulit diprediksi, juga range ukuran jumlah partai sangat beragam	Koalisi bisa sangat gemuk dengan melibatkan partai-partai yang tidak perlu agar tujuan kebijakan mendapat dukungan mayoritas.

Sumber: Lili Romli dkk, 2009.

Sedangkan menurut Arend Lijphart, teori tentang koalisi dapat dibedakan menjadi: pertama adalah *minimal winning coalitions* yang menganut prinsip besaran (*size principle*), koalisi ini terdiri atas dua atau lebih partai politik yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen, tetapi kemenangan ini bersifat minimal, artinya tidak ada penambahan partai lain ke dalam koalisi kalau hal tersebut tidak diperlukan, hanya ingin menjadi suara mayoritas mutlak; kedua, yaitu *minimum size coalitions* yaitu koalisi yang didasarkan pada asumsi yang sama tentang maksimalisasi kekuatan, koalisi ini lebih rasional dan logis dalam memperhitungkan kekuatan daripada yang pertama karena koalisi yang dibentuk berdasarkan kekuatan strategis masing-masing partai di parlemen.; ketiga, *coalitions with smallest number of parties* yakni koalisi yang dibentuk antara partai besar dan partai

kecil-kecil dengan alasan bahwa berkoalisi dengan partai kecil mempermudah di dalam bernegosiasi dan tawar menawar; keempat, *minimal range coalitions* yakni koalisi dua atau lebih partai yang memiliki kesamaan pandangan dan preferensi didalam kebijakan.; kelima, *minimal connected winning coalitions*, yakni koalisi dua atau lebih partai yang memiliki kedekatan hubungan kebijakan atau suatu isu tertentu (Boni Hargens, 2007). Menurut Arend Lijphart, koalisi partai politik merupakan sebuah solusi dimana negara menganut sistem pemerintahan presidensial dipadukan sistem kepartaian multipartai (Lili Romli dkk, 2009: 257).

9. Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Dalam pembahasan mengenai perkembangan partai politik di Indonesia akan dibagi menjadi lima periode waktu dari mulai zaman Pra Kemerdekaan, Orde lama, Orde baru dan Era Reformasi (Khoirudin dkk, 2010).

a. Partai Politik Zaman Pra Kemerdekaan

Partai politik mulai muncul di Indonesia sekitar awal abad 20 yang digunakan sebagai alat perjuangan nasional, dan sebagai kepanjangan tangan dari organisasi-organisasi sosio-agama (Khoirudin dkk, 2010). Dimasa awal-awal kemerdekaan Indonesia, pembentukan ideologi merupakan prasarana penting dalam proses pembentukan partai politik. munculnya partai politik merupakan bentuk aktualisasi dari tiga aliran utama ideologi yang berkembang di dekade kedua dan ketiga abad

ke-20. Ketiga aliran yang dimaksud adalah Islam, Marxisme/Sosialisme, dan Nasionalisme (Khoirudin dkk, 2010).

Aliaran Islam ditandai dengan lahirnya Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911 yang didirikan oleh H. Samanhudi sebagai perkumpulan dagang. Aliran Marxisme/Sosialisme diusung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1920. Sedangkan aliran Nasionalisme ditandai dengan munculnya Partai Nasionalis Indonesia (PNI), yang didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927. Menurut Durkei (Khoirudin dkk, 2010), partai politik di Indonesia banyak muncul dizaman kolonial Belanda. Menurutnya, terdapat dua pandangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal tersebut yaitu: pertama, mengemukakan bahwa ada suatu gerakan *authochtonous* yang bersumber dari dalam, berasal dari kesadaran untuk lepas dari kolonialisme; Kedua, mengemukakan bahwa pergerakan nasional sebagai sesuatu yang bersifat *heterochtonous* bersumber dari luar.

Selain ketiga partai diatas, dizaman kolonial juga bermunculan partai-partai, diantaranya adalah: Partai Khatolik berdiri bulan November 1918, Partai Indonesia berdiri April 1931, Partai Rakyat Indonesia berdiri pada September 1930, Parindra berdiri pada Januari 1931, dan Gerindro pada bulan Mei 1937. Sedangkan partai politik pada masa penjajahan Jepang dilarang. Pemerintah Jepang membubarkan partai-partai politik yang pernah ada dizaman kolonial Belanda. Hanya

organisasi Islam, Masyumi dan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) yang diperbolehkan oleh pemerintah Jepang untuk berdiri (Khoirudin dkk, 2010).

b. Partai Politik di Era Orde Lama

Partai dalam masa Orde Lama akan dibagi menjadi tiga periode, yaitu Periode Kemerdekaan (1945-1950), Periode Demokrasi Parlementer (1950-1959), dan Periode Demokrasi Terpimpin.

1) Periode Kemerdekaan (1945-1950)

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengadakan sidang dan akan menetapkan peraturan peralihan UUD 1945 yang antara lain akan dibentuk sebuah partai politik sebagai alat bantu perjuangan, yaitu dibentuk Partai Nasionalis Indonesia (PNI) (Khoirudin dkk, 2010). Selanjutnya pada tanggal 3 November 1945 Wakil Presiden Mohamad Hatta mengeluarkan makhlumat yang dijadikan landasan lahirnya partai politik baru di Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Partai politik dianjurkan pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik. Berhubungan dengan usulan Badan Pekerja Komite Indonesia Nasional Pusat kepada pemerintah supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai itu hendaknya memperluas perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Pemerintah mengaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa: (a) Pemerintah menyukai timbulnya partai-

partai politik, karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. (b) Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946 (Zulfikri Suleman, 2010:213)

Dengan munculnya maklumat tersebut kemudian berdiri beberapa partai politik yang diantaranya adalah: Partai Masyumi pada tanggal 7 November 1945, PKI (Partai Komunis Indonesia), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai Khatolik, Partai Rakyat dan Kedaulatan Rakyat (PKRI), kemudian disusul oleh partai-partai politik lain.

2) Periode Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Pada periode ini dilaksanakan pemilu pertama kali di Indonesia untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955, sedangkan tanggal 15 Desember 1955 pemilihan untuk memilih anggota Konstituante. Berikut tabel hasil dari pemilu 1955:

Tabel 6. Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 1955.

No	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	PNI	8.434.653	22,32	57
2	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3	NU	6.955.141	18,41	45
4	PKI	6.179.914	16,36	39
5	PSII	1.091.160	2,89	8
6	Parkindo	1.003.326	2,66	8
7	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8	PSI	753.191	1,99	5
9	IPKI	541.306	1,43	4
10	Perti	483.014	1,28	4
11	PRN	242.125	0,64	2
12	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13	GPPS	219.985	0,58	2
14	PRI	206.161	0,55	2
15	P3RI	200.419	0,53	2
16	Murba	199.588	0,53	2
17	Baperki	178.887	0,47	1
18	(PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19	Grinda	154.792	0,41	1
20	Permai	149.287	0,40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23	PPTI	85.131	0,22	1
24	AKUI	81.454	0,21	1
25	PRD	77.919	0,21	1
26	PRIM	72.523	0,19	1
27	Acoma	64.514	0,17	1
28	R.Soedjono P	53.306	0,14	1
29	Lain-lain	1.022.433	2,71	-

Sumber:http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39 pada 10 Oktober 2011.

Tabel 7. Hasil Pemilu 1955 Untuk Anggota Konstituante.

No	Partai	Suara	%	Kursi
1	PNI	9.070.218	23,97	119
2	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3	NU	6.989.333	18,47	91
4	PKI	6.232.512	16,47	80
5	(PSII	1.059.922	2,80	16
6	Parkindo	988.810	2,61	16
7	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8	PSI	695.932	1,84	10
9	IPKI	544.803	1,44	8
10	Perti	465.359	1,23	7
11	PRN	220.652	0,58	3
12	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13	GPPS	152.892	0,40	2
14	PRI	134.011	0,35	2
15	P3RI	179.346	0,47	3
16	Murba	248.633	0,66	4
17	Baperki	160.456	0,42	2
18	Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19	Grinda	157.976	0,42	2
20	Permai	164.386	0,43	2
21	PD	169.222	0,45	3
22	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23	PPTI	74.913	0,20	1
24	AKUI	84.862	0,22	1
25	PRD	39.278	0,10	1
26	PRIM	143.907	0,38	2
27	Acoma	55.844	0,15	1
28	R.Soedjono P	38.356	0,10	1
29	Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30	Partai Tani	30.060	0,08	1
31	Radja	33.660	0,09	1
32	GBRI	39.874	0,11	
33	PIR NTB	33.823	0,09	1
34	L.M.Idrus Effendi	31.988	0,08	1

Sumber:http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39 pada 10 Oktober 2011.

Pemilu 1955 menjelaskan bahwa dukungan suara partai-partai politik cenderung mengikuti garis sosial sebagaimana pendapat Clifford Geertz, yaitu berdasarkan varian golongan priyayi, santri, dan abangan. Misalnya Masyumi, PSII dan Perti banyak mendapatkan suara dari golongan santri. Partai Nasionalis Indonesia (PNI), mendapat suara dari golongan priyayi, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapat suara dari golongan abangan (Khoirudin dkk, 2010). Masa 1950-1959 disebut sebagai masa kejayaan partai politik karena mereka memainkan peran sangat penting didalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer, tetapi hal ini membuat pemerintahan tidak stabil dan akhirnya sering terjadi pergantian pemerintahan. Selain itu, karena adanya perbedaan ideologi antar partai membuat dewan konstituante gagal melaksanakan tugasnya untuk membuat konstitusi yang baru, karena masalah tersebut, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tanggal 5 Juli 1959 (Khoirudin dkk, 2010).

3) Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pasca dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 juli 1959, presiden Soekarno melakukan langkah untuk menyederhanakan partai politik guna menciptakan stabilitas nasional. Perbedaan partai politik pada masa ini tidak sebebaskan ketika zaman demokrasi

parlementer. Adanya Penetapan Presiden (PenPres) No. 13 Tahun 1960 yang mengatur pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai politik, yang dengan itu pada tanggal 17 Agustus 1960 Presiden Soekarno membubarkan Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi).

Pada tanggal 14 April 1961 hanya mengakui sembilan partai yaitu: PNI, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Khatolik, Perti, Pertindo, dan Murba, kemudian tanggal 21 Desember 1965 Partai Murba di bubarkan oleh Soekarno (Khoirudin dkk, 2010). Meskipun jumlah partai semakin sedikit tetapi konflik antar partai masih tetap ada, hal ini dikarenakan adanya perbedaan ideologi partai politik (Khoirudin dkk, 2010). Menjadi ciri pada masa demokrasi terpimpin adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dikenal dengan G 30 S/PKI, selama tahun 1956-1970 tidak dilaksanakan pemilu, kekuasaan Soekarno sangat besar dan terjadi pembubaran beberapa partai politik.

c. Partai Politik di Zaman Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan, dan dilakukan fusi partai politik. Dari sembilan partai politik menjadi dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Indonesia Perjuangan (PDI) (Khoirudin dkk, 2010). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan Fusi dari Partai

Nahdatul Ulama, Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Serikat Islam Indonesia, (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Perti. Sedangkan PDI merupakan Fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Ikatan Perintis Kemerdekaan. Pada masa orde baru terdapat tiga organisasi kekuatan politik Indonesia, yaitu Partai Persatuan pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), ditambah organisasi non partai politik yaitu Golongan karya (Golkar).

Pada era Orde Baru dilakukan enam kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1971 yang diikuti sembilan partai politik (PKRI, PSII, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan GOLKAR), kemudian dilanjutkan pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang diikuti oleh PDI, PPP, dan GOLKAR. Dengan hasil rincian hasil pemilu partai politik selama orde baru, yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 1971.

No	Partai	Suara	%	Kursi
1	Golkar	34.348.673	62,82	236
2	NU	10.213.650	18,68	58
3	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4	PNI	3.793.266	6,93	20
5	PSII	1.308.237	2,39	10
6	Parkindo	733.359	1,34	7
7	Katolik	603.740	1,10	3
8	Perti	381.309	0,69	2
9	IPKI	338.403	0,61	-
10	Murba	48.126	0,08	-

Sumber:http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40 pada 10 Oktober 2011

Tabel 9. Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 1977.

No	Partai	Suara	%	Kursi
1	Golkar	39.750.096	62,11	232
2	PPP	18.743.491	29,29	99
3	PDI	5.504.757	8,60	29

Sumber:http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 pada 10 Oktober 2011

Tabel 10. Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 1982.

No	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	48.334.724	64,34	242
2.	PPP	20.871.880	27,78	94
3.	PDI	5.919.702	7,88	24

Sumber:http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 pada 10 Oktober 2011

Tabel 11. Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 1987.

No	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	62.783.680	73,16	299
2.	PPP	13.701.428	15,97	61
3.	PDI	9.384.708	10,87	40

Sumber:http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 pada 10 Oktober 2011

Tabel 12. Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 1992.

No	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	66.599.331	68,10	282
2.	PPP	16.624.647	17,01	62
3.	PDI	14.565.556	14,89	56

Sumber:http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 pada 10 Oktober 2011

Tabel 13. Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 1997

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	84.187.907	74,51	325
2.	PPP	25.340.028	22,43	89
3.	PDI	3.463.225	3,06	11

Sumber:http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 pada 10 Oktober 2011.

Jika dilihat dari tabel perolehan suara dalam pemilu selama orde baru maka Golongan Karya (Golkar) mendominasi perolehan suara dari pemilu tahun 1971 sampai tahun 1997 dengan perolehan suara lebih dari 50%.

d. Partai Politik di Era Reformasi

Saat masa reformasi, terjadi kembali kebebasan didalam membentuk partai politik. Hal ini bisa kita amati dari jumlah peserta pemilu tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Era reformasi ditandai dengan runtuhnya pemerintahan orde baru oleh gerakan mahasiswa 1998 (Khoirudin dkk, 2010). Setelah reformasi, terjadi tiga kali pemilu di tahun 1999, 2004 dan 2009. Pada tahun 1999 partai yang mengikuti pemilihan umum sebanyak 48 partai politik, dengan pemenang lima besar yaitu PDIP (33,74%), Partai Golkar (22,44%), PPP (10,71%), PKB (12,61%) dan PAN (7,12%) (http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42 pada 10 Oktober 2011).

Pada pemilu 2004 lima besar perolehan suara partai politik yaitu: Golkar (21,62 % suara), PDIP (18,31% suara), PKB (10,61% suara), PPP (8,16% suara), Partai Demokrat (7,46% suara) (http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5340&Itemid=76 pada 10 Oktober 2011).

Kemudian diikuti pada pemilu 2009 dengan lima besar pemenang pemilu yaitu Partai Demokrat (20,85% suara), Partai Golkar (14,45% suara), Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, (14,03% suara) Partai Keadailan Sejahtera (7,88% suara), Partai Amanat Nasional

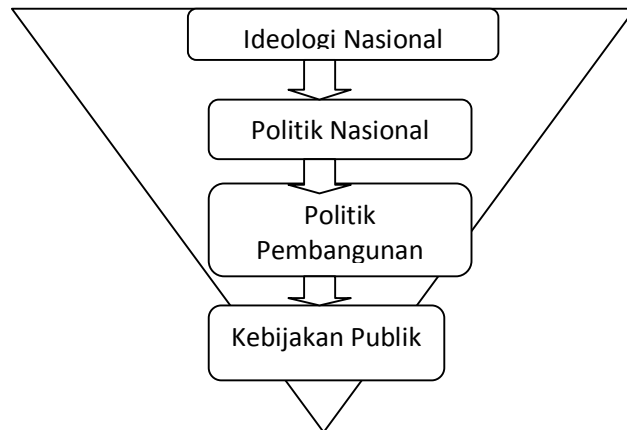
(6,01% suara) (<http://www.pemiluindonesia.com/pemilu-2009/kpu-tetapkan-hasil-pemilu-legislatif-2009.htm> pada 10 Oktober 2011).

10. Keputusan politik

1. Pengertian Keputusan Politik

Dalam bukunya Ramlan Surbakti (2007: 189), keputusan politik adalah keputusan yang mengikat, menyangkut, dan mempengaruhi masyarakat umum. Dalam menentukan alternatif kebijakan terbaik diantara alternatif-alternatif yang lainnya perlu mengambil sebuah patokan yang digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan politik, misalnya ideologi, undang-undang, agama. Ideologi merupakan patokan atau arah dari pembuatan keputusan politik khususnya kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan elaborasi dari sebuah ideologi. Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik merupakan ujung tombak dari ideologi (Riant Nugroho, 2009: 19). Hubungan sebuah ideologi dengan kebijakan publik dapat dilihat gambar dibawah.

Gambar 2. Kebijakan Publik Sebagai Ujung Ideologi.



Sumber: Riant Nugroho, 2009: 19

Keputusan politik secara umum dibagi menjadi dua: *pertama*, kebijakan publik, adalah program-program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. *Kedua*, Pejabat publik yaitu orang-orang yang akan menyelenggarakan kebijakan umum. (Ramlan Surbakti, 2007:190).

2. Pengertian Kebijakan Publik

Budi Winarno (2008), menjelaskan beberapa definisi kebijakan publik oleh para tokoh ilmu politik diantaranya sebagai berikut:

- a. Robert Eyestone, mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.
- b. Thomas R.Dye, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

- c. Richard Rose, menyarankan bahwa kebijakan hendaknya berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.
- d. Carl Fried Rich, mengemukakan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan atau mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
- e. Anderson mengemukakan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud, ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Dari beberapa pengertian diatas terdapat beberapa persamaan dalam mendefinisikan kebijakan publik, yaitu bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diusulkan atau ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor (seseorang, kelompok atau pemerintah) untuk mengatasi suatu masalah atau dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran.

3. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan didalam proses pembuatan kebijakan (Ramlan Surbakti, 2007: 191):

a. Jumlah Orang Pengambil Keputusan

Jumlah orang yang mengambil keputusan, yaitu besaran aktor yang membuat keputusan, dapat satu orang, dua orang, bahkan jutaan orang.

b. Peraturan Pembuat Keputusan Atau Formula Pengambilan Keputusan

Peraturan pembuat keputusan atau formula pengambilan keputusan ialah keputusan yang mengatur jumlah orang atau presentase orang yang harus memberikan persetujuan terhadap suatu alternatif keputusan agar dapat diterima dan disahkan sebagai keputusan. Peraturan pembuat keputusan atau formula pengambilan keputusan dirumuskan dalam konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan bagi negara, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi politik dan kemasyarakatan. Formula pengambilan keputusan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, pengambilan keputusan secara mufakat. *Kedua*, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Pengambilan suara terbanyak dibagi menjadi tiga, yaitu dua pertiga dari orang yang

berhak mengambil keputusan, formula mayoritas (50% +1) dan formula pluralitas (suara yang paling banyak).

c. Informasi

Strategi yang akan ditempuh dalam proses pembuatan keputusan akan sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan informasi yang tersedia. Ketepatan pembuatan keputusan dalam arti mencapai sasaran yang hendak dituju juga sangat bergantung pada lengkap atau tidaknya informasi yang tersedia. Fakta, data, teori dan kecenderungan-kecenderungan dalam masyarakat merupakan beberapa contoh informasi.

4. Isi kebijakan Publik

Isi kebijakan publik pada dasarnya dibedakan menjadi tiga: berdasarkan pemanfaatan dan beban yang dikenakan kepada individu anggota masyarakat, yaitu ekstratif, alokasi distributif, dan regulatif (Ramlan Surbakti, 2007: 192-193). Selain itu, Theodore Lowi (Ramlan Surbakti 2007: 192-193), mengategorisasikan kebijakan umum menjadi empat tipe berdasarkan dua kriteria, yaitu dikenakan tidaknya suatu paksaan secara langsung, dan langsung tidaknya kebijakan diterapkan pada individu. Keempat, tipe kebijakan umum menurut Theodore Lowi tersebut yaitu regulatif, redistributif, distributif, dan konstituen, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan Regulatif

Kebijakan regulatif terjadi apabila kebijakan mengandung paksaan dan akan diterapkan secara langsung terhadap individu. Biasanya kebijakan regulatif dibuat untuk mencegah agar individu tidak melakukan sesuatu tindakan yang tidak diperbolehkan. Seperti undang-undang hukum pidana, undang-undang anti monopoli dan kompetisi yang tidak sehat, serta berbagai ketentuan yang menyangkut keselamatan umum. Selain itu, kebijakan regulatif dibuat untuk memaksakan agar individu melakukan suatu tindakan hingga kepentingan umum tidak terganggu seperti berbagai bentuk perizinan dalam menggunakan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public goods*).

b. Kebijakan Redistributif

Kebijakan redistributif ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga negara tetapi penerapannya melalui lingkungan. Pengenaan pajak secara progresif kepada sejumlah orang yang termasuk katagori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan inti kebijakan retributif. Hasil penerapan undang-undang pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak bumi, dan bangunan, pajak atas keuntungan, dan bunga tabungan, iuran listrik, yang digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum.

c. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung (kemungkinan pengenaan paksaan fisik sangat jauh) tetapi kebijakan ini diterapkan langsung terhadap individu. Individu dapat menarik manfaat dari kebijakan itu, walaupun tidak dikenakan paksaan kepada individu untuk menggunakannya. Dalam pengertian yang lebih kongkret, kebijakan distributif berarti penggunaan anggaran belanja negara atau daerah untuk memberikan manfaat secara langsung kepada individu, seperti pendidikan dasar yang bebas biaya, subsidi energi bahan bakar minyak, subsidi sarana produksi pertanian dll.

d. Kebijakan Konstituen

Kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh, dan penerapan kebijakan secara tidak langsung melalui tindakan lingkungan. Kebijakan konstituen mencakup dua lingkungan bidang garapan, yaitu urusan keamanan nasional dan luar negeri, serta berbagai dinas pelayanan administrasi.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Secara umum ada empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu lingkungan, persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan, aktivitas pemerintah pemerintah perihal kebijakan, dan

aktivitas masyarakat perihal kebijakan (Ramlan Surbakti , 2007: 194). Selain faktor diatas ada empat faktor lagi yang mempengaruhi corak dan arah keputusan yang dijelaskan sebagai berikut (Ramlan Surbakti, 2007: 196):

a. Ideologi dan Konstitusi

Ideologi memberi arah mengenai masyarakat seperti apa yang hendak dituju, sedangkan bidang-bidang apa saja yang akan ditangani, lembaga apa saja yang akan menyelenggarakan, bagaimana menyelenggarakannya diatur didalam konstitusi.

b. Latar Belakang Pribadi Pembuat Keputusan

Latar belakang pribadi seperti asal suku, agama, pembawaan, kecenderungan, dan keinginan pribadi, harapan dan kekhawatiran, pengalaman masa lalu, tingkat pendidikan. Latar belakang pribadi ini akan mempengaruhi corak dan arah suatu keputusan yang diambil.

c. Informasi Yang Tersedia

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik memerlukan informasi yang lengkap dan akurat, seperti dalam membuat keputusan mengenai siapa yang dipilih atau yang akan di angkat menjadi pejabat publik pada suatu instansi pemerintah memerlukan kulifikasi pendidikan, kemampuan, pengalaman dan pangkat yang bersangkutan untuk memegang jabatan tersebut.

d. Golongan Pendukung Pembuat Keputusan dan Keputusan Yang Telah Ada

Pendukung bagi pembuat keputusan turut pula menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil. Selanjutnya keputusan yang pernah dibuat dan masih berlaku juga akan mempengaruhi corak dan arah keputusan yang dibuat demi kesesuaian dan kesinambungan suatu program tertentu. Tetapi hal ini tidak mutlak karena apa yang diputuskan dapat saja diubah sebagian atau seluruhnya.

Selain itu, James Anderson (Budi Winarno, 2008:133-136), berpendapat bahwa terdapat nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat keputusan, antara lain: nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai ideologi. Nilai-nilai tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai-Nilai Politik

Pembuatan keputusan (*decision maker*) mungkin menilai alternatif-alternatif kehidupan berdasarkan pada kepentingan partai politiknya beserta kelompoknya, keputusan yang dibuat didasarkan pada keuntungan politik dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan.

b. Nilai-Nilai Organisasi

Keputusan-keputusan individu mungkin diarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan untuk melihat organisasinya bisa hidup terus, untuk memperluas dan memperbesar program-program dan kegiatan-kegiatannya atau mempertahankan kekuasaannya dan hak-hak istimewanya.

c. Nilai-Nilai Pribadi

Usaha untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi kedudukan sejarah seseorang.

d. Nilai-Nilai Kebijakan

Pembuat keputusan politik tidak hanya dipengaruhi oleh perhitungan-perhitungan keuntungan, organisasi-organisasi atau pribadi, namun para pembuat keputusan mungkin bertindak dengan baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan mengenai apa yang merupakan kebijakan publik secara moral benar atau pantas.

e. Nilai-Nilai Ideologi

Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran dunia yang sederhana dan merupakan pedoman bagi rakyat untuk melakukan tindakan.

6. Bentuk dan Tipe Kebijakan Umum

Ramlan Surbakti (2007), berdasarkan isi dan prosedur keputusan politik diklasifikasikan menjadi tiga:

a. Keputusan Rutin

Keputusan rutin biasanya dipersiapkan secara seksama, membutuhkan waktu yang lama dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang normal sesuai yang ditetapkan dengan konstitusi dan undang-undang.

b. Keputusan Darurat

Keputusan darurat ialah keputusan yang dibuat untuk mengatasi kondisi darurat yang perlu penanganan segera, seperti menghadapi ancaman perang, bencana alam, kekacauan politik, kekacauan ekonomi.

c. Keputusan Bukan Keputusan

Keputusan bukan keputusan adalah terdapat suatu keputusan yang tidak mengandung konsekuensi secara hukum dan bersifat verbal belaka sebagai upaya menenangkan masyarakat.

7. Pembuat Keputusan Politik

Menurut Ellsworth dan Arthur (Ramlan Surbakti, 2007), para sarjana politik biasanya mengajukan tiga kemungkinan elite politik yang membuat keputusan politik, yaitu:

a. Elite Formal

Elite formal adalah elit politik yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat keputusan.

b. Orang Yang Berpengaruh

Orang yang berpengaruh adalah orang-orang yang karena memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, senjata dan massa terorganisasi yang mampu mempengaruhi elit formal sehingga dalam membuat keputusan sesuai dengan keinginan orang yang berpengaruh.

c. Penguasa

Penguasa ialah orang yang secara nyata membuat keputusan, elite formal dan orang berpengaruh dapat menjadi penguasa.

Ramlan Surbakti (2007), ada tiga alat yang dapat digunakan untuk mengetahui siapa yang berkuasa :

a. Analisis Posisi

Analisis posisi adalah suatu metode untuk mengetahui pembuat keputusan atau penguasa dengan cara melihat kedudukan seseorang dalam lembaga pemerintahan.

b. Analisis Reputasi

Analisis reputasi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui pembuat keputusan dengan cara memperhatikan reputasi seseorang dalam lingkungan pemerintah.

c. Analisis Keputusan

Analisis keputusan adalah metode untuk mengetahui elit politik dengan cara meneliti siapa yang ikut dalam proses pembuatan keputusan dalam beberapa keputusan yang dianggap representatif.

Aktor perumus kebijakan publik dibagai menjadi dua yaitu, aktor resmi aktor dan tidak resmi (Budi Winarno, 2008:123). Aktor resmi meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif sedangkan aktor tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu. Aktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Aktor Resmi

1) Lembaga Eksekutif

Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran penting didalam perumusan publik, keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan bisa dilihat dalam komisi-komisi presiden atau dalam rapat-rapat kabinet.

2) Lembaga Legislatif

Lembaga ini bersama dengan lembaga eksekutif (presiden dan pembentunya), memegang peran yang penting didalam perumusan kebijakan, setiap undang-undang menyangkut persoalan-persoalan publik harus mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif.

3) Lembaga Yudikatif

Lembaga ini mempunyai kewenangan yang besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui peninjauan kembali undang-undang atau peraturan

b. Aktor Tidak Resmi

1) Kelompok-Kelompok Kepentingan

Kelompok ini merupakan pemeran serta tidak resmi yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan di hampir semua negara, kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mereka berfungsi menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif kebijakan.

2) Partai-Partai Politik

Dalam masyarakat modern, partai-partai politik seringkali melakukan agregasi kepentingan, partai-partai tersebut berusaha untuk mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan.

3) Warga Negara Individu

Walaupun tugas pembentukan kebijakan pada dasarnya diserahkan kepada para pejabat publik namun dalam beberapa hal para individu masih dapat mengambil peran secara aktif dalam pengambilan keputusan.

8. Tahap-Tahap kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Menurut Budi Winarno (2008: 30-32) tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut.

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya, salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas

legislatif, konsensus, antar direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada umumnya dibuat untuk meraih dampak yang digunakan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

9. Model Analisis Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart model analisis kebijakan publik yang paling baik adalah model elitis dan model pluralis (Budi Winarno, 2008:42-45), yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Model Elitis

Thomas Dye dan Harmon Zieger dalam *the irony of democracy* memberikan suatu ringkasan pemikiran menyangkut model ini, sebagai berikut:

- 1) Kelompok kecil yang memerintah itu bukan tipe massa yang dipengaruhi. Para elit ini (*the rulling class*) biasanya berasal dari lapisan masyarakat yang ekonominya tinggi.
- 2) Perpindahan dari kedudukan non-elit ke elit sangat pelan dan berkesinambungan untuk memelihara stabilitas dan menghindari evolusi. Hanya kalangan non-elit yang telah menerima konsensus elit yang mendasar yang dapat diterima ke dalam lingkaran yang memerintah.
- 3) Elit memberikan konsensus pada nilai-nilai dasar sistem sosial dan pemeliharaan sistem.
- 4) Kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan-tuntutan massa, tetapi nilai-nilai elit yang berlaku. Perubahan-perubahan dalam kebijakan publik adalah secara inkremental, ketimbang secara revolusioner.

- 5) Para elit secara relatif memperoleh pengaruh langsung yang kecil dari massa yang apatis, sebaliknya, para elit mempengaruhi massa yang lebih besar.

b. Model Pluralis

Pandangan pluralis dapat dirangkum dalam uraian berikut :

- 1) Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungannya dengan individu-individu yang lain dalam proses pembuatan keputusan.
- 2) Hubungan-hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung, namun hubungan-hubungan kekuasaan lebih dibentuk untuk keputusan-keputusan khusus.
- 3) Tidak ada pembedaan yang tetap antara “elit” dan “massa”.
- 4) Kepemimpinan bersifat cair dan mempunyai mobilitas yang tinggi. Kekayaan hanya merupakan salah satu dari sekian banyak asset politik yang ada.
- 5) Terdapat banyak pusat kekuasaan diantara komunitas. Tidak ada kelompok tunggal yang mendominasi pembuatan keputusan untuk semua masalah kebijakan.
- 6) Kompetisi bisa dianggap berada di antara pemimpin. Kebijakan publik lebih lanjut dipandang merefleksikan tawar-menawar atau kompromi yang dicapai diantara kompetisi pemimpin-pemimpin politik.

10. Hubungan Partai Politik dengan Kebijakan Publik

Budi Winarno (2008), menyebutkan bahwa aktor kebijakan publik dibagi menjadi aktor resmi dan aktor tidak resmi. Aktor resmi meliputi badan-badan administrasi pemerintah, presiden (eksekutif), lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan, aktor tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, warga negara individu. Jika dilihat dari pernyataan tersebut, partai politik secara langsung masuk kedalam salah satu aktor kebijakan publik.

Hal tersebut dikarenakan partai politik memiliki berbagai kepentingan yang diartikulasikan dari masyarakat atau konstituenya untuk bisa diartikulasikan menjadi kebijakan publik. Sedangkan secara tidak langsung partai politik memiliki pengaruh yang besar didalam proses pembuatan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Sebagai contoh, pembuatan produk undang-undang yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif bisa dikatakan merupakan hasil dari pengaruh partai politik. Hal ini dikarenakan pejabat-pejabat yang duduk di legislatif maupun eksekutif merupakan wakil dari partai yang masih taat pada kebijakan yang dibuat partainya. Hal ini memperlihatkan bahwa partai politik memiliki pengaruh yang besar untuk menentukan kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara tersebut.

Fadilah Putra (20003 :73-75) menyatakan, untuk melihat kaitan antara janji politik dengan kebijakan publik ada tiga bentuk yaitu: pertama, adalah model agenda, alat ini digunakan dengan cara menguji efek-efek kemenonjolan berbagai isu dalam janji-janji politik partai terhadap prioritas alokasi anggaran dan kebijakan pada pemerintahan pasca pemilu, tanpa harus memilih mana partai yang menang dan mana partai yang kalah dalam pemilu; kedua, adalah model mandat, alat ini digunakan dengan cara mengamati pengaruh tambahan dari janji politik partai terhadap produk kebijakan dan alokasi anggaran, dengan melihat pada sisi partai mana yang menang dalam pemilu. Sehingga harapannya dimodel ini adalah akan terlihat jelas bahwa nuansa kebijakan yang muncul dalam rezim pasca pemilu didominasi oleh partai pemenang pemilu. Sekaligus diuji apakah memang janji politik partai pemenang pemilu lebih mewarnai ketimbang partai yang kalah dalam pemilu; ketiga, adalah model ideologi, hal ini ditempuh dengan jalinan ideologi yang selama ini diyakini dalam jangka waktu yang panjang. Melihat apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh partai-partai politik sesuai dengan arah ideologinya.

11. Tinjauan Tentang Ideologi

a. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua kata, yakni *ideo* yang artinya pemikiran dan *logis* artinya logika, ilmu,

pengetahuan, atau dapat didefinisikan bahwa ideologi merupakan ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita. Secara lebih lengkap, Ali Syariati (Firdaus Syam , 2007: 338) mengemukakan ideologi adalah sebuah kata ajaib yang menciptakan pemikiran dan semangat hidup diantara manusia, terutama diantara kaum muda dan khususnya diantara para cendekiawan dan intelektual dalam suatu masyarakat.

Firdaus Syam (2007), terdapat pengertian ideologi dari para ahli: Menurut Alfian ideologi adalah pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam, dipunyai, dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka. Menurut Sukarna ideologi adalah konsepsi manusia mengenai politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan untuk diterapkan didalam masyarakat atau negara. Sidney Hook mendefinisikan ideologi adalah ilmu sekaligus seni dan cara untuk merealisasikan cita-cita bernegara, berpolitik, dan membangun cita-cita masyarakat, ideologi diyakini dan mampu memberikan jawaban dan harapan yang diinginkan negara.

Menggaris bawahi dari berbagai pendapat terkait arti ideologi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ideologi merupakan sistem nilai yang menyeluruh mencakup konsepsi-konsepsi manusia

mengenai politik, sosial, ekonomi, kebudayaan yang secara moral dianggap benar guna dijadikan pedoman didalam hidupnya.

b. Sejarah Lahirnya Ideologi

Terdapat tiga kemungkinan lahirnya sebuah ideologi (Firdaus Syam , 2007: 240-241) yaitu:

- 1) Ideologi lahir karena diinspirasi oleh sosok tokoh yang luar biasa dalam sejarah bangsanya. Pada keadaan ini, gagasan seseorang yang luar biasa atas kehendak pelaku dan dukungan pengikut, alam pikirannya mengenai cita-cita masyarakat yang diperjuangkan dalam gerakan politik, diakui dan dirumuskan secara sistematis. Intinya ideologi ini lahir karena pemikiran seseorang.
- 2) Ideologi lahir berdasarkan alam pikiran masyarakat, ideologi ini dirumuskan oleh sejumlah orang yang berpengaruh dan mempresentasikan kelompok masyarakat, kemudian disepakati sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, dan bernegara, bila perlu diciptakan mitos-mitos untuk mendapatkan pengakuan legal dan kultural dari masyarakat bersangkutan sehingga mereka tunduk dan menyakini.
- 3) Ideologi lahir berdasarkan keyakinan tertentu yang bersifat universal, ideologi ini lahir dan dibawa oleh orang yang diyakini sebagai kehendak Tuhan, dengan membawa pesan untuk melakukan pembebasan dan memberikan bimbingan dalam mengatur kehidupan

yang sebenarnya, serta konsekuensi moral dikemudian hari yang akan diterima bila melanggarnya. Ideologi ini syarat dengan pesan moral yang sesuai dengan nurani serta dasar primordial manusia, biasanya ideologi ini lahir diinspirasi oleh spirit agama.

c. Dimensi-Dimensi Ideologi

Menurut Alfian (1980: 187), ada tiga dimensi yang harus dipenuhi oleh suatu ideologi, supaya ideologi tersebut mampu mempertahankan relevansinya. Ketiga dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Dimensi Realitas

Dimensi realitas adalah kemampuan ideologi untuk selalu memcerminkan realita dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, dengan hal tersebut anggota masyarakat akan merasa memiliki sebuah ideologi.

2) Dimensi Idealisme

Dimensi idealisme adalah lukisan kemampuan ideologi memberikan harapan kepada berbagai kelompok, atau golongan yang ada dalam masyarakat untuk mempunyai kehidupan bersama secara lebih baik untuk membangun suatu masa depan yang lebih cerah.

3) Dimensi Fleksibilitas

Dimensi fleksibilitas adalah kemampuan suatu ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya.

Selain itu menurut Sastra Pratedja (Adeng Muchtar, 2004: 45-46), ideologi seharusnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (a) adanya suatu penafsiran terhadap kenyataan; (b) setiap ideologi memiliki seperangkat nilai atau suatu preskripsi moral; (c) ideologi memuat suatu orientasi dan tindakan yang merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kunto Wibisono (Adeng Muchtar, 2004: 45), mengatakan bahwa ideologi memiliki unsur-unsur antara lain: (1) adanya keyakinan, yakni gagasan-gagasan vital yang diyakini akan kebenarannya; (2) adanya mitos, yakni sesuatu yang dimitoskan secara optimal dan dideterministik pasti akan menjamin tercapainya tujuan; (3) loyalitas, yakni menuntut adanya keterlibatan secara optimal dari para pendukungnya.

Sementara itu Soerjanto Puspwardoyo (Adeng Muchtar, 2004: 45-46), menyebutkan fungsi sebuah ideologi: pertama, struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitar; kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia,

ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak; keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya; kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan; keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkahlakunya seseuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung didalamnya. Selanjutnya menurut Vago (1989) ideologi memiliki fungsi bagi para pengikutnya yaitu:

- a. Memberikan legitimasi dan rasionalitas terhadap perilaku dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat.
- b. Sebagai dasar atau acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok masyarakat.
- c. Memberikan motivasi bagi para individu mengenai pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan.

Dari berbagai pendapat mengenai unsur-unsur ideologi yang telah disebutkan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi setidaknya harus memiliki unsur pokok sebagai berikut:

- a. Adanya suatu relitas hidup yang diyakini kebenarannya.
- b. Adanya tujuan hidup yang dicita-citakan.
- c. Adanya cara guna mewujudkan tujuan hidup yang dicita-citakan.
- d. Adanya loyalitas dari pengikutnya.

- e. Adanya kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang atau pengikutnya untuk mau melangkah dan bertindak.

d. Macam-Macam Ideologi di Dunia

Terdapat tiga ideologi besar yang demikian kuat mempengaruhi keyakinan masyarakat dalam mewujudkan masa depan politik terbaik menurut anggapannya, ideologi besar itu tumbuh berasal dari filsafat dengan cara pandang yang berbeda dalam memandang dasar hidup dan cita-cita manusia (Firdaus Syam, 2007: 242). Ideologi-ideologi besar tersebut berakar dari tiga pendekatan filsafat (Firdaus Syam, 2007: 242) yaitu :

a. Filsafat Idealisme

Filsafat Idealisme lebih mengedepankan paham rasionalisme dan individualisme, kemudian berkembang dalam kehidupan politik yang melahirkan ideologi Liberalisme dan Kapitalisme. Ide yang menjadi kekuatan dasar manusia sebagai pusat alam semesta, manusia menjadi titik pangkal perubahan sejarah. Pandangan kehidupan idiologi liberalisme dan kapitalisme adalah melahirkan Sekulerisme moderat yaitu pandangan yang memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan kenegaraan.

b. Filsafat Materialisme (*filosofi of materialime*)

Filsafat Materialisme (*filosofi of materialime*) lebih mengedepankan paham emosionalisme berupa perjuangan kelas dengan kekerasan

dan kolektivisme, yang dalam kehidupan politik telah melahirkan sosialis komunisme. Materi (ekonomi) menjadi kekuatan dasar menempatkan kondisi ekonomi sebagai faktor penentu terjadinya perubahan sejarah, ini melahirkan adanya pertentangan antara agama dengan negara. Agama dianggap sebagai faktor penghambat atau candu. Sosialisme-Komunisme melahirkan sekulerisme radikal.

c. Filsafat Teologisme

Pandangan filsafat Teologisme terbagi menjadi dua: pertama adalah paham agama yang menempatkan ajaran Tuhan memegang peran sentral dalam kehidupan politik kenegaraan, dalam konstruksi politiknya pemuka agama sebagai tokoh yang dikultuskan; kedua, paham agama yang menempatkan ajaran Tuhan sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan ekspresi. Dalam hubungannya dengan politik kenegaraan, agama sebagai sesuatu yang suci, bukan untuk dikultuskan atau dimistikkan tetapi agama sebagai pembimbing. agama dapat didialogkan untuk terlibat sebagai wacana sekaligus menjadi sumber etika, moral, dan hukum.

Dari ketiga pendekatan tersebut, maka lahirlah tiga ideologi besar dunia: pendekatan filsafat Idealisme melahirkan ideologi Liberalis-Kapitalis, pendekatan filsafat materialisme melahirkan ideologi Sosialis-Komunis dan dari pendekatan filsafat Teologisme

melahirkan ideologi Islam. Penjelasan dari ketiga ideologi tersebut adalah sebagai berikut (Firdaus Syam, 2007 : 245- 321) :

a. Ideologi Liberalisme

Liberal secara etimologi berasal dari bahasa latin yang berarti *free*, selanjutnya *liberal* berarti *nonrestricted* yang berarti tidak dibatasi atau *independent in opinion* yaitu bebas dalam pendapat (Firdaus Syam 2007: 263). Secara terminologi, Liberalisme diartikan sebagai suatu paham ditegakannya kebebasan bagi setiap individu berada pada posisi yang sederajat dalam hal kemerdekaan dan hak-hak dasarnya (Adeng Muchtar, 2004: 53). Liberalisme menolak adanya paham yang melakukan pengekangan terhadap kebebasan individu, serta anti terhadap feodalisme, klerikalisme, etatisme, absolutisme dan perbudakan.

Liberalisme lahir menjadi suatu paham dan melembaga sekitar abad 18 di daratan eropa dan inggris. Ideologi ini muncul akibat tindakan gereja, raja dan kaum foedal cenderung tirani, Karena itu rakyat melakukan perlawanan, Mereka menuntut kebebasan, persamaan, dan keadilan. Tuntutan tersebut merupakan sebuah semboyan yang dikumandangkan saat revolusi Prancis tahun 1789. Paham Liberalisme kemudian melahirkan Kapitalisme dalam lapangan ekonomi, Hedonisme dalam lapangan sosial kebudayaan, *free value* dalam lapangan ilmu pengetahuan, sekulerisme dalam

hubungan negara dan agama, serta demokrasi dalam kehidupan politik ((Firdaus Syam, 2007)

Terdapat prinsip-prinsip yang dapat dijelaskan dari ideologi Liberalisme (Firdaus Syam 2007: 263) yaitu sebagai berikut: (1) mementingkan Individu; (2) memperlakukan secara sama pemikiran orang lain; (3) percaya terhadap persamaan dasar semua manusia; (4) kebebasan berbicara; (5) pemerintah dilakukan dengan persetujuan yang diperintah; (6) pemerintah berdasarkan hukum; (7) negara adalah alat; (8) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara; (9) Percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta; (10) menolak dogmatis.

Zulfikri Suleman (2010: 98-103), ada tiga prinsip yang dicakup Liberalisme. Pertama, prinsip moral Liberalisme adalah menegaskan adanya nilai-nilai dan hak-hak dasar kebebasan, kemuliaan dan ekspresi kehidupan yang melekat pada manusia dan individu. Konsep inilah yang dimaksud dengan hak-hak dasar individu. Pada akhirnya prinsip moral Liberalisme ini akan melahirkan tiga bentuk kebebasan: (1) hak-hak pribadi yaitu mencakup hak-hak dasar tertentu untuk melindungi individu dari kekuasaan dari luar dirinya termasuk dari kekuasaan pemerintah. Hak-hak pribadi ini mencakup: hak untuk berfikir, berbicara dan beragama. (2) hak-hak sipil yaitu hak-hak untuk menyalurkan hak pribadi dalam bentuk aktivitas dan

partisipasi seseorang dalam kehidupan bersama. Hak-hak sipil mencakup hak untuk mentakan pikiran melalui tulisan, hak untuk berdiskusi, hak untuk berkumpul dan berorganisasi. (3) Hak-hak sosial yaitu hak seseorang untuk hidup bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki tanpa hambatan.

Kedua, prinsip ekonomi Liberalisme. menurut Roy C. Macridis (Zulfikri Suleman, 2010: 98-103), yaitu ekonomi liberal prinsip liberal dalam bidang ekonomi berhubungan dengan siapa yang berhak mengatur kehidupan politik. Dalam pandangan ekonomi liberal menghendaki agar kehidupan ekonomi cukup diserahkan kepada hukum alam, maksudnya usaha individu-individu secara bebas dan kompetitif tanpa campur tangan pemerintah. Prinsip ekonomi Liberalisme ini melahirkan sistem ekonomi kapitalis.

Ketiga, prinsip kehidupan politik Liberalisme adalah berhubungan dengan bagaimana prinsip kebebasan individu diterjemahkan dalam kerangka kehidupan bernegara. Maksudnya adalah bagaimana individu berarti bebas dari pengendalian kekuasaan penguasa. Sebagai contohnya; kebebasan dalam berfikir dan menyatakan pendapat, kebebasan hak milik, kebebasan berkelompok, kebebasan dari pers, dan kebebasan dari rasa takut. Paham Liberalisme dalam kehidupan politik ini mewujudkan menjadi sistem politik yang disebut dengan demokrasi.

Dari pendapat kedua ahli diatas, dapat diambil garis besar mengenai prinsi-prinsip ideologi Liberalisme:

- a. Adanya penjaminan hak milik perseorangan, dan tidak adanya istilah hak milik berfungsi sosial.
- b. Mengedepankan persaingan bebas.
- c. Menganggap sama setiap individu.
- d. Pemberian kebebasan penuh terhadap individu.
- e. Paham Liberalisme kemudian melahirkan dalam lapangan politik, Kapitalisme dalam lapangan ekonomi, Hedonisme dalam lapangan sosial kebudayaan, *free value* dalam lapangan ilmu pengetahuan, sekulerisme dalam hubungan negara dan agama, serta demokrasi dalam kehidupan politik.

b. Ideologi Sosialisme-Komunisme

Sosialisme dengan Komunisme memang tidak sama baik secara filosofis maupun metode dan tujuannya, tetapi mereka memiliki kesamaan dalam hal pembelaannya terhadap penderitaan masyarakat lemah dan berbasis kepada nilai kolektivitas dan solidaritas dalam membangun metode atau paham yang dianutnya (Firdaus Syam, 2007: 265).

Pertama, ideologi Sosialisme menurut Deliar Noor (Firdaus Syam, 2007:265) pada hakikatnya berpangkal dari kepercayaan diri manusia, melahirkan kepercayaan pula bahwa segala penderitaan

dan kemelaratan dihadapi dapat diusahakan melenyapkannya. Sedangkan menurut George Lansbury dijelaskan bahwa Sosialisme, berarti cinta kasih, kerjasama, dan persaudaraan dalam setiap masalah kemanusiaan merupakan satu-satunya perwujudan dari iman Kristiani. George Lansbury (Firdaus Syam, 2007:265) menjelaskan, “apakah orang itu tahu atau tidak mereka yang setuju dan menerima persaingan, pertarungan satu dengan yang lain sebagai jalan memperoleh roti setiap hari sungguh melakukan pengkhianatan dan tidak menjalankan kehendak Allah”. Dari pendapat tersebut tampak bahwa lahirnya paham ini merupakan reaksi dari adanya ideologi Liberalisme, dan tampak juga bahwa Sosialisme diilhami oleh keberadaan agama atau nilai-nilai teologis.

Dampak dari adanya ideologi Liberalisme menimbulkan sikap Individualistis, Konsumerisme, Hedonisme, Materialisme, dan Sekulerisme. Hal ini mengakibatkan terjadinya masalah sosial, seperti melemahkan ikatan emosional dalam keluarga, disorientasi, disorganisasi sosial dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Terjadinya hal tersebut menimbulkan reaksi untuk mencari alternatif lain untuk dijadikan nilai-nilai didalam kehidupan. Sehingga munculah paham Sosialisme yang menentang kepentingan individu sebagai dasar pribadi. Menurut tokoh sosialis utopis Thomas Moore, sebagai kekuatan politik Sosialisme merupakan reaksi dari

Kapitalisme dan Sosialisme dapat ,mengembangkan dirinya hanyalah dinegara dimana tradisi lembaga liberal sudah berkembang (Firdaus Syam, 2007:269).

Firdaus Syam (2007: 277) menguraikan beberapa prinsip-prinsip Sosialisme. (1) dalam pembentukan gerakan sosialis pengaruh agama merupakan yang paling kuat. Menurut Attle (Firdaus Syam, 2007: 277), adanya gerakan sosialis Kristen yang dipimpin oleh dua orang biarawan, yaitu Fredrick Maurice dan Charles Kingsley mencapai puncak kejayaannya dalam pertengahan abad sembilan belas serta menjadi sumber penting untuk perkembangan organisasi kelas buruh serta sosialis kemudian prinsip yang menjadi pedoman bagi kalangan sosialis Kristen adalah konsep yang menandakan bahwa Sosialisme harus dikristenkan dan dan kristianitas harus di sosialisasikan; (2) idealisme etis dan estetis, ini menjadi sumber Sosialisme di Inggris. Menurut Jhon Ruskin dan William Morris (Firdaus Syam, 2007:277), mengungkapkan ini bukan untuk suatu program politik/ ekonomi, tetapi merupakan pemberontakan melawan kemelaratan, kebosanan, dan kemiskinan hidup dibawah Kapitalisme industry; (3) Empirusme Fabian, ini merupakan ciri gerakan sosialis Inggris yang paling khas.

Ajaran dari Empirusme Fabian dalam hal politik menghendaki perubahan masyarakat secara konstitusional, perubahan itu jangan

sampai melalui revolusi yang radikal dengan membalikan struktur politik dengan cara paksa atau kekerasan. Prinsipnya bahwa tidak mungkin ada kecuali kepada kelas menengah dan atas ditunjukkan bahwa tuntutan dasar pikiran serta politik sosialis masuk akal dan bersifat adil; (4) Sosialisme sebagai kekuatan politik, sosial, dan ekonomi, sangat berpihak kepada tindakan sosialis populis dan untuk rakyat. Hal ini dilakukan berupa pemberian kesempatan kerja, menghapus diskriminasi, memperjuangkan mengenai persamaan hak, memperjuangkan hak-hak pekerja, kerja sama serta menghapuskan persaingan dan mengatur mekanisme ekonomi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut Robert Owen (Adeng Muchtar, 2004: 54) terdapat agenda-agenda dari Sosialisme: (1) menciptakan kesempatan yang lebih banyak bagi kelas-kelas yang berkedudukan rendah; (2) mengakhiri ketidaksamaan yang didasarkan atas kelahiran dan tidak atas jasa; (3) membuka lapangan pendidikan bagi semua rakyat; (4) menghapus praktik-praktik diskriminasi yang didasarkan atas jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan kelas sosial; (5) memberikan jaminan sosial yang cukup bagi mereka yang sakit, menganggur dan sudah tua; (6) merencanakan kembali kota-kota dan membongkar daerah-daerah perkampungan yang padat dan membangunnya kembali dengan rumah-rumah baru; (7) memberikan pemeliharaan kesehatan

bagi setiap orang yang tergantung pada keadaan dompetnya; (8) membangun kembali masyarakat atas dasar kerja sama sebagai ganti persaingan, dorongan dan kepentingan.

Menurut Beatrice Webb (Adeng Muchtar, 2004: 54), agenda-agenda Sosialisme dapat terlaksana secara perlahan dengan syarat: (1) perubahan harus dilakukan secara demokratis, diterima mayoritas rakyat; (2) harus terlaksana secara berangsur-angsur (*evolitif*) dan tidak menimbulkan dislokasi; (3) harus dijaga jangan sampai dianggap melanggar kesusilaan rakyat, (4) harus dilalui secara konstitusional dan bersifat damai.

Kedua, Ideologi Komunisme, awalnya komunisme mengandung dua pengertian (Firdaus Syam, 2007:281): (1) ada hubungannya dengan komune (*commune*), suatu satuan dasar bagi wilayah negara yang berperintah sendiri, dengan negara itu sendiri sebagai federasi komune-komune, (2) dari istilah Komunisme, ia menunjukkan milik atau kepunyaan bersama. Ideologi Marxisme-Leninisme termasuk salah satu varian rumpun ideologi Sosialisme. Ideologi Marxisme-Lenisme berasal dari ajaran Henrich Karl Marx, Ajaran Marxisme-Leninisme dibangun atas dasar pemikiran Karl Marx dan Friederich Engels yang selanjutnya dikembangkan lebih jauh oleh W.E. Lenin yang selanjutnya dikenal dengan paham komunisme (Adeng Muchtar, 2004: 54-55)

Secara garis besar, pengertian Komunisme adalah sebuah aliran berpikir berlandaskan kepada atheisme, yang menjadikan materi sebagai asal segala-galanya (Firdaus Syam, 2007:280). Pemerintahan komunis memperlakukan semua negara bagian mereka, rakyat dan cita-citanya yaitu menciptakan masyarakat sama rata dan sama rasa, ideologi komunis menganut sistem komando, hierarkis dari atas, dengan pola yang sentralistik dan diktator atas nama proletar, sehingga sering disebut disebut diktator proletariat (Firdaus Syam,2007: 280). Sedangkan Karl Marx mendefinisikan masyarakat komunis adalah suatu komunis yang tidak berkelas, tenteram, tenang , manusia dengan disiplin diri, dan pandangan terhadap kerja sebagai sumber kegembiraan, lepas dari perlu tidaknya kerja ini dipandang dari segi kepentingan diri (Firdaus Syam,2007:280).

Firdaus Syam (2007), terdapat prinsip-prinsip yang terdapat dalam ideologi Komunisme yaitu: (1) ideologi Komunisme adalah sistem politik, ekonomi dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Lininisme; (2) orang-orang komunis percaya kepada *historical materialis*, sebab mereka memandang soal-soal spiritual hanya sebagai efek sampingan akibat dari keadaan perkembangan materi termasuk ekonomi. Ideologi komunis tidak mempercayai Tuhan, agama dilarang tegak karena hanya sebagai candu bagi manusia dan masyarakat, (3) dalam mencapai tujuan dengan

menghalalkan segala cara yaitu dengan kekerasan radikal, revolusioner, perjuangan kelas. tidak mengakui danya hak asasi manusia, (4) cita-cita perjuangan ideologi komunis adalah membangun masyarakat tanpa negara, tanpa kelas dengan konsep sama rata, sama rasa, (5) pengendali kebijakan berada ditangan segelintir orang yang disebut pilot biro, dengan sendirinya kebijakan ekonomi juga dilakukan secara tersentral dan diktator dan pemerintah yang dikendalikan oleh sejumlah orang sedikit. Selain itu terdapat unsur-unsur ajaran Marxisme (adeng Muchtar, 2004: 55), yaitu: (1) Filsafat dialektika, atau filsafat yang diambil dari ajaran Hegel, kemudian diubah menjadi dialektika materialisme, kemudian menjadi historis materialism; (2) Historis materialism, yaitu paham materialisme yang digunakan untuk memahami sejarah, dan di antara bagian yang penting adalah teori tentang nilai lebih (*surplus value*); (3) teori tentang negara dan revolusi, ajaran ini memberikan petunjuk tentang mengorganisir dan menggerakkan rakyat yang lapar, terhina dan tertindas disertai beberapa petunjuk aksi-aksi politik.

c. Ideologi Islam

Dalam ideologi Islam, Alquran dan Sunah sebagai sumber utama dari ideologi Islam, setiap muslim memungkinkan membuka ruang merumuskan ideologinya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Firdaus Syam, 2007:296). Mohamad Natsir menjelaskan orang

Islam itu mempunyai falsafah hidup, mempunyai ideologi, seperti juga orang fasis atau komunis mempunyai falsafah hidup dan ideologinya sendiri-sendiri (Firdaus Syam, 2007: 296).

Terdapat prinsip-prinsip ideologi Islam yaitu (Firdaus Syam, 2007: 296): (1) percaya hanya kepada satu Tuhan; (2) persatuan dan kesatuan; (3) musyawarah dan mufakat; (4) memegang persamaan dasar manusia; (5) etika dan tingkah laku didasarkan atas kerja sama; (6) memegang/ menegakkan keadilan (*keep justice*), (7) sistem ekonomi; (8) hukum Tuhan; (9) masyarakat yang penuh kasih sayang dan bukan sebaliknya yang penuh dengan kebencian; (10) menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; (11) kekuasaan itu bukan hukum, tetapi hukum adalah kekuasaan; (12) pemerintah dan yang diperintah mempunyai persamaan sedrajat; (13) pemerintah dengan persetujuan yang diperintah; (14) membangun kebudayaan.

Kenegaraan dalam Islam tidak sama dengan istilah teokrasi, seperti kaum gereja diabad pertengahan dengan memilih pemimpin mereka dari kalangan gereja kemudian berhak secara paksa memutih hitamkan rakyat atas nama Tuhan. Sistem kenegaraan Islam juga bukan seperti Sekulerisme yang memisahkan agama dengan kehidupan bernegara, tetapi politik kenegaraan Islam berdasarkan nilai-nilai Islam (Firdaus Syam, 2007: 302). Sistem politik yang dimaksud disini adalah suatu politik yang berdasarkan pada nilai-

nilai Islam atau syariat Islam. Menurut Yusuf Alqordhawy bahwa *siyasah syariah* merupakan politik yang dilandaskan kepada kaidah-kaidah syariat, hukum dan tuntunanNya (Firdaus Syam2007: 301). Abdul Ala Al Maududi mengemukakan bahwa sistem politik Islam didasarkan pada tiga prinsip yakni *Tauhid* (Ke Maha Esaan Tuhan), *Risalah* (Kerasulan Muhamad), dan *Khalifah* (Firdaus Syam2007: 3001).

Penjelasan dari ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut: *Tauhid* berarti hanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta, pemelihara, dan penguasa seluruh alam, kedaulatan hanya terletak kepadaNya. Dia yang berhak memberi perintah dan larangan, maka ketaatan terhadapNya adalah mutlak. *Risalah*, Rosulullah sesuai dengan maksud dari kitabullah, telah menegakkan bagi kita salah satu pola dari sistem hidup dalam Islam dengan melaksanakan hukum Islam itu, dan memberikan dalam praktik dengan detail secara rinci yang diperlukan. *Khalifah*, menurut kamus besar bahasa Arab berarti perwakilan (*representation*). sekaligus menjelaskan mengenai posisi tempat manusia dimuka bumi menurut ajaran Islam sebagai *khalifah* atau wakil dari Tuhan (Firdaus Syam, 2007:303).

Abu Ala Al Maududi, memandang landasan dasar dari suatu ideologi maupun dari sistem politik kenegaraan Islam dalam melakukan perubahan dibanding dengan yang lainnya diilustrasikan

sebagai berikut, jika revolusi Prancis berakar pada ajaran-ajaran pujangga tiga serangkai Rousseau, Voltare, Montesqui, revolusi Rusia berdasarkan ajaran Marx lenin Torstsky, gerakan nazi berdasarkan Hegel, Gothe dan Nitsche, maka revolusi Islam adalah berdasarkan kepada ajaran Tuhan (Alquran dan Sunah) yang berurat tunggang di dalam gerakan massa (*mass movement*) kaum muslim (Firdaus Syam, 2007: 303). Menurut Gibb, politik kenegaraan dalam Islam merupakan perpaduan antara kehendak Tuhan dengan suara rakyat yang dimusyawarahkan, atau dengan firman Tuhan (*fox die*), sabda nabi (*fox prophete*), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam Islam (Firdaus Syam, 2007: 303).

d. Ideologi Pancasila

Pancasila digali dari kondisi bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan (Pandji Setijo, 2009). Oleh karena itu sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia yang kemudian dilembagakan menjadi Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi nasional. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) didalam sidang BPUPKI disampaikan konsep tentang dasar Negara Indonesia oleh Mr Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Prof Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah melalui beberapa kali

sidang, pada tanggal 10 Juli 1954 BPUPKI mempunyai rumusan Pancasila dengan isi sebagai berikut: *Sila pertama*, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; *Sila kedua*, kemanusiaan yang adil dan beradap. Sila ketiga, persatuan Indonesia; *Sila keempat*, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; *Sila kelima*, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Pandji Setijo, 2009).

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang secara formal mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kapasitas awalnya Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, sementara sisi lainnya adalah pandangan dunia (Slamet Sutrisno, 2006: 66). Pancasila sebagai ideologi negara merupakan seperangkat gagasan vital yang menggambarkan sikap atau pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana secara formal harfiah, dirumuskan dalam bagian akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila memiliki arti sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, maupun keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara guna menjunjung tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Slamet Sutrisno, 2006: 66). Ideologi Pancasila mengajarkan kepada manusia untuk: (1) Beriman, dan

bertakawa kepada Tuhan YME karena hidup manusia tergantung juga padaNya; (2) menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, disamping kemanusiaan yang adil dan beradap; (3) persatuan; (4) demokrasi dan musyawarah, (5) keadilan sosial (Pandji Setijo, 2009). Sedangkan pandangan tentang Pancasila dari Notonogoro yang dikutip oleh Slamet Sutrisno dalam bukunya yang berjudul “ Filsafat dan Ideologi Pancasila” (2006):

Pancasila merupakan azas pandangan dua dunia, suatu azas pandangan hidup, buah hasil perenungan jiwa yang mendalam, buah hasil penelaahan cipta yang teratur dan seksama diatas basis pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas. Alam mula material Pancasila adalah adat, tradisi dan kebudayaan Indonesia, lima unsur yang tercantum dalam didalam Pancasila bukanlah hal-hal yang timbul baru pada pembentukan Negara Indonesia, akan tetapi sebelum dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat, bangsa Indonesia, yang ada hidup dalam jiwa masyarakat rakyat bangsa dan negara.

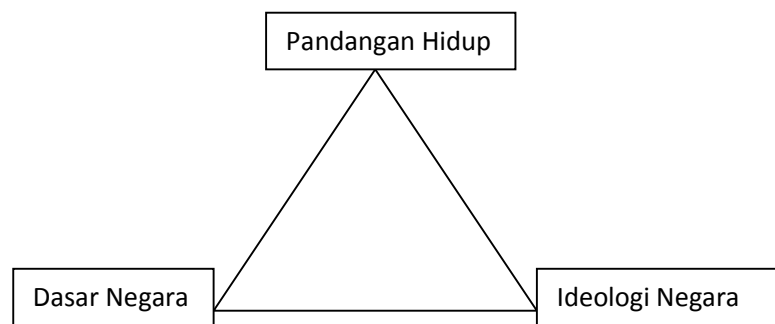
Pernyataan Notonogoro tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang disampaikan Yudi Latif (2011), yang menyatakan:

Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang (kemerdekaanya) Negara Indonesia, masyarakat nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, (sekitar) 14 abad pengaruh Hinduisme dan Budhaisme, (sekitar) 7 abad pengaruh Islam, dan sekitar 4 abad pengaruh agama Kristen.

Pancasila memiliki tiga kapasitas pokok (Slamet Sutrisno, 2006: 127) yaitu: (1) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berisi sistem nilai keIndonesiaan yang telah berkembang secara akulturatif selama ribuan tahun, (2) Pancasila sebagai dasar negara

asas kerohanian negara dimana kapasitas ini menjadi acuan disusunnya dasar negara dan dijabarkan kedalam berbagai peraturan perundangan, (3) Pancasila sebagai ideologi nasional, artinya segenap warga negara yang memiliki keniscayaan untuk menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Ketiga kapasitas pokok Pancasila tersebut dapat digambarkan:

Gambar 3. Triologi Pancasila.



Sumber: Slamet Sutrisno, 2006: 131

Menurut Idham Samawi (Kedaulatan Rakyat, 17/ 07/ 2010) ideologi Pancasila memiliki ciri-ciri: (1) mengakui, menghargai, memperkuat dan memelihara pluralism; (2) memanusiakan manusia dan memuliakan manusia; (3) mempersatukan, dan selalu punya kemampuan untuk menghindari perpecahan yang tidak perlu; (4) mengedepankan musyawarah bukan untuk menindas rakyat kecil, tetapi merupakan cermin dari tidak mudah lelah dalam menemukan solusi bersama, untuk kepentingan bersama; (5) berorientasi dan

selalu dipandu untuk bersifat dan menuju keadilan, lebih dari itu semua kepemimpinan Pancasila membentuk arah pada tata kehidupan baru yang lebih baik dan bermakna material dan spiritual.

12. Pemikiran-Pemikiran Yang Berkembang di Indonesia

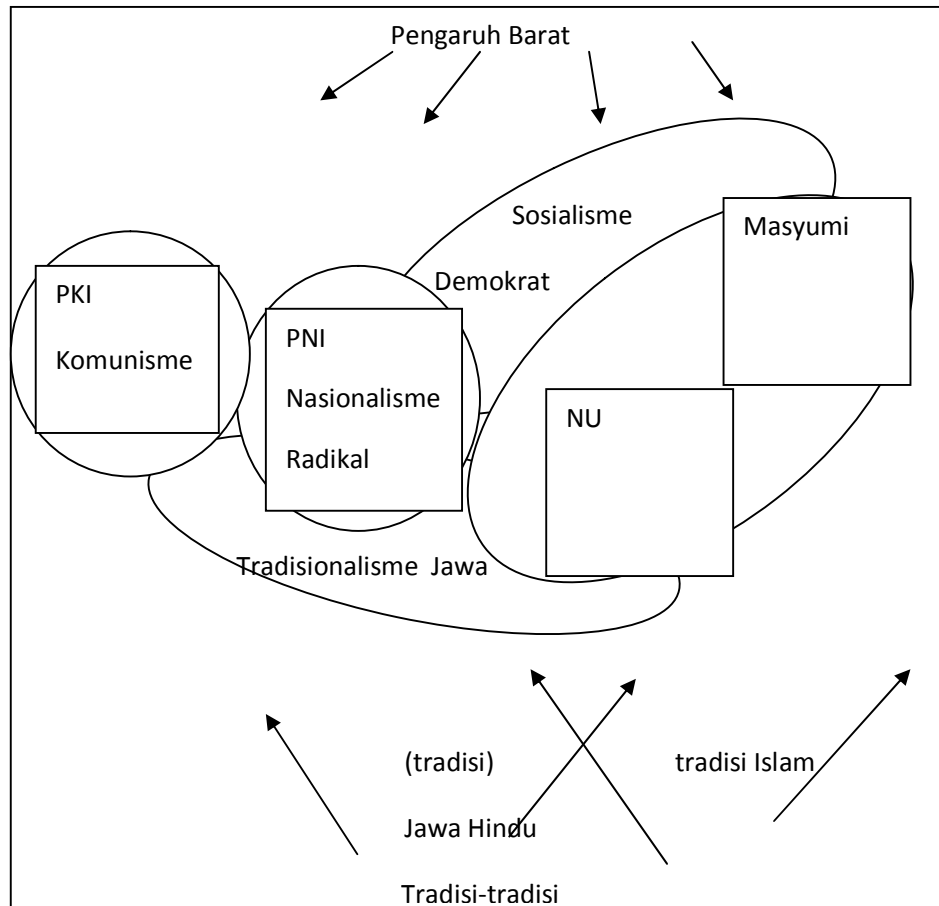
Perumusan Pancasila mengalami beberapa perubahan yaitu dihilangkannya kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” diganti dengan kata “Yang Maha Esa”. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik kepentingan dari paham, aliran, agama, ideologi yang telah berkembang di Indonesia sebelum negara ini merdeka. Sebelum kemerdekaan, masyarakat Indonesia telah hidup dengan berbagai pengaruh pemikiran. Sebagaimana pernyataan Yudi latif (2011: 57) “Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang (kemerdekaanya) negara Indonesia, masyarakat nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, (sekitar) 14 abad pengaruh Hinduisme dan Budhaisme, (sekitar) 7 abad pengaruh Islam, dan sekitar empat abad pengaruh agama Kristen”.

Pandapat tersebut diperkuat dengan sudah berkembang berbagai organisasi dengan paham atau asas yang berbeda antara satu dengan yang lain sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Organisasi-Organisasi itu adalah: Budi Utomo berdiri tanggal 20 Mei 1908, Serikat Dandang Islam tahun 1909 yang bersaskan Islam, Partai Komunis Indonesia yang muncul mulai tahun 1924 dengan ideologi Komunisme.

Muhammadiyah lahir tahun 1912 yang berasaskan Islam, *Indsche Party* lahir tahun 1915, *Indische Social Demokratische Partij* (1920), Partai Nasionalis Indonesia (PNI) lahir tahun 1927 yang bercorak keasas Nasionalis.

Macam-macam pemikiran yang ada sebelum kemerdekaan menurut Soekarno dapat dikelompokkan kedalam tiga rumpun ideologi utama yang menaungi seluruh organisasi politik Indonesia, yaitu Nasionalisme, Marxisme, dan Islam (Herbert Feith dan dan Lance Castles, 1988). Selanjutnya dibawah Demokrasi Terpimpin, klasifikasi ketiga golongan ideologi tersebut diberi status baru oleh Soekarno yang disebut dengan NASAKOM singkatan dari Nasionalis, Agama, Komunis (Herbert Feith dan Lance Castles, 1988). Menurut Herbert Feith (Herbert Feith dan Lance Castles, 1988), terdapat lima aliran dalam pemikiran politik yang berkembang di Indonesia. Lima pemikiran tersebut adalah: Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, Komunisme. Kelima pemikiran tampak pada ideologi yang dibawa oleh partai-partai politik pada pemilihan umum 1955. Peta aliran pemikiran politik Herbert Feith dapat dilihat pada gambar:

Gambar 4. Peta Aliran Pemikiran Politik



Sumber: Herbert Feith dan Lance Castles, 1988

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, namun tiga arus utama ideologi yang disebutkan oleh Soekarno (Islam, Nasionalisme, Marxisme) ditahun 1926 tetap bisa berkembang pasca kemerdekaan, ketiga ideologi tersebut saling berebut tempat untuk memberi warna dalam kehidupan bangsa Indonesia (Herbert Feith, 1970). Ideologi-ideologi tersebut mendapat status resmi oleh

Soekarno sebagai penggali Pancasila dengan dikeluarkannya kebijakan tentang Nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) (Herbert Feith, 1970). Menurut Alfian (Rusli Karim, 1983:67), menurutnya partai politik terbagi kedalam lima aliran pemikiran yaitu (1) aliran nasionalis: PNI, PRN, PIR Hazarin, Parindra, Partai Buruh, SKI, PIR Wongsonegoro, (2) partai Islam: Masyumi, NU, PSII, Peri, (3) aliran komunis: PKI, SOBSI, BTI, (4) aliran sosialis: PSI, GTI, (5) aliran Kristen/Nasrani: Partai Katolik, Parkindo.

Ideologi-ideologi yang ada, kemudian bertarung dipemilu melalui partai-partai yang mengusungnya. Diantaranya adalah pemilu pertama di Indonesia yaitu tahun 1955 dengan perolehan suara empat besar sebagai berikut: PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang berideologi Pancasila mendapatkan suara 22,3%, Partai Masyumi dengan mengusung Islam sebagai ideologi mendapat 20,9%, Partai NU dengan menjadikan Islam sebagai ideologi mendapat suara 18,4%, dan PKI yang beraliran komunis mendapat suara 16,4% (Herbert Feith, 1970). Sampai era reformasi ideologi-ideologi tersebut tetap mewarnai partai-partai yang ada di Indonesia, meskipun jarak ideologi tidak selebar dibanding ketika pasca kemerdekaan. Tetapi ideologi seperti Islam dan nasionalisme tetap hadir diusung oleh partai-partai di era reformasi sampai saat ini, kecuali ideologi komunis yang dilarang untuk berkembang di Indonesia semenjak orde baru lahir.

Seperti halnya pemilu 1955 dimana partai-partai politik mengusung ideologi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, begitu juga partai-partai yang mengikuti pemilu 2009 dengan mengusung ideologi yang berbeda-beda. Dengan lima besar pemenang pemilu 2009 sebagai berikut: Partai Demokrat (PD) mengusung ideologi nasionalis memperoleh 20,85% suara Partai Golongan Karya (P Golkar) dengan ideologi nasionalis memperoleh 14,45% suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung ideologi Nasionalis (*Marhaenisme*) memperoleh 14,03% suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Islam sebagai ideologi memperoleh 7,88% suara, serta Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung ideologi nasionalis memperoleh 6,01% suara. Dengan melihat perolehan pemilu 2009 dimana yang masuk menjadi lima besar suara adalah partai politik yang mengusung ideologi Islam dan Nasionalis, maka saat ini pertarungan pemikiran politik di Indonesia yang menonjol adalah antara Islam dan Nasionalis . Hal tersebut juga dinyatakan oleh Kevin R Evans (Andy Ramses dkk, 2009:160), bahwa ideologi partai politik di Indonesia terpisah antara “kiri” dan “kanan”. Kanan adalah partai-partai yang berlandaskan Islam, dan “kiri” adalah ideologi yang menolak adanya proses Islamisasi (sekuleris).

13. Hubungan Ideologi dan Partai Politik

Ideologi merupakan hal yang penting dari sebuah partai politik, karena ideologi merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah partai politik. Selain itu, partai politik juga merupakan identitas yang menjadi pembeda dengan partai-partai yang lain, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi partai yang ada melalui ideologinya (Firmanzah, 2008). Ketika suatu partai politik dengan ideologi tertentu memenangkan pemilihan umum mereka dapat menginstitutionalisasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ideologi partai tersebut dalam kebijakan-kebijakan publik. Untuk menginstitutionalisasi ideologi tersebut kedalam partai politik diperlukan beberapa tahapan antara lain sebagai berikut (Firmanzah, 2008:102):

a. *Proses Coercive*

Proses ini biasanya dilakukan melalui cara-cara yang bersifat memaksa melalui peraturan yang disertai *reward* dan *punishment*. Visi, misi, AD/ART tujuan partai, beserta program kerja merupakan manifestasi dari mekanisme ini. Strategi ini diterapkan biasanya pada anggota partai politik.

- b. Menciptakan Kondisi *Normative* (terdapat kondisi yang di impikan bersama)

Menciptakan kondisi normatif, misalnya komunikasi regular jargon politik, tablik akbar dan penciptaan komunitas-komunitas diskusi dapat digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan kondisi normatif.

- c. Strategi *Mimetic*

Strategi ini tepat diterapkan pada individu nonpengurus dan pendukung, harapannya dengan melihat hal-hal positif, yang dilakukan pengurus partai maka diharapkan akan menimbulkan kesan positif dari masyarakat luas sehingga pada akhirnya menghasilkan simpatisan baru.

Ideologi di dalam sebuah partai politik semestinya tampak dari unsur-unsur yang menyusun dari partai politik tersebut, yaitu (Firmanzah, 2008):

- a. Misi

Misi menjelaskan mengapa organisasi harus ada, menjelaskan mengapa suatu organisasi ada sekaligus juga dalam hal apa organisasi itu harus ada. Pernyataan misi partai ini juga memberikan gambaran tentang nilai dan paham yang dianutnya, serta memberikan landasan bagi perjuangannya.

b. Visi

Visi partai politik adalah pernyataan mengenai kondisi dan situasi masyarakat ideal yang ingin diciptakan oleh partai politik. Visi menjadi penting, karena masyarakat harus diberi gambaran dan kepastian tentang finalisasi perjuangan mereka.

c. Tujuan Antara

Tujuan jangka panjang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merealisasikannya. Hal ini mempengaruhi kondisi psikologis para anggota partai yang mendukung perjuangannya. Untuk mengurangi dampak ketidakpastian ini, partai politik perlu membangun tujuan antara, misalnya tujuan lima tahun. Tujuan jangka panjang harus diterjemahkan kedalam tujuan antara, sehingga memudahkan dalam mengukur alur pencapaian, harus diingat bahwa konsistensi antara tujuan jangka panjang dengan tujuan antara harus dipertahankan. Hal ini dilakukan ketika tujuan jangka panjang dipecah-pecah menjadi sejumlah tujuan antara yang lebih terukur dalam waktu yang relatif singkat. Cara ini juga dapat membantu dalam menilai apakah proses pencapaian sudah berada di jalur yang benar atau tidak, selain itu, tujuan antara dapat membantu untuk mengurangi efek penyimpangan proses pencapaian tujuan jangka panjang.

d. Strategi Partai Politik

Strategi partai politik merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, strategi yang disusun harus tetap dalam koridor ideologi partai politik. Jadi kita dapat menelusuri ideologi partai politik melalui strategi yang di gunakannya. Sebagai contoh adalah strategi partai politik dalam berkoalisi dengan partai lain, partai harus mempertimbangkan kesamaan ideologi dari partai yang akan diajak berkoalisi, bukan hanya mempertimbangkan tujuan pragmatis kekuasaan tanpa adanya pertimbangan ideologi.

e. Strategi Organisasi Partai Politik

Struktur organisasi partai politik berisikan beberapa hal: *pertama*, struktur organisasi mencerminkan divisionalisasi kerja dan aktivitas dalam tubuh partai politik bersangkutan; *kedua*, struktur organisasi partai politik menjelaskan bagaimana interaksi antar unit dan manusia terjadi didalamnya, *ketiga*, struktur organisasi juga bercerita tentang *job description*. Keterkaitan organisasi politik dengan ideologi tercermin dalam cara mengelompokkan tugas dan pekerjaan. Selain itu, tugas dan pekerjaan yang ada dalam struktur tersebut juga mencerminkan ideologi partai politik bersangkutan. Misalnya, kalau ideologi partai politiknya bersifat lebih religius, unit yang bersifat dakwah akan muncul dalam struktur organisasi. Sementara ketika ideologi partai bersifat kerakyatan,

unit yang mencoba menganalisis dan berkomunikasi dengan petani, nelayan, buruh, akan muncul menjadi unit yang penting.

f. Kebijakan Partai Politik

Kebijakan partai merupakan cara suatu partai politik didalam melihat, menganalisis dan mengajukan solusi atas permasalahan-permasalahan bangsa yang mencerminkan ideologi yang di anutnya. Ideologi partai tercermin dalam kebijakan-kebijakan suatu partai politik, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

g. Kolektivitas Ideologi Politik

Ideologi politik seharusnya dilihat secara menyeluruh serta menjadi identitas organisasi dan anggota partai secara keseluruhan. Untuk itu yang diperlukan pertama-tama adalah mengakumulasikan ide, gagasan, sistem nilai, dan kepentingan politik di level individu, menjadi ideologi organisasi, sebelum kemudian dikomunikasikan kemasyarakat luas.

h. *Platform* Partai Politik

Platform partai berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Platform partai berisikan acuan dasar bagi penyusunan hal-hal yang harus dilakukan seperti program kerja, dan isu politik. Selain itu platform partai berisikan hal-hal yang bersifat fundamental dan menjadi prioritas perjuangan partai.

i. Isu Politik

Isu politik merupakan topik dan bahasan yang mencerminkan isu-isu terkini yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

j. Kerangka Acuan *Problem Solving*

Selain pengungkapan isu politik, partai politik juga dituntut untuk memberikan program penyelesaian atas permasalahan sosial dan politik.

Kualitas partai politik akan ditentukan oleh kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Cara partai politik dalam membangun dan menyusun program pemecahan masalah-masalah sosial tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang mereka ikuti. Atau bisa diartikan ideologi memberikan petunjuk dan arah tentang cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang di hadapi oleh masyarakat.

14. Sosialisasi politik

a. Konsep Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik menurut Kennet P. Langson adalah bagaimana masyarakat dalam mentransmisikan budaya dari generasi kegenerasi yang lain (Cholisin, 2000). Menurut Dawson dan Prewitt, sosialisasi politik merupakan proses pengembangan lewat mana seseorang warga negara menjadi matang secara periodik (Cholisin, 2000). Dari kesimpulan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses transmisi orientasi politik budaya bangsanya (sistem

politik nasional) agar warga negara memiliki kematangan politik, sadar akan hak dan kewajibannya sesuai yang ditentukan dalam sistem politik nasional. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik terutama dilakukan melalui sekolah-sekolah merupakan bagian dari sosialisasi politik (Cholisin, 2000).

b. Macam-Macam Teori Sosialisasi Politik

Teori sosialisasi politik yang melihat pada level warganegara secara individual, dikenal dua teori sistem politik yaitu: teori sistem (*system theory*) dan teori hegemoni (*hegemonic theory*) (Cholisin, 2000).

1) Teori Sistem (*system theory*)

Menurut Easton, sosialisasi politik dianggap memainkan peranan utama dalam menjaga kestabilan politik, memungkinkan sistem politik yang sama berlaku terus menerus sehingga mencapai dan berada dalam suasana mapan dan mantap. Menurut Almond (1960) Sosialisasi politik memungkinkan terjadinya *System maintenance* (kemampuan sistem politik mempertahankan dirinya sendiri secara terus menerus). Atau menurut Easton dan Denis sebagai *System Persistence* (kemampuan bertahan secara terus menerus sambil mengalami perubahan-perubahan) (Cholisin, 2000).

2) Teori Hegemonik (*hegemonic theory*)

Menurut teori hegemonik, sosialisasi politik diarahkan dari kekuatan politik yang dominan kepada kekuatan politik yang didominasi, atau mentransmisikan ideologi politik dari kelompok yang dominan kepada kelompok politik yang didominasi dalam masyarakat (Cholisin, 2000).

Sedangkan teori sosialisasi politik dilihat dari aspek pola-pola belajar politik yang terkait dengan perkembangan sosial dan pribadi yaitu: teori psikodinamik, teori belajar sosial, dan teori perkembangan kognitif (Cholisin, 2000).

1) Teori Psikodinamik

Teori ini berasumsi bahwa kebutuhan dan pengalaman sewaktu anak-anak menentukan orientasi politik seseorang. Misalnya, seseorang yang melakukan aktivitas politik karena ia membutuhkan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain.

2) Teori Belajar Sosial

Teori ini kebalikan dari teori psikodinamik yang menitikberatkan pada faktor internal seseorang sebagai penentu orientasi politik. Sedangkan menurut teori ini yang menentukan orientasi politik seseorang adalah faktor dari eksternal. Teori belajar menekankan faktor eksternal yaitu penerimaan stimulus dan penguatan (*reinforcement*) dari lingkungan. Pesan-pesan yang diterima individu

dari lingkungan merupakan faktor krusial dalam menentukan pandangan yang akan diadopsi seseorang. Misalnya, anak memiliki pandangan politik yang positif terhadap polisi karena keluarga, sekolah menyatakan kerja polisi adalah menjaga manusia dari kejahatan.

3) Teori Perkembangan Kognitif

Teori ini berada diantara kedua teori psikodinamik dan teori belajar sosial. Yaitu menekankan pada interaksi dengan lingkungan dan kapasitas berfikir individu.

c. Tipe-tipe Sosialisai Politik

Terdapat dua tipe belajar politik atau sosialisasi politik (Cholisin, 2000) yaitu:

1) Belajar Politik Secara Langsung

Sosialisasi politik langsung adalah merupakan proses dimana isi yang ditransmisikan adalah orientasi politik secara eksplisit. Contohnya adalah orang yang belajar secara langsung tentang sistem pemerintahan, sistem politik. Beberapa tipe budaya politik langsung antara lain (Cholisin, 2000):

a) Meniru

Meniru adalah belajar politik dengan cara meniru, yang ditiru dapat berupa tingkah laku politik, keterampilan politik, harapan-harapan politik dan sikap-sikap politik. Contoh: anak-

anak menyukai partai politik tertentu karena meniru orangtuanya yang menjadi pengurus partai tersebut.

b) Sosialisasi Partisipatori

Sosialisasi partisipatori adalah metode belajar politik dengan cara menyiapkan diri untuk peranan politik yang diinginkan. Misalnya orang tua dan guru dapat mendefinisikan peranan warganegara yang baik, sehingga anak dapat mengantisipasi peran yang dituntut oleh sistem nasional.

c) Pendidikan Politik

Metode pendidikan politik dengan bersifat dialogis, terbuka, rasional, atau penyadaran. Di sekolah dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang arahnya adalah menumbuhkan *good citizenship* atau agar anak menjadi efektif bagi bangsanya. Pendidikan politik beda dengan indoktrinasi yang sifatnya monolog, tapi dengan cara dialog. Rezim otoriter lebih banyak menggunakan indoktrinasi politik dari pada pendidikan politik.

d) Pengalaman Politik

Metode belajar politik dengan pengalaman politik sering ditafsirkan dengan cara tumpang tindih dengan pendidikan politik. Pada pengalaman politik penekanannya adalah pada orang yang sedang belajar politik (disosialisasikan), sedangkan

pada pendidikan politik pada yang sedang mensosialisasikan. Pengalaman politik tidak mesti positif misalnya, pengalaman yang pahit melakukan kontak dengan pejabat terlibat dalam pembuatan keputusan yang otoriter dapat menyebabkan partisipan menjadi frustrasi, bermusuhan dan mengasingkan diri dari proses politik.

2) Belajar Politi Secara Tidak Lansung

Disebut dengan sosialisasi politik tidak langsung adalah bahwa orientasi yang kepada hal-hal non politik akan mempengaruhi orientasi politik tertentu. Contoh seorang individu yang tegas terhadap dirinya sendiri untuk memperoleh terhadap apa yang ia inginkan, akan menjadi warga negara yang tegas. Dalam sosialisasi politik tak langsung, terdapat beberapa tipe (Cholisin, 2000) meliputi:

a) Pengalihan Hubungan Pribadi

Tipe sosialisasi politik pengalihan hubungan pribadi yaitu pengalaman hubungan anak dengan orang tua, murid dengan guru akan dikembangkan dalam hubungannya dengan figur penguasa. Ada kecenderungan bersifat tetap bahwa hubungan dengan penguasa merupakan pengulangan dari apa yang telah dilakukannya pada pengalaman pertama kali dalam hidupnya. Contohnya jika hubungan antara anak dengan orangtuanya, jika

anak kooperatif dengan orangtuanya maka nantinya ia juga akan kooperatif dengan penguasa.

b) Magang

Aktivitas-aktivitas nonpolitik dipandang sebagai magang untuk aktivitas politik. Contohnya, aktif di organisasi sebagai pembelajaran sebelum aktif di politik.

c) Generalization

Menurut teori ini adalah kepercayaan dasar kepada pola-pola nilai budaya yang bersifat umum. Contohnya, adalah pandangan mengenai manusia memiliki hakekat sifat yang baik, maka mudah menimbulkan prasangka yang baik kepada penguasa, atau tokoh politik lain.

15. Pendidikan Politik

a. Pengertian Pendidikan Politik

Menurut Alfian (1981: 235), arti pendidikan politik dalam arti sempit adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun. M. Pangabean (Sinipar, 1984: 58), mendefinisikan pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Edgar Fore (Liman, 2000: 81), mendefinisikan pendidikan politik sebagai penyiapan generasi untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, seputar faktor yang mempengaruhi dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut. Ia berpendapat bahwa pendidikan politik bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik karakteristik manusia yang kenyang dengan jiwa demokrasi. Sedangkan menurut Good, pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik (Liman, 2000: 82).

b. Materi Pendidikan Politik

Cholisin (1992: 87) mengklasifikasikan pendidikan politik menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

1) Aspek Pengetahuan

Aspek pengetahuan berisi pengenalan terhadap sistem politik, serta konsep- konsep dan pemikiran umum lain dibidang politik.

2) Aspek Pemahaman

Aspek Pemahaman dimaksudkan berupa pemahaman terhadap maksud, tujuan, dan manfaat kebijakan politik serta pemahaman terhadap fungsi lembaga politik maupun infrastruktur politik.

3) Aspek Pembentukan Sikap Politik

Aspek pembentukan sikap politik seharusnya berupa pembentukan sikap menerima terhadap kebijakan-kebijakan politik dengan

argumentasi yang selaras dengan tuntutan-tuntutan nilai-nilai yang dianut serta kegunaannya bagi diri dan masyarakat.

4) Aspek Perilaku atau Partisipasi Politik

Aspek perilaku atau partisipasi politik dalam bidang politik ini tentunya adalah kewajiban berperan serta secara benar dalam kehidupan politik sesuai kesepakatan dalam bentuk aturan-aturan politik.

c. Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik, untuk itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan akhirnya seperti dalam sosialisasi politik. Gabriel A. Almond (Mohtar Mas'oeed dan Cholin Mac Andrews 1991: 35) mengemukakan tujuan sosialisasi politik sebagai berikut: (1) mewariskan budaya suatu negara; (2) membangun kebudayaan publik; (3) menciptakan kebudayaan politik yang baru sama sekali. Sedangkan menurut Cholisin (1995: 89) pendidikan politik bertujuan: (1) mengenalkan berbagai kebijakan politik dan lembaga-lembaga politik; (2) memberi pemahaman secara baik tentang maksud, tujuan, dan manfaat kebijakan politik baik tataran infrastruktur dan supra struktur; (3) membentuk sikap-sikap politik khususnya sikap menerima terhadap berbagai kebijakan politik; (4) mengarahkan perilaku/ partisipasi politik warga negara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sementara Liman (2000) mengemukakan

tujuan pendidikan politik sebagai berikut: (1) kepribadian politik, (2) kesadaran politik, (3) partisipasi Politik.

d. Lembaga-lembaga Pendidikan Politik

Menurut Liman 2000: 106-110) lembaga- lembaga pendidikan politik terdiri dari:

- 1) Keluarga
- 2) Sekolah
- 3) Partai Politik dan *Pressure group*
- 4) Media Informasi dan Komunikasi Politik

16. Budaya Politik

a. Pengertian Budaya Politik

Menurut Yahya Muhaimin (Suharno, 2004), konsep budaya politik pada hakikatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Menurut Almond dan Verba (1990), mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara didalamnya. Sedangkan Firmanzah (2008), mengartikan budaya organisasi adalah semua sistem nilai, kepercayaan dan kerangka berpikir yang tercermin didalam bentuk-bentuk perilaku dan sikap manusia, kebiasaan-kebiasaan, serta secara formal organisasi. Ideologi politik diterjemahkan kedalam budaya organisasi politik.

Dikatakan Almond dan Verba (1990), di dalam objek yang berfokus pada sistem politik terdapat tiga komponen yang saling menunjang yaitu:

1) Komponen Kognitif

Komponen kognitif adalah pengetahuan dan sikap kepercayaan pada politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang diambil, atau simbol-simbol yang dimiliki dalam sistem politiknya, peranan dan segala kewajibannya, secara input dan output.

2) Komponen Afektif

Komponen afektif adalah perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik.

3) Komponen Evaluatif

Komponen evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik secara tipikal (khas) melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan yang memang telah dipunyai seseorang.

b. Tipe-tipe Budaya Politik

Menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba (1990), ada tiga tipe utama budaya-budaya politik:

1) Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial memiliki ciri-ciri tidak adanya peran-peran politik yang bersifat khusus, orientasi parokial juga memperlihatkan ketiadaan harapan terhadap perubahan-perubahan yang berarti yang di inisiatifkan oleh sistem politik.

2) Budaya Politik Subjek

Budaya politik subjek memiliki ciri-ciri: anggota masyarakat yang memiliki budaya subjek menyadari adanya otoritas pemerintahan (sistem politik), mereka secara efektif diarahkan terhadap otoritas tersebut. Hubungan para subjek dengan sistem secara umum dan terhadap *out put*, administratif atau *downward flow* nya alur pelaksanaan kebijakan dari sistem politik itu secara esensial merupakan hubungan yang pasif, walaupun mereka memiliki bentuk kompetensi (kemampuan) secara terbatas.

3) Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah satu bentuk budaya yang anggota-anggota masyarakatnya cenderung memiliki orientasi yang nyata terhadap sistem secara keseluruhan, struktur dan proses politik serta administratif.

17. Kerangka berfikir

Menurut Mark N Hagopian, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan (Ichlasul, 1996: XV). Sedangkan menurut Riant Nugroho (2009), kebijakan publik sebagai ujung ideologi merupakan falsafah atau pedoman didalam membuat sebuah keputusan politik atau kebijakan publik sebuah partai politik. Ideologi dengan kebijakan publik merupakan sesuatu yang berhubungan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah merupakan aktor kebijakan publik, oleh sebab itu banyak produk-produk kebijakan yang dihasilkan oleh kedua aktor tersebut. Orang-orang yang berada di DPR dan pejabat-pejabat politik dipemerintah sebagian besar merangkap sebagai anggota-anggota partai politik. Mereka merupakan wakil dari partai-partai politik yang ditempatkan diranah eksekutif dan legislatif.

Partai-partai politik mengusung ideologi-ideologi yang berbeda, ada yang mengusung ideologi bercorak Islam, Nasionalis, Sosialisme, Liberalisme dimana antara ideologi-ideologi tersebut terdapat perbedaan. Partai politik mestinya memperjuangkan ideologi partainya untuk bisa di elaborasikan menjadi sebuah kebijakan publik yang dihasilkan melalui wakilnya di Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu anggota partai politik yang berada di eksekutif dan legislatif harus

memperjuangkan kepentingan partai tersebut, sehingga produk-produk kebijakan sesuai dengan ideologi partai. Oleh karenanya wakil-wakil partai yang ada di DPR dan Pemerintahan seharusnya paham dan memiliki karakter sesuai dengan ideologi yang diusung partai. Maka pembinaan terhadap kader partai politik untuk ditempatkan di Dewan perwakilan Rakyat (DPR) atau Pemerintah merupakan sesuatu yang mesti dilakukan secara baik agar menghasilkan *output* kader yang berkualitas, sehingga mampu memperjuangkan ideologi partai secara maksimal.

Tetapi saat ini partai-partai politik diduga cenderung berperilaku tidak diorientasikan karena ideologi. Munculnya dugaan tersebut ketika melihat perilaku anggota partai politik yang terjerat kasus-kasus hukum, seperti halnya adanya anggota Dewan perwakilan Rakyat DPR yang merupakan wakil partai terjerat kasus korupsi, perbuatan asusila yang diperbuat oleh anggota dewan perwakilan rakyat, rekrutmen calon pejabat-pejabat publik dilakukan secara asal-salan atau jalan pintas, kader-kader partai politik cenderung kurang memahami ideologi partainya. Hal ini mencerminkan bahwa partai politik cenderung berorientasi *pragmatis* (kekuasaan), bergerak tanpa didasari orientasi ideologi. Padahal ideologi penting sebagai pedoman bagi partai politik.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih mendalam sejauh mana partai politik konsisten dalam menjadikan ideologi sebagai orientasi, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Konsistensi Partai Politik di

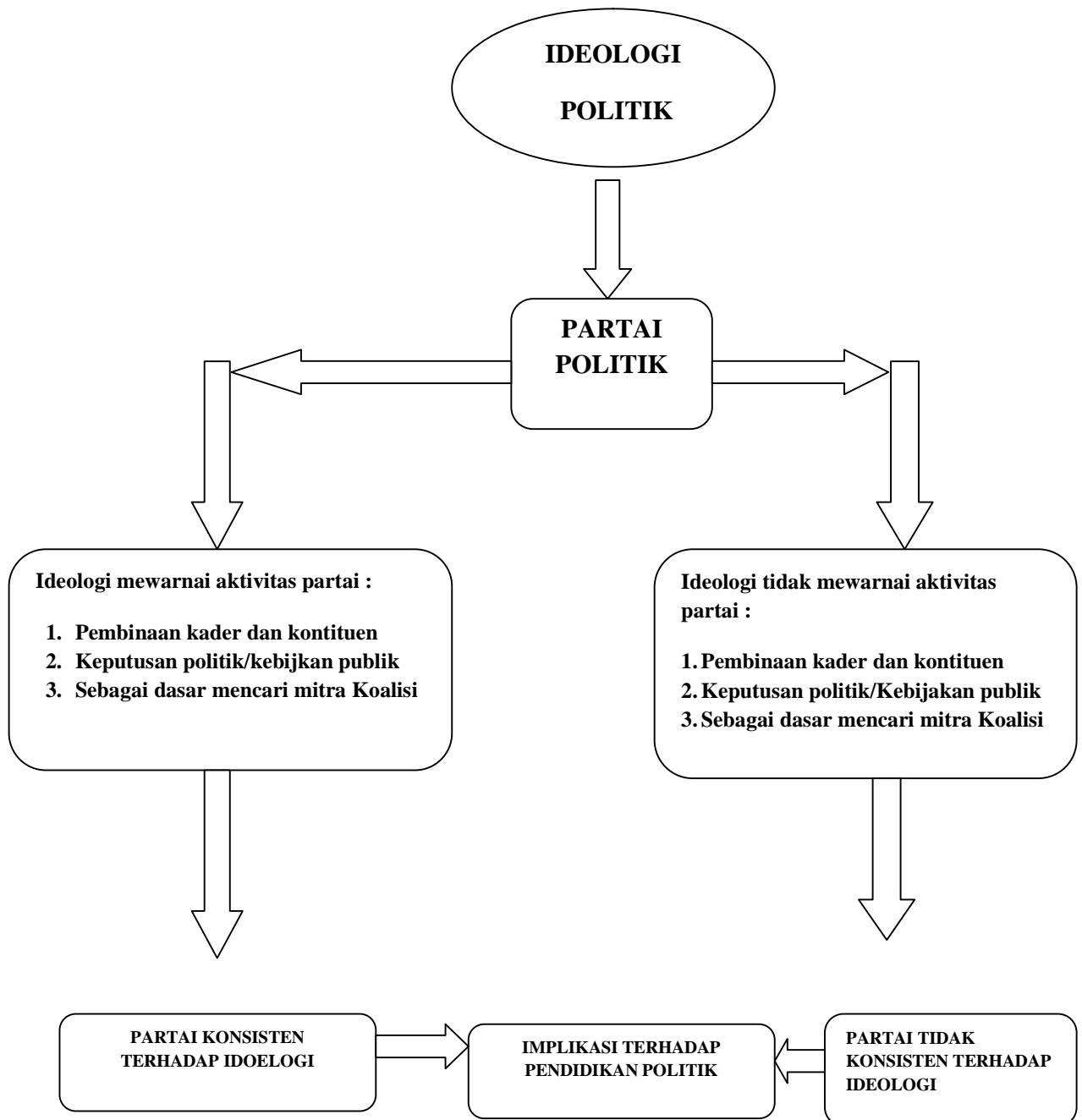
Indonesia dalam Menjadikan Ideologi Politik Sebagai Orientasi, Studi Terhadap Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN)” dari tahun 1999 sampai penelitian ini dilaksanakan.

Peneliti akan menganalisa beberapa aspek yang nantinya akan di gunakan sebagai tolok ukur apakah partai politik tersebut konsisten didalam menjadikan ideologi sebagai orientasi. Setidaknya ada tiga aspek yang akan dianalis oleh peneliti. Aspek yang *pertama* yaitu terkait sosialisasi atau internalisasi ideologi partai kepada para kader, artinya apakah partai politik mempunyai program-program yang sifatnya adalah ideologisasi. *Kedua* adalah mengenai partai politik didalam memilih mitra koalisi, artinya apakah partai politik menggunakan pertimbangan ideologi didalam mencari mitra koalisi. Aspek ketiga adalah menganalis produk kebijakan publik yang sudah dihasilkan partai politik melalui wakilnya di legislatif maupun eksekutif. Artinya apakah ideologi partai mewarnai kebijakan publik yang dihasilkan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisa kebijakan publik yang berbentuk undang-undang. Tetapi tidak semua produk undang-undang akan di analisis, melainkan akan dilakukan dengan sampel yaitu mengambil contoh beberapa undang-undang yang sekiranya memiliki dampak besar bagi masyarakat atau konstituen partai. Dalam penelitian ini undang-undang yang akan dikaji adalah undang-undang tentang Sikdiknas (UU No

12 Tahun 2003). Selanjutnya akan dikaji juga terkait pergeseran ideologi kepartaian di Indonesia dilihat dari Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN). Selain itu, peneliti juga akan mengkaji mengenai implikasi masalah tersebut terhadap pengembangan pendidikan politik masyarakat.

Adapun Kerangka Berfikir (*conceptual framework*) yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 5. Kerangka Berfikir:



BAB III METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul “Konsistensi Partai Politik di Indonesia Dalam Menjadikan Ideologi Sebagai Orientasi (Studi Terhadap Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, PDIP, PKS. PAN)” menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan naturalistik. Menurut Sugiyono (2009), penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya) pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi implementasi dan analisis data.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Naturalistik. Karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (objek alamiah). Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisi saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan setelah keluar objek relatif tidak berubah (Sugiyono, 2009: 2).

Peneliti juga menggunakan referensi data hasil penelitian yang mendukung, yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga survei maupun lembaga lainnya untuk dijadikan referensi oleh peneliti. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian ini, peneliti juga banyak mencari data ataupun

hasil analisis yang dilakukan oleh para pengamat maupun ahli-ahli politik yang relevan dengan apa yang diteliti. Dari data-data yang diperoleh itulah, maka peneliti menganalisis dan menelaah secara objektif dan kritis, lalu mendeskripsikannya.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sehatara (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) yang beralamat di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Waktu Penelitian dilaksanakan pada tanggal 7 April 2011 sampai tanggal 7 Juli 2011.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian menurut Sanapiah Faisal (2001:109), adalah menunjuk pada orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran dan informasi mengenai konsistensi partai politik di Indonesia dalam manjadikan ideologi, maka peneliti memilih dan menentukan subyek penelitian dengan menggunakan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan subyek penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Lexy J. Moleong, 2002:165).

Adapun kriteria atau pertimbangan yang digunakan peneliti adalah pengurus-pengurus partai dan pengamat politik yang karena posisinya atau kedudukannya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai informasi yang diperlukan peneliti. Berdasarkan kriteria tersebut maka yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Idham Samawi (Ketua Departemen Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
2. Bapak Widi Pratomo (Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta).
3. Bapak Darul Falah (Anggota Majelis Syuro Pusat Partai Keadilan Sejahtera).
4. Bapak Agus Purnomo (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).
5. Bapak Khudori (Ketua Departemen Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta).
6. Bapak John Serang Keban (Ketua Bidang Pembinaan Kader DPD Partai Golkar Yogyakarta).
7. Bapak Paryanto Rohma (Wakil Ketua Bidang Pengkaderan Partai Amanat Nasional).
8. Bapak Ali Muhti (Wakil Ketua bidang Kebijakan Publik Partai Amanat Nasional).

9. Bapak Sutan (Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Yogyakarta).
10. Bapak Pongki (Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat).
11. Bapak Kuskrido Ambardi, P.Hd. (Dosen Ilmu Komunikasi Politik Universitas Gajah Mada (UGM). Pengamat Politik dan Penulis Buku Mengungkap Politik Kartel).
12. Bapak Dr. Ari Dwipayana (Dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (FISIPOL UGM). Pengamat Politik).

d. **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan atau Studi Literatur

Studi kepustakaan atau studi literatur adalah suatu upaya untuk memperoleh data dengan mempelajari berbagai sumber pustaka atau literatur yang dapat diandalkan guna mendukung kelengkapan tulisan. Menurut Sugiyono (2009) menyatakan bahwa kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan mempelajari teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli, arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Studi Analisis Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpulkan dan meluruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut (Winarno, 1980:143). Sedangkan Dokumen menurut Guba dan Lincoln (Lexy J. Moleong 2006:216) adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau mengajukan akunting.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen Pribadi meliputi catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Sedangkan dokumen resmi menurut Lexy J. Moleong (2000:163), terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, aturan suatu lembaga tertentu yang digunakan yang digunakan dalam kalangan sendiri termasuk didalamnya risalah, keputusan pimpinan kantor dan lain sebagainya. Dokumen internal dan menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. Dokumen eksternal adalah berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial misalnya majalah, buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan melalui media massa. Dokumen

eksternal dapat digunakan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian meliputi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Peneliti akan mempelajari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berhubungan dengan AD ART, platform, program kerja terkait dengan ideologisasi, kebijakan publik, koalisi, rekrutmen pejabat publik Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sehatara (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN).

3. Wawancara

Salah satu yang menjadi ciri dari penelitian kualitatif adalah sipeneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data. Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancari (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu). Untuk memfokuskan tema yang akan diwawancarakan biasanya menggunakan petunjuk umum wawancara yang disebut pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat untuk memudahkan peneliti agar tetap fokus pada permasalahan yang diteliti (Muslim, 2002: 51). Responden adalah mereka yang yang terpilih oleh peneliti, biasanya mereka dipandang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, serta mereka yang lebih mengetahui informasi

yang diperlukan (Lexy J.Moleong, 2005:91). Alat bantu yang digunakan pada saat interview adalah alat tulis dan tape recorder dan alat bantu lainnya yang bisa membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

Dalam penelitian ini, metode wawancara ini peneliti menggunakan tehnik wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan di ajukan kepada interviewer (yang diwawancarai), sedangkan dilapangan permasalahan bisa dikembangkan sesuai tujuan penelitian. Pedoman wawancara dalam penelitian ini dibuat dengan menguraikan setiap indikator-indikator pada rumusan masalah yang akan diteliti dan berkembang sesuai penemuan-penemuan lain yang ditemukan dilapangan.

e. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu pada penelitian menggunakan metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Guba (Noeng Muhajir 2000:148) menghendaki manusia sebagai sumber pengumpul data atau kemampuan menyesuaikan data dengan berbagai realitas yang tidak dapat dikerjakan oleh instrumen lain. Hal ini juga dikemukakan Lexy J.Moleong (2006:163) bahwa peranan manusia sebagai alat atau instrumen sangat besar dalam penelitian kualitatif. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti

menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan informasi guna menunjang tercapainya tujuan penelitian.

f. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkup, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Pada tahap reduksi data peneliti menyajikan data kedalam laporan secara sistemik, dengan menitik beratkan pada data yang mengarah pada pemecahan masalah dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Data yang disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi berupa informasi mengenai Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sehatara (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dalam melakukan koalisi, rekrutmen pejabat publik dan pembuatan kebijakan publik sejak tahun 1999 sampai sekarang.

2. Unitisasi Katagorisasi

Data yang sederhana dan dipilih kemudian disusun secara sistematis kedalam suatu unit dengan sifatnya masing-masing data menonjolkan hal-hal yang penting seputar perilaku Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sehatara (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dalam melakukan koalisi, rekrutmen pejabat publik dan pembuatan kebijakan publik sejak tahun 1999 sampai sekarang, serta implikasi bagi pendidikan politik.

Unit-unit data yang telah terkumpul dipilah-pilah kembali dan dikelompokan sesuai dengan kategorisasi yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terkait sejauh mana Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sehatara (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) konsisten terhadap ideologi.

3. Display Data

Display data adalah penyajian data kedalam sejumlah matriks yang sesuai. Data hasil dari dokumen yang telah dikategorisasikan kemudian disajikan kedalam bentuk narasi konstruksi. Data dalam bentuk narasi konstruktif ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan data secara sistematis untuk kemudian dianalisa untuk mengambil kesimpulan.

g. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah tringulasi. Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. (Sugiyono, 2009). Trangulasi yang dipakai dalam dalam penelitian ini adalah tekhnik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tentang Partai Politik

1. Diskripsi Tentang Partai Demokrat (PD)

a. Sejarah Partai Demokrat (PD)

Lahirnya Partai Demokrat (PD) merupakan inisiatif dari Susilo Bambang Yudhoyono. Inisiatif ini lahir diinspirasi atau diilhami oleh kekalahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilihan calon wakil presiden dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001. Melihat dari perolehan suara dalam pemilihan calon wakil presiden tersebut beserta hasil *pooling public* yang menunjukkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok Susilo Bambang Yudhoyono bisa dibawa menjadi pemimpin bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi wakil presiden republik Indonesia, tetapi menjadi Presiden Republik Indonesia untuk masa mendatang (<http://www.demokrat.or.id/sejarah> pada 10 Oktober 2011).

Hasilnya adalah beberapa orang yang diantaranya adalah Vence Rumangkang memberikan dukungan untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden Indonesia. Supaya cita-cita tersebut bisa terealisasi maka jalan yang akan digunakan adalah dengan mendirikan partai politik. Selanjutnya, dimulailah perumusan

konsep dasar dan *platform* partai sebagaimana yang di inginkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Perumusan dikerjakan oleh Tim Krisna Bambu Apus. Sedangkan untuk teknis administrasi diselesaikan tim yang dipimpin Vence Rumangkang (<http://www.demokrat.or.id/sejarah> pada 10 Oktober 2011).

Terdapat juga diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri partai politik untuk mempromosikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden. Diskusi-diskusi tersebut terjadi antara lain: pada tanggal 12 Agustus 2001 pulul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertempat di apartemen Hilton, rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara maraton setiap hari. Tim itu terdiri dari: (a). Vence Rumangkang, (b). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (c). Achmad Kurnia, (d). Adhiyaksa Daut, SH, (e).Baharuddin Tonti, (f). Shirato Syafei (<http://www.demokrat.or.id/sejarah> pada 10 Oktober 2011).

Sedangkan di lingkungan kantor Menkopolkam juga diadakan diskusi untuk pendirian sebuah partai politik untuk dijadikan kendaraan politik bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diskusi dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Dilanjutkan pada tanggal 29 Agustus 2001 yang dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudoyono (SBY), pertemuan ini merupakan cikal bakal pendirian Partai Demokrat (PD). Dalam pertemuan tersebut, Vence Rumingkang menyatakan bahwa

rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada Susilo Bambang Yudoyono (SBY) (<http://www.demokrat.or.id/sejarah> pada 10 Oktober 2011).

Pada tanggal 20 Agustus 2001, Vence Rumingkang yang dibantu oleh Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Terbentuklah Tim Sembilan yang beranggotakan sepuluh orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik, kesepuluh orang tersebut adalah: (1) Vence Rumangkang, (2) Dr. Ahmad Mubarak, MA, (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum), (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso, (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung, (6) RMH. Heroe Syswanto Ns, (7) Prof. Dr. RF. Saragih, SH., MH, (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping kesepuluh nama tersebut, terdapat beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. pada finalisasi konsep partai dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (<http://www.demokrat.or.id/sejarah> pada 10 Oktober 2011).

Supaya partai politik dapat disahkan oleh undang-undang kepartaian diperlukan paling sedikit lima puluh orang sebagai pendiri, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya lima puluh orang saja dilengkapi menjadi sembilan puluh sembilan orang. Angka sembilan puluh sembilan dipakai agar ada sambungan makna dengan Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai penggagas. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada tanggal sembilan bulan sembilan. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang (<http://www.demokrat.or.id/sejarah> pada 10 Oktober 2011).

Kepengurusan disusun dan disepakati bahwa kriteria calon ketua umum adalah putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam. Sedangkan calon sekretaris jendral adalah dari luar Jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal, sementara Bendahara Umum dijabat oleh Vence Rumangkang. Pada malam harinya pukul 20.30 WIB. Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan partai kepada Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke-52. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (DepKeHam) pada

esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001 (<http://www.demokrat.or.id/sejarah> pada 10 Oktober 2011).

Pada tanggal 10 September 2001 pukul 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (DepKeHam) Republik Indonesia oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (DepKeHam). Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU 06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (DepKeHam) Republik Indonesia mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor: 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) yang pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (DepKeHam) Republik Indonesia sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum kongres partai ini (<http://www.demokrat.or.id/sejarah> pada 10 Oktober 2011)

b. Ideologi, Visi dan Misi Partai Demokrat (PD)

Partai Demokrat berasaskan Pancasila dan Ideologi Partai Demokrat adalah Nasionalis-Religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat (AD ART Partai Demokrat tahun 2010).

Visi dari Partai Demokrat (PD) yaitu mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme, dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan Sejahtera. Dari visi tersebut Partai Demokrat (PD) menurunkannya menjadi tiga misi besar untuk mencapai visi. Tiga misi Partai Demokrat (AD ART Partai Demokrat Tahun 2010): *Pertama*, Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan didalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan. *Kedua*, Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi. *Ketiga*, Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, otonomi

daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan (AD ART Partai Demokrat tahun 2010).

2. Diskripsi Tentang Partai Golongan Karya (P. Golkar)

a. Sejarah Partai Golongan Karya (P Golkar)

Sejarah Partai Golongan Karya (P. Golkar) bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya sekretariat bersama golongan karya (sekber Golkar). Sekretariat bersama Golongan Karya (sekber Golkar) didirikan oleh golongan militer khususnya perwira angkatan darat dengan cara menghimpun puluhan organisasi pemuda, sarjana, buruh, tani, dan nelayan selanjutnya anggota terus berkembang mencapai 220 organisasi. Sekretariat bersama Golongan Karya (sekber Golkar) didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Didirikan karena adanya rongrongan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi masyarakatnya (ormas) dalam kehidupan politik di Indonesia. Sekretariat bersama Golongan Karya (sekber Golkar) merupakan wadah pengaruh politik tertentu (<http://www.golkar.or.id/tentang/sejarah> pada 10 Oktober 2011).

Ketua pertama sekretariat gabungan Golongan Karya (sekber Golkar) yaitu Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I pada bulan Desember 1965. Pada saat didirikan

golkar beranggotakan 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam sekretariat gabungan Golongan Karya (sekber Golkar) kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaanannya kedalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO) (<http://www.golkar.or.id/tentang/sejarah> pada 10 Oktober 2011):

- 1) Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
- 2) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
- 3) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- 4) Organisasi Profesi
- 5) Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
- 6) Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
- 7) Gerakan Pembangunan.

Dalam perkembangan selanjutnya Sekber Golongan Karya (sekber Golkar) berubah menjadi Golongan Karya (Golkar), dan menjadi salah satu organisasi peserta pemilu. Ketika pemilu pertama dimasa Orde Baru dilaksanakan, yaitu pemilu tahun 1971, Golongan Karya (Golkar) menjadi pemenang. Dan kemenangan Golongan Karya (Golkar) berlanjut pada pemilu-pemilu selanjutnya, yaitu pada pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Data hasil perolehan pemilu partai Golongan Karya (Golkar) dari tahun 1971-2009 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 14. Daftar Perolehan Suara P. Golkar dari Pemilu tahun 1971-2009.

Pemilu	Jumlah Suara	Prosentase	Kursi	Peringkat
1971	34.348.673	62,82%	236	1
1977	39.750.096	62,11%	232	1
1982	48.334.724	64,34%	242	1
1987	62.783.680	73,16%	299	1
1992	66.599.331	68,105%	282	1
1997	84.187.907	74,51%	325	1
1999	23.741.758	22,44%	120	2
2004	24.480.757	21,58%	108	1
2009	15.037.757	14,455	107	2

Sumber : <http://www.golkar.or.id/pages-tentang/18/hasil-pemilu> pada 10 Oktober 2011.

Golongan Karya (Golkar) menyatakan diri bukan partai politik. Pada bulan September tahun 1973, Golongan Karya (Golkar) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Pada Musyawarah Nasional tersebut, Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Selanjutnya konsolidasi Golongan Karya (Golkar) mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Pada tahun 1998 terjadi demonstrasi besar yang menuntut Presiden Soeharto mundur. Dan pada bulan Mei 1998 Presiden Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini

berdampak pada Golongan Karya (Golkar). Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golongan Karya (Golkar) juga dituntut untuk dibubarkan. Namun tuntutan untuk membubarkan Golongan Karya (Golkar) tidak terpenuhi sampai sekarang. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum golongan karya (Golkar) pada masa ini kemudian dapat mempertahankan eksistensi partai. Di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, Golongan Karya (Golkar) berubah wujud menjadi Partai politik. Dengan mengusung citra sebagai Golongan Karya (Golkar) baru (<http://www.golkar.or.id/tentang/sejarah> pada 10 Oktober 2011).

b. Ideologi Partai Golongan Karya (Golkar)

Ideologi yang di perjuangkan partai Golongan Karya (Golkar) adalah Ideologi Pancasila dan doktrin kekaryaan (AD ART Partai Golkar tahun 2010).

c. Platform / Visi dan Misi Partai Golongan Karya (Golkar)

Visi dan misi partai Golongan Karya (Golkar) dikenal dengan Paradigma Baru Partai Golkar, yang diputuskan dalam Keputusan Rapim IV Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2000 Nomor: I/RAPIM-IV/GOLKAR/2000, yang masih berlaku sampai sekarang. Dari keputusan tersebut Partai Golongan Karya (P Golkar) menetapkan pijakan penting bagi arah perjuangan partai Golongan Karya (P Golkar). Poin-poin pentingnya berupa ideologi partai, visi dan misi partai,

platform dan pokok-pokok perjuangan dari Partai Golongan Karya (P Golkar) dirumuskan disana. Penjelasan mengenai poin penting dalam Keputusan Rapim IV Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2000 Nomor: I/RAPIM-IV/GOLKAR/2000 tersebut adalah sebagai berikut (<http://www.golkar.or.id/tentang/sejarah> pada 10 Oktober 2011):

Mengenai ideologi yang akan diperjuangkan, partai Golongan Karya (Golkar) mengusung Ideologi Pancasila dan doktrin kekaryaan. Sedangkan untuk Visi perjuangan adalah Partai Golongan Karya (Golkar) memiliki visi mewujudkan Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi. Dengan visi tersebut maka Partai Golongan Karya (Golkar) berharap akan terbangun kehidupan politik nasional yang demokratis. Visi dibidang ekonomi adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya sistem perekonomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Dengan visi ekonomi kerakyatan, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Partai Golongan Karya (Golkar) menginginkan dimasa depan usaha kecil, menengah dan koperasi menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang sebenarnya. Tanpa upaya-upaya pemberdayaan rakyat, maka tujuan menciptakan masyarakat madani akan semakin jauh dari gapaian. Untuk itu sejalan dan searah dengan visi menciptakan kesejahteraan rakyat, perhatian terhadap upaya penguatan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi prioritas yang paling diutamakan bagi partai ini. Visi dibidang sosial budaya adalah mecita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu, maka partai Golongan Karya (Golkar) perlu mengembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi

berkembangannya budaya ilmu (etos intelektualisme), budaya kerja (etos kerja), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius dikalangan masyarakat. Partai Golongan Karya (Golkar) hendak mengembangkan pola hubungan sosial yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap masyarakat, dan diganti dengan pandangan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antar warga Negara.

Untuk mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional disegala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golongan Karya (P. Golkar) melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern yaitu: *Pertama*, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. *Kedua*, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (*merit system*) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik.

Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. *Ketiga*, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat (<http://www.golkar.or.id/pages-tentang/15/ad-art/> pada 10 Oktober 2011).

Sedangkan platform yang dijadikan pijakan partai Golongan Karya, yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari pijakan ini maka Partai Golongan Karya (Golkar) bewawasan kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang mengatasi golongan dan kelompok baik golongan atau kelompok atas dasar agama, suku, etnis, maupun budaya. Kemajemukan atau pluralisme tidak dipandang sebagai kelemahan atau beban, melainkan justru sebagai potensi atau kekuatan yang harus dihimpun secara sinergis dan dikembangkannya sehingga menjadi kekuatan nasional yang kuat dan besar. Partai Golongan Karya (Golkar) terbuka bagi semua golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan tersebut diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan

anggota maupun dalam rekrutmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi-posisi politik. Partai Golongan Karya (Golkar) mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif untuk mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan serta senantiasa siap berkompetisi secara sehat. Perwujudan dari wawasan kebangsaan Partai Golongan Karya yang paripurna adalah sikap keterbukaan dan kemajemukan (AD ART Partai Golkar tahun 2010).

3. Gambaran Umum Tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

a. Sejarah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP)

Latar belakang lahirnya Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dihubungkan dengan adanya peristiwa 27 juli 1996. Dampak dari peristiwa ini adalah munculnya Megawati Soekarno Putri dikancah perpolitikan nasional. Meskipun Megawati Soekarno tercatat sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesai (PDI) dan sekaligus sebagai anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun setelah peristiwa 27 Juli 1996 namanya mulai dikenal di seluruh Indonesia (http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=98 pada 10 Oktober 2011)

Dengan dibukanya kehidupan kepartaian oleh Presiden Habibie, dan untuk menyongsong pemilu 1999 maka Megawati Soekarno Putri

mendirikan sebuah partai yang diberi nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 1999 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluar sebagai pemenang, dengan memperoleh suara (33,74%), dan 151 kursi di parlemen. Tetapi kemenangan tersebut tidak serta merta mengantarkan ketua umumnya menjadi Presiden. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) gagal membawa Megawati Soekarno Putri menjadi presiden dan hanya mampu membawa ke kursi wakil presiden (http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=98 pada 10 Oktober 2011).

Dalam pemilu legislatif tahun 2004, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun ke peringkat kedua, dengan (18,31% suara) atau 109 kursi. Pada pemilu presiden tahun 2004, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mencalonkan ketua umumnya Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden, berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden, namun belum juga mampu meraih kemenangan (http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=98 pada 10 Oktober 2011).

Dalam pemilu legislatif tahun 2009, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali turun ke peringkat ketiga dengan perolehan (14,03% suara). Selanjutnya partai ini

mencalonkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai calon Presiden, berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden, namun pasangan ini hanya mampu menduduki posisi nomor kedua.

b. Ideologi Platform/ Visi dan Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berideologi Pancasila 1 Juni 1945 (AD ART PDIP tahun 2010). Dalam menegakkan ideologi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) menetapkan sepuluh langkah strategis yang dikenal dengan Dasa Prasetya. Dasa Prasetya merupakan arah umum perjuangan partai dalam menerapkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Dasa Prasetya berarti sepuluh janji kesetiaan, yang berupa 10 (sepuluh) butir pemikiran kebangsaan mengenai usaha pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=99 pada 10 Oktober 2011).

- 1) Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.
- 2) Kegotong-royongan rakyat dalam memecahkan masalah bersama.
- 3) Memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.

- 4) Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.
- 5) Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat.
- 6) Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.
- 7) Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.
- 8) Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 9) Menegakan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.
- 10) Menegakkan Hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak azasi manusia.

Tujuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; *Pertama*, mewujudkan amanat penderitaaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. *Kedua*, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara: sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat: sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai. *Ketiga*, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik,

berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas. Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Surat ketetapan No:11/Tap/Kongres III/PDIP/2010).

Fungsi dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) sebagai sarana: Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis, dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menjadi alat

perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara (Surat ketetapan No:11/Tap/Konggres III/PDIP/2010).

4. Diskripsi Tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

a. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tumbuh dari Lembaga Dakwah Kampus (LDK) anak-anak muda tarbiyah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan sebuah partai politik yang berasal dari gerakan dakwah tarbiyah (Burhanudin Muhtadi, Genta Demokrasi Metro TV pada 28 April 2011). Gerakan Tarbiyah adalah gerakan dakwah yang terdiri dari lima elemen penting (Imdadudin Rahmat, 2008:24): *Pertama*, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). *Kedua*, elemen jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan jaringan Rohaniawan Islam (ROHIS) di sekolah. *Ketiga*, elemen para alumnus perguruan tinggi dari Timur Tengah. *Keempat*, para aktivis Islam maupun kepemudaan. *Kelima*, para dai lulusan pesantren. Dalam perjuangan

jamaah Tarbiyah dikenal dengan tahapan-tahapan atau disebut fase perjuangan. Diawali dengan fase *tandzimi*, fase *sya'bi*, fase *muasasi*, fase *daulah*. Era reformasi membuka peluang bagi jamaah tarbiyah untuk melakukan akselerasi fase perjuangan ke fase daulah, yaitu dengan langkah awal mendirikan partai politik (wawancara dengan Darul Falah, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2010-20015 pada 30 April 2011).

Momentum reformasi sebenarnya dimanfaatkan oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) untuk membentuk partai politik yang bersaskan Islam, namun usaha tersebut mengalami kegagalan. Lahirnya Partai Bulan Bintang (PBB) yang berasaskan Pancasila membuat sebagian anggota Dewan Dakwah yang terlibat dalam perumusan berdirinya partai Islam merasa kecewa (Imdadudin Rahmat, 2008:34).

Pada saat itu menurut Abu Rida:

Jamaah yang saat ini menjadi Partai Keadilan (PK), sedang menunggu dan memperhatikan Dewan Dakwah yang akan membentuk partai politik Islam, akan tetapi ketika partai politik yang berdiri tidak berasaskan Islam maka mereka (Jamaah Tarbiyah) kemudian mengadakan musyawarah sendiri (Muhammad Furqon, 2004).

Musyawah untuk mendirikan partai politik dilakukan oleh 52 aktivis jamaah Tarbiyah. Namun sebelum melakukan musyawarah, jamaah ini sudah melakukan survei terhadap kader-kadernya. Dari 6000 angket yang disebar pada kader tarbiyah kembali 5800 angket.

Hasilnya 86% kader lebih mendukung berdirinya sebuah partai politik, sedangkan 27% sisanya menginginkan untuk mempertahankan sebagai organisasi masyarakat, yayasan, LSM, kampus, pesantren dan lembaga lainnya. Musyawarah yang dilakukan oleh 52 aktivis jamaah tarbiyah yang diketuai oleh Dr. H.M Hidayat Nurwahid dan Lutfi Hasan Ishaq, MA memutuskan untuk mendirikan sebuah partai politik yang diberi nama Partai Keadilan (PK) (Imdadudin Rahmat, 2008: 36).

Partai Keadilan (PK) didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 bertepatan pada hari Senin 26 Rabi'ul Awwal 1419H (Nasiwan, 2003:256). Dideklarasikan oleh 52 tokoh gerakan *Tarbiyah* di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Jakarta Baru, dihadiri sekitar 50000 pendukungnya. Presiden Partai Keadilan (PK) saat itu adalah Nurmahmudi Ismail. Partai Keadilan (PK) berasaskan Islam tanpa mencantumkan Pancasila sebagai asas partainya (Nasiwan, 2003:256). Setelah satu tahun pasca dideklarsikannya, Partai Keadilan (PK) berhasil lolos untuk mengikuti pemilu ditahun 1999 dan mendapatkan suara sekitar 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari semua jumlah suara, menempatkan 7 orang wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004. Pada 20 Oktober 1999 Partai Keadilan (PK) menerima tawaran kursi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet KH Abdurrahman Wahid, lalu menunjuk presiden Partai Keadilan (PK) Nurmahmudi Ismail sebagai menteri. Selanjutnya

Nurmahmudi Ismail mengundurkan diri dari presiden Partai Keadilan (PK) dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Namun dengan hanya mendapatkan suara 1,36% dari seluruh jumlah suara, Partai Keadilan (PK) tidak berhasil lolos *electoral threshold* untuk mengikuti pemilu lagi pada tahun 2004 yang minimal harus mendapatkan minimal 2% suara sesuai Undang-Undang Pemilu No 13 tahun 2003. Untuk dapat mengikuti pemilu kembali pada tahun 2004 maka Partai Keadilan (PK) mengubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penambahan kata “sejahtera” dengan dasar filosofi bahwa partai baru yang akan dibentuk tidak hanya menekankan pada ranah keadilan dan hukum pada tingkat politik, namun juga menyelesaikan permasalahan tentang belum tercapainya kesejahteraan dikalangan masyarakat bawah (Imdadun Rahmat, 2008: 38).

Pada tanggal 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, Partai Keadilan (PK) bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), prosesi penggabungan dilakukan secara resmi pada hari Kamis 3 juli 2003 dihadapan notaris Tri Sulistiowarni, S.H. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik Partai Keadilan (PK) menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), termasuk anggota

dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Dalam Pemilu 2004 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) perolehan suaranya meningkat menjadi 8.325.020 suara atau sekitar 7,34% dari total suara dan berhasil menempatkan 45 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2004-2009. Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil menempatkan presiden partainya menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2004-2009. Setelah terpilih menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2005-2010 (<http://www.pk-sejahtera.org/content/sejarah-ringkas> pada 10 Oktober 2011).

Pada pemilu tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 7,88% dan menempatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada pada urutan yang ke-4 perolehan suara nasional. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkoalisi dengan pasangan calon Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono. Selanjutnya setelah Susilo Bambang Yudoyono terpilih

kembali sebagai Presiden Indonesia, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring dipercaya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pejabat sementara Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian pada sidang majelis syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2010-2015 (<http://www.pk-sejahtera.org/content/sejarah-ringkas> pada 10 Oktober 2011).

b. Ideologi, Platform / Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan sebuah partai politik yang berasal dari gerakan dakwah tarbiyah (Burhanudin Muhtadi, pernyataan digenta demokrasi Metro tv pada 28 april 2011). Namun jika dilihat dari warna ideologi dan metode (*manhaj*) perjuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipengaruhi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang mencita-citakan terwujudnya pemerintahan Islami dengan dasar Alquran dan As Sunah secara paripurna (Imanudin Rahmat, 2008).

Dengan cita-cita perjuangan mewujudkan pemerintahan Islam berdasar pada Al quran dan sunnah, maka partai ini mendeklarsikan dirinya menjadi partai dakwah (Wawancara dengan Agus purnomo,

anggota Fraksi PKS DPR RI pada tanggal 30 April 2011 di Yogyakarta).

Menurut Agus Purnomo:

meskipun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berideologi Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih mengutamakan pada substansi atau nilai-nilai ajaran Islam dalam mengelaborasi ideologinya dari pada secara formal seperti halnya produk hukum yang berlabel syariah. (Wawancara dengan Agus Purnomo, anggota Fraksi PKS DPR RI pada tanggal 30 April 2011 di Yogyakarta).

c. Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdiri dari (AD ART PKS tahun 2011):

- 1) Anggota Pendukung yang terdiri dari:
 - a) Anggota Mula
 - b) Anggota Muda
- 2) Anggota Inti yang Terdiri Dari:
 - a) Anggota Madya
 - b) Anggota Dewasa
 - c) Anggota Ahli
 - d) Anggota Purna

5. Deskripsi Tentang Partai Amanat Nasional (PAN)

a. Sejarah Partai Amanat Nasional (PAN)

Latar belakang lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN) tidak lepas dengan adanya semangat reformasi. Diawali sidang tanwir Muhammadiyah di Semarang, tanggal 5-7 Juni 1998 yang merekomendasikan supaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempersiapkan satu partai politik baru yang ditindaklanjuti oleh beberapa gerakan reformasi yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MAR) (http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional pada 10 Oktober 2011).

Majelis Amanat Rakyat (MARA) merupakan organisasi yang ditujukan untuk mewadahi kerjasama berbagai organisasi dan perorangan yang serta memiliki komitmen terhadap gerakan reformasi. Majelis Amanat Rakyat (MARA) dideklarasikan pada tanggal 14 Mei 1998 bertempat di Jakarta dengan tokoh diantaranya Prof. DR. H. Amien Rais, Gunawan Muhammad, DR. Rizal Ramli, Prof Emil Salim, AM. Fatwa serta bebarapa tokoh yang lain (http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional pada 10 Oktober 2011).

Selanjutnya Majelis Amanat Rakyat (MARA) sepakat untuk mendirikan sebuah partai politik dengan berbagai nama diantaranya Partai Amanat Bangsa (PAB), Partai Amanat Rakyat (PAR). Tetapi pada akhirnya nama yang dipilih adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Amanat Nasional (PAN) dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya (Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) No 17 Tahun 2006 Tentang Tafsir Asas dan Platform Partai Amanat Nasional).

Dalam pertemuan di Bogor pada 5-6 Agustus 1998, para tokoh tersebut mendirikan sebuah partai politik bernama Partai Amanat

Bangsa (PAB). Selanjutnya Pada 23 Agustus 1998 Partai Amanat Bangsa (PAB) berubah nama menjadi PAN, Dan menunjuk Amien Rais sebagai ketua umumnya yang pertama. Partai Amanat Nasional (PAN) bertujuan untuk menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita PAN berakar pada moral agama, kemanusiaan, kemajemukan, nonsektarian dan nondiskriminatif (Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) No 17 Tahun 2006 Tentang Tafsir Asas dan Platform Partai Amanat Nasional).

Dalam upayanya untuk eksistensi di masa depan, Partai Amanat Nasional (PAN) berdiri di atas landasan ideologis amanah dan nasionalitas dengan tujuan supaya mampu memberikan respons secara cerdas dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan bangsa serta dalam memberikan kontribusi bagi terciptanya kehidupan politik yang demokratis di Indonesia (Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) No 17 Tahun 2006 Tentang Tafsir Asas dan Platform Partai Amanat Nasional).

Dengan ideologi amanah, dimaksudkan agar proses dan pencapaian hasil Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pergulatan politik sepenuhnya bersandar pada kehendak untuk mewujudkan dan mengkongretkan amanat rakyat, sementara dengan ideologi nasionalis berarti Partai Amanat Nasional (PAN) menghargai dan menjunjung

tinggi pluralitas, heterogenitas atau kemajemukan sosial, ekonomi dan budaya yang kemudian berpadu membentuk sebuah negara bangsa bernama Indonesia. Maka, ideologi amanah dan nasionalitas merupakan pilar penyangga Partai Amanat Nasional (PAN), agar tidak terkikis eksistensinya semata sebagai pengejawantahan dari kepentingan parsial partikular (Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) No 17 Tahun 2006 Tentang Tafsir Asas dan Platform Partai Amanat Nasional).

b. Dasar dan Azas Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional didasarkan pada Pancasila dan berasaskan akhlaq politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam (AD dan ART Partai Amanat Nasional Tahun 2010 Pasal 4).

c. Identitas Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat (AD dan ART Partai Amanat Nasional Tahun 2010).

d. Sifat Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai yang terbuka bagi warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan mandiri (Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) No 17 Tahun 2006 Tentang Tafsir Asas dan Platform Partai Amanat Nasional).

e. Visi Partai Amanat Nasional (PAN)

Terwujudnya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa (Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) No 17 Tahun 2006 Tentang Tafsir Asas dan Platform Partai Amanat Nasional).

f. Misi Partai Amanat Nasional (PAN) :

- 1) Mewujudkan kader yang berkualitas dan militan.
- 2) Mewujudkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai yang dekat dan membela rakyat.
- 3) Mewujudkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur.

- 4) Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat.
- 5) Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 6) Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional (Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) No 17 Tahun 2006 Tentang Tafsir Asas dan Platform Partai Amanat Nasional).

g. Kader, Anggota, dan Simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN)

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah mengikuti proses pengkaderan partai. Jenjang dan jenis kaderisasi terdiri atas pengkaderan formal dan non formal. Jenjang kaderisasi dalam pengkaderan Partai Amanat Nasional (PAN) secara formal terdiri atas (AD ART PAN Tahun 2010):

- 1) Kader muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat setelah lulus orientasi perkaderan dalam masa bimbingan calon anggota (MABITA).

- 2) Kader dasar yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat setelah lulus latihan kader amanat dasar (LKAD).
- 3) Kader madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) setempat setelah lulus latihan kader amanat madya (LKAMI).
- 4) Kader Utama yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setelah lulus latihan kader amanat utama (LKAU).
- 5) Anggota Partai Amanat Nasional (PAN) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan dan tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN).
- 6) Simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah orang yang mendukung tujuan dan perjuangan partai, tetapi belum tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN). Simpatisan berhak mengikuti kegiatan-kegiatan partai dan dapat mengambil inisiatif dalam mengorganisasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung perjuangan partai.

B. Diskripsi Strategi Partai Politik Dalam Mensosialisasikan Ideologi Politik Kepada Kader-Kader Partai

1. Partai Demokrat (PD)

Partai Demokrat jika dilihat sejarah kelahirannya, maka partai ini bukanlah partai kader. Partai ini lahir sebagai kendaraan bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi presiden. Dalam Website resmi Partai Demokrat (PD) disampaikan latar belakang berdirinya Partai Demokrat:

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling publik yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik (<http://www.demokrat.or.id/sejarah/> pada 10 Oktober 2011).

Partai Demokrat tidak hadir untuk sebagai memperjuangkan ideologi, tetapi ideologi dirumuskan bersamaan dengan lahirnya partai ini, dan merupakan pemikiran dari Susilo Bambang Yudhoyono .

...hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnik administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang (<http://www.demokrat.or.id/sejarah/> pada 10 Oktober 2011).

Partai Demokrat memiliki program-program untuk pembinaan dan internalisasi ideologi terhadap para kader-kader partai. Program pembinaan tersebut adalah dengan cara training untuk kader, sosialisasi, serta dengan Workshop yang dilakukan oleh partai politik (Wawancara dengan saudara Pongky, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pembinaan kader DPD Partai Demokrat DIY pada 2 Mei 2011).

Menurut Pongky, pembinaan dan ideologisasi kader yang paling utama adalah dengan cara training kader yang disebut TFL (Training For Leader). Training kader wajib bagi kader-kader Partai Demokrat supaya tercipta kader yang cerdas, santun beretika dan handal. Mekanismenya adalah diawali ditingkat Dewan Pimpinan Pusat dengan peserta adalah wakil dari masing-masing provinsi (DPD). Kemudian wakil-wakil dari provinsi ini dilatih untuk juga bisa memberikan kader-kader ditingkat kabupaten dan kecamatan. Pasca dilakukan training atau pelatihan, kader-kader lalu diterjunkan untuk menjalankan roda partai. Pelatihan kader ini baru dilakukan oleh partai Demokrat selama dua kali sampai saat ini. Sedangkan untuk workshop dan sosialisasi ideologi sifatnya adalah incidental atau tidak rutin (Wawancara dengan saudara Pongky Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pembinaan kader DPD Partai Demokrat DIY pada 2 Mei 2011).

Kalau melihat dari program kerja DPD Partai Demokrat DIY tahun 2010 dan 2011 terkait program pembinaan khusus kader adalah adanya TFL (*Training For Leader*), Program Latihan Kepemimpinan dan Ketahanan Pemuda, serta Pelatihan dan Orientasi Kepartaian. Ketika program pembinaan kader tersebut hanya diprogramkan sekali dalam rentang waktu tahun 2010 dan 2011 (Dokumentasi Rapat Kerja Daerah II, DPD Partai Demokrat Provinsi DIY pada hari minggu, 21 Februari 2010).

2. Partai Golongan Karya (P Golkar)

Model sosialisasi ideologi politik Partai Golongan Karya (P Golkar) berbeda dengan apa yang digunakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu: menerjunkan langsung kader-kadernya untuk melakukan kerja-kerja ideologis. Sedangkan untuk partai Golongan Karya (P Golkar) melakukan sosialisasi ideologi politiknya dengan cara melakukan training/ pelatihan yang diperuntukan terhadap para kadernya. Partai Golongan Karya (P Golkar) menggunakan program training lima tipologi kader. Kelima tipologi kader tersebut adalah: (1) Kader Karakter Desa; (2) Kader Fungsional; (3) Kader Penggerak Partai; (4) Kader Penggalang; (5) Kader Pemerintah (Wawancara dengan John S Keban, Ketua Pembinaan Kader Partai Golongan Karya DPD DIY pada 30 April 2011).

Alur Pelaksanaan Training Lima Tipologi Kader Partai Golongan Karya (P Golkar) adalah diawali dengan melatih para trainer yang akan diterjunkan untuk melakukan training kekader-kader ditingkat desa dan kecamatan. Pelatihan para trainer disebut dengan program TOT (*Training For Trainer*) yang diambil dari perwakilan kader setiap DPD (Dewan Pimpinan Daerah P Golkar) diseluruh Indonesia (Wawancara dengan John S Keban, Ketua Pembinaan Kader Partai Golongan Karya DPD DIY pada 30 April 2011).

Pelaksanaan TOT (*Training For Trainer*) dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (P Golkar). Kemudian setelah kader-kader perwakilan masing-masing DPD (Dewan Pimpinan Daerah P Golkar) selesai mengikuti TOT (Training For Trainer) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (P Golkar) maka para kader tersebut akan menjadi trainer yang akan melakukan training lima tipologi kader Partai Golongan Karya (P Golkar) di daerahnya masing-masing (Wawancara dengan John S Keban, Ketua Pembinaan Kader Partai Golongan Karya DPD DIY pada 30 April 2011).

Pelaksanaan Training Lima Tipologi Kader Partai Golongan Karya (P Golkar) dilakukan secara bertahap yaitu: (1) Training untuk kader-kader karakter desa, (2) Training untuk kader-kader Fungsional, (3) Training untuk kader-kader Fungsional, (4) Training untuk kader-kader penggalang, (5) Training untuk kader-kader Pemerintah. Pada periode lima tahun akan

terdapat lima training/pelatihan lima tipologi kader sesuai dengan tipologi masing-masing. Sedangkan muatan ideologi politik partai tidak diajarkan melalui training secara sendiri, tetapi disisipkan sebagai materi disetiap training lima tipologi kader (Wawancara dengan John S Keban, Ketua Pembinaan Kader Partai Golongan Karya DPD DIY pada 30 April 2011). Menurut John S Keban Pelaksanaan training lima tipologi kader yang dianggap sebagai jalur utama sosialisasi ideologi bagi kader-kader dilakukan tidak rutin, tetapi minimal diikuti sekali oleh kader-kader Partai Golongan Karya (P Golkar) (Wawancara dengan John S Keban, Ketua Pembinaan Kader Partai Golongan Karya DPD DIY pada 30 April 2011).

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat ini mendeklarasikan dirinya sebagai partai ideologi, yaitu bagaimana memperjuangkan pengaplikasian ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, khususnya keperpihakan terhadap rakyat kecil (*wong cilik*). Pendeklarasian kembalinya partai ini ke partai ideologi ditegaskan dalam kongres III PDIP pada tanggal 5-9 April 2010 (wawancara dengan Idham Samawi Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi Periode 2010-20-15 pada 15 April 2011). Lebih lanjut Megawati Soekarno Putri mengatakan “sebagai partai ideologis posisi kita sangat jelas; kita tidak akan pernah menjadi bagian dari kekuasaan yang yang tidak berpihak kepada wong cilik” (Donny Graha dkk, 2011). Untuk menjadi partai yang kuat secara ideologi, tidak

bisa hanya bermodal ideologi saja, tetapi membutuhkan juga kader yang militan, pelembagaan partai yang kuat. Hal tersebut juga disadari oleh Megawati Soekarno Putri yang terlihat dalam pidatonya di kongres III PDIP:

...perjuangan tak akan pernah mencapai terminalnya hanya dengan retorika. Untuk bisa bekerja efektif, ideologi membutuhkan kader, ideologi membutuhkan pemimpin, ideologi butuh organisasi dan manajemen, ideologi butuh aturan bermain, ideologi butuh kebijakan program, ideologi membutuhkan program. ideologi membutuhkan sumberdaya.

Dengan pernyataan tersebut, maka semestinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuat sebuah sistem pembinaan kader yang jelas. Agar sosialisasi politik bisa berjalan, dan terbentuk kader-kader yang ideologis.

Dalam melakukan proses sosialisasi politik yang berupa ideologi partai kepada para kader-kadernya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak melakukannya dengan metode sosialisasi langsung dengan pendidikan politik di kelas-kelas, atau tatap muka langsung antar guru dengan murid. Tetapi dengan cara menerjunkan langsung kader-kadernya untuk kerja-kerja ideologis (wawancara dengan Idham Samawi Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi Periode 2010-20-15 pada 15 April 2011). Menurut Idham Samawi, kerja-kerja ideologis yang dimaksud adalah bagaimana kader-kader terutama yang ada distruktural Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun langsung kerakyat-rakyat kecil, untuk melakukan

inventarisasi masalah-masalah yang dialami oleh rakyat kecil (*wong cilik*), kemudian dari masalah-masalah yang ada dilakukan advokasi untuk dapat diselesaikan. Program kerja-kerja ideologis ini difokuskan dalam sebuah program kerja DPP PDIP yang diberi nama program cabang pelopor (wawancara dengan Idham Samawi Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi Periode 2010-2015 pada 15 April 2011). Penjelasan Tentang Cabang Pelopor adalah:

a. Pengertian Cabang Pelopor

Cabang pelopor adalah cabang (Kabupaten/Kota, atau level DPC partai), yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai cabang pelopor, dan kepadanya akan diberikan tugas-tugas partai sebagaimana yang termuat dalam haluan partai yaitu dasa prasetya partai. Secara umum cabang yang dimaksud atau masuk dalam kategori cabang pelopor adalah cabang yang: (1) telah menyelesaikan proses konsolidasi organisasi, sebagaimana yang dimaksud oleh Dewan Pertimbangan Partai (DPP) partai, (2) mempunyai anggota parlemen (DPRD) atau Fraksi PDI Perjuangan, (3) mampu menempatkan kader partai untuk menduduki jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, (4) membangun sinergi tiga pilar (Risalah Cabang Pelopor Bidang Kaderisasi DPP PDIP, Periode kepengurusan 2010-2015).

Cabang pelopor merupakan langkah PDIP dalam menjalankan trias dinamika dan dasa prasetya partai, secara konsisten dan

bertanggungjawab yang disinergikan dengan kerja pemerintah daerah, sehingga secara ideal membentuk suatu pemerintahan daerah, yang berwatak sosial (berpihak kepada kepentingan rakyat) dan berwatak nasional (berpihak pada kepentingan bangsa), yang sejalan dengan kepentingan rakyat (partai) dan berdasarkan ideologi Pancasila (Risalah Cabang Pelopor Bidang Kaderisasi DPP PDIP, Periode kepengurusan 2010-2015).

b. Tujuan Cabang Pelopor

Tujuan dari adanya cabang pelopor (Risalah Cabang Pelopor Bidang Kaderisasi DPP PDIP, Periode kepengurusan 2010-2015) adalah:

- 1) Melahirkan kader-kader partai yang pilih tandang, militan, memiliki integritas, patriotik dan ideologis. Kader kelak akan mengisi jabatan-jabatan publik, posisi-posisi strategis dilapangan sosial ekonomi dan sosial budaya, maupun untuk kepentingan struktur partai. Yang dimaksud dengan kader yang berkualitas adalah anggota partai yang telah mencapai suatu perkembangan politik yang diisyaratkan partai, atau anggota yang dedikasi, loyalitas, dan pengabdianya kepada partai dan masyarakat umum tidak tercela.
- 2) Memastikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, yang menjadi dasar bagi keputusan-keputusan politik pemerintah daerah, sehingga keputusan tersebut berkualitas sebagai keputusan dari, oleh dan untuk rakyat atau keputusan yang berpihak kepada rakyat. Bukan hanya

produk politik yang harus sejalan dengan garis ideologi, akan tetapi juga dengan proses politik (*musyawarah*) dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik tersebut.

Menjadikan ideologi Pancasila sebagai tuntunan dalam membangun tata hidup masyarakat yang sejalan dengan Pancasila atau membangun suatu masyarakat Pancasila (Risalah Cabang Pelopor Bidang Kaderisasi DPP PDIP, Periode kepengurusan 2010-2015).

c. Tahapan Kerja Cabang Pelopor

Tahapan cabang pelopor (Risalah Cabang Pelopor Bidang Kaderisasi DPP PDIP, Periode kepengurusan 2010-2015) adalah:

1) Tahap pemetaan

Tahap pemetaan adalah tahap memetakan wilayah politik. Ditahap pemetaan akan diperoleh gambaran persoalan-persoalan rakyat yang dapat dibagi kedalam dua kategori: (1) persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang tidak secara langsung berkait dengan kebijakan pemerinatah, (2) persoalan-persoalan yang berkait dengan kebijakan Negara, dan hanya dapat diatasi dengan kebijakan Negara yang memihak rakyat. Pada tahap ini juga dilakukan penyerapan aspirasi rakyat.

2) Tahap perencanaan

Tahap perencanaan adalah proses perumusan kebijakan daerah yang dilakukan secara musyawarah yang melibatkan tiga

pilar dan unsur lain yang berkait, yang dipimpin oleh partai. Hasil rumusan ini akan akan dipilih menjadi: (1) program yang akan dijalankan oleh partai, (2) program yang akan diperjuangkan atau didorong dijalankan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota).

3) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan semua rencana kerja, baik ditingkat partai ataupun ditingkat fraksi dan eksekutif, dijalankan. Partai, dengan seluruh organ yang dimiliki harus mengawal, untuk memastikan rencana berjalan dengan baik, dan dari pelaksanaan rencana tersebut diperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam tahapan ini partai mempunyai dua kepentingan yaitu: (1) memastikan semua rencana berjalan dengan baik dan dari pelaksanaan perencanaan tersebut diperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan, (2) memastikan bahwa pelaksanaan program dan seluruh rangkaian prosesnya terkomunikasi dengan baik kepada komunitas dan khalayak, agar terjadi suatu pendidikan politik yang arahnya adalah untuk memberikan pencerahan kepada rakyat dan basis partai.

4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Dalam proses pembinaan kader-kader, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan majelis-majelis tarbiyah serta forum-forum pengkaderan partai sebagai medan pembentukan ideologi, pemahaman keislaman, dan pandangan politik kebangsaan. Sistem pengkaderan Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki fungsi untuk melakukan rekrutmen dan melakukan pembinaan seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai (Imdadudin Rahmat, 2008: 239). Sampai saat ini, pengkaderan *tarbiyah* yang dikenal dengan *liqo* atau pertemuan (mentoring) menduduki posisi utama didalam pengkaderan dan pembinaan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Imdadudin Rahmat, 2008: 239).

Dalam wawancara dengan salah satu anggota Majelis Syuro Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu Darul Falah mengatakan:

bahwa cara melakukan internalisasi ideologi yang utama dilakukan oleh Partai keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kader-kadernya adalah melalui *liqo* (pertemuan). *Liqo* atau pertemuan merupakan kewajiban bagi kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disetiap jenjang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Wawancara dengan Darul Falah, Anggota Majelis Syuro Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didalam melakukan fungsi-fungsi kaderisasinya tidak hanya menggunakan sarana *liqo* sebagai satu-satunya program partai untuk melakukan proses ideologisasi kepada kader-kadernya. Sebagaimana pernyataan Agus Purnomo:

Liqo merupakan sesuatu kegiatan kaderisasi yang harus diikuti oleh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun *liqo* bukan satu-satunya strategi/sarana untuk melakukan ideologisasi, masih ada strategi-strategi lain untuk pembinaan seperti halnya adalah mukhoyam, rihlah (Wawancara dengan Agus Purnomo, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada 30 April 2011).

Menurut Imdadudin Rahmat (2008: 238). Terdapat tiga jenis pengkaderan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu; (1)

Pengkaderan melalui tarbiyah, (2) Pengkaderan melalui underbow partai (3) pengkaderan formal kepartaian.

a. Pengkaderan Melalui Tarbiyah

Sistem pengkaderan melalui metode *tarbiyah* diharapkan akan menghasilkan para peserta yang menghasilkan kader yang memiliki kompetensi sebagai berikut: (1) aqidah yang lurus; (2) ibadah yang benar; (3) akhlaq yang baik; (4) berkemampuan produktif; (5) berwawasan luas; (6) berbadan kuat; (7) mampu memerangi nafsu; (8) mampu mengatur diri; (9) mampu mengatur waktu/ haritsun ala waqtihi (10) bermanfaat bagi orang lain (Imdadudin Rahmat, 2008: 242).

Terdapat tujuh perangkat-perangkat tarbiyah yang biasa digunakan dalam proses kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu: (1) Usrah (Halaqoh); (2) Katibah; (3) Rihlah; (4) Muhoyam (Mu'asykar); (5) Daurah; (6) Nadwah; (7) Muktamar. Penjelasan dari ketujuh perangkat tersebut (Buku saku kader tarbiyah, 2010) adalah:

1) Usrah/Liqo/Halaqoh

Usrah merupakan bentuk pembinaan terkecil namun paling penting dalam pembangunan karakter anggota. Usrah dapat dikatakan sebagai kumpulan oaring yang terikat dengan kepentingan bersama yang anggotanya seperti sebuah kerabat atau keluarga menjadi penjaga bagi anggota-anggotanya. Tujuan usrah secara umum adalah membentuk kepribadian Islami secara integral pada

setiap individu muslim, mentarbiyah, dan mengembangkannya sesuai etika dan nilai Islam. Usrah diikuti sekitar 5-10 orang yang dibimbing oleh seorang guru (*mutarobbi*).

2) Katibah

Katibah pola spesifik dalam mentarbiyah sekelompok anggota yang bertumpu pada tarbiyah ruhani, pelembut hati, penyucian jiwa, dan membiasakan fisik beserta seluruh anggota badan untuk melaksanakan ibadah secara umum, juga tahajud, tadabur, dan berfikir kritis. Khatibah berarti kumpulan beberapa usrah. Tujuan katibah adalah menciptakan keharmonisan bangunan kepribadian Islam yang utuh pada seseorang dekat dengan Allah SWT.

3) Rihlah

Kalau katibah lebih ditekankan pada aspek ruhaniyah, Rihlah ditekankan pada aspek fisik. Rihlah umumnya dilakukan setiap sebulan sekali dimulai pada setelah shalat subuh dan diakhiri pada saat shalat maghrib. Agenda didalam rihlah para peserta diberi kebebasan bergerak, berolah raga, berlatih, bersabar untuk bersungguh-sungguh.

4) Mukhoyam

Mukhoyam adalah kegiatan mirip dengan kegiatan berkemah yang diikuti oleh setiap kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mukhoyam biasanya dilakukan selama satu tahun sekali.

5) Daurah

Daurah adalah aktivitas berkala yang dilakukan setiap waktu tertentu secara rutin. Aktivitasnya berupa ceramah, kajian, dan pelatihan tentang suatu masalah dengan tema tertentu yang dirasa penting bagi keberlangsungan amalan Islami.

6) Nadwah

Nadwah secara umum merupakan sekumpulan orang. Nadwah merupakan pertemuan yang menghimpun sejumlah pakar dan para spesialis untuk mengkaji suatu tema ilmiah atau persoalan. Sasaran nadwah adalah pengetahuan dan wawasan.

7) Muktamar

Muktamar secara bahasa adalah tempat musyawarah. Kelebihan muktamar adalah mampu menampung sejumlah pakar, terlibat dalam pembahasan dan kajian. Peserta muktamar terlibat dalam diskusi dan dialog dengan seluruh anggota muktamar.

Didalam proses pembinaan sistem tarbiyah dari proses rekrutmen (menarik massa) sampai proses pembinaan, setidaknya kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui tiga tahapan

pembinaan yaitu: (1) *ta'rif* (pengenalan), (2) *ta'win* (pembinaan), (3) *Tanfidz* (realisasi) kerja-kerja dakwah (Imdadudin Rahmat, 2008: 244). Penjelasan dari ketiga tahapan tersebut yaitu: Tahap pertama adalah *ta'rif*, *ta'rif* merupakan fase pengenalan Islam kepada berbagai objek dakwah melalui berbagai sarana, baik melalui bentuk pendekatan personal (*dakwah fardiyah*) dimana seorang aktivis dakwah kampus secara khusus dan intensif melalui pendekatan dan interaksi personal dengan calon objek dakwah, metode dakwah fardiyah ini biasanya memanfaatkan pertemanan.

Bentuk kedua dari tahapan *ta'rif* adalah melalui daurah (training) dalam rangka rekrutmen. Bentuk ketiga dari *ta'rif* adalah melalui penerbitan berbagai media informasi dan publikasi umum yang dikelola oleh kalangan kader tarbiyah. Seperti halnya menggunakan majalah dinding (*madding*), bulletin dan majalah. Bentuk kelima dari *ta'rif* adalah melalui mentoring di kalangan mahasiswa. Mentoring adalah berupa bimbingan yang dilakukan kepada sekelompok orang dengan jumlah terbatas sekitar 5-10 orang. Program ini biasanya dilakukan dikalangan mahasiswa dan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Tahapan yang kedua, adalah fase *takwin* (pengaderan).

Fase ini dimulai ketika objek dakwah yang direkrut dalam fase *ta'rif* dinilai serius. Pembinaan dalam fase ini dilakukan dalam sebuah halaqoh tarbawiyah yang berupa kelompok kecil pembinaan yang

beranggotakan 5-10 orang, yang dibimbing oleh seorang pembina yang disebut murobbi. Berbeda dengan fase *ta'rif*, difase *ta'win* proses pembinaan berjalan secara intensif dalam pertemuan (*liqo*) yang dilaksanakan sekali dalam sepekan dalam kelompok *halaqoh* dengan paduan kurikulum tarbiyah. Tahap yang *ketiga* dalam sistem kaderisasi tarbiyah adalah fase *tanfidz*, fase ini disebut dengan fase realisasi kerja-kerja dawah. Para kader yang sudah mengikuti fase *ta'rif* dan juga fase *tandfiz* kemudian dinilai udah siap lalu diarahkan menjadi pekerja-pekerja dakwah.

Dari rangkain proses yang dilakukan, sistem pengkaderan tarbiyah memfokuskan pada pembinaan berbasis kelompok kecil yang sering disebut dengan usroh, halaqoh atau liqo dibawah tanggungjawab seorang *murobbi* atau pendidik dan peserta didiknya disebut dengan *mutarobbi*. Biasanya dalam satu kelompok *liqo* berjumlah sekitar 5-10 orang, sedangkan pertemuannya dilakukan seminggu atau dua minggu sekali, rutin selama menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Wawancara dengan Khudori, Ketua Kaderisasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Yogyakarta pada Mei 2011).

b. Pengkaderan Melalui Organisasi *Underbow*

Pengkaderan melalui organisasi- organisasi *underbow* Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu melakukan pembinaan pengkaderan

yang khas sesuai dengan organisasi *underbow*. Contohnya adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia melakukan pembinaan dengan training-training pengkaderan berjenjang yang disebut dengan Daurah Marhalah I, Daurah Marhalah II, Daurah Marhalah III (Imdadudin Rahmat, 2008).

c. Pengkaderan Melalui Jalur Formal Kepartaian

Sedangkan untuk pengkaderan secara resmi oleh kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari tingkat dewan pengurus ranting (DPRa) samapi dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP PKS). Kaderisasi diPartai Keadilan Sejahtera (PKS) dilakukan kedalam tujuh jenjang (Imdadudin Rahmat, 2008;274) yaitu;

1) Training Orientasi Partai I (TOP I)

Training ini dilakukan selama satu sampai dua hari, dan biasanya pada akhir pekan atau hari libur. Pada Training Orientasi Partai I (TOP I) peserta diperkenalkan tentang eksistensi dan srtuktur kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian setelah selesai mengikuti Training Orientasi partai I (TOP I) dan dinyatakan lulus maka peserta dinyatakan menjadi anggota pemula terdaftar. Peserta telah sah sebagai pemegang kartu anggota partai, mereka akan diikutkan kedalam Taklim Rutin Partai (TRP) atau *liqo* sekaligus dilakukan pembinaan.

2) Training Orientasi Partai II (TOP II)

Setelah para kader yang mengikuti Training Orientasi Partai I (TOP I) dan mengikuti Taklim Rutin Partai (TRP) serta dinyatakan berhak untuk mengikuti training Orientasi Partai II (TOP II) dalam bentuk rekomendasi dari *murobbi* maka kader tersebut akan dilakukan Training Orientasi Partai II (TOP II). Setelah lulus dari Training Orientasi Partai II (TOP II) maka akan menyandang status sebagai anggota pemula terbina yang berkewajiban untuk mengikuti Training Rutin Kader (TRK), Pelatihan-pelatihan Kepartaian (PPK) serta Kegiatan Internal Partai (KIA). Fungsi pada training ditahab kedua ini adalah untuk mengkondisikan Taklim Rutin Partai (TRP) dan Pemegang KTA (Kartu Tanda Anggota) untuk mencapai lima syarat mengikuti tarbiyah level pemula yakni; berkepribadian *hanif*, bersedia mengikuti program tarbiyah yang telah dijadwalkan, memiliki semangat untuk mengubah diri sendiri dan orang lain, melaksanakan shalat lima waktu, peduli dan simpati pada masalah keislaman. Setelah kelima syarat tersebut tercapai maka kader ini masuk pada jenjang anggota mula (Tahmidi).

Anggota pemula (*tahmidi*) mulai mengikuti sistem pembinaan yang disebut *Usroh, liqo* atau *halaqoh* yaitu dengan kelompok kecil berjumlah 5-10 orang dan dibimbing oleh seorang *murobbi* serta dipandu menggunakan kurikulum tarbiyah Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) yang materinya dibagi menjadi; dasar-dasar keislaman, pengembangan diri, dakwah pemikiran Islam, wawasan sosial kemasyarakatan serta ditambah tema tentang Kepartaian (ke-PKS-san).

3) Training Dasar I (TD I)

Pada Training Dasar I (TD I) diikuti oleh kader yang dianggap lulus dalam semua aktivitas dijenjang pertama dengan bukti Surat Kelulusan Anggota Pemula (SKAP), pada jenjang ini pendidikan tarbiyah mengacu pada *manhaj* tarbiyah anggota muda. Jika pada Tarbiyah level pemula, peserta lebih banyak mendapatkan materi-materi pembentukan ideologi, pemikiran (*fikrah*), dan mabda' ala Tarbiyah maka pada tahap Training Dasar I (TD I), materi-materi yang diberikan mulai berorientasi pada pendalaman ilmu keagamaan. Pada level ini, selain mendapatkan aspek penguatan ideologi (fikrah, aqidah, dan komitmen pada sistem Islam) juga diberikan pembekalan wawasan yang ilmu-ilmu Islam yang dibutuhkan seorang dai dan aktivitas partai. Bagi yang lulus Training Dasar I (TD I) maka akan direkomendasikan *murobbinya* untuk mendapatkan predikat anggota muda (*mu'ayyid*). Aktivitas anggota muda adalah Taklim Rutin Kader (TRK), Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK), Kegiatan Internal Partai (KIA) juga harus mengikuti Kajian Sosial Ilmu Politik (KISP I).

4) Training Dasar II (TDII)

Training Dasar II (TD II) merupakan kelanjutan tarbiyah bagi anggota muda. Pada tahap ini manhaj yang digunakan adalah *manhaj* tarbiyah anggota madya. Aktivitas tarbiyah serta kegiatan tambahannya sama dengan jenjang sebelumnya, tetapi kadar, kedalaman, dan keluasan wawasannya lebih ditingkatkan. Ketika kader lulus dalam Training Dasar II (TD II) maka akan menyandang predikat sebagai anggota madya (*Muntasib*).

5) Training Lanjutan I (TL I)

Training lanjutan I (TL I) merupakan pelatihan untuk menjadi anggota dewasa (*Muntazhim*). Materi yang diberikan kepada anggota dewasa (*Muntazhim*) merupakan materi terdalam dan terluas dari tarbiyah, dan merupakan penyempurnaan dari materi-materi yang diberikan kepada jenjang-jenjang sebelumnya. Pada jenjang ini, kader tetap harus mengikuti Taklim Rutin Kader (TRK), Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK), Kegiatan Internal Partai (KIA).

6) Training lanjutan II (TL II)

Training Lanjutan II (TL II) merupakan training untuk menjadi kader dengan predikat ahli (*Amil*), yang memungkinkan dinominasikan untuk menduduki jabatan-jabatan dalam partai. Pada jenjang ini, kader tetap harus mengikuti Taklim Rutin Kader (TRK),

Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK), Kegiatan Internal Partai (KIA).

7) Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS)

Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS) merupakan pelatihan untuk menjadi anggota purna, yaitu merupakan anggota tertinggi dalam penjenjangan kader di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kalau melihat pengkaderan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari melalui metode tarbiyah, *underbow*, maupun jalur formal partai maka nampak semua jalur pengkaderan menggunakan metode Taklim Rutin Kader (TRP) atau biasa disebut dengan istilah *Liqo*, *Usroh*, dan *Halaqoh* sebagai strategi untuk melakukan pembinaan sekaligus ideologisasi terhadap kader-kadernya. Meskipun dengan kedalaman materi yang berbeda-beda disetiap jenjang kader.

Taklim rutin Kader (TRP) dilakukan secara rutin bagi kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setiap pekan sekali dalam bentuk kelompok-kelompok kecil berjumlah sekitar 5-10 orang, didalam kelompok tersebut terdapat *murobbi* (pembina) dan *mutarobbi* (peserta didik), *murobbi* sebagai pendidik atau ketua kelompok yang bertanggung jawab memberi materi pembinaan, sedangkan *mutarobbi* adalah peserta didik yang diberikan pembekalan (Wawancara dengan Khudori, Ketua Departemen Kaderisasi DPW PKS Yogyakarta). Taklim

Rutin Partai (TRP) atau *Usroh, liqo, halaqoh* merupakan strategi utama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didalam melakukan proses internalisasi ideologi kepada para kader disetiap jenjang (wawancara dengan Darul Falah, Anggota Majelis Syuro' Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

5. Partai Amanat Nasional (PAN)

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional tahun 2011, kader partai amanat nasional secara formal organisasi dibagi menjadi empat jenjang kader: (1) Kader muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD); (2) kader dasar yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD); (3) kader madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW); (4) kader utama yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) (Diambil dari AD ART PAN Tahun 2011).

Secara formal, pendidikan kader-kader Partai Amanat Nasional dilakukan dengan sesuai jenjang kader (Wawancara dengan Paryanto, Ketua Bidang Kadersisasi DPW PAN DIY pada Mei 2011). Menurut Paryanto, sosialisasi ideologi Partai Amanat Nasional (PAN) dilakukan dengan cara pelatihan-pelatihan (Training). Pelatihan (training) dilaksanakan sesuai dengan jenjang kader; setidaknya kalau menurut jenjang pengkeran Partai

Amanat Nasional (PAN), terdapat empat jenis pelatihan (training) yang dilakukan:

- a. Masa Bimbingan Calon Anggota (MABITA), yang harus diikuti oleh calon-calon kader yang akan masuk menjadi kader anggota muda.
- b. Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD), yang harus diikuti oleh para kader dengan jenjang kader muda. Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) adalah syarat bagi kader-kader muda yang akan naik kejenjang kader dasar.
- c. Latihan Kader Amanat Madya (LKAM), yang harus diikuti oleh para kader dengan jenjang kader Madya. Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) adalah syarat bagi kader-kader dasar yang akan naik kejenjang kader Madya.
- d. Latihan Kader Amanat Utama (LKAU), yang harus diikuti oleh kader-kader dengan jenjang kader madya. Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD) adalah syarat bagi kader-kader dasar yang akan naik kejenjang kader Madya (Wawancara dengan Paryanto, Ketua Bidang Kadersisasi DPW PAN DIY pada Mei 2011).

Keempat pelatihan: (1) Masa Bimbingan Calon Anggota (MABITA), (2) Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD), (3) Latihan Kader Amanat Madya (LKAM), (4) Latihan Kader Amanat Utama (LKAU) merupakan sarana utama yang dimiliki oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk melakukan sosialisasi ideologi partai (Wawancara dengan Paryanto,

Ketua Bidang Kadersisasi DPW PAN DIY). Setiap pelatihan diajarkan tiga materi wajib yaitu: (1) materi-materi tentang ideologi Partai Amanat Nasional (PAN), (2) materi-materi tentang ketatanegaraan, (3) pengetahuan umum (Wawancara dengan Paryanto, Ketua Bidang Kadersisasi DPW PAN DIY pada Mei 2011).

6. Analisis Strategi Sosialisasi Ideologi Partai Politik Terhadap Kader-Kader Partai

a. Partai Demokrat (PD)

Internalisasi ideologi yang dilakukan Partai Demokrat termasuk dalam tipe sosialisasi secara langsung, melalui pendidikan politik diruangan antara pendidik dan peserta didik. Program yang menjadi andalan dari partai ini adalah TFL (*Training For Leader*) yang diperuntukan untuk kader-kader Partai Demokrat. Out put yang diinginkan setelah mengikuti training ini adalah tercipta kader partai yang cerdas, santun beretika dan militant. Selain program utama (pembinaan) tersebut, juga terdapat metode lain yang dilakukan oleh Partai Demokrat, yaitu melalui workshop dan sosialisasi kepartaian.

Program-program pembinaan yang dilakukan Partai Demokrat tidak dilakukan secara rutin sebulan sekali atau seminggu sekali. Program ini dilakukan selama satu periode pengurusan minimal sekali diikuti oleh kader-kader partai. Selain itu, tidak ada sanksi secara tegas bagi para kader yang tidak mengikuti pembinaan TFL (*Training For*

Leader). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana proses kaderisasi yang tidak rapi. Secara realita dilapangan tidak ada penjenjangan kader. Siapapun bisa menjadi pimpinan dalam partai ini, meskipun tidak melewati proses kaderisasi partai. Masuknya Ulil Absar Abdala dan Andi Nur Pati sebagai pimpinan pusat adalah penjelasanya. Dengan perangkat pembinaan yang minim: tidak rutin dan bersifat tentatif. sedikitnya program untuk agenda ideologisasi maka partai ini sulit untuk menciptakan kader-kader yang ideologis dan milian. Selain itu, latar belakang partai yang lebih pragmatis kekuasaan dan personal juga memungkinkan berperan besar menjadikan partai demokrat pragmatis (non ideologis).

b. Partai Golongan Karya (P Golkar)

Partai Golongan Karya tidak berbeda dengan metode sosialisasi ideologinya. Sosialisasi ideologi politik dilakukan dengan cara training, dengan bertatapmuka secara langsung antara pendidik dan peserta didik, dilakukan dalam ruangan. Program ideologisasi Partai Golkar adalah dengan training Lima Tipologi Kader. Lima tipologi kader yang dimaksud adalah: (1) Training untuk kader-kader karakter desa, (2) Training untuk kader-kader Fungsional, (3) Training untuk kader-kader Fungsional, (4) Training untuk kader-kader penggalang, (5) Training untuk kader-kader Pemerintah. Selama lima tahun kedepan Partai

Golkar wajib melaksanakan training lima tipologi kader ini. Lima tipologi kader diperuntukan untuk kader-kader sesuai tipologinya.

Secara konsistensi pembinaan, training lima tipologi kader dapat dikatakan tidak konsisten dalam hal rutinitasnya. Dengan hanya mengandalkan training ini maka kader-kader partai hanya akan mendapat pendidikan sekali dalam lima tahun. Dengan hanya minimnya pembinaan (sekali dalam satu periode) maka kemungkinan besar kader-kader partai akan sulit menciptakan kader-kader yang ideologis dan loyal kepada partai. Fenomena Yudi Krisnandi dan Wiranto yang pindah partai memperkuat dugaan tersebut.

c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki metode yang berbeda dengan partai-partai yang lain dalam hal pembinaan kader. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak melakukan pembinaan atau sosialisasi ideologi dengan metode pendidikan politik secara tatap muka didalam kelas. Partai ini melakukan sosialisasi ideologi kepada kader-kadernya dengan cara kerja-kerja ideologis. Kerja ideologis yang dimaksud adalah menerjunkan kader-kadernya untuk menyelesaikan masalah masyarakat secara langsung. Program ini dinamakan dengan program cabang pelopor PDIP. Kader-kader PDIP ditingkat cabang ditugaskan turun langsung kemasyarakat untuk menginventarisir masalah-masalah rakyat

untuk dicarikan solusinya. Selain program ini, tidak ada program lain yang dikerjakan oleh bidang kaderisasi untuk mensosialisasikan ideologinya.

d. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera melakukan sosialisasi ideologi partai dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: tarbiyah, Underbow, training kepartaian. Namun dari ketiga jalur pembinaan, liqo atau halaqoh menjadi agenda inti yang wajib diikuti oleh setiap anggota partai. Liqo harus dilakukan setiap minggu sekali secara rutin selama menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera. Metode ini sama dengan partai yang lain, yaitu mendidik kader-kadernya terkait ideologi partai dengan cara tatapmuka secara langsung antara pendidik dengan peserta didik. Namun yang membedakan dengan partai yang lain adalah bahwa pendidikan kader bagi Partai Keadilan Sejahtera merupakan hal yang utama. Sehingga pertemuan (liqo) dilakukan rutin setiap minggu.

e. Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional melakukan sosialisasi ideologi dilakukan secara training sesuai dengan jenjang pengkaderan partai. Setidaknya ada empat kali training untuk seluruh jenjang. Jadi selama menjadi kader PAN hanya diwajibkan mengikuti sosialisasi tersebut sebanyak empat kali. Menurut Ali Mukhti, pelatihan kader di PAN sudah banyak yang tidak jalan (Wawancara dengan Ali Mukti Ketua

Fraksi PAN Kota Yogyakarta Periode 2004-2009 pada 25 April 2011). Secara realitas juga nampak bahwa kaderisasi PAN tidak berjalan dengan baik. Hadirnya para artis yang dengan mudah menjadi legislatif dari PAN merupakan cerminan bahwa penjenjangan kader yang diprogramkan tidak berjalan dengan baik.

Dengan melihat dari sosialisasi ideologi yang dilakukan oleh partai politik diatas dapat dibedakan menjadi dua jalur sosialisasi politik, yaitu: (1) Sosialisasi politik secara langsung yang dilakukan melalui tatap muka didalam kelas antara trainer dengan peserta. Metode ini dilakukan oleh: Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional. (2) Sosialisasi dengan cara memberikan pengalaman lapangan langsung terhadap para kader-kadernya. Metode ini digunakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, jika dilihat dari rutinitas sosialisasi ada partai politik yang melakukan sosialisasi secara rutin dan ada partai politik yang tidak rutin melakukan pendidikan politik terhadap para kadernya. Secara rutinitas sosialisasi, dari kelima partai yang ada hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melakukan pendidikan politik kader-kader secara rutin setiap pekan. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 17. Strategi Ideologisasi Partai Politik Kepada Para Kader.

	Metode Sosialisasi	Rutinitas Program
PD	Tatap Muka	Tidak Rutin
P Golkar	Tatap Muka	Tidak Rutin
PDIP	Pemberian Pengalaman	Isidental
PKS	Tatap Muka	Rutin
PAN	Tatap Muka	Tidak Rutin

Sumber: Penulis

C. Diskripsi Peta Koalisi Partai Politik Dari Pemilu 1999-2004

1. Peta Koalisi Pada Pemilihan Umum Tahun 1999

Pemilihan umum tahun 1999 adalah pertama setelah runtuhnya Orde Baru. Terdapat 183 partai politik dan 141 diantaranya sudah disahkan oleh Departemen Kehakiman. Dari jumlah tersebut setelah deseleksi oleh “Tim Sebelas” menyusut menjadi 48 partai politik yang kemudian ikut menjadi peserta pemilu. Dari 48 partai sebanyak 18 diantaranya menggunakan asas Islam, simbol Islam atau berbasis massa Islam (Nasiwan, 2003: 244).

Kedelapan belas partai tersebut adalah: (1) Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (PKMI), (2) Partai Umat Islam (PUI), (3) Partai Kebangkitan Umat (PKU), (4) Partai Masyumi Baru, (5) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI), (6) Partai Abdul Yatama (PAY), (7) Partai Amanat Nasional (PAN), (8) Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSSI 1905), (9) Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, (10) Partai Bulan Bintang (PBB), (11) Partai Keadilan (PK), (12) Partai Nahdatul Ummat (PNU), (13) Partai Islam Demokrat (PID), (14) Partai Persatuan (PP), (15) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (16) Partai Daulat Rakyat (PDR), (17) Partai Solidaritas Uni Nasional Indonseia (SUNI), (18) Partai Umat Islam Indonesia (PUMI). Dari 18 partai politik, yang menggunakan Islam sebagai asasnya ada 7 partai politik yaitu: (1) Masyumi, (2) Partai Keadilan, (3) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), (4) Partai Umat Islam, (5) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (6) Partai Syarikat

Islam Indonesia 1905 (PSSI 1905), (7) Partai Persatuan (Nasiwan, 2003:245).

Pada pemilihan umum sebelumnya hanya terdapat tiga partai politik yang boleh menjadi peserta pemilihan umum, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Berbeda dengan pemilihan umum tahun 1999 yang diikuti 48 partai politik.

Tabel 18. Partai Politik Peserta Pemilu Pada Tahun 1999.

No	Partai Politik	Suara
1	Partai Indonesia Baru	0,18%
2	Partai Kristen Nasional Indonesia	0,35%
3	Partai Nasional Indonesia	0,36%
4	Partai Aliansi Demokrat Indonesia	0,08%
5	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia	0,27%
6	Partai Ummat Islam	0,25%
7	Partai Kebangkitan Ummat	0,28%
8	Partai Masyumi Baru	0,14%
9	Partai Persatuan Pembangunan	10,71%
10	Partai Syarikat Islam Indonesia	0,36%
11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	33,74%
12	Partai Abul Yatama	0,20%
13	Partai Kebangsaan Merdeka	0,10%
14	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	0,52%
15	Partai Amanat Nasional	7,12%
16	Partai Rakyat Demokratik	0,07%
17	Partai Syarikat Islam Indonesia 1905	0,14%
18	Partai Katolik Demokrat	0,20%
19	Partai Pilihan Rakyat	0,04%
20	Partai Rakyat Indonesia	0,05%
21	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi	0,43%
22	Partai Bulan Bintang	1,94%
23	PSPSI	0,06%
24	Partai Keadilan	1,36%
25	Partai Nahdlatul Ummat	0,64%
26	PNI - Front Marhaenis	0,35%
27	PIPKI	0,31%
28	Partai Republik	0,31%
29	Partai Islam Demokrat	0,06%
30.	PNI - Massa Marhaen	0,33%
31	Partai Musyawarah Rakyat Banyak	0,06%
32	Partai Demokrasi Indonesia	0,33%
33	Partai Golongan Karya	22,44%
34	Partai Persatuan	0,62%
35	Partai Kebangkitan Bangsa	12,61%
36	Partai Uni Demokrasi Indonesia	0,13%
37	Partai Buruh Nasional	0,13%
38	PMKGR	0,19%
39	Partai Daulat Rakyat	0,40%
40	Partai Cinta Damai	0,16%
41	Partai Keadilan dan Persatuan	1,01%
42	Partai Solidaritas Pekerja	0,05%
43	Partai Nasional Bangsa Indonesia	0,14%
44	Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia	0,34%
45.	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia	0,17%
46.	Partai Nasional Demokrat	0,09%
47.	Partai Umat Muslimin Indonesia	0,05%
48.	Partai Pekerja Indonesia	0,06%

Sumber: http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42 pada 10 Oktober 2011

Dari tabel diatas, setidaknya terdapat tiga kesimpulan yang bisa dibuat: (1) Partai politik yang menjadi peserta lebih banyak dibanding dengan pemilu sebelumnya yang hanya dibatasi 3 peserta yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Nasiwan, 2003:244). Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik bagi warga negara. (2) pada pemilihan umum 1999 partai politik peserta pemilihan umum memperlihatkan beragamnya alternatif ideologi yang ditawarkan, sehingga muncul fragmentasi partai politik berdasarkan ideologi, (3) hasil pemilihan umum 1999 sebagaimana dugaan dari awal tidak menghasilkan kontestan partai politik yang mendapatkan suara mayoritas.

Dengan adanya keberagaman ideologi yang diusung oleh partai politik yang kemudian ditawarkan pada masyarakat sebagai sebuah solusi permasalahan bangsa. Semestinya partai politik konsisten untuk tetap menyuarakan ideologinya setelah pemilihan umum. Sebab ideologi merupakan identitas partai politik dan juga tujuan mengapa partai politik didirikan. Ideologi selain menjadi identitas bagi partai politik juga sebagai tujuan partai (Ramlan Surbakti, 1992:115). Keberagaman warna ideologi pada pemilu 1999 digambarkan oleh Nasiwan (2003:245):

Partai politik peserta pemilu 1999 jika dilihat dari asas yang digunakan dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) partai politik yang berbasas murni Islam sebesar 16,7%, (2) partai politik yang berbasaskan Islam dan Pancasila sebesar 10,4%, (3) partai politik yang berbasas murni Pancasila sebesar 64,6%, (4) partai politik yang berbasas Pancasila dan lainnya sebesar 4,2%, (5) partai politik yang berbasas Pancasila dan non-Islam sebesar 4,2%.

Pemilihan umum 1999 tidak menghasilkan kemenangan mayoritas.

Partai politik yang keluar sebagai pemenang adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan hanya mendapat 1/3 dari seluruh total suara (Kuskrido Ambardi,2009: 177). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meskipun menang namun tidak mencapai kemenangan mayoritas dan hanya berhasil mendapatkan 1/3 dari seluruh total suara, dan untuk dua pertiga suara sisanya dibagi dengan 18 partai yang lain. Tabel berikut adalah data mengenai perolehan kursi partai politik tahun 2009 di DPR.

Tabel 19. Perolehan Suara Dan Kursi Pemilu 1999.

No	Partai Politik	Suara	Kursi
1	PDIP	35.689.073	154
2	Partai Golongan Karya (P.Golkar)	23.741.749	120
3	PPP	11.329.905	59
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.336.982	51
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	7.528.956	35
6	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.049.708	13
7	Partai Keadilan (PK)	1.436.565	6
8	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	1065.6868	6
9	Partai Nahdlatul Ummat (PNU)	679.179	3
10	PDKB	550.846	3
11	PBI	364.291	3
13	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	345.720	2
14	Partai Persatuan (PP)	655.052	1
15	Partai Daulat Rakyat (PDR)	427.854	1
16	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	375.920	1
17	PNI Front Marhaenis	365.176	1
18	PNI Massa Mahaen	345.629	1
19	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	328.654	1
20	Partai Kebangkitan Ummat (PKU)	300.064	1

Sumber:http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42 pada 10 Oktober 2011

Dengan tidak adanya partai politik memperoleh suara mayoritas, maka dimungkinkan untuk partai politik melakukan koalisi, keharusan melakukan koalisi sebagaimana yang dinyatakan oleh Hanta Yudha (Kompas, 27 Juli 2010) “Koalisi yang tidak lazim dalam tradisi presidensialisme justru menjadi kebutuhan mendasar dan sulit dihindari dalam presidensial”.

Setelah pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999 selesai, selanjutnya dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Majelis

Permasyarakatan Rakyat (MPR). Komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah berjumlah 700 anggota, terdiri dari semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berjumlah (500), ditambah dengan utusan golongan berjumlah (65) dan utusan daerah berjumlah (135).

Tabel 20. Distribusi Kursi di DPR dan MPR (1999-2004).

No	Fraksi	DPR		MPR	
		Kursi	%	Kursi	%
1	PDIP	153	30,6	185	26,9
2	GOLKAR	120	24,6	182	26,1
3	PPP	58	11,8	70	9,7
4	PKB	51	10,0	57	8,5
5	F. Reformasi	41	8,2	41	6,2
6	PBB	13	2,6	14	2,1
7	KKI	13	2,6	13	1,8
8	PDU	8	1,6	9	1,3
9	PDKB	5	1,0	5	0,7
10	TNI	38	7,6	38	5,6
11	Utusan Golongan			73	10,1
	TOTAL	500	100	695	100

Sumber: Kuskrindo Ambardi, 2009:179

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas 700 anggota: 500 dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 135 dari Utusan Daerah, dan 65 dari Utusan Golongan. Utusan daerah tidak membentuk fraksi sendiri. Setiap utusan bergabung dengan fraksi pilihannya sendiri, sehingga jumlah kursi yang dimiliki oleh setiap partai politik sebagian besar meningkat. Sedangkan tetap tidak jelas mengapa utusan golongan meningkat menjadi 73 karena data diambil dari NDI pada 1999 (Kuskrindo Ambardi, 2009: 179). Lebih jauh Kuskrindo Ambardi (2009) mengatakan:

Dari fraksi-fraksi yang ada, dapat dikategorisasi berdasar pada ideologinya, yaitu: (1) PDIP berideologi Sekuler Nasionalis, (2) Golkar berideologi Sekuler Nasionalis, (3) PPP berideologi Islam, (4) PKB Partai Pluralis berbasis Muslim, (5) PK berideologi Islam (6) PAN Partai Pluralis berbasis Muslim, (7) PBB berideologi Islam (8) KKI gabungan dari Sekuler, Kristen, Khatolik (8) PDU gabungan partai-partai Islam kecil.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 1999 tidak dilakukan dengan sistem paket Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan dilakukan dengan cara memilih Presiden terlebih dahulu kemudian baru diikuti dengan memilih Wakil Presiden. Pemilihan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan presiden tahun 1999 diikuti tiga calon presiden; (1) Abdurahman Wahid, (2) Megawati Soekarno Putri, dan (3) Yusril Iza Mahendra. Namun beberapa menit sebelum dilakukan pemungutan suara dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), calon presiden Yusril Iza Mahendra mengundurkan diri sebagai calon presiden dan menyerahkan dukungannya kepada calon presiden Abdurahman Wahid. Yusril Ihza Mahendra mengundurkan dikarenakan sejak awal pencalonannya hanya sebagai pengganti jikalau Abdurahman Wahid (Gusdur) tidak mau mencalonkan diri sebagai presiden (Habibie, 2006: 442). Menurut Habibie (2006: 435):

setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakya (MPR) dalam sidang umum yang dilaksanakan mulai hari Kamis tanggal 14-21 Oktober 1999. Satu jam setelah setelah Amien Rais menutup sidang paripurna pada pukul 00.35 Rabu dini hari tanggal 20 Oktober 1999 para pimpinan fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pimpinan partai kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai

Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) telah hadir dirumanya untuk membahas calon presiden yang akan diusung agar tidak hanya ada calon presiden tunggal Megawati Soekarno Putri saja, calon yang diusulkan pertama kali adalah Amien Rais, namun Amien Rais tidak menyanggupinya, calon kedua yang diusulkan adalah Akbar Tanjung, calon ketiga adalah Hamzah, calon keempat adalah Wiranto, dan calon kelima adalah Abdurahman Wahid (Gusdur). Dari kelima nama yang diusulkan hanya Abdurahman Wahid yang menyanggupinya, namun untuk menjaga jikalau Abdurrahman Wahid tidak jadi mencalonkan, maka Yusril Isha Mahendra meminta izin kepada Habibie untuk mencalonkan diri.

Dengan pengunduran diri Yusril Iza Mahendra, akhirnya hanya Megawati Soekarno Putri dan Abdurahman Wahid (Gusdur) yang mengikuti kompetisi merebutkan kursi Presiden. Partai-partai politik sadar bahwa dengan mengusung presiden secara sendiri-sendiri akan sulit untuk menang (Kuskrido Ambardi, 2009:185). Maka yang terjadi adalah partai-partai politik melakukan koalisi untuk memenangkan pertarungan calon presiden. Tabel dibawah adalah koalisi pendukung pasangan masing-masing calon presiden.

Tabel 21. Hasil Pemilihan Presiden dan Perkiraan Koalisi Pendukung Dalam SU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1999.

Calon Presiden	Koalisi Pendukung	suara	Ideologi
Abdurrahman Wahid	Golkar PPP PKB PAN PBB PK Partai Islam lain Utusan Daerah Utusan Golongan TNI/Polri	100 57 51 35 12 7 10 57 15 30	Golkar: Sekuler, Nasionalis. PKB: Pluralis, berbasis Islam. PPP: Islam PK: Islam PBB: Islam PAN: Islam
Megawati Soekarno Putri	PDIP Utusan Daerah Utusan Golongan Golkar Partai Kecil, Nasionalis dan Non Islam (KKI) TNI/Polri	154 50 69 20 17 3	PDIP: Nasionalis, Sekuler KKI: Nasionalis, non Islam
Abstain	TNI/Polri	5	

Sumber: Lili Romli dkk, 2009: 260

Pasca dilakukan pemilihan presiden dan Abdurrahman Wahid yang memenangkannya maka selanjutnya akan dipilih wakil presiden. Untuk pemilihan wakil presiden periode 1999-2004 yang akan mendampingi presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) terdapat dua calon yang akan berkompetisi. Calon pertama adalah Megawati Soekarno Putri dan calon yang kedua adalah Hamzah Haz. Calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri mendapat dukungan dari: (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (2) Partai Golongan Karya (Golkar), (3) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (4) Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI), (5) Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB). Sedangkan untuk calon wakil presiden

Hamzah Haz didukung oleh: (1) Partai Amanat Nasional (PAN), (2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (3) Partai Keadilan (PK), (4) Partai Bulan Bintang (PBB), (5) Perserikatan Daulatul Ummah (Kuskrido Ambardi, 2009:184). Pemilihan untuk mengisi jabatan wakil presiden antara Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Haz akhirnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri dengan mendapatkan suara (396) sedangkan Hamzah Haz mendapatkan (284) suara.

Tabel 22. Calon Wakil Presiden Indonesia Periode 1999-2004.

Calon Wakil Presiden	Partai Politik Pendukung	Ideologi Partai Pemberi Dukungan
Megawati Soekarno Putri	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)	Golkar: Sekuler, Nasionalis. PKB: Pluralis, berbasis Islam. PDIP: Nasionalis, Sekuler KKI: Nasionalis, non Islam PDKB; Nasionalis
Hamzah Haz	Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan (PK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Daulatul Ummah	PPP: Islam PK: Islam PBB: Islam PAN: Pluralis, Berbasis Islam

Sumber : Kuskrido, Ambardi, 2009: 184

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi perubahan susunan koalisi, nampak jelas adalah Partai Golongan Karya (P Golkar) yang awalnya bergabung dengan kelompok koalisi Islam saat mengusung

calon presiden Abdurrahman Wahid dan berseberangan dengan Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP). Namun disaat pemilihan Wakil Presiden Partai Golongan Karya (P Golkar) bergabung dengan Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP). Begitu juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang awalnya berbeda pilihan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tetapi saat pemilihan Wakil Presiden Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersatu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kekalahan Hamzah Haz dalam pemilihan Wakil Presiden tidak membuat partai-partai pendukungnya menjadi pihak oposisi. Tetapi yang terjadi adalah semua partai yang berkompetisi dari semenjak pemilihan Presiden dan kemudian pemilihan wakil presiden, semua partai politik bergabung menjadi satu kedalam pemerintahan atau kabinet. Hal tersebut nampak dari susunan kabinet yang dibangun oleh presiden Abdurrahman Wahid berasal dari gabungan partai-partai politik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 23. Komposisi Kabinet Abdurrahman Wahid (Gusdur) Sebelum perombakan (Oktober1999-Agustus 2000).

No	Partai Politik	kader di Kabinet	%
1	PDIP	5	15
2	Partai Golongan Karya (P Golkar)	5	15
3	PPP	2	6
4	Partai Kebagnkitan Bangsa (PKB)	5	15
5	Partai Amanat Nasional(PAN)	5	13
6	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	3
7	Partai Keadilan (PK)	1	3
	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	5	15
	Profesional (non partai)	4	15
Total		33	100

Sumber : Kuskrido Ambardi, 2009:19

Tabel 24. Komposisi Kabinet Abdurrahman Wahid (Gusdur). Setelah Perombakan (Agustus 2000-Juni 2001).

No	Partai Politik	Jumlah kader di Kabinet	%
1	PDIP	4	13
2	Partai Golongan Karya (P Golkar)	4	13
3	PPP	1	6
4	Partai Kebagnkitan Bangsa (PKB)	6	19,5
5	Partai Amanat Nasional(PAN)	4	13
6	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	3
7	Partai Keadilan (PK)	1	3
	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	4	15
	Profesional (non partai)	6	15
Total		31	100

Sumber: Kuskrido Ambardi, 2009:191

Setelah kabinet berjalan beberapa waktu, akhirnya presiden Abdurrahman Wahid melakukan perombakan kabinetnya. Perombakan tersebut tidak mengubah komposisi partai politik yang ada didalamnya, namun terjadi pengurangan jatah kursi menteri bagi beberapa partai

politik. Dengan dilakukannya perombakan kabinet, partai-partai politik yang memainkan peran penting dalam menjadikan Abdurrahman Wahid (Gusdur) menjadi presiden merasa dirugikan. Hal itu dikarenakan perombakan tersebut berakibat pada berkurangnya jatah kursi menteri yang untuk partai-partai politik pendukungnya.

Dari tabel 24 nampak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tadinya mendapat 5 kursi dikabinet berkurang menjadi 4 kursi. Partai Golongan Karya (P Golkar) yang tadinya juga mendapat 5 kursi dikabinet berkurang menjadi 4 kursi. Pengurangan juga terjadi terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari 2 kursi menjadi 1 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dari 5 kursi berkurang menjadi 4 kursi. Namun pengurangan kursi dikabinet tidak terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat tambahan satu kursi dari 5 kursi menjadi 6 kursi dikabinet. Partai politik yang merasa dirugikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) mencoba untuk melakukan protes dengan memberi memorandum. sebagaimana dilukiskan oleh Kuskrindo Ambardi (2009: 195):

Sebagai respon dari langkah-langkah yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), para pemimpin partai melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperingatkan Abdurrahman Wahid (Gusdur) untuk kembali kejalur yang telah disepakati, rangkaian peringatan tersebut tidak khusus menyebut perombakan kabinet sebagai alasan, namun menggunakan isu terkait peran Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dalam dua skandal korupsi di Bulog dan bantuan keuangan dari Brunei atau yang sering disebut dengan Buloggate dan Bruneigate.

Rangkaian memorandum yang diberikan kepada Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) berakhir dengan surat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditujukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR). Permintaan tersebut dikabulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan hasilnya presiden Abdurahman Wahid dilengserkan dan digantikan oleh Wakil Presiden yaitu Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya dilakukan pemilihan untuk memilih Wakil Presiden, yang dimenangkan oleh Hamzah Haz. Setelah Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden dan Hamzah Haz menjadi wakil Presiden maka komposisi kabinet juga berubah.

Tabel 25. Komposisi Kabinet Megawati Soekarno Putri.

No	Partai Politik	kader di Kabinet	%
1	PDIP	6	19
2	P Golkar	4	13,5
3	PPP	3	10
4	PKB	1	3
5	Partai Amanat Nasional(PAN)	6	19
6	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	3
7	Partai Keadilan (PK)	-	-
	TNI	4	13,5
	Profesional (non partai)	6	19
Total		31	100

Sumber: Kuskrindo Ambardi, 2009:196-197

Dari tabel 25 nampak terjadi perubahan komposisi di dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Perubahan paling terlihat adalah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketika masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat banyak kursi di kabinet. Namun setelah presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) digantikan oleh Megawati Soekarno Putri, jatah kursi menteri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya satu kursi. Selain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan (PK) juga tidak mendapat jatah kursi di kabinet, di lain pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing mendapatkan tambahan dua kursi.

2. Peta Koalisi Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2004

Pemilihan umum tahun 2004 setidaknya ada beberapa pergeseran peta koalisi antar partai politik yang pernah terbentuk (Hanta Yudha, 2010:160). *Pertama*, koalisi partai menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama. *Kedua*, koalisi partai menjelang pemilihan presiden putaran kedua. *Ketiga*, koalisi partai dalam pemilihan pimpinan DPR. *Keempat*, Koalisi partai politik dalam pemilihan pimpinan MPR. *Kelima*, koalisi partai dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah (keputusan interpelasi dan angket).

a. Koalisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I

Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004 diikuti oleh lima pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden: (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Wiranto dan Shalahudin Wahid. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Megawati Soekarno putri dan Hasyim Muzadi. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo. (4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. (5) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama tahun 2004 terbentuk empat koalisi besar. Lebih lanjut Hanta Yudha (2010:161) menjelaskan:

Koalisi ini terbentuk guna mengukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Koalisi pertama, merupakan partai-partai pendukung pasangan calon Wiranto dan Shalahudin Wahid. Koalisi ini terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kasih Peduli Bangsa (PKPB), PPNUI, Partai Patriot Pancasila dan Partai Golongan Karya (P.Golkar). Koalisi kedua, merupakan koalisi pendukung pasangan calon Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi. Koalisi terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Koalisi ketiga, merupakan koalisi pendukung pasangan Calon Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo. Koalisi pendukung calon Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Amien Rais dan Siswono Yudgohusodo terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), (PSI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI), PPDI, PNBK, PBSK, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi ini adalah koalisi dengan jumlah partai yang paling banyak dibanding dengan koalisi-koalisi yang lain, tetapi akumulasi jumlah suara dari koalisi ini hanya menempati urutan ketiga dibawah koalisi pendukung pasangan Wiranto dan Shalahudin Wahid serta pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Haz.

Koalisi keempat, yaitu koalisi pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Pasangan ini didukung oleh koalisi partai politik yang terdiri dari tiga partai yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI. Sedangkan untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari Hamzah Haz dan Agum Gumelar hanya diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan tidak melakukan koalisi dengan partai yang lain.

Koalisi Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2004 putaran 1 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Peta Koalisi Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004 Putaran I.

Capres-Cawapres	Koalisi Partai	Ideologi Partai Koalisi
Wiranto-Shalahudi Wahid	<ul style="list-style-type: none"> ➤ P Golkar ➤ PKB ➤ PKPB ➤ PPNUI ➤ P Patriot Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golkar: Pancasila ➤ PKB: Ideologi Pancasila ➤ PKPB: Pancasila ➤ PPNUI: Ideologi Islam ➤ P Patriot Pancasila: Pancasila
Megawati-Hasyim Muzadi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PDIP ➤ PDS 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PDIP: Pancasila Marhaenisme ➤ Partai Damai Sejahtera (PDS): Ideologi Pancasila
Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PAN ➤ PBR ➤ PKS ➤ PSI ➤ PPDI ➤ PNBK ➤ PBSD ➤ PNI Marhaen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PAN: Ideologi Pancasila ➤ PBR: Ideologi Islam ➤ PKS: Ideologi Islam ➤ PSI: Pancasila ➤ PPDI: Ideologi Pancasila ➤ PNBK: Marhaenisme ➤ PNI Marhaenisme: Ideologi Marhaenisme
Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PD ➤ PBB ➤ PKPI 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PD: Nasionalis ➤ PBB: Islam ➤ PKPI: Nasionalis

Sumber : Diolah dari <http://www.kpu.go.id> pada 10 Oktober 2011

b. Peta Koalisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

Putaran II

Peta koalisi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua mengalami pergeseran. Koalisi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua merupakan cikal bakal lahirnya koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan (Hanta Yudha, 2010: 162). Lebih lanjut dijelaskan Hanta Yudha (2010), sebagai berikut:

Pemilihan Presiden dan Wakil presiden pada putaran kedua merupakan kelanjutan dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada putaran pertama, dimana masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden belum mendapatkan kemenangan secara mayoritas yaitu 50% suara lebih. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil dari pemenang peringkat kesatu dan kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama. Dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang lolos untuk bisa mengikuti pemilihan pada putaran kedua yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla dan Pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Hasyim Muzadi. Pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi mendapat dukungan dari koalisi partai yang terdiri atas tujuh partai politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kasih Peduli Bangsa (PKPB), dan PNI Marhaenisme. Lebih lanjut koalisi pendukung pasangan calon Presiden Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi dikenal dengan koalisi kebangsaan Sementara koalisi yang mendukung pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla didukung oleh empat partai politik. Partai-partai ini adalah: Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PKPI. Koalisi pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dikenal dengan koalisi kerakyatan.

Peta koalisi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 putaran II dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 27. Peta Koalisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Putaran II.

Capres- Cawapres	Koalisi Partai	Ideologi Partai Politik
Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PDIP ➤ PDS ➤ PBR ➤ P Golkar ➤ PPP ➤ PNI ➤ Marhaenisme ➤ PKPB 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PDIP: Pancasila ➤ Marhaenisme ➤ PDS: Pancasila ➤ PBR: Islam ➤ P.Golkar: Pancasila ➤ PPP: Ideologi Islam ➤ PNI Marhaenisme: ➤ Marhaenisme ➤ PKPB: Pancasila
Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PD ➤ PBR ➤ PKPI ➤ PKS 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PD: Ideologi Pancasila ➤ (PBR): Ideologi Islam ➤ PKPI: Pancasila ➤ PKS : Ideologi Islam

Sumber: Diolah dari [Http://www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) pada 10 Oktober 2011

c. Peta Koalisi Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Koalisi yang terjalin saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertahan lama. Koalisi kebangsaan yang dimotori oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengalami perpecahan (Hanta Yudha, 2010:165). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang awalnya menjadi bagian dari koalisi kebangsaan keluar dan bergabung dengan koalisi kerakyatan bersama Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan (PKPI) yang selanjutnya dikenal dengan koalisi kerakyatan.

Pada kontestasi pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terdapat dua koalisi besar yang saling berkontestasi. Kedua koalisi antara lain adalah koalisi kebangsaan yang terdiri dari gabungan Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara dipihak koalisi kerakyatan setelah masuknya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kekoalisi, terdiri dari Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), PKPI ditambah dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Hanta Yudha, 2010:165).

Koalisi kebangsaan yang terdiri dari gabungan Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) mengusulkan empat nama calon sebagai unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nama-nama yang diusulkan adalah Agung Laksono sebagai calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari Partai Golongan Karya (P.Golkar), Soetardjo sebagai calon Wakil Ketua Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Indonesia Perjuangan (PDIP), Muhaimin Iskandar sebagai calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB), dan Zaenal Maarif sebagai calon

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

Sementara dari koalisi keumatan yang terdiri dari gabungan Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), PKPI, ditambah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Pelopor Demokrasi mengusulkan empat nama calon Sebagai unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keempat nama calon adalah Endin J. Soefihara sebagai calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), E.E. Mangindaan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat (PD), Ali Masykur Musa sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Farhan Hamid sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Amanat Nasional (PAN). Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerapkan politik dua kaki. Disatu pihak mencalonkan Muhaimin Iskandar bersama koalisi kebangsaan, dipihak yang lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencalonkan Ali Masykur Musa bersama dengan koalisi kerakyatan.

Tabel 28. Peta Koalisi Pemilihan Pimpinan DPR.

Koalisi	Anggota Koalisi	Paket Pimpinan DPR	Ideologi
Koalisi kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partai Golongan Karya (P.Golkar) ➤ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ➤ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ➤ Partai Bintang Reformasi (PBR) ➤ Partai Damai Sejahtera(PDS) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Agung Laksono (P.Golkar) ➤ Sutardjo (PDIP) ➤ Muhaimin Iskandar (PKB) ➤ Zaenal Maarif (PBR) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partai Golongan Karya (P.Golkar): Ideologi Pancasila ➤ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Ideologi Pancasila Marhaenisme ➤ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Ideologi Pancasila ➤ Partai Bintang Reformasi (PBR): Ideologi Islam ➤ Partai Damai Sejahtera(PDS): Ideologi Pancasila
Koalisi Keumatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ➤ Partai Demokrat (PD) ➤ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ➤ Partai Amanat Nasional (PAN) ➤ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Endin J. Soefihara (PPP) ➤ E.E. Mangindaan (PD) ➤ Ali Masykur (PKB) ➤ A. Farhan Hamid (PAN) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Ideologi Islam ➤ Partai Demokrat (PD):Ideologi Pancasila ➤ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Ideologi Pancasila ➤ Partai Amanat Nasional (PAN): Ideologi Pancasila ➤ Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Ideologi Islam

Sumber: Diolah dari www.kpu.go.id pada 10 Oktober 2011 dan Kuskrido Ambardi, 2009

d. Peta Koalisi Pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2004

Pada pemilihan unsur pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2004 koalisi yang ada tidak jauh berbeda dengan konfigurasi koalisi pemilihan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kontestasi pada pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2004 terbagi menjadi dua kubu koalisi. Koalisi Kebangsaan merupakan gabungan dari Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) mengusulkan empat nama calon sebagai unsur Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Keempat calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2004-2009 yang diusung oleh koalisi kebangsaan adalah Sutjipto sebagai calon Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Theo L. Sambuaga sebagai calon Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Golongan Karya (P. Golkar), ditambah dua calon lagi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD): A. Ida Zulaikha Ismeth Nasution dan Sarwono Kusuma Atmadja.

Di pihak koalisi kerakyatan yang terdiri dari Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), PKPI, ditambah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Pelopor Demokrasi. Paket calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari koalisi keumatan adalah: Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), A.M. Fatwa sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Amanat Nasional (PAN), ditambah dua calon Wakil Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD): M. Aksa Mahmud dari Dewan Perwakilan Daerah (PDP) Sulawesi Selatan dan Mooryati Soedibyo dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta.

Tabel 29. Peta koalisi Pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Nama Koalisi	Partai-Partai	Paket calon Pimpinan MPR	Ideologi Partai Koalisi
Koalisi kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Partai Golongan Karya (P.Golkar) ➢ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ➢ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ➢ Partai Bintang Reformasi (PBR) ➢ Partai Damai Sejahtera (PDS) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sutjipto (PDIP) ➢ Theo. L Sambuaga (P. Golkar) ➢ A.Z. Ismeth Nasution (DPD) ➢ Sarwono Kusumaatmadja (DPD) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Partai Golongan Karya (P.Golkar): Ideologi Pancasila ➢ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Ideologi Pancasila Mathaenisme ➢ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Ideologi Pancasila ➢ Partai Bintang Reformasi (PBR): Ideologi Islam ➢ Partai Damai Sejahtera (PDS): Ideologi Pancasila
Koalisi Keumatan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ➢ Partai Demokrat (PD) ➢ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ➢ Partai Amanat Nasional (PAN) ➢ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hidayat Nurwahid (PKS) ➢ A.M. Fatwa (PAN) ➢ M. Aksa Mahmud (DPD) ➢ Mooryati Soedibyo (DPD) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Ideologi Islam ➢ Partai Demokrat (PD): Ideologi Pancasila ➢ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Ideologi Pancasila ➢ Partai Amanat Nasional (PAN): Ideologi Pancasila ➢ Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Ideologi Islam

Sumber: Diolah dari www.kpu.go.id pada 10 Oktober 2011 dan Kuskrido Abardi, 2009

e. Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Periode 2004-2009

Pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditopang oleh tujuh partai politik, yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun setelah Partai Golongan Karya (P.Golkar) tidak lagi dipimpin oleh Akbar Tanjung dan dipimpin Jusuf Kalla, Partai Golongan Karya (P.Golkar) keluar dari koalisi kebangsaan dan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Dengan keluarnya Partai Golongan Karya maka koalisi kebangsaan bubar dan meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai oposisi (Hanta yudha, 2010: 176).

Tabel 30. Peta Koalisi Pendukung Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I.

Koalisi Partai	Partai Partai	Ideologi
Koalisi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partai Persatuan pembangunan (PPP) ➤ Partai Golongan Karya (P.Golkar) ➤ Partai Demokrat (PD) ➤ Partai Amanat Nasional (PAN) ➤ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ➤ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ➤ Partai Bulan Bintang (PBB) ➤ Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partai Persatuan pembangunan (PPP): Ideologi Islam ➤ Partai Golongan Karya (P.Golkar): Ideologi Pancasila ➤ Partai Demokrat (PD): Ideologi Pancasila ➤ Partai Amanat Nasional (PAN): Ideologi Pancasila ➤ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Ideologi Pancasila ➤ Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Ideologi Islam ➤ Partai Bulan Bintang (PBB): Ideologi Islam ➤ Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI): Ideologi Pancasila
Oposisi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Ideologi Pancasila
Netral	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partai Bintang Reformasi (PBR) ➤ Partai Damai Sejahtera (PDS) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partai Bintang Reformasi (PBR): Ideologi Islam ➤ Partai Damai Sejahtera (PDS): Ideologi Pancasila

Sumber: diolah dari Kuskrindo Ambardi, 2010 dan Diolah dari www.kpu.co.id pada 10 Oktober 2011

3. Peta Koalisi Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

Pemilihan Umum 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional, dan 6 partai politik lokal. Partai-partai peserta pemilu 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 31. Partai Politik Peserta Pemilu 2009.

No	Partai Politik	Suara	%
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3.922.870	3,77%
2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1.461.182	1,40%
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	745.625	0,72%
4	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	1.260.794	1,21%
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4.646.406	4,46%
6	Partai Barisan Nasional (Barnas)	761.086	0,73%
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	934.892	0,90%
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8.206.955	7,88%
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	6.254.580	6,01%
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)	197.371	0,19%
11	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%
12	Partai Persatuan Daerah (PPD)	550.581	0,53%
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5.146.122	4,94%
14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	414.043	0,14%
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0,13%
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	896.660	0,86%
17	Partai Karya Perjuangan (PKP)	351.440	0,34%
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	414.750	0,40%
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	137.727	0,13%
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	671.244	0,64%
21	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)	630.780	0,61%
22	Partai Pelopor	342.914	0,33%
23	Partai Golongan Karya (Golkar)	15.037.757	14,45%
24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5.533.214	5,32%
25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	1.541.592	1,48%
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696	0,45%
27	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.864.752	1,76%
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	14.600.091	14,03%
29	Partai Bintang Reformasi (PBR)	1.264.333	1,21%
30	Partai Patriot	547.351	0,53%
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	324.553	0,31%
33	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	320.665	0,31%
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	1.527.593	1,47%
35	Partai Merdeka	111.623	0,11%
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%
37	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	140.551	0,14%
38	Partai Buruh	265.203	0,25%
39	Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS)		
40	Partai Daulat Aceh (PDA)		
41	Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)		
42	Partai Rakyat Aceh (PRA)		
43	Partai Aceh (PA)		
44	Partai Bersatu Aceh (PBA)		

Sumber: <http://www.pemiluindonesia.com/pemilu-2009/kpu-tetapkan-hasil-pemilu-legislatif-2009.html> pada 10 Oktober 2011

Dari 38 partai politik peserta pemilu 2009 yang masuk dalam lima besar pemenang pemilu adalah Partai Demokrat (PD) (20,85% suara), Partai Golkar (PG) (14,45% suara), Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) (14,03% suara) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (7,88%), Partai Amanat Nasional (PAN) (6,01%). Dan yang berhasil lolos *parlementary threshold* ada sembilan partai politik; (1) Partai Demokrat PD), (2) Partai Golongan Karya (P Golkar), (3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (4) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (5) Partai Amanat Nasional (PAN), (6) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (7) Partai Persatuan Pemangunan (PPP), (8) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), (9) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

Tabel 32. Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2009 Lolos *Treshold*

Partai Politik	Suara	Persentase	Kursi	Persentase Kursi
PD	21.703.137	20,85%	148	26,43%
P Golkar	15.037.757	14,45%	108	19,29%
PDI P	14.600.091	14,03%	93	16,61%
PKS	8.206.955.	7,88%	59	10,59%
PAN	6.254.580	6,01%	42	7,50%
PPP	5.533.241	5,32%	39	66,69%
PKB	5.146.406	4,94%	30	5,36%
Gerindra	4.646.406	4,46%	26	4,64%
Hanura	3.922.870	3,77%	15	2,68%

Sumber : <http://www.pemiluindonesia.com/pemilu-2009/kpu-tetapkan-hasil-pemilu-legislatif-2009.html> pada 10 Oktober 2011

Partai politik pemenang pemilu 2009 tidak mendapatkan kemenangan mayoritas. Hanya Partai Demokrat (PD) yang bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden karena syarat untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang mendapatkan suara minimal 20%. Sedangkan partai-partai politik selain Partai Demokrat (PD) hanya memperoleh suara kurang dari 20% jumlah pemilih. Oleh karena itu, partai politik yang ingin mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus bergabung atau berkoalisi dengan partai politik yang lain untuk mendapatkan minimal suara 20% sebagai syarat untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan kemenangan Partai Demokrat (PD) yang tidak kemenangan mayoritas dimungkinkan akan kesulitan untuk memenangkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk itu Partai Demokrat (PD) mesti melakukan koalisi dengan partai politik yang lain. Dalam hal ini Kuskrido Ambardi (2009) menjelaskan:

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 terdapat tiga pasangan calon: (1) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto, (2) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, (3) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dan Wiranto. Pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto diusung oleh koalisi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Buruh, Partai merdeka, Partai Kedaulatan, Partai Sarikat Islam (PSI), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Pasangan Susilo Bambang

Yudhoyono dengan Boediono didukung koalisi Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Republika, Partai Patriot, Partai Pelopor, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Indonesia Baru (PIB), PPPI, PNBKI, PKDI, Partai PDI. Pasangan Muhammad Jusuf Kalla dengan Wiranto didukung oleh koalisi Partai Golongan Karya (P Golkar) dan Parta Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Pasangan Capres dan Cawapres periode 2009-2014 juga dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 33. Pasangan Capres dan Cawapres periode 2009-2014.

No	Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	Megawati Soekarno Putri dengan Praowo Subianto	PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI
2	Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono	Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI
3	Muhammad Jusuf Kalla dengan Wiranto	Partai Golongan Karya dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Sumber: www.wikipedia.com dan www.kpu.go.id pada 10 Oktoer 2010

Kabinet Indonesia bersatu Jilid II merupakan kabinet yang komposisinya diambil dari kalangan profesional dan partai koalisi pendukung pasangan presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono. Terdapat 61% unsur kabinet berasal dari orang partai yakni 21 dari 34 orang menteri merupakan perwakilan partai, sedangkan unsur kabinet dari Profesional sebesar (39%) atau 13 dari 34

orang menteri (<http://nusantaranews.wordpress.com/> pada 10 Oktober 2011).

Partai politik yang masuk kedalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II adalah partai politik yang mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014, kecuali Partai Golongan Karya (P Golkar) yang masuk ke dalam koalisi setelah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Akhirnya partai politik yang masuk dalam kabinet antara lain: (1) Partai Demokrat (PD), (2) Partai Golongan Karya (Golkar), (3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (4) Partai Amanat Nasional (PAN), (5) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (6) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Data dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 34. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.

Partai Politik	Nama Kader Partai Politik	Kementerian	Jml
Partai Demokrat (PD)	Darwin Zahedy Saleh, Freddy Numberi, Jero Wacik, Syarifudin Hasan, EE Mangindaan, Andi Mallarangeng, Gamawan Fauzi,	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, Menneq Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menneq Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri	7
Partai Golongan Karya (P Golkar)	Agung Laksono, MS Hidayat, Mustafa Abubakar	Menko Kesra, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menneq BUMN	3
Partai Amanat Nasional (PAN)	Hatta Rajasa, Patrialis Akbar, Zulkifli Hasan,	Menko Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehutanan	3
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Suswono, Salim Assegaf Aljufrie, Tifatul Sembiring, Suharna Surapranata	Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menneq Riset dan Teknologi	4
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Muhaimin Iskandar, Helmy Faisal Zaini	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menneq Pembangunan Daerah Tertinggal	2
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Suryadharma Ali, Suharso Monoarfa	Menteri Agama, Menneq Perumahan Rakyat	2

Sumber : Diolah dari Kompas 22/10/2009

4. Analisis Partai Politik (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS)) Dalam Menjadikan Ideologi Sebagai Orientasi Memilih Mitra Koalisi.

Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, dimana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri . Menurut Lili Romli (2009: 257) koalisi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: pertama, *policy blind coalition* yaitu koalisi yang tidak didasarkan pada pertimbangan kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan. Kedua, *policy based coalition* yaitu koalisi yang berdasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasi (*policy seeking*). Secara lebih jelas dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 35. Model-Model Koalisi

<i>Policy Blind Coalitions Theory</i>	<i>Policy Based Coalitions Theory</i>
Menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi	Menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan
Minimal <i>winning coalitions</i>	Minimal <i>connected coalitions</i>
Asumsi partai bertujuan “ <i>office seeking</i> ” (memaksimalkan kekuasaan)	Asumsi partai bertujuan “ <i>policy seeking</i> ” (mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai)
Loyalitas peserta koalisi sulit dijamin	Loyalitas peserta koalisi secara minimal diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan
Sulit diprediksi, juga range ukuran jumlah partai sangat beragam	Koalisi bisa sangat gemuk dengan melibatkan partai-partai yang tidak perlu agar tujuan kebijakan mendapat dukungan mayoritas.

Sumber: Lili Romli dkk, 2009.

Dalam penelitian ini akan mengkaji apakah koalisi yang dijalin oleh partai politik selama ini termasuk kedalam *Policy Blind Coalitions Theory* atau *Policy Based Coalitions Theory*. Artinya apakah koalisi partai politik di Indonesia selama ini didasarkan pada orientasi ideologi atau tidak. Konsistensi partai politik dalam mempertahankan ideologinya dapat dilihat melalui pilihan partai politik dalam memilih mitra koalisi. Partai politik semestinya memilih mitra koalisi dengan mempertimbangkan kedekatan ideologi, visi, platform dan kebijakan partai, sebagaimana pendapat Sunni Tanuwidjaja (Kompas, 27 Maret 2010) “ke depan jika ada penataan ulang koalisi, konvergensi visi, kebijakan dan program harus dijadikan dasar utama koalisi”. Untuk mengetahui konsistensi partai politik di Indonesia

dalam menjadikan ideologi sebagai orientasi dalam berkoalisi maka akan dilihat dari pilihan partai politik memilih mitra koalisi pada pemilihan umum 1999 sampai pemilihan umum 2009, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

a. **Analisis Pemilu 1999 (Pemilihan Presiden)**

Pada pemilu Presiden tahun 1999 diikuti oleh dua calon yaitu (1) Abdurrahman Wahid (2) Megawati Soekarno Putri. Abdurrahman Wahid (Gusdur) mendapat dukungan dari Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK) yang sekarang menjadi PKS, Sedangkan Megawati Soekarno Putri mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), gabungan partai kecil yang berideologi nasionalis dan non Islam.

Dengan melihat pada tabel 21 dapat dipetakan warna ideologi yang diusung oleh partai-partai politik pada pemilu tahun 1999. Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Ideologi Sekuler Nasionalis. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan partai yang mengusung ideologi Islam. Sedangkan untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung ideologi Nasionalis namun berbasis pemilih muslim. Secara garis besar warna ideologi partai-partai politik yang ada terbelah

menjadi dua warna ideologi, antara ideologi Islam dengan Nasionalis. Selanjutnya ideologi yang diusung oleh partai politik (PDIP, P Golkar, PPP, PAN, PK) tersebut masihkah mewarnai proses partai politik didalam menjalin koalisi. Kalau partai-partai politik (PDIP, P Golkar, PPP, PAN, PK) konsisten dalam menjadikan ideologi sebagai orientasi dalam memilih koalisi semestinya partai-partai tersebut memilih mitra koalisi yang memiliki kesamaan ideologi.

Sebagaimana bisa dilihat pada tabel 21 nampak bahwa tidak semua partai politik dalam membangun koalisi didasarkan pada orientasi ideologi. Hal tersebut terlihat dari koalisi partai politik yang mendukung calon presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Masuknya Partai Golongan Karya (P Golkar) dalam koalisi pendukung Abdurrahman Wahid (Gusdur) menunjukkan bahwa koalisi yang dibangun bukanlah koalisi berbasis ideologis. Koalisi ini bukan termasuk dalam tipe kedalam *Policy Based Coalitions Theory*, yang menjadikan ideologi sebagai pertimbangan penting dalam membangun koalisi. Dengan masuknya partai Golongan Karya (P Golkar) menjadi bagian dari koalisi pendukung calon presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) maka ada dua ideologi yang berbeda dalam koalisi. Partai Golongan Karya (P Golkar) mendasarkan pada ideologi nasionalis sekuler berkoalisi dengan Partai-partai berhaluan (berideologi) Islam seperti Partai Bulan Bintang (PBB),

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK). Sedangkan untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung ideologi nasional yang memiliki basis pemilih Islam dan ideologi nasionalis dari kedua partai ini lebih condong ke nasionalis religious (Islam) karena pemimpin-pemimpin kedua partai tersebut adalah tokoh-tokoh pimpinan Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama (NU). Semestinya, koalisi yang dibangun adalah koalisi yang hanya memiliki satu warna ideologi. Partai Golongan Karya (P Golkar) yang memiliki warna ideologi sekuler berbeda dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) yang mengusung ideologi agama (Islam).

Sedangkan calon presiden Megawati Soekarno Putri didukung oleh koalisi yang beranggotakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan gabungan partai-partai kecil yang berideologi nasionalis. Kalau dilihat dari kesamaan dari warna ideologi yang dibawa oleh masing-masing partai politik yang mengusung ideologi nasionalis maka koalisi yang dibangun oleh pengusung calon presiden Megawati Soekarno Putri merupakan koalisi yang berdasarkan kesamaan ideologi. Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan warna ideologi diantara partai-partai dalam koalisi pendukungnya.

Setelah pemilihan presiden selesai dan dimenangkan oleh calon presiden Abdurrahman Wahid, selanjutnya dilangsungkan pemilihan wakil presiden. Pemilihan wakil diikuti dua calon: *pertama* adalah Megawati Soekarno Putri, *kedua* adalah Hamzah Haz. Calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri mendapat dukungan dari: (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (2) Partai Golongan Karya (Golkar), (3) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (4) Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI), (5) Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB). Sedangkan untuk calon wakil presiden Hamzah Haz didukung oleh; (1) Partai Amanat Nasional (PAN), (2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (3) Partai Keadilan (PK), (4) Partai Bulan Bintang (PBB), (5) Perserikatan Daulatul Ummah (Kuskrido Ambardi, 2009: 184). Lebih lengkapnya peta dukungan masing-masing calon wakil presiden dapat dilihat pada tabel 22.

Kompetisi pemilihan Wakil Presiden dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri. Jika diamati pada tabel 22 maka nampak bahwa terjadi perubahan peta koalisi yang terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal tersebut terlihat pada koalisi yang awalnya pendukung calon presiden Abdurrahman Wahid terjadi perpecahan, dan pindah kepihak Megawati Soekarno Putri. Partai politik yang pindah dari yang awalnya bergabung dengan koalisi pendukung

Abdurrahman Wahid menjadi pendukung Megawati Soekarno Putri dalam pencalonan sebagai wakil presiden adalah Partai Golongan Karya (P Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Masuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi tersebut membuktikan pilihan yang diambil oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukanlah didasari pertimbangan ideologi. Semestinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih Hamzah Haz untuk menjadi wakil presiden. Hal ini dikarenakan corak ideologi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dimana basisnya adalah pemilih Islam dan pemimpin-pemimpin partai sebagian besar dari tokoh Nadlatul Ulama (NU) akan lebih dekat dengan Hamzah Haz yang merupakan tokoh Islam.

Sebagaimana dipaparkan oleh Kuskrido Ambardi (2010), "Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak tepat jika dimasukkan kedalam kategori partai Islam, namun juga sulit ditempatkan digaris sekuler, hal tersebut dikarenakan para pemimpin mereka memiliki keislaman yang kuat". Nampak dari Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Matori Abdul Djalil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berasal dari tokoh Nadlatul Ulama (NU), dan Amien Rais dari Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan mantan ketua Muhammadiyah. Sedangkan koalisi dari pendukung calon presiden Hamzah Haz adalah terdiri dari partai-partai yang mengusung ideologi

Islam. Dari kesamaan ideologi partai pendukung Hamzah Haz setidaknya dapat menimbulkan kesan bahwa koalisi yang dibangun merupakan koalisi yang ideologis. Hal ini didasarkan pada adanya kesamaan ideologi dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung calon Wakil Presiden Hamzah Haz.

b. Analisis Koalisi Pendukung Kabinet Abdurrahman Wahid

Setelah dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Abdurrahman Wahid keluar sebagai pemenang dalam kompetisi pemilihan Presiden, serta Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden maka selanjutnya adalah membentuk kabinet. Sebelum menganalisa terkait koalisi dalam pembentukan kabinet, terlebih dahulu akan melihat komposisi antara Presiden Abdurrahman Wahid yang awalnya diusung oleh sebagian besar oleh partai-partai Islam dan sekaligus Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang berlatar belakang dari kalangan santri dengan wakil presiden Megawati Soekarno Putri didukung oleh partai-partai yang beraliran ideologi yang sebagian besar nasionalis sekuler. Dengan melihat fenomena tersebut dapat diprediksi bahwa kedepan kabinet yang dibangun adalah kabinet yang akan mengakomodasi partai-partai yang mengusung Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi bagian dari kabinet yang akan disusun. Kalau prediksi benar maka kabinet yang dibentuk adalah

kumpulan dari beberapa partai politik pendukung Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri yang berbeda secara ideologi. Sehingga koalisi dipemerintahan bukanlah koalisi yang didasarkan pada ideologi. Untuk lebih pastinya lihat pada tabel 23 terkait komposisi kabinet yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri.

Pada tabel 24 nampak bahwa semua partai politik yang awalnya saling berhadapan dalam kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi satu dalam kabinet yang dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Ideologi yang awalnya dikampanyekan sebelum pemilihan dan nampak saling bersaing untuk merebutkan *positioning* dimata pemilih melalui ideologi. Tetapi setelah pemilihan selesai ideologi partai politik menjadi tidak terlihat ketika penyusunan kabinet. Dalam hal ini Kuskrido Ambardi (2010: 1-2) berpendapat:

Menjelang Pemilihan umum (pemilu) 1999, mudah kita menjumpai betapa partai-partai politik itu saling bersaing keras. Mereka menikmati kebebasan untuk menegaskan warna ideologinya. Penegasan ideolog menjadi hal yang normal sebagai upaya untuk menggalang suara, partai politik bebas menegaskan apakah termasuk partai yang islamis dan sekuler. Namun ketika memasuki proses pembentukan pemerintahan, persaingan politik tersebut tampak terhenti. Berbagai perbedaan ideologis diantara partai-partai seolah tidak menjadi faktor penting dengan mengambil nama Kabinet persatuan nasional , cabinet yang terbentuk melibatkan semua partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencakup partai Islam dan Sekuler.

Kalau dilihat kembali pada tabel 24, maka nampak tidak adanya kompetisi diantara parta-partai, karena semua menjadi satu dalam kabinet. Partai-partai sudah tidak menjalankan ideologinya, tidak menjadikannya sebagai orientasi dalam pertimbangan untuk memilih mitra koalisi. Kabinet yang yang disusun oleh oleh Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri terdapat partai-partai yang berbeda secara ideologis. Terdapat dua warna ideologi: Partai-partai yang mengusung ideologi nasional sekuler seperti halnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai Golongan Karya (P Golkar). Serta partai-partai yang secara jelas mengusung ideologi Islam sebagaimana Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan (PK) ditambah lagi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasioanl (PAN) yang meskipun mengusung ideologi nasionalis namun lebih mengarah kepada Islam. Berkumpulnya partai-partai yang berbeda ideologi dalam kabinet yang disusun oleh Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Megawati Soekarno Putri membuktikan bahwa kabinet ini dibentuk bukan karena didasari pada ideologi. Dengan fenomena itu dapat dikatakan bahwa koalisi yang dibangun bukan merupakan koalisi ideologis.

Perjalanan partai politik pada pemilihan umum (pemilu) 1999 dalam membangun sebuah koalisi dari semenjak pemilihan presiden sampai saat membentuk kabinet dapat dikategorikan kedalam koalisi yang tidak didasarkan pada ideologi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudahnya partai-partai politik berubah koalisi ketika menghadapi fenomena politik tertentu, seperti pemilihan presiden, wakil presiden dan pembentukan kabinet, serta berkumpulnya partai-partai politik yang berbeda ideologi didalam satu koalisi.

c. Analisis Pemilihan Presiden Putaran I Tahun 2004

Pada pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik hanya menghasilkan 10 partai politik yang memiliki suara yang signifikan di Dewan Perwakilan Rakyat (Hanta Yuda, 2010: 31). Kesepuluh partai politik yaitu: Partai Golongan karya (P Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun kesepuluh partai politik tersebut tidak semua bisa melewati batas *electoral threshold*, hanya ada tujuh partai politik yang berhasil lolos. Ketujuh partai politik yang lolos adalah Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Pemilu 2004 secara tidak menghasilkan kekuatan mayoritas. Tidak ada satu partai politik pun yang mendapatkan suara mayoritas (*single majority*), yaitu memperoleh suara lebih dari 50%. Partai politik pemenang pemilu (P Golkar) hanya berhasil memperoleh 23 % suara. Dengan tidak adanya partai politik yang mendapatkan kemenangan mayoritas, maka konsekuensinya adalah proses politik selanjutnya harus disertai dengan koalisi partai politik (Hanta Yuda, 2010:31). Gabungan partai politik (koalisi) terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden diputaran pertama dan putaran kedua. Selain itu koalisi juga terjadi saat pembentukan kabinet. Pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan dua putaran karena pasangan calon presiden dan wakil presiden belum ada yang memperoleh suara mayoritas, yaitu mendapatkan suara 50% lebih pada putaran I.

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2004 diikuti oleh lima pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden: (1) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Wiranto dan Shalahudin Wahid, (2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Megawati Soekarno putri dan Hasyim Muzadi, (3) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo, (4) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan

Jusuf Kalla, (5) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Hamzah Haz dan Agum Gumelar. Dengan munculnya lima pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik terfragmentasi kedalam koalisi-koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Secara garis besar pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama tahun 2004 terbentuk empat koalisi besar (Hanta Yudha, 2010:161).

Pada tabel 26 dapat diketahui siapa saja calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik pendukung beserta ideologinya. Untuk mengetahui apakah koalisi yang dibangun dalam pemilu 2004 merupakan koalisi ideologis maka dapat dilihat dari koalisi yang dibangun dari masing- masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Pertama*, Koalisi pendukung pasangan Wiranto dengan Sholahudin Wahid terdiri dari: Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kasih Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Nadlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Patriot Pancasila. Kalau dilihat dari ideologi partai-partai yang mendukung pasangan Wiranto dengan Sholahudin Wahid maka terlihat koalisi ini belum bisa dikategorikan kedalam koalisi berbasis ideologi. Masuknya Partai Persatuan Nadlatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang berideologi Islam menjadi bagian koalisi dapat dilihat sebagai dukungan terhadap Sholahudin Wahid yang merupakan salah satu tokoh Nadlatul Ummah,

namun dengan masuknya PPNUI kedalam koalisi yang sebagian besar berideologi nasionalis menjadikan koalisi ini terdapat corak ideologi yang berbeda selain nasionalis dan membuat koalisi ini tidak bisa dikategorikan kedalam koalisi ideologis. Selain itu bergabungnya Wiranto yang berlatar belakang nasionalis dengan Sholahudin Wahid yang berlatar belakang santri dapat dikatakan sebagai pasangan yang tidak memiliki kesamaan secara ideologi.

Kedua, koalisi yang dibangun pasangan Megawati Soekarno Putri yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Damai Sejahtera (PDS) bisa dikategorikan sebagai koalisi yang ideologis. Kedua partai ini secara formal mempunyai ideologi yang sama yaitu nasionalis. *Ketiga*, adalah pasangan presiden dan wakil presiden Amien Rais-Siswono Yudhohusodo. Pasangan ini didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Sosialis Indonesia (PSI), (PPDI), PPNB, PNBK, PBSB, Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme). Partai-partai yang mendukung pasangan Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo tidaklah berasal dari ideologi yang sama. Kalau kita perhatikan pada tabel diatas, terdapat ideologi Nasionalis dan ideologi Islam yang mengisi koalisi ini. Ideologi Islam dibawa oleh PKS dan PBR sedangkan untuk PSI, PPDI, PNBK, PBSB,

PNI Marhaenisme membawa ideologi Nasionalis. Sedangkan PAN sendiri bisa masuk diantara kedua ideologi tersebut, namun secara AD ART PAN bisa dikategorikan kedalam ideologi Nasionalis, meskipun secara basis massa dari kalangan Islam. Dengan adanya partai-partai dengan ideologi yang berbeda , maka koalisi ini tidaklah merupakan koalisi yang dibangun atas dasar ideologis.

Keempat, koalisi yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla. Koalisi ini disusung oleh Partai Demokrat (PD) dengan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai Demokrat (PD) mengusung ideologi nasionalis, sedangkan untuk Partai Bulan Bintang (PBB) membawa ideologi Islam. Dengan melihat konfigurasi tersebut maka koalisi yang dibangun bukanlah merupakan koalisi yang ideologis. Dari keseluruhan koalisi partai politik yang dibangun pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama tahun 2004 hanya koalisi pendukung pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi yang bisa dikategorikan sebagai koalisi ideologis. Tetapi yang menjadi catatan adalah masuknya Hasyim Muzadi sebagai wakil presiden dari kalangan santri mengisyaratkan bahwa pilihan ini bukanlah pilihan yang didasari pada ideologi, namun diorientasikan sebagai alat pendulang suara karena Hasyim Muzadi merupakan ketua umum Nadlatul Ulama (NU). Sehingga pasangan ini

juga bisa dimasukkan kedalam koalisi non ideologis sebagaimana tiga .
koalisi yang lain.

d. Analisis Pemilihan Presiden Putaran II tahun 2004

Setelah dilakukan pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, keempat pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mendapatkan suara mayoritas (50% lebih) maka untuk mendapatkan suara mayoritas dilakukan pemilihan tahap kedua dengan hanya mengikut sertakan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan perolehan suara terbanyak nomor satu dan nomor dua. Hasil dari pemilihan tahap satu adalah; Pasangan Megawati Hasyim Muzadi memperoleh 26.286.788 suara (27%), pasangan Wiranto dan Shalahudi Wahid memperoleh 31.569.104 suara (22%), pasangan Amien Rais-Siswono Yudhohusodo memperoleh 17.392.931 suara (15%), pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memperoleh 39.838.184 suara (33%), pasangan Hamzah Haz –Agum Gumelar 3.569.861 suara.

Tabel 38. Perolehan Suara Pasangan Capre-Cawapres Putaran I tahun 2004.

Capres-Cawapres	Suara Capres	%
Megawati Hasyim Muzadi	26.286.788	27
Wiranto dan Shalahudi Wahid	31.569.104	22
Amien Rais-Siswono Yudhohusodo	17.392.931	15
Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla	39.838.184	33
Hamzah Haz –Agum Gumelar	3.569.861	3
Total	118.656.868	100

Sumber:http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5451&Itemid=76 pada 10 Oktober 2011

Berdasarkan ketentuan bahwa yang berhak mengikuti pemilihan ditahap kedua adalah pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang mendapat suara terbanyak kesatu dan kedua maka yang berhak menjadi kandidat dipemilihan putaran kedua yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden Megawati Soekarno Putri dengan Hasyim Muzadi dan Pasangan calon Preisiden dengan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla. Selanjutnya untuk mengetahui apakah koalisi yang dibangun pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diputaran kedua merupakan koalisi yang didasari orientasi ideologis atau tidak, maka dapat dilihat bagunan koalisi yang terjadi pada pemilihan diputaran kedua.

Pada tabel 27 diketahui bahwa pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi didukung oleh koalisi partai politik yang terdiri tujuh partai politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Kasih Peduli Bangsa (PKPB). Selanjutnya koalisi ini lebih dikenal dengan koalisi kebangsaan yang dideklarasikan pada tanggal 19 Agustus 2009 (Hanta Yudha, 2010; 163). Sementara koalisi yang mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla mendapat dukungan dari empat partai politik yaitu; Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI. Koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono selanjutnya dikenal dengan koalisi kerakyatan.

Koalisi kebangsaan yang dibangun untuk mendukung pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Hasyim Muzadi sebenarnya bisa dimasukkan kedalam koalisi yang memiliki kesamaan ideologi, karena hampir sebagian besar koalisi kebangsaan diusung oleh partai-partai politik yang berideologi nasionalis: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Kasih Peduli Bangsa (PKPB). Namun dugaan tersebut menjadi tidak berlaku karena dikoalisi kebangsaan terdapat dua partai politik yang mengusung ideologi Islam; Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan masuknya

Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung ideologi Islam bergabung menjadi satu koalisi bersama partai-partai yang berideologi nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Kasih Peduli Bangsa (PKPB), maka koalisi ini bukanlah koalisi yang didasarkan pada orientasi ideologi.

e. **Koalisi Pendukung Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1**

Setelah dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla mendapatkan 69.266.350 suara atau sekitar 61 % , sedangkan Megawati Soekarno Putri mendapatkan 44.990.704 suara atau 39%.

Tabel 39. Hasil Pilpres Putaran Kedua.

Capres-Cawapres	Suara	%
Megawati-Hasyim Muzadi	44.990.704	39
SBY-JK	69.266.350	69

Sumber:http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5532 pada 10 Oktober 2011

Pasangan Susillo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla yang mendapatkan 69.266.350 atau 61% akhirnya keluar sebagai pemenang dalam pemilihan presiden tahap kedua. Dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kall menjadi Presiden dan Wakil

Wresiden maka dengan hak prerogatif yang dimiliki, Presiden dan Wakil Presiden berhak menyusun kabinetnya sendiri. Namun dengan Partai Demokrat yang hanya mendapatkan suara tidak mayoritas, maka akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono melakukan koalisi dengan beberapa partai politik untuk mendukung pemerintahannya supaya berjalan dengan lebih stabil (Hanta Yudha, 2010). Koalisi tersebut nampak dari adanya pembagian menteri di Kabinet Indonesia Bersatu.

Tabel 40. Distribusi Jabatan Menteri Berdasarkan Partai Politik (2004).

Partai Politik	Menteri	%
Golkar	2	5,5
PDIP	0	0
PKB	2	5,5
PPP	2	5,5
PD	2	5,5
PKS	3	8,5
PAN	2	5,5
PBB	2	5,5
BPD*	2	5,5
Non Partai- TNI	4	11
Non Partai- Profesional	15	42
Total	36	100

Sumber: Kuskrido Ambardi, 2009; 266

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hanya ada satu partai politik besar yang menjadi oposisi bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya jatah menteri bagi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP). Sedangkan hampir semua partai-partai besar masuk menjadi koalisi pendukung

pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari adanya jatah menteri yang diberikan kepada partai-partai pendukung yang menjadi unsur Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Sebagai bentuk transaksi diantara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Partai Politik pendukungnya adalah diberikanya jatah kursi menteri untuk partai politik pendukung oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan sebagai kompensasi dari jatah menteri yang diberikan maka partai- partai politik harus mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau dugaannya benar, maka koalisi ini bukanlah berorientasi pada ideologi, namun lebih pada kekuasaan. Untuk menjawab apakah koalisi yang dibentuk merupakan kolisi yang berdasarkan pada kesamaan ideologi atau tidak, dapat dijawab dengan melihat ideologi partai politik yang berkoalisi mendukung pemerintah, khususnya ideologi partai politik yang menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Tabel 41. Ideologi Partai Politik yang Menjadi Bagian KIB (2004).

Partai Politik	Ideologi
Golkar	Nasionalis
PKB	Nasionalis
PPP	Islam
PD	Nasionalis
PKS	Islam
PAN	Nasionalis
PBB	Islam
BPD	Campuran Islam-Nasionalis

Sumber: Diolah dari www.kpu.go.id dan Kuskrindo Ambardi, 2009

Komposisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) terdiri dari partai-partai politik yang tidak mengusung ideologi yang sama. Koalisi partai politik yang menjadi pendukung pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan ideologi yang diusung masing-masing partai politik. Partai politik dengan ideologi yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai dengan ideologi Nasionalis yang dibawa oleh Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan untuk BPD terdapat partai politik yang membawa ideologi Islam dan juga Nasionalis. Komposisi kabinet yang didalamnya terdapat unsur partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda menunjukkan bahwa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) bukan merupakan kabinet yang ideologis. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa

koalisi yang dibangun sebagai pendukung pemerintah bukanlah koalisi yang didasari pada kepentingan atau persamaan ideologi.

f. Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009

Pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2009 terdapat tiga calon pasangan: (1) Pasangan Calon Presiden Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, (2) Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono, (3) Muhammad Jusuf Kalla dengan Wiranto. Pasangan Megawati Soekarno di dukung oleh koalisi partai politik; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono didukung oleh; Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kasih Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Republikan, Partai Patriot, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai

Matahari Bangsa (PMB), Partai Pelopor, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI). Pasangan Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto didukung oleh; Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (P Hanura).

Setelah dilakukan pemungutan suara dengan hasil: pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto mendapatkan 32.548.105 suara, atau 26,79%. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono mendapat 73.874.562 suara, atau 60,80%. Dan Pasangan Jusuf Kala dengan Wiranto mendapat 15.081.814 suara, atau 12,41%. Dengan mendapatkan 60,80% suara dari seluruh pemilih, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono keluar sebagai pemenang pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama tanpa melewati pemilihan tahap kedua seperti halnya pada tahun 2004

Tabel 42. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014.

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Pendukung	Perolehan Suara
1	Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto	PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI	32.548.105 (26,79%)
2	Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono	Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPI, Partai Republikan Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI	73.874.562 (60, 80%)
3	Muhammad Jusuf Kalla dengan Wiranto	Partai Golongan Karya dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	15.081.814 (12,41%)

Sumber: http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/pilpres2009/reakapitulasi_nasional.pdf pada 10 Oktober 2011

Dari tabel diatas memberikan informasi tentang nama calon presiden dan wakil presiden, koalisi partai-partai pendukung masing-masing pasangan calon, serta ideologi setiap partai politik yang ada dalam koalisi pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2009. Untuk mengetahui terkait orientasi koalisi oleh partai-partai politik maka dapat diamati dari konfigurasi koalisi yang dibuat oleh partai politik.

Pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto didukung oleh partai politik yang tidak semuanya memiliki ideologi yang sama yaitu nasionalis. Hal tersebut terlihat dari masuknya Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang mengusung ideologi Islam menjadi satu koalisi dengan partai-partai politik nasionalis seperti: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (P Gerindra), PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI.

Sedangkan untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono juga didukung oleh partai-partai yang tidak memiliki kesamaan secara ideologi. Pasangan ini didukung oleh Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kasih Peduli Bangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Republikan, Partai Patriot, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Pelopor, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang mengusung ideologi nasionalis.

Namun koalisi pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono juga didukung oleh partai-partai yang mengusung ideologi Islam seperti; Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR). Pasangan Jusuf Kalla dengan Wiranto sebenarnya didukung oleh koalisi partai politik yang memiliki kesamaan secara ideologi. Koalisi ini didukung oleh Partai Golongan Karya (P Golkar) dengan Partai Hati Nurani Rakyat (P Hanura), kedua partai tersebut sama-sama mengusung ideologi nasionalis.

Dari ketiga koalisi partai politik yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden terlihat bahwa koalisi yang dibangun bukanlah koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi dari setiap partai politik. Argumen ini dibuktikan dengan adanya perbedaan secara ideologi dari koalisi yang dibangun oleh partai-partai politik. Fenomena itu nampak dari koalisi pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono dan Pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Dalam koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan ini terdapat dua ideologi yang berbeda yaitu ideologi Islam dan ideologi Nasionalis yang berkumpul dalam satu koalisi. Sedangkan untuk pasangan Jusuf Kalla dengan Wiranto secara kesamaan ideologi dari partai pendukungnya terlihat koalisi yang dibangun oleh pendukung pasangan ini nampak lebih ideologis dibanding dengan

koalisi pendukung kedua pasangan calon yang lainnya. Karena koalisi pendukung Jusuf Kalla dengan Wiranto sama-sama mengusung ideologi nasionalis. Namun kesimpulan ini menjadi bias ketika pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto kalah, Partai Golkar bergabung dengan koalisi pendukung Pemerintah yang didalamnya juga terdapat partai-partai Islam.

h. Koalisi Pendukung Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Setelah memenangi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum 2009 maka yang menjadi tugas Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono adalah membentuk kabinet yang akan membantu tugas presiden dan wakil presiden lima tahun kedepan. Karena Indonesia menganut sistem Presidensial maka presiden memiliki hak prerogratif untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pembantunya dikabinet (Hanta Yudha, 2009).

Dengan kewenangan tersebut semestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih menteri-menteri untuk masuk dalam kabinet sesuai dengan pertimbangannya, dan dicari yang sesuai untuk bisa membantu kinerjanya. Namun yang terjadi adalah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II berisi oleh partai-partai yang menjadi mitra koalisi Susilo Bambang Yudhoyono. Secara lebih rinci: kabinet Indonesia bersatu Jilid II merupakan kabinet yang komposisinya diambil dari kalangan profesional dan partai koalisi pendukung pasangan presiden

dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Boediono saat pemilihan presiden, kecuali Partai Golongan Karya (P Golkar). Terdapat 61% unsur kabinet yang berasal dari orang partai politik yakni 21 dari 34 orang menteri merupakan perwakilan partai, sedangkan unsur kabinet dari Profesional sebesar (39%) atau 13 dari 34 orang menteri (<http://nusantaranews.wordpress.com/> pada 10 Oktober 2011).

Komposisi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (lihat tabel 34) terdapat unsur dari partai politik mitra koalisi Susilo Bambang Yudhoyono. Terdapat enam partai politik yang kader-kadernya menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB Jilid II). Keenam partai politik tersebut adalah: Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kalau dilihat dari sisi ideologi partai-partai politik yang masuk dalam koalisi dipemerintahan terdapat perbedaan dari ideologi yang diusung masing-masing partai politik. Ideologi Islam yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan ideologi nasionalis diusung oleh Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan tidak adanya kesamaan ideologi yang diusung oleh partai-partai politik dalam koalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dipemerintahan,

memperlihatkan bahwa koalisi yang dibangun oleh partai-partai politik bukan merupakan koalisi ideologis. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa koalisi yang dibangun bukan merupakan koalisi yang berorientasi pada ideologi.

Pola koalisi yang dilakukan oleh partai-partai pada tahun 1999-2009 bukanlah koalisi yang dibangun berdasarkan orientasi ideologi (*Policy Based Coalitions Theory*) namun hanya berorientasi pragmatis (*Policy Blind Coalitions Theory*). Partai politik di Indonesia cenderung tidak menggunakan ideologi sebagai pertimbangan penting dalam membangun koalisi. Namun partai-partai lebih pada berorientasi pragmatis kekuasaan. Partai-partai politik cenderung melonggarkan ikatan ideologinya. Hal ini terlihat pada bagaimana partai memilih mitra didalam koalisinya. Partai cenderung tidak memperhatikan kedekatan ideologi, ataupun persamaan isu yang akan diangkat didalam koalisi. Hal itu terlihat dari tiga fenomena berikut: *pertama*, fenomena partai politik melakukan koalisi bukan hadir karena untuk mengangkat isu, atau kebijakan tertentu, namun hanya seputar terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilihan Kepala Daerah. Dengan kata lain partai politik hanya melakukan koalisi jika urusan bagi-bagi jabatan, bukan pada atas kedekatan ideologi dan isu yang akan di angkat. *Kedua*, fenomena unsur

koalisi yang terdiri dari macam-macam ideologi, atau disebut dengan koalisi pelangi. Partai politik mudah berubah-ubah dalam membangun koalisi dengan partai politik yang lain meskipun berbeda-beda ideologinya. *Ketiga* adalah mudahnya partai politik untuk berganti-ganti pasangan koalisi.

D. Konsistensi Partai Politik Dalam Mengelaborasi Ideologi Partai Politik Ke Dalam Kebijakan Publik (Undang-Undang Sisidiknas No 20 Tahun 2003)

Dalam kebijakan publik, ideologi merupakan bagian penting dalam memberi arah produk sebuah kebijakan publik. Menurut Ramlan Surbakti (2007) ada empat faktor yang dapat mempengaruhi corak dan arah kebijakan publik, yaitu: ideologi dan konstitusi, latar belakang pribadi pembuat keputusan, informasi yang tersedia, golongan pendukung pembuat keputusan dan keputusan yang telah ada. Senada dengan pernyataan tersebut, James Anderson juga berpendapat bahwa corak dan arah kebijakan publik dipengaruhi oleh: nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijakan, dan nilai-nilai ideologi (Budi Winarno, 2008:133-136). Dari kedua pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ideologi memiliki pengaruh yang kuat terhadap corak dan arah kebijakan publik yang akan dihasilkan. Kebijakan publik merupakan elaborasi dari ideologi atau merupakan ujung tombak dari ideologi. Sebagaimana dikatakan Riant Nugroho (2009) “kebijakan publik

merupakan ujung tombak dari ideologi”. Partai politik merupakan aktor kebijakan publik (Ramlan Surbakti, 2007).

Disisi lain partai politik memiliki ideologi yang merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah partai politik (Firmanzah, 2008). Jadi partai politik merupakan aktor dari kebijakan publik sekaligus juga sebagai alat untuk digunakan sebagai perjuangan sebuah ideologi. Oleh karena itu, partai politik semestinya konsisten memperjuangkan apa yang menjadi ideologinya dengan cara mengelaborasi menjadi kebijakan-kebijakan publik. Dengan kata lain, wajah ideologi partai politik dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan.

Sedangkan menurut Klingeman (Fadilah Putra, 20003 :73-75), untuk melihat kaitan antara janji politik dengan kebijakan publik ada tiga model yaitu : *pertama*, adalah model agenda, alat ini digunakan dengan cara menguji efek-efek kemenonjolan berbagai isu dalam janji-janji politik partai terhadap prioritas alokasi anggaran dan kebijakan pada pemerintahan pasca pemilu, tanpa harus memilih mana partai yang menang dan mana partai yang kalah dalam pemilu. *Kedua*, adalah model mandate, alat ini digunakan dengan cara mengamati pengaruh tambahan dari janji politik partai terhadap produk kebijakan dan alokasi anggaran, dengan melihat pada sisi partai mana yang menang dalam pemilu. Sehingga harapannya di model ini adalah akan terlihat jelas bahwa nuansa kebijakan yang muncul dalam rezim pasca pemilu didominasi oleh partai pemenang pemilu. *Ketiga*, adalah model ideologi, hal ini

ditempuh dengan jalinan ideologi yang selama ini diyakini dalam jangka waktu yang panjang. Yaitu, melihat apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh partai-partai politik sesuai dengan arah ideologinya.

Dalam sub bab ini akan dikaji mengenai konsistensi partai politik dalam membuat kebijakan publik. Menggunakan model Klingeman dalam membedah hubungan antara kebijakan publik dengan janji-janji partai politik saat kampanye, khususnya model ketiga yaitu model ideologi, yaitu dengan melihat apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh partai-partai politik sesuai dengan arah ideologinya. Sebagai studi kasus dalam kajian ini adalah Undang-Undang Sisdiknas (UU 20 Tahun 2003), dipilih undang-undang ini karena dalam proses pembuatannya menjadi isu publik yang populer. Selain itu dalam pembuatan undang-undang Sisdiknas diwarnai isu agama yang menjadi perdebatan antara partai politik dengan ideologi nasionalis dan partai politik dengan ideologi agama (Islam).

Undang-undang Sisdiknas merupakan undang-undang yang sangat penting dalam politik parlemen antara tahun 2002 dan tahun 2003, alasannya adalah sampai tingkat tertentu fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sangat ideologis dalam tiga bulan terakhir menjelang finalisasi rancangan undang-undang ini (Kuskrido Ambardi, 2009:200). Partai-partai politik terlibat perang ideologis sebelum akhirnya mencapai kompromi pada tahun 2003 (Kuskrido Ambardi, 2009:201). Gagasan awal munculnya undang-undang ini berasal dari sekelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut menilai bahwa undang-undang pendidikan yang lama (UU No.2/1989) sudah tidak memadai sebagai landasan hukum untuk menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang (Kuskrido Ambardi, 2009:201).

Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2002 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membawa gagasan dalam bentuk rancangan produk dari panitia kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang selanjutnya mengirim surat kepada pemerintah, yang meminta menunjuk wakil pemerintah untuk membahas rancangan tersebut; pada tanggal 29 Februari 2003 pemerintah mengajukan rancangan sendiri (PPRUU Sisdiknas, Sekretariat Umum DPR RI, 2003). Rancangan versi pemerintah inilah yang memancing kontroversi, terdapat isu penting yang termaktub dalam dua pasal, yaitu : terkait posisi agama dalam pendidikan. Lebih jauh Kuskrido Ambardi (2009:201-202) menggambarkan situasi ini sebagai berikut:

pasal tiga rancangan pemerintah menyatakan bahwa tujuan sistem pendidikan nasional adalah membentuk pelajar menjadi beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia.pasal ini ditingkat masyarakat memunculkan pertentangan yang tajam, bukan hanya anantara kalangan agama dan sekuler, melainkan antara kalangan Muslim dan Kristen. Bagi sekelompok masyarakat, kata-kata beriman , bertakwa, dan berakhlak mulia dianggap kosakata khas Islam dan karena itu, mereka menganggap rancangan pemerintah itu mengandung bias Islam yang bertentangan dengan kepentingan komunitas non-Muslim. Lebih jauh mereka yang menentang menganggap bahwa rancangan itu adalah kamuflase belaka dari satu kelompok Islam dalam Usaha mereka mendirikan Negara Islam yang lama diimpikan.

Dari apa yang disampaikan diatas, setidaknya muncul benturan kepentingan ideologis dari masing-masing partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tarik-menarik kepentingan itu muncul antara partai politik yang membawa ideologi Islam dengan Partai politik yang mengusung ideologi nasionalis atau sekuler. Kepentingan partai-partai yang membawa ideologi Islam adalah terkait dengan agenda syariatisasi, yaitu bagaimana nilai-nilai Islam bisa mewarnai disetiap kebijakan publik (wawancara dengan Kuskrido Ambardi, 24 April 2011). Sedangkan kepentingan partai-partai politik yang membawa ideologi nasionalis atau sekuler adalah bagaimana menolak adanya dominasi nilai-nilai dari satu golongan atau menolak adanya campuran agama dalam setiap kebijakan publik yang di keluarkan oleh Negara. Apalagi dalam rancangan undang-undang Sisdiknas terdapat pasal yang mengharuskan semua sekolah memberi murid pelajaran agama sesuai dengan agama para murid oleh guru agama yang sesuai. Pasal tersebut dikalangan masyarakat umum dikenal sebagai pasal agama (Kuskrido Ambardi, 2009:201). Kasus pro dan kontra tentang Rancangan Undang-Undang Sisdiknas terutama pasal 12 Ayat 1, tentang kewajiban sekolah formal untuk menyelenggarakan pendidikan agama, serta diajarkan oleh guru agama yang sama dapat dibaca sebagai masih tetap hidupnya pandangan yang menolak kehadiran agama (Islam) dalam wilayah publik dalam derajat yang berbeda dengan penolakannya terhadap Islam sebagai ideologi negara atau Piagam Jakarta sebagai dasar Negara (Nasiwan dkk, 2010). Dengan kentalnya isu agama dalam pembahasan

rancangan undang-undang ini, maka pertarungan antar partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nampak menjadi pertarungan ideologis.

Pasal agama yang muncul dalam rancangan undang-undang Sisdiknas versi pemerintah dan diadopsi oleh Panja Dewan perwakilan Rakyat (DPR) telah membuat perpecahan, tidak hanya diwilayah politik yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja, namun juga melebar pada wilayah sosial (masyarakat umum). Perpecahan di wilayah sosial nampak dari adanya berbagai aksi masa antara bulan Maret dan Juni 2003, berbagai organisasi masa Islam melakukan aksi dijalan-jalan dan mendatangi gedung DPR untuk menyuarakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang Sisdiknas, khususnya penerapan pasal agama. Organisasi-organisasi seperti Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indoneisia (MUI), berbagai mahasiswa Islam dari berbagai Universitas dan asosiasi-asosiasi sekolah semuanya mendukung diterapkannya pasal agama tersebut (Koran Tempo, 14 Maret 2003). Disisi yang lain, berbagai kelompok orang Kristen dan Katolik menentang rancangan undang-undang Sisdiknas; Majelis Pendidikan Kristen, Majelis Nasional Pendidikan Khatolik, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), serta banyak komunitas Kristen dan Khatolik diseluruh Indonesia menentang hal tersebut (Kompas, 13 Maret 2003).

Di wilayah politik, perbedaan pandangan terjadi diantara fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok yang mendukung pasal agama, dengan kelompok yang tidak mendukung atau menolak pasal agama. Fraksi-fraksi yang mendukung pasal agama diwakili oleh fraksi-fraksi Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Keadilan (PK), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB), sedangkan fraksi-fraksi yang menolak disahkannya pasal agama dalam undang-undang Sisdiknas (UU no 20 Tahun 2003) adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI), dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) (Kuskrido Ambardi, 2009:204). Dalam pandangan awalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cenderung mengakomodasi kepentingan konstituen non muslim yang berasal dari Indonesia Timur (Kuskrido Ambardi, 2009:204). Pandangan masing-masing fraksi terhadap pasal agama dalam undang-undang Sisdiknas (UU NO 20 Tahun 2003) dapat digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 42. Pandangan Awal Fraksi di DPR Terhadap Adanya Pasal Agama dalam UU Sisdiknas (UU No 20 Tahun 2003).

No	Faktor	Fraksi-Fraksi
1	Mendukung Disahkannya UU Sisdiknas dengan Pasal Agama	Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Keadilan (PK), dan Partai Bulan Bintang (PBB), Fraksi Partai Golongan Karya (P Golkar)
2	Menolak Disahkannya UU Sisdiknas dengan Pasal Agama	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI), dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)

Sumber: Kuskrido Ambardi, 2009

Pertentangan tersebut menyisakan ruang kompromi, ketika tekanan untuk membuang pasal agama memuncak, akhirnya menghapus kewajiban bagi sekolah menyediakan guru agama. Sebaliknya, pemerintah melalui Menteri Agama dan Pendidikan akan menyediakan guru agama bagi sekolah (Koran Kompas, 28 Maret 2003). Pada tanggal 11 Juni 2003 diadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan akhir para fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pandangan akhir fraksi-fraksi yang disampaikan pada sidang paripurna tanggal 11 Juni 2003 berbeda dengan pandangan awal. Dalam sidang ini, semua fraksi menerima rancangan undang-undang Sisdiknas menjadi Undang-Undang Sisdiknas (UU No 20 Tahun 2003), kecuali Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) yang tetap menolak disahkannya rancangan

undang-undang Sisdiknas menjadi Undang-Undang. Pandangan fraksi-fraksi tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 43. Pandangan Akhir Fraksi/ Partai Politik Terhadap RUU Sisdiknas (UU No 20 Tahun 2003)

N0	FRAKSI/ POLITIK	PARTAI	PANDANGAN
1	Fraksi Golkar		Menerima disahkannya RUU Sisdiknas
2	Fraksi PDIP		Menerima disahkannya RUU Sisdiknas, meskipun minta untuk ditunda.
3	Fraksi PAN&PKS		Menerima disahkannya RUU Sisdiknas
4	Fraksi PPP		Menerima disahkannya RUU Sisdiknas
5	Fraksi PKB		Menerima disahkannya RUU Sisdiknas
6	Fraksi PBB		Menerima disahkannya RUU Sisdiknas
7	PDKB		Menolak disahkannya RUU Sisdiknas

Sumber: Kuskrido Ambardi, 2009

Dari pandangan akhir fraksi/ partai politik memperlihatkan adanya ketidak konsistenan yang dilakukan oleh partai-partai politik dari pandangan awal. Terdapat fraksi/ partai politik yang berubah pandangan, yang awalnya menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Sisdiknas, berubah mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut. Secara konsistensi ideologi partai politik, juga nampak bahwa partai-partai politik yang ada di Dewan perwakilan Rakyat (DPR) tidak semua konsisten dalam memperjuangkan ideologi partai. Kalau dilihat dalam tabel diatas, hanya Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang masih konsisten dengan ideologi yang diusungnya, yaitu ideologi Islam. Serta dari kelompok partai nasionalis (Pluralisme) hanya Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) yang konsisten dengan ideologi nasionalis yaitu mendengarkan

kepentingan minoritas. Sedangkan untuk Partai Golongan Karya (P Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikenal dengan ideologi nasionalis sekuler menerimanya, meskipun PDIP tidak hadir dalam sidang Paripurna pengesahan RUU Sisdiknas (Wawancara dengan Kuskrido Ambardi, tanggal 24 April 2011). Lebih jauh Kuskrido Ambardi (2009: 205-206) menerangkan sikap PDIP sebagai berikut

Menyangkut PDIP, partai ini bisa menerima rancangan itu namun meminta tenggang waktu satu minggu untuk member penjelasan kepada konstituenya, terutama mayoritas Kristen dari Indonesia Timur... Namun Muhaimin Iskandar dari PKB, waktu itu Ketua Sidang Paripurna, menyatakan bahwa penundaan itu melanggar aturan DPR. Akibatnya, Sidang Paripurna itu digelar tanpa kehadiran anggota PDIP... Jadi, PDIP bukan menolak rancangan itu hanya ingin menunda sidang paripurna.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Partai Golkar dan PDIP tidak konsisten dengan ideologinya, karena ikut menerima disahkannya Rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang syarat dengan agenda Islamisasi atau bias Islam. Bahkan menurut Kuskrido Ambardi, bahwa disahkannya Rancangan Undang-Undang Sisdiknas menjadi Undang-Undang adalah kemenangan dari pihak Islam (wawancara dengan Kuskrido Ambardi, 24 April 2011). Tidak konsistennya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam memperjuangkan ideologinya juga nampak dari rancangan undang-undang versi Pemerintah yang lebih cenderung memberi porsi lebih terhadap hadirnya pasal agama, padahal presiden saat itu adalah Megawati Soekarno Putri yang juga menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berideologi nasionalis sekuler. Sedangkan bagi Partai Golongan Karya (P

Golkar), dukungan yang diberikan kepada disahkannya undang-undang ini memberikan sinyal bahwa partai ini tidak konsisten memperjuangkan ideologi nasionalisnya, dimana semestinya partai ini juga mendengarkan suara-suara dari golongan minoritas non muslim yang menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Namun kalau melihat dari ketua umum Partai Golongan Karya (P Golkar) yang bersal dari Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia (HMI) maka dukungan terhadap disahkannya Rancangsn Undang-Undang tersebut menjadi sangat wajar.

Posisi dilematis adalah dihadapi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menjadi dilematis dikarenakan secara basis massa, kedua partai ini adalah sebagian besar dari kalangan umat Islam. Namun secara formal ideologi kedua partai ini adalah nasionalis, yang mendukung pluralitas (Kuskridi Ambardi, 2009). Jadi tidak hanya mengakomodir kepentingan umat-umat Islam saja, tetapi juga umat-umat minoritas non muslim. Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki basis massa dari kalangan Muhammadiyah. Hal ini nampak dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai dipegang oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sebagai contoh adalah ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) adalah Amien Rais yang dulunya adalah mantan ketua umum Muhammadiyah. Bahkan menurut Amien Rais “Politik yang dijalankan seorang Muslim, sekaligus berfungsi sebagai alat dakwah, sudah tentu bukanlah politik sekuler, melainkan politik yang penuh komitmen kepada Allah” (Firdaus Syam,2003: 76). Melihat pemikiran Amien Rais yang

menjadikan politik sebagai alat dakwah, maka dapat diartikan bahwa keberadaan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebagai alat untuk melakukan Islamisasi. Meskipun secara formal menggunakan ideologi nasionalis, namun memiliki kecondongan kepada religiusitas (Islam).

Kondisi Partai Amanat Nasional (PAN) mirip dengan kondisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemiripannya nampak dari basis masa yang sama-sama umat Islam sebuah organisasi massa Islam. Tokoh besar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang juga mantan ketua umum organisasi masa Islam terbesar yaitu Nadlatul Ulama (NU). Oleh karena berasal dari basis organisasi massa Islam, kedua partai ini lebih dikategorikan dekat dengan religiusitas (Islam). Meskipun secara formal di Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga lebih menukung ideologi nasionalis yang menghargai semangat-semangat pluralitas. Jadi dengan kecenderungannya kepada religiusitas (Islam), maka kedua partai ini sangat wajar ketika mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang Sisdiknas menjadi undang-undang. Tetapi menjadi tidak wajar dan tidak konsisten terhadap ideologi, kalau ditarik garis lurus dengan ideologi formal dari kedua partai ini (PAN dan PKB) yaitu nasionalis.

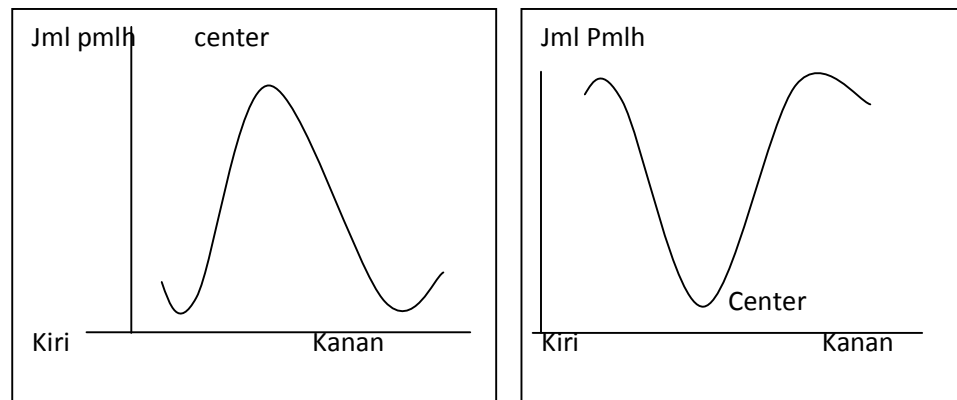
E. Pergeseran Ideologi Partai Politik Di Indonesia

1. Konflik Ideologi Partai-Partai Politik Pada Massa Demokrasi Parlementer

Perkembangan kepartaian di negara-negara Barat menjelang perang dunia kedua mengalami perkembangan baru. Partai-partai politik mulai meninggalkan tradisi membedakan antara berbagai jenis partai, seperti patronage versus ideologi, massa versus kader, “kiri” versus “kanan”. Hal itu disebabkan adanya keinginan partai-partai kecil untuk memperluas dukungan suara, dengan cara merangkul pemilih tengah (*median voter* atau *floating vote*) dan mengendorkan sikap doktriner, kaku, serta eksklusif yang dulu mereka pegang teguh menjadi fleksibel. Fenomena ini disebut oleh Otto Kirchheimer dengan *de-ideologisasi* partai-partai. Yaitu partai-partai politik dengan ideologi ekstrim “kiri” maupun “kanan” bergeser secara sentripetal kesisi tengah (*trend to center*) atau dengan kata lain terjadi konvergensi antara partai “kiri” dan “kanan” (Miriam Budiardjo, 2008:400). Lebih lanjut Otto Kirchheimer menyebut jenis ini dengan *cath-all party*, yaitu partai yang ingin menghimpun semaksimal mungkin dukungan dari bermacam-macam kelompok masyarakat dan dengan sendirinya inklusif. Anthony Downs menambahkan, dengan terjadinya konvergensi ini akan mempengaruhi jumlah pemilih, yaitu lebih banyak konvergensi akan menghasilkan kenaikan pemilih, sedangkan lebih sedikit konvergensi

mengakibatkan penurunan pemilih (Miriam Budiardjo, 2008:400). Seperti diperlihatkan dalam tabel dibawah ini:

Gambar 7. Perbedaan Konvergensi Ideologi Kiri/Kanan dalam Masyarakat



Dalam masyarakat mapan konvergensi (titik temu) ideologi kiri dan kanan terjadi di senter **Dalam masyarakat terpolarisasi tidak ada konvergensi kiri dan kanan, tetap ekstrim**

Sumber : Miriam Budiardjo, 2008:401

Dalam masyarakat Eropa saat itu, partai “kiri” dicirikan dengan adanya campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara total, kesejahteraan untuk lapisan bawah. Sedangkan partai kanan dicirikan dengan pasar bebas secara total, kesejahteraan untuk lapisan atas (Miriam Budiardjo, 2008:400). Berbeda dengan kondisi di Indonesia, istilah partai “kiri” adalah partai politik yang membawa ideologi sosial-komunis atau anti terhadap Islamisme, dan “kanan” merupakan partai-partai yang mengusung ideologi Islam, dan mendukung Islamisme. Syamsudin Haris

(Suara Pembaruan/ 31/ 2010) menyebutkan partai “kanan” sebagai partai politik dengan asas agama, sedangkan partai “kiri” merupakan partai yang berasaskan ideologi sosialis-komunis.

Untuk Indonesia pemisahan partai politik “kanan” dan “kiri” bukanlah jenis pemisahan antara sosialis dengan kapitalis, seperti yang dikenal di sebagian besar masyarakat Barat namun pemisahan partai “kanan” dan “kiri” adalah antara kaum Sekuleris dan Islamis. Partai yang beraliran “kanan” adalah partai-partai politik Islam yang mendukung terjadinya Islamisme di Indonesia. Sedangkan partai-partai politik “kiri” adalah partai-partai politik yang menentang setiap pengakuan atau pemberian posisi khusus bagi agama Islam di Indonesia (Andy ramses dkk, 2009: 159-160).

Partai politik di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 (Andy ramses dkk, 2009). Pada awal kemerdekaan Indonesia partai-partai politik memiliki perbedaan mencolok dalam hal ideologi yang diperjuangkan. Ideologi menjadi pijakan dalam praktek politik dan dalam pencapaian tujuan partai politik. Pemisahan partai politik berdasarkan pada pemisahan antara “kiri” dan “kanan”. Pemisahan ini (kiri dan kanan) bukan jenis pemisahan Sosialis dan Kapitalis seperti halnya di masyarakat Eropa. Namun Pemisahan kiri dan kanan didasarkan antara kaum Sekuleris dan kaum Islamis (Andy ramses dkk, 2009). Dalam sejarah perjalanan kepartaian Indonesia, ujung

kiri ditempati oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai-partai politik yang menentang setiap pengakuan atau pemberian perlakuan khusus bagi agama Islam di Indonesia. Sedangkan dibagaian kanan ditempati oleh partai-partai Islam yang mendukung suatu transformasi Indonesia kearah suatu bentuk negara yang Islami.

Pertentangan antara kedua ideologi tersebut, nampak saat menentukan dasar negara bagi negara baru Indonesia. Perbedaan tentang dasar negara sudah lama terjadi, bahkan sebelum negara Indonesia merdeka. Perbedaan tersebut diantaranya adalah apakah negara Indonesia akan didasarkan pada Islam atau Sekuler. Perbedaan pandangan ini berlanjut samapai setelah proklamasi kemerdekaan, bahkan berlanjut pada zaman reformasi. Tajamnya perbedaan ideologi pada masa-masa kemerdekaan terlihat dari dibubarkannya badan Konstituante oleh presiden Soekarno. Badan Konstituante adalah badan untuk membuat undang-undang dasar bagi Negara Indonesia. Badan ini diisi wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum konstituante pada tanggal 15 Desember tahun 1955 (Adnan Buyung, 2009: 30).

Pemilihan umum diikuti tiga puluh empat partai politik, yaitu empat partai politik besar: Partai Nasionalis Indonesia(PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nadlatul Ulama (NU), Partai Masyumi, serta partai-partai kecil (Adnan Buyung, 2009: 31). Dalam fraksi di Konstituante terbagi menjadi tiga kelompok yang masing-masng mendukung falsafah

negara tertentu. Ketiga fraksi itu adalah: pertama, blok yang mendukung Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, kedua adalah blok yang mendukung Islam sebagai dasar negara, ketiga adalah blok sosial ekonomi, yang mengajukan ekonomi sosialis dan demokrasi sesuai dengan pasal 33 dan pasal 1 UUD 1945 sebagai dasar Negara (Adnan Buyung, 2009: 32). Ketiga blok tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 44. Tiga Faksi Ideologis Di Konstituante.

Nama Fraksi	Jumlah Kursi
I. Blok Pancasila	
1. PNI (Partai Nasional Indonesia)	119
2. PKI (Partai Komunis Indonesia)	60
3. Republik Proklamasi	20
4. Parkindo (Partai Kristen Indonesia)	16
5. Partai Khatolik	10
6. PSI (Partai Sosilais Indoenesia)	10
7. IPKI (Partai Pendukung Kemerdekaan Indonesia)	8
8. PRN (Partai Rakyat Nasional)	3
9. P3RI (Persatuan Pegawai Polisi Indonesia)	3
10. Partai Persatuan Daya	3
11. GPPS (Gerakan Pembela Pancasila)	2
12. PRI (Partai Rakyat Indonesia)	2
13. Baperki	2
14. PRIM (Partai Republik Indonesia Merdeka)	2
15. PIR (Persatuan Indoneisa Raya- Wongsonegoro)	2
16. PIR (Persatuan Indoneisa Raya- Hazairin)	2
17. Gerindra	2
18. PRD (Partai Rakyat Desa)	1
19. R. Soedjono Prawirosoedarso	1
20. Gerakan Benteng Republik Indonesia	1
21. Partai Tani Indonesia	1
22. Radja Kaprabon	1
23. PIR (Nusa Tenggara Barat-Lombok)	1
24. Permai	2

Tabel 44. Tiga faksi Ideologis di Konstituante.

Nama Fraksi	Jumlah Kursi
II. Blok Islam	
1. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)	112
2. NU (Nadlatul Ulama)	91
3. PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia)	16
4. Perti (Persatuan Tarbijjah Islamiyah)	7
5. AKUI-Madura	1
6. PPTI	1
7. Gerakan Pilihan Sunda	1
8. Pusat Penggerak Pencalonan L.E Idrus Effendi – Sulawesi Tenggara	1
JUMLAH	230

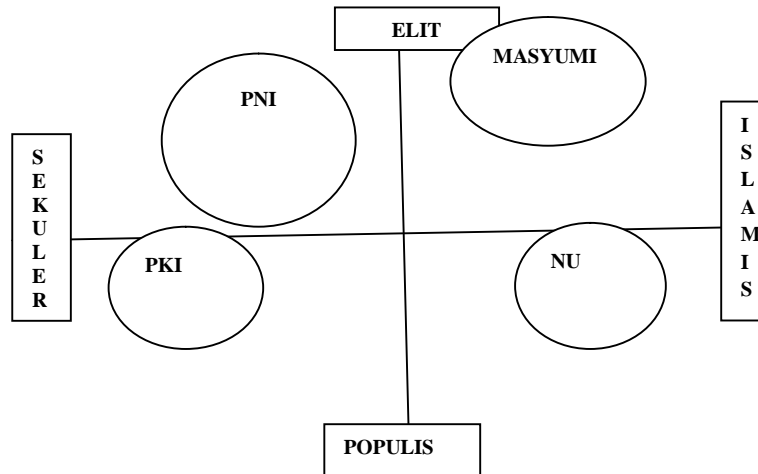
Nama Fraksi	Jumlah Kursi
III. Blok Sosial-Ekonomi	
1. Partai Buruh	5
2. Partai Murba	4
3. Acoma	1
JUMLAH	10

Sumber: Adnan Buyung, 2009: 33

Pada tanggal 10 November 1956 para anggota konstituante dilantik, selanjutnya pada tanggal 12 November 1956 Konstituante mulai mengadakan sidang. Dalam sidang konstituante, persoalan dasar negara yang pernah menjadi perdebatan dalam (BPUPKI) muncul kembali. Terdapat tiga usulan dasar Negara yaitu: (1) Islam, (2) Pancasila (3) Sosial-Ekonomi (Lili Romli, 2006:161).

Ketiga usulan mendapat dukungan yang masing-masing: (1) Islam mendapat dukungan sebanyak 230 orang, (2) Pancasila mendapat dukungan sebanyak 273 orang, dan (3) Sosial-ekonomi mendapat dukungan 9 orang (Lili Romli,2006:161). Perdebatan mengenai dasar negara di Konstituante menjadi semakin berlarut-larut dan tidak mencapai kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia, terutama antara kubu Islam dan kubu Nasionalis. Di kubu Islam yang mendukung kembalinya Piagam Jakarta sebagai dasar Negara, terdapat dua partai yang memiliki suara yang signifikan yaitu: Masyumi dan NU. Sedangkan di kubu Nasionalis yang menolak Piagam Jakarta terdapat dua partai politik besar yaitu: PNI dan PKI. Peta ideologi keempat partai tersebut jika digambarkan dengan konsep “kanan” dan “kiri” adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Peta Ideologi Antar Partai Politik Pada Pemilu 1955.



Sumber: Andy ramses dkk, 2009

Dari gambar diatas nampak bahwa keempat partai (PNI, PKI, Masyumi, NU) menduduki posisi ekstrem kana dan kiri. Dampaknya adalah tidak didapati kesepakatan terkait dasar Negara Indonesia di sidang-sidang yang dilakukan Konstituante. Kemudian memaksa presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Hal sekaligus membuktikan bahwa partai politik diawal kemerdekaan masih konsisten untuk menjadikan ideologi sebagai orientasi perjuangan.

2. Konflik Ideologi Partai-Partai Politik Pada Zaman Orde Baru

Pertentangan ideologi antara partai-partai politik mencapai puncaknya dan memakan korban jiwa adalah ketika terjadi peristiwa gerakan 30 September 1965 berupa pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap pemerintah Indonesia. Setelah

beberapa bulan setelah usaha pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), masa depan politik Indonesia belum begitu jelas. Akhirnya, Soeharto membangun apa yang dikenal dengan Orde Baru (Ricklef, 2009:587). Berpijak dari pengalaman pada masa demokrasi parlementer, dimana partai-partai politik dengan perbedaan ideologi yang ada membuat kondisi politik di Indonesia tidak stabil. Maka pada zaman Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto menjadi fokus utama adalah bagaimana menciptakan kondisi politik yang stabil (Lili Romli, 2006:61). Langkah yang dilakukan untuk itu adalah dengan cara melakukan penyerdehanaan jumlah partai politik.

Kesembilan partai yang ada (Parmusi, NU, PSII, Perti, PNI, Partai Khatolik, Parkindo dan Murba) dikelompokkan menjadi dua kelompok. *Pertama* adalah kelompok Materiil-Spirituil yang terdiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI), IPKI, Partai Khatolik dan Murba. *Kelompok kedua*, adalah spirituil-materiil yang terdiri dari Parmusi, NU, PSII, dan Perti (Lili Romli, 2006:62). Partai-partai politik ini setelah pemilihan umum tahun 1971, tepatnya pada tanggal 1973. kedua kelompok tersebut diharuskan melakukan fusi. Kelompok dari partai-partai Islam terwadahi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok partai-partai nasionalis dan Kristen membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selanjutnya semenjak partai politik melakukan fusi maka organisasi peserta pemilu di zaman orde baru terdiri dari: (1) Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan partai-partai beraliran Islam, (2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasionalis dan Kristen, serta (3) Golongan Karya (Golkar).

Kalau melihat dari bergabungnya partai-partai politik (fusi) dengan berdasarkan garis aliran nasionalis dan Islam, semestinya pada zaman Orde Baru juga terjadi pertarungan kedua aliran yang diperjuangkan oleh kedua partai tersebut. Namun ternyata yang saling berhadap-hadapan adalah antara partai Islam (PPP) dengan pemerintah yang saat itu adalah dijabat orang-orang Golkar yang terjadi pada pemilihan umum 1977 (Lili Romli, 2006:68). Dengan kondisi yang demikian maka pada tahun 1980 diterapkan asas tunggal bagi semua partai politik (Lili Romli, 2006: 61). Dengan adanya asas tunggal, semua partai politik wajib menggunakan Pancasila sebagai asasnya. Penerapan asas tunggal juga membuat kekuatan partai Islam lemah. Dan semenjak itu maka aliran-aliran yang ada menjadi tidak terlihat secara signifikan dalam perpolitikan di masa orde baru, karena semua asas diganti dan disamakan yaitu asas Pancasila.

3. Konflik Ideologi Partai-Partai Politik Pasca Orde Baru (Orde Reformasi)

Krisis ekonomi menjadi salah satu faktor dari tumbangnya pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Kejatuhan orde baru pada tanggal 20 Mei 1998 adalah awal dari hadirnya ruang publik baru yang lebih demokratis atau menurut Affan Gaffar, sebagai awal transisi menuju demokrasi (Affan Gafar, 2006). Suatu kondisi yang awalnya adalah otoriter beralih menuju demokratisasi. Jatuhnya Orde Baru dikarenakan banyaknya tuntutan dari berbagai kalangan untuk mengganti yang selama ini dianggap otoriter. Dalam hal ini Miriam Budiardjo (2008:132). mengambarkan:

Dibidang politik, dominasi Presiden Soeharto telah membuat presiden menjadi penguasa mutlak karena tidak ada satu institusi/lembaga pun yang dapat menjadi pengawas presiden dan mencegahnya melakukan peyelewengan kekuasaan (*abuse of power*). Menjelang berakhirnya orde baru, elite politik semakin tidak peduli dengan aspirasi-aspirasi rakyat dan semakin bayak membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para kroni dan merugikan Negara dan rakyat banyak. Akibat dari semua ini adalah semakin menguatnya kelompok-kelompok yang menentang Presiden Soeharto dan Orde Baru (2008:132).

Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia (Miriam Budiardjo, 2008:132). Demokratisasi dilakukan dengan melakukan proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat tidak terbelenggu, kedaulatan rakyat ditegakkan, dan terjadi ceks and bakances antara eksekutif dengan legislatif (Miriam Budiardjo, 2008:134). Liberalisasi dalam sistem

kepartaian dilaksanakan dengan memberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik baru. Akibatnya pemilihan yang dilakukan pada masa reformasi diikuti oleh 48 partai politik nasional. selain itu, asas tunggal yang selama ini dijadikan sebagai alat peyeragaman ideologi partai politik dihapuskan. Dampaknya adalah munculnya partai-partai politik dengan membawa keragaman asas atau ideologi. Sebagai contoh munculnya partai politik yang secara terang-terangan menggunakan ideologi Islam. Partai-partai yang menggunakan ideologi Islam adalah: Partai Keadilan (PK), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB). Macam-macam ideologi partai-partai politik pada pemilihan umum tahun 1999 atau di masa orde reformasi dapat diamati pada tabel di bawah:

Tabel 45. Ideologi Partai-Partai Politik Pada Pemilu 1999.

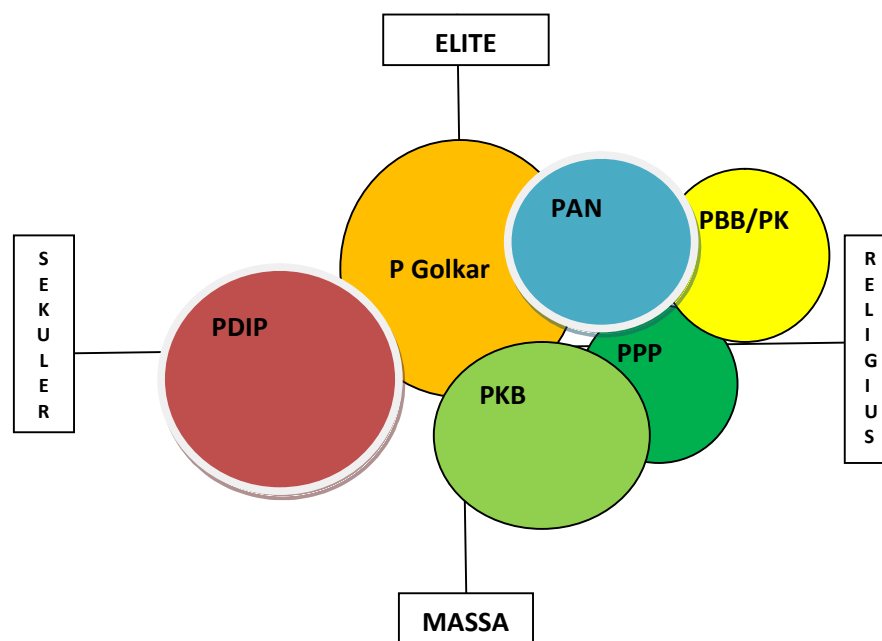
Ideologi Islam	Ideologi Sosial Demokrat	Ideologi Nasionalis
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Islam Ortodoks:</i> Partai Bulan Bintang (PBB) ➤ <i>Islam Progresif:</i> Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ➤ <i>Islam Tradisionalis:</i> Partai Persatuan Nadlatul Ummah (PPNU), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang ➤ <i>Islam Modernis:</i> Partai Amnat Nasional (PAN) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Progresif Kiri:</i> Partai Merdeka, Partai Buruh Sosial Demokrat ➤ <i>Progresif Kanan:</i> Partai Perhimpunan Indonesia Baru ➤ <i>Konservatif Tengah:</i> Partai Sarikat Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Nasionalis Populis</i> (Marhaenisme&Sosialis Indonesia): PNI ➤ Marhaenisme, Partai Nasional Benteng Kemerdekaan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Pelopor ➤ <i>Nasionalisme Negara</i> (State Develomentalism): Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Patriot Pancasila, Partai Keadilan dan Persatuan ➤ <i>Nasionalis Religi</i> (Islam Kebangsaan): Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) ➤ <i>Nasionalis Demokrat</i> (Nation State): Partai Demokrat ➤ <i>Nasionalis Progresif</i> (Nasional Pluralis): Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan dan Persatuan Daerah

Sumber: Cholisin, 2004, "Moralitas Politik Dalam Pemilu 2004 dan Implikasinya Bagi Pendidikan Kewarganegaraan", dalam Jurnal Civic Volume 1 Nomor 2 Tahun 2004

Kevin Raymond juga memetakan ideologi partai politik di Indonesia pada pemilu 1999 dengan belahan kiri dan kanan. Kanan yang berarti membawa ideologi agama (Islam) sedangkan poisisi kiri adalah partai politik yang membawa ideologi nasionalis/sekuler dan area tengah adalah partai politik yang moderat, dalam arti lebih longgar dalam

menerapkan ideologi (Andy ramses dkk, 2009). Peta ideologi menurut Kevin Raymond Eyes dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 9. Peta Ideologi Partai Besar Hasil Pemilu 1999.



Sumber: Diolah dari Andy ramses dkk, 2009

Dari gambar peta ideologi di atas menunjukkan bahwa perpecahan ideologi diantara partai-partai politik yang terjadi pada perpolitikan tahun 1955 hadir kembali pada situasi politik pada masa reformasi. Namun yang menjadi perbedaan adalah pada masa reformasi perbedaan ideologi tidak setajam pada masa awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi liberal

perbedaan ideologi tersebut secara kuat diperjuangkan oleh masing-masing partai pengusung dan tidak berhasil mencapai kompromi, tetapi pada masa reformasi, ideologi-ideologi itu dengan mudah dapat dikompromikan. Selain itu dimasa reformasi mulai muncul partai-partai yang lebih moderat atau memposisikan diri partai tengah yang agak longgar terhadap ideologi.

Pertentangan secara ideologi pada masa reformasi terlihat pada saat munculnya aspirasi tentang diperlakukanya kembali piagam Jakarta sebagai dasar negara (Lili Romli, 2006). Kemunculan agenda mengembalikan Piagam Jakarta kedalam Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari adanya usulan perlunya dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 bab tentang agama. Pembahasan mengenai amandemen pasal 29 dilakukan dalam rapat Panitia Ad Hoc 1 BP-MPR tahun 2000 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2000 dipimpin oleh Harun Kamil, SH dari fraksi Utusan Golongan dan sekretaris Ali Massykur Musa, M.Si dari fraksi PKB (Lili Romli, 2006:190).

Dalam rapat ini muncul berbagai pandangan dari berbagai fraksi terkait perlu tidaknya diadakan amandemen terhadap pasal ini maupun usulan terhadap perubahannya. Fraksi reformasi dengan juru bicara AM. Lutfi setuju dengan pendapat Harun Kamil tentang pentingnya pasal Agama. Fraksi ini mengusulkan agar Pasal 29 ditambah 1 ayat, yaitu ayat 3

yang berbunyi: "Tiap pemeluk agama diwajibkan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing". Fraksi KKI (Kesatuan Kebangsaan Inonesia) dengan pembicara Antonius Rahail mengusulkan agar judul Bab Agama diganti menjadi Ketuhanan Ynag Maha Esa". Kemudia Ia mengusulkan juga agar ayat 1 berbunyi "Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kerakyatan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan untuk ayat 2 adalah "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya serta untuk mendirikan tempat ibadah masing-masing". Selain itu Fraksi KKI (Kesatuan Kebangsaan Inonesia) menusulkan tambahan ayat 3 yang berbunyi, "Negara menjamin persamaan yang adil dan merata untuk semua penduduk agama" (Lili Romli, 2006:184).

Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) melalui juru bicaranya Gregorius Seto Harianto berpendapat bahwa pasal 29 ayat 1 tidak perlu dirubah. Sedangkan untuk pasal 2 diubah dengan dengan bunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu". Juru bicara fraksi Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri), Drs. Taufiqurahman Ruki, SH,

mengajak agar bab tentang agama dan pasal 29 ayat (1) dan (2) tetap seperti apa adanya dan tidak perlu untuk dilakukan perubahan. Fraksi Golongan Karya (Golkar) dengan juru bicaranya Sutjipto, SH berpendapat bahwa Pasal 29 ayat (1) tidak perlu dilakukan perubahan, sedangkan ayat (2) perlu diperjelas yaitu "Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya". Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan juru bicaranya Drs. Soewarno mengusulkan bahwa pasal 29 tetap dipertahankan sebagaimana adanya, tidak perlu dilakukan perubahan. Sedangkan untuk fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya H. Zain Badjeber, mengusulkan supaya Piagam Jakarta masuk kedalam pasal 29 UUD 1945, namun meskipun PPP mengusulkan Piagam Jakarta masuk kedalam Pasal 29 UUD 1945 dasar Negara Indonesia tidak perlu diganti dengan Islam (Lili Romli, 2006:190). Usulan-usulan awal mengenai amandemen Pasal 29 UUD 1945 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 46. Pandangan Awal Fraksi-Fraksi di MPR Tentang Amandemen Pasal 29 UUD 1945

NO	FRAKSI	USUL
1	PPP, PBB	Piagam Jakarta dimasukkan kedalam Pasal 29 UUD 1945, yaitu masuknya tujuh kata:” dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
2	PAN, PK	Ditambah ayat 1 dengan rumusan: “dengan melindungi penduduk dari penyebaran agama yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta ditambah ayat 3, “Penyelenggaraan Negara tidak boleh menyimpang dari norma agama”.
3	KKI	Ayat 1 ditambah seperti bunyi dari Pancasila
4	PKB	Ayat 1 ditambah dengan rumusan:”dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya”. Ayat 2 berbunyi:”Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama”. Kemudian ditambah ayat 3:”Negara menjamin agamanya dan beribadat menurut kepercayaan agamanya”.
5	PDU	Ayat 2 berbunyi:” Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya”.

Sumber: Risalah Sementara Rapat PAH I BP MPR 14 Juni 2000 dikutip dari Lili Romli, 2006:196

Pandangan awal dari masing-masing fraksi diatas setidaknya mengilustrasikan bahwa perdebatan mengenai masuknya Piagam Jakarta kedalam UUD 1945 masih terus menjadi perdebatan sampai pasca Orde Baru. Hal ini terlihat dari usulan yang dikeluarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait masuknya Piagam Jakarta kembali dimasukkan dalam pasal 29 UUD 1945. Lebih jauh Lili Romli (2006:196-187) menggambarkan situasi tersebut:

Sehubungan dengan usul perubahan terhadap pasal 29 tersebut diatas terlihat ada dua fraksi, yaitu PPP dan Fraksi PBB, yang merupakan dua partai politik Islam, mengusulkan Piagam Jakarta dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945. Piagam Jakarta, seperti telah dijelaskan sebelumnya, merupakan untuk berkompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan saat hendak menyusun dasar Negara dan UUD di BPUPKI tahun 1945. Dalam Piagam Jakarta ini, terdapat tujuh kalimat yang mengandung nilai-nilai Islam yang tercantum dalam Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dengan dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut, maka setiap partai politik Islam pada masa Parleментар sampai dengan masa awal Orde Baru berusaha agar tujuh kata tersebut masuk kembali dalam UUD 1945. Kini pada era reformasi ini ketika MPR melakukan amandemen kedua terhadap UUD 1945. Fraksi PPP dan Fraksi PKB ,engusulkan kembali Piagam Jakarta tersebut dalam PAH I BP MPR.

Usulan masuknya kembali Piagam Jakarta kedalam UUD 1945 atas usulan PPP dan PBB mendapat respon yang negative dari berbagai fraksi yang lain. Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi TNI, Fraksi PKB, Fraksi PDKB, Fraksi PDU, Fraksi KKI, dan Fraksi utusan golongan menolak usulan tersebut. Sedangkan partai Islam yang lainnya seperti: PK, PKU, PNU,PSII tidak semua memiliki kesesuaian pendapat dengan apa yang diusulkan oleh PPP dan PBB. Ini terbukti dari adanya usulan jalan tengah seperti yang disampaikan oleh Partai Keadilan melalui Fraksi Reformasi. Pandangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) mengenai masuknya kembali Piagam Jakarta kedalam UUD 1945 pasal 29 terus konsisten diperjuangkan oleh kedua partai ini, terlihat pada pandangan Akhir ST MPR yang disampaikannya (Lili Romli, 2006:223). Gambaran pemandangan Akhir dari Fraksi-Fraksi di MPR dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 47. Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi di MPR Tentang Amandemen Pasal 29 UUD 1945.

NO	FRAKSI	PANDANGAN AKHIR
1	PDIP	Menolak Piagam Jakarta
2	GOLKAR	Menolak Piagam Jakarta
3	REFORMASI	Menolak Piagam Jakarta
4	PPP	Setuju Piagam Jakarta
5	PBB	Setuju piagam Jakarta
6	PKB	Menolak Piagam Jakarta
7	Utusan Golongan	Menolak Piagam Jakarta
8	KKI	Menolak Piagam Jakarta
9	PDU	Menolak Piagam Jakarta
10	TNI/POLRI	Menolak Piagam Jakarta
11	PDKB	Menolak Piagam Jakarta

Sumber: Diolah dari Buku Lili Romli berjudul “Islam Yes partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia” tahun 2006.

Pandangan akhir fraksi di MPR memperlihatkan konflik Ideologi dari masing-masing fraksi masih terlihat antara Islam dengan Sekuler. Islam yang dibawa PPP dan PBB dengan mengusulkan kembalinya Piagam Jakarta masuk dalam pasal 29 UUD 1945 yang ditentang oleh pihak sekuler yang diwakili oleh partai-partai nasionalis: F PDIP, F Golkar, F KKI FPDKB. Pertentangan ini terus memanas hingga pandangan akhir masing-masing fraksi di MPR. Dalam hal ini konflik ideologi terlihat kuat, namun disisi yang lain disaat presiden Abdurrahman Wahid diturunkan. Partai-partai Islam mendukung Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden, padahal dari kalangan sekuler. Selain itu bersandingnya Hamzah Haz dan bersatunya semua partai politik menjadi satu kubu menunjukkan tidak adanya konsistensi partai politik dalam menjalankan perjuangan

ideologinya. Lebih lanjut Kuskrido Ambardi mengatakan,” naiknya presiden megawati menjadi presiden menggantikan Gusdur, dan diikuti berkumpulnya partai dalam satu kubu memperlihatkan bahwa partai-partai sudah tidak lagi mempertimbangkan aspek ideologi” (Wawancara Tanggal 24 April 2011).

Pada tahun 2003, fenomena konflik ideologi muncul kembali saat pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Sisdiknas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perdebatan terjadi mengenai munculnya pasal agama (Kuskrido Ambardi, 2009). Pasal itu muncul usulan pihak pemerintah. Lebih jauh Kuskrido Ambardi (2009: 201-202) melukiskan:

Pasal tiga rancangan pemerintah menyatakan bahwa tujuan sistem pendidikan nasional adalah membentuk pelajar menjadi beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia.pasal ini ditingkat masyarakat memunculkan pertentangan yang tajam, bukan hanya antara kalangan agama dan sekuler, melainkan antara kalangan Muslim dan Kristen. Bagi sekelompok masyarakat, kata-kata beriman , bertakwa, dan berakhlak mulia dianggap kosakata khas Islam dan karena itu, mereka menganggap rancangan pemerintah itu mengandung bias Islam yang bertentangan dengan kepentingan komunitas non-Muslim. Lebih jauh mereka yang menentang menganggap bahwa rancangan itu adalah kamufase belaka dari satu kelompok Islam dalam Usaha mereka mendirikan Negara Islam yang lama diimpikan

Pada pandangan awal, fraksi-fraksi yang mendukung pasal agama ini adalah: Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Keadilan (PK), dan Partai Bulan Bintang (PBB), Fraksi Partai Golongan Karya (P Golkar). Sedangkan partai yang

menentang yaitu: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI), dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB). Namun suasana konflik yang seakan-akan adalah konflik ideologi antara pihak Islam yang menginginkan masuknya moral agama dalam Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dengan pihak sekuler yang menolak peran agama dalam undang-undang tersebut tidak terlihat berlangsung secara terus-menerus sampai pada pandangan akhir masing-masing fraksi, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2000 mengenai amandemen pasal 29 UUD 1945. Pada pandangan akhir masing-masing fraksi terlihat kubu sekuler tidak lagi konsisten untuk memperjuangkan ideologinya. Karena pada pandangan akhir semua fraksi tidak ada yang menolak diberlakukannya Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjadi Undang-Undang Sisdiknas (UU No 20 Tahun 2003). Yang juga menarik dari munculnya pasal agama ini adalah dimunculkan oleh pemerintahan Megawati yang sebenarnya bukan berasal dari kalangan Islam (agama). Hal ini juga menunjukkan bahwa ideologi bagi partai politik sudah tidak lagi menjadi orientasi atau pedoman didalam membuat sebuah kebijakan. Ideologi menjadi mudah untuk dikompromikan guna mencari kekuasaan semata.

Mudahnya partai politik melakukan kompromi ideologi dan tidak adanya konsistensi partai politik dalam memperjuangkan ideologi partai terbukti pada pasca pemilu 2009. Setelah pemilu 2009 partai politik yang berbeda ideologi menjadi satu kubu membentuk Setgab (sekretariat gabungan). Partai politik yang satu dengan yang lain sudah sulit untuk dibedakan secara ideologi. Perilaku yang munculkan oleh partai-partai politik cenderung seragam (Wawancara Kuskrido Ambardi, Tanggal 24 April 2011). Situasi ini selaras dengan apa yang diwacanakan oleh Kuskrido Ambardi (Kompas, 29/ 3/ 2010).

Partai-partai dari pemilu ke pemilu mengalami kekaburan identitas. Partai politik cenderung melihat ideologi menjadi tidak penting, padahal ideologi penting bagi partai politik karena menjadi identitas partai, partai politik di Indonesia cenderung berkolusi ketimbang berkompetisi, mereka membentuk sebuah kelompok yang memiliki kecenderungan untuk melayani diri sendiri dibandingkan secara individual mencoba mewakili beragam kepentingan kolektif yang ada di masyarakat, kompetisi antar partai politik yang hadir dalam arena politik menghilang begitu partai politik memasuki arena pemerintahan (pembentukan kabinet) dan arena legislatif, serta memudarnya komitmen ideologis dan programatik partai saat mereka membentuk koalisi pemerintahan.

Selain itu, Yudi latif (Kompas, 28/ 04/ 2009) juga menggambarkan situasi ini sebagai berikut:

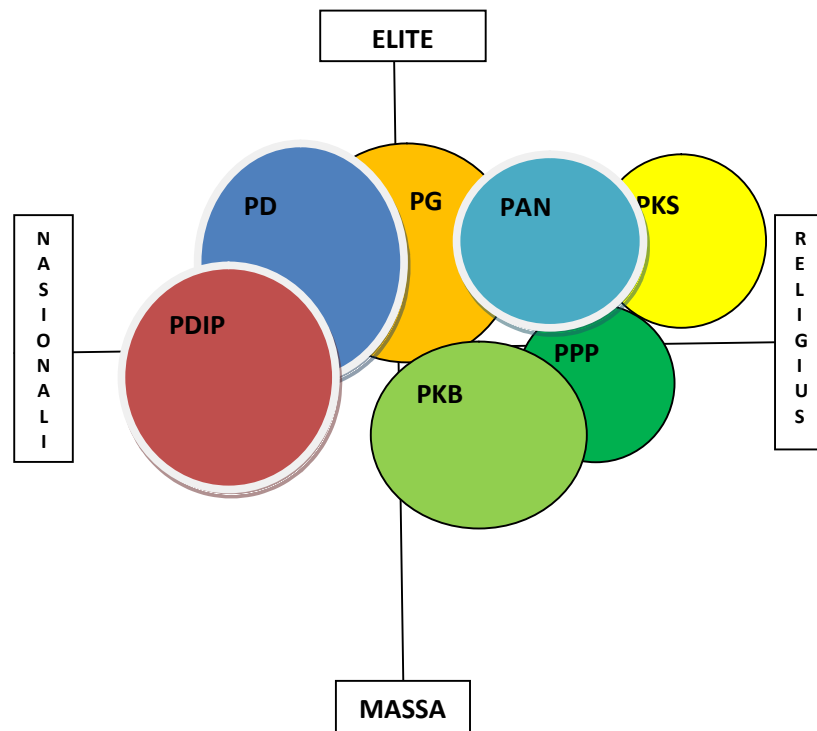
Dengan segala karut-marut dan aneka kecurangan yang mewarnai pemilu legislatif, belum ada tanda-tanda kekecewaan akan menjelma menjadi amuk, mengantarkan demokrasi ke jalan buntu. Nada-nada kutukan dan ajakan pemboikotan hanya berseliweran lewat layanan pesan singkat (SMS) berantai, paling jauh sebatas ultimatum dalam kongko-kongko elite secara terbatas, lantas mereda ditelan kepentingan koalisi. Perilaku elite politik tersebut menggembirakan sekaligus menyedihkan. Menggembirakan karena berdasarkan pengalaman

sejumlah negara, yang paling bertanggung jawab atas keruntuhan suatu demokrasi bukanlah orang-orang biasa, melainkan perilaku elite politik (Bermeo, 2003). Beruntunglah, kekecewaan elite politik Indonesia atas pelaksanaan pemilu itu dinetralisasi oleh melemahnya "konflik visi" dalam politik digantikan oleh menguatnya "konflik kepentingan". Dalam konflik visi, yang dipertaruhkan adalah gagasan yang bersifat tak teraba, mengandung asumsi-asumsi dasar yang menuntut konsistensi logis, kesetiaan, dan pengorbanan jangka panjang. Oleh karena itu, ketika konflik visi yang terjadi, daya ledaknya bisa membuat para penganut perbedaan visi terpecah dalam kesiagaan siap mati yang memengaruhi rentang panjang sejarah bangsa. Dalam konflik kepentingan, yang dipertaruhkan adalah hal-hal teraba, mengandung kejelasan untung-rugi yang bersifat pragmatis jangka pendek. Karena sifatnya yang cetek dan menyangkut kepentingan orang per orang, terlalu konyol jika banyak orang mempertaruhkan jiwanya di altar pengorbanan. Oleh karena itu, durasi konflik kepentingan biasanya berjangka pendek. Meski peredupan konflik visi bisa mencegah kekacauan dan perpecahan bangsa, politik tanpa visi tak menyediakan basis nilai dan harapan. Dampaknya segera terlihat dalam pola koalisi. Pemimpin partai sibuk bermanuver politik secara zig-zag, tanpa beban berganti-ganti posisi etis. Partai-partai yang bercorak liberal rela bersanding dengan partai-partai bercorak iliberal. Rujukan koalisi bukanlah titik temu dalam nilai dan visi, melainkan semata-mata berdasarkan alokasi sumber daya dan kursi. Platform yang disusun secara serabutan diajukan sekadar alat justifikasi. Tanpa kejelasan visi, politik kehilangan peta jalan ke arah mana masyarakat akan diarahkan, prioritas nasional apa yang akan dipilih, fokus pembangunan apa yang akan disasar, dan akhirnya pengorbanan apa yang dituntut dari rakyat. Politik tanpa visi sekadar kemeriahan pesta pora yang menyesatkan; memberikan harapan semu dengan biaya mahal, tanpa arah ke depan, tanpa perenungan mendalam, dan tanpa komitmen pada penyelesaian masalah- masalah mendasar.

Pernyataan-pernyataan di atas memperkuat pendapat bahwa saat ini partai-partai politik sudah tidak konsisten lagi dalam memperjuangkan ideologinya. Bisa dikatakan bahwa partai politik sudah tidak menggunakan ideologi sebagai orientasi. Meskipun peta Ideologi secara formal

digambarkan oleh Hanta Yudha (2010) masih menunjukkan adanya belahan kiri dan kanan:

Gambar 10. Peta Ideologi Partai Besar Hasil Pemilu 2004.



Sumber: Diambil dari Buku Hanta Yudha berjudul "Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi", tahun 2010

Gambar di atas memperlihatkan bahwa secara formal partai politik masih memiliki keanekaragaman antara satu dengan yang lainnya. Namun jika dilihat pada realitas perilaku partai politik, maka keanekaragaman ideologi tersebut sudah tidak terlihat lagi. Ideologi dalam aktivitas keseharian partai politik sudah tidak dijadikan lagi sebagai orientasi. Hal

tersebut Nampak pada berbagai proses pembuatan kebijakan publik di Dewan perwakilan Rakyat (DPR) yang terkadang ideologi mudah untuk dikompromikan. Pembuatan undang-undang sisdiknas tahun 2003 memperlihatkan betapa partai politik sudah tidak lagi didasarkan pada orientasi ideologi, namun lebih pada kompromi-kompromi non ideologis. Terlihat dari berbagai partai politik yang berideologi nasionalis sekuler juga menyetujui undang-undang ini, padahal undang-undang sisdiknas memberi ruang yang lebar untuk agama masuk dalam ranah-ranah publik (pendidikan). Selain itu, adanya Sekretariat gabungan partai politik koalisi yang tidak seideologi memperkuat bahwa partai-partai politik saat ini sudah tidak bergerak berdasarkan ideologi. Mudah retaknya koalisi pemerintahan SBY saat ini adalah bukti bahwa koalisi bukan pada kesamaan ideologi. Dalam konteks ini, Hanta Yudha (Kompas, 13 April 2010) menggambarkan terkait koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono:

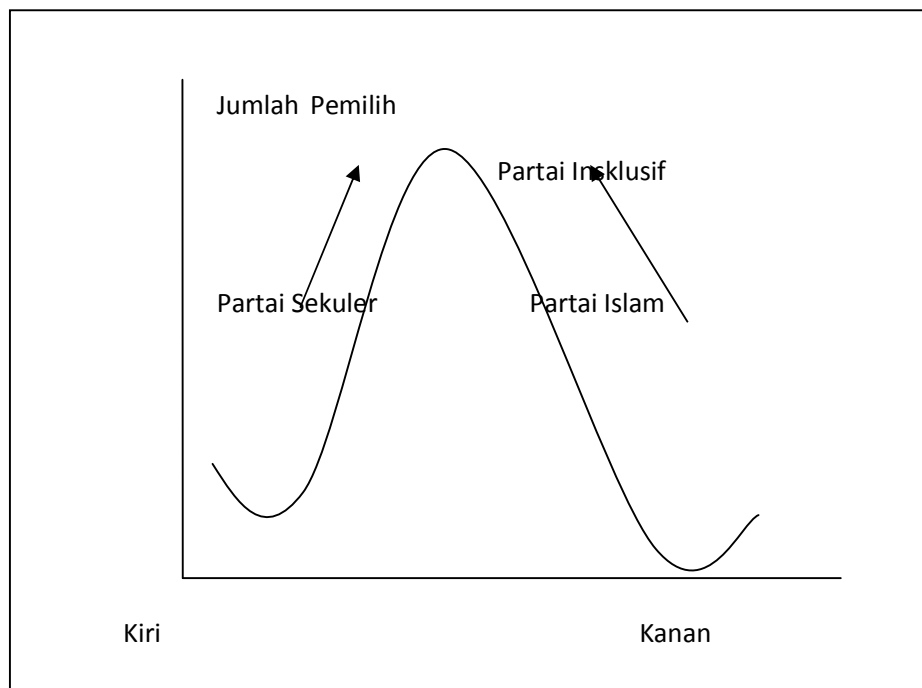
....efek dari lemahnya ideologi partai dan kuatnya kepentingan pragmatisme untuk investasi politik 2014. Hal inilah yang menyebabkan karakter partai-partai dalam berkoalisi tidak disiplin, sangat oportunistis, dan pragmatis. Akibatnya, koalisi yang terbangun akan selalu rapuh dan cair karena koalisi dibangun di atas fondasi kepentingan pragmatisme kekuasaan ketimbang kedekatan ideologi atau persamaan platform.

Fenomena-fenomena di atas menggambarkan bahwa partai politik dari tahun 1955 yang sangat kuat dalam memperjuangkan ideologi, lambat laun mulai melonggarkan ikatan ideologinya. Pada gambar 10, ditahun

1955 peta ideologi partai politik masih berhadap-hadapan antara posisi kiri dan kanan. Namun pada tahun 1999 dan 2004 sudah mulai muncul posisi tengah (lihat gambar 10). Trend partai politik mengusung isu keterbukaan (*inklusif*), memperlihatkan bahwa peta ideologi partai politik saat ini sudah mengarah pada posisi tengah (*konvergen*), meskipun secara formal masih ideologi itu masih beraneka ragam dan saling berhadapan. Perilaku kelima partai pemenang pemilu 2009: Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengikuti *trend* konvergensi ideologi tersebut, atau menurut Otto Kirchheimer disebut dengan *de-ideologisasi* (Miriam Budiardjo, 2008:401). Masuknya PD, P Golkar, PKS, PAN dalam satu koalisi dan membentuk Setgab (sekretariat gabungan) membuktikan keterbukaan dan mulai lemahnya simpul ideologis partai. Sedangkan PDIP menjadi oposisi bukan semata-mata dikarenakan perbedaan ideologi, tetapi lebih pada faktor personal Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana pernyataan Kuskrido Ambardi, tidak masuknya PDIP ke dalam pemerintahan bukan sekedar faktor ideologi, tetapi lebih pada faktor personal Megawati, hal itu nampak dari adanya petinggi-petinggi PDIP yang mulai mendekat dengan pemerintah (Wawancara dengan Kuskrido Ambardi pada 24 April 2011). Dengan adanya Sekretariat gabungan dimungkinkan tidak akan ada lagi konflik ideologi, karena

semua sudah dikompromikan dalam sekretariat gabungan (Setgab). Pergeseran Ideologi secara perilaku partai politik dapat dijelaskan seperti pada tabel dibawah ini:

Gambar 11: Pergerakan Ideologi Partai Politik di Indonesia



Sumber : Penulis

Gambar di atas merupakan kesimpulan yang menunjukkan bahwa partai-partai politik di Indonesia saat ini mengalami pergeseran ideologi ke arah tengah (moderat). Ideologi-ideologi partai mengalami *konvergensi* ke arah satu titik. Tidak lagi saling berhadap-hadap antara satu partai dengan partai yang lainnya meskipun terdapat perbedaan secara ideologi. Walaupun secara formal ideologi partai politik terlihat masih

memperlihatkan adanya perbedaan, namun secara perilaku sehari-hari sudah tidak nampak lagi perbedaan tersebut. Hal tersebut terlihat dari sudah tidak adanya isu besar yang diperjuangkan partai politik dan menjadi pembeda antara partai satu dengan yang lainnya, dengan kata lain tidak ada kompetisi dalam memenangkan kebijakan yang sesuai dengan ideologi. Kalaupun ada kompetisi hanya terjadi ketika pemilihan umum dan isu kecil yang sifatnya insidental seperti masalah angket bank century. Dan itupun hanya sebagai panggung pencitraan partai politik mencari kepopuleran, serta untuk menaikkan daya tawar, bukan memperjuangkan ideologi. Buktinya adalah masalah-masalah tersebut tidak pernah diselesaikan secara tuntas.

F. Implikasi Terhadap Pengembangan Pendidikan Politik

Pendidikan politik dalam arti sempit adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun (Alfian, 1981: 235). Sedangkan menurut M. Pangabean, mendefinisikan pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi yang lain (dalam Sinipar, 1984:58). Menurut Ustman (Liman, 2000:87), pendidikan politik adalah upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang berusaha membentuk dan menumbuhkan

kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, kemampuan berpartisipasi politik secara aktif dalam memecahkan persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik. Pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik, untuk itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan akhirnya seperti dalam sosialisasi politik. Menurut Gabriel A. Almond, tujuan sosialisasi politik sebagai berikut: (1) mewariskan budaya suatu Negara; (2) membangun kebudayaan publik; (3) menciptakan kebudayaan politik yang baru sama sekali (Mohtar Mas' oed dan Cholin Mac Andrews 1991:35).

Pendidikan politik memiliki karakter-karakter sebagai berikut: (1) merupakan kegiatan yang bukan hanya bertujuan membangun dan mengembangkan pengetahuan politik tertentu pada manusia, tetapi bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan orientasi-orientasi politik yang meliputi nilai-nilai, keyakinan, arah, dan perasaan politik yang menjadikan individu memiliki kesadaran terhadap situasi politik, persoalan-persoalan, regional, nasional maupun internasional, dan menjadikannya mampu, secara sadar dan aktif, berpartisipasi dalam kehidupan politik masyarakat pada khususnya, dan kehidupan sosial pada umumnya; (2) tidak bertujuan menumbuhkan loyalitas pada individu kepada penguasa sehingga membenarkan semua tindakannya, namun justru merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk membentuk

mentalitas yang kritis dan mampu melakukan dialog yang konstruktif, dan bertindak dengan sesuatu yang membawa kearah yang lebih baik; (3) pendidikan politik tidak akan tereliasiasi sebagaimana mestinya jika didalamnya tidak ada kebebasan berpendapat, kritik, dan dialog, serta adanya kontrol yang ketat atas segala pemikiran dari pihak penguasa; (4) merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hayat. Tidak terbatas pada tahapan usia tertentu atau masastudi tertentunamun berlangsung selama manusia menjadi makhluk politik yang hidup sengan masyarakat; (5) selain mempunyai landasan politik, pendidikan politik juga mempunyai landasan ideologis dan sosial. Dialah yang membentuk kultur politik dengan segala kandunganya. Maksudnya, membentuk nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang fundamental yang denganya perasaan dan orientasi politik individu dibentuk; (6) perangkat-perangkat kegiatan ini tidak hanya terbatas pada sekolah atau keluarga, akan tetapi meliputi lembaga-lembaga formal maupun non formal, seperti partai politik, pers dan lain-lain. Demikian dengan metode-metodenya, tidak hanya terbatas pada pengajaran langsung, akan tetapi juga meliputi metode-metode tidak langsung seperti magang, menirukan; dan pengajaran politik secara langsung, serta penyediaan tempat dan sarana untuk penerapan praktek politik secara langsung (Liman, 2000:89-90)

Sedangkan menurut Cholisin (1995:89) pendidikan politik bertujuan: (1) mengenalkan berbagai kebijakan politik dan lembaga-lembaga politik; (2) memberi pemahaman secara baik tentang maksud, tujuan, dan manfaat

kebijakan politik baik tataran infrastruktur dan supra struktur; (3) membentuk sikap-sikap politik khususnya sikap menerima terhadap berbagai kebijakan politik, (4) mengarahkan perilaku/ partisipasi politik warga negara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sementara Liman (2000) mengemukakan tujuan pendidikan politik sebagai berikut: (1) kepribadian politik; (2) kesadaran politik; (3) partisipasi politik. Dari pendapat para ahli di atas setidaknya dapat diambil benang merah, bahwa pendidikan politik memiliki tujuan: (1) sosialisasi politik; (2) kepribadian politik; (3), kesadaran politik; (4) partisipasi politik. Dalam kaitannya dengan partai politik, secara fungsi memiliki tanggungjawab untuk melakukan pendidikan politik masyarakat (Firmanzah, 2008). Partai politik dituntut untuk melakukan sosialisasi politik, membentuk kepribadian politik, menghidupkan kesadaran masyarakat, meningkatkan partisipasi politik.

Tetapi dalam kenyataannya, pendidikan politik kurang mendapatkan perhatian yang serius oleh partai politik. Dalam situasi biasa, partai sibuk dengan agenda-agenda non kependidikan politik. Partai politik dalam hal-hal tertentu lebih memilih bertindak pragmatis mementingkan dirinya, dan meninggalkan ideologinya. Dengan bekerja tanpa didasari ideologi, membuat partai politik tidak memiliki arah yang jelas. Hal ini berdampak masyarakat tidak bisa melihat *positioning* partai politik secara jelas. Masyarakat secara tidak langsung diajarkan sikap-sikap pragmatis, dan tidak dicerdaskan. Hal itu karena aktivitas partai politik tidak memberikan pengetahuan atau informasi

baru kepada masyarakat. Sebagai contoh aktivitas koalisi dan kompetisi partai politik hanya jika saat pemilu, dan bukan pada karena adanya isu tentang formulasi kebijakan publik tertentu.

Partai politik secara internal telah melakukan pendidikan politik terhadap para kader-kadernya. Namun secara efektifitas pembinaan yang dilakukan tidaklah sama antara partai satu dengan yang lainnya. Pembinaan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera melalui usrah/ liqo, training- training yang dilakukan oleh Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) serta pemberian pengalaman secara langsung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada para kader-kadernya bisa dikatakan sebagai pendidikan politik. Karena dengan pembinaan-pembinaan tersebut para kader disosialisasikan terkait ideologi, asas, dan platform partai.

Dengan cara tersebut para kader pembinaan yang dilakukan secara terus menerus maka memungkinkan akan terbentuk tujuan politik: terjadinya sosialisasi politik, membentuk kepribadian politik, menghidupkan kesadaran masyarakat, meningkatkan partisipasi politik. Namun, konsistensi pembinaan yang terjadi saat ini, berbeda antara partai satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan intensitas pembinaan dari masing-masing partai politik. Sebagaimana karakter dari pendidikan politik adalah dilakukan secara kesinambungan dan terus menerus. Dalam konteks ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memenuhi karakter tersebut, yaitu dilakukan secara

terus menerus sepanjang masih menjadi bagian dari partai. Berbeda dengan Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya dilakukan beberapa kali saja pelatihan dan pengawasan terhadap para anggota tidak secara ketat. Dampak dari ketidak intensifnya pembinaan ini adalah mudahnya anggota-anggota partai politik yang pindah kepartai lain (lompat pagar). Padahal dengan pembinaan yang baik, mestinya para kader memiliki loyalitas terhadap partainya. Dengan hanya pembinaan yang sifatnya jangka pendek maka dimungkinkan para kader tidak memiliki orientasi politik komprehensif (kognitif, afektif, evaluatif).

Dalam hal pembentukan koalisi, perilaku partai politik tidak memberi pendidikan yang baik bagi masyarakat. Untuk masalah ini, partai politik terlihat hanya berorientasi pragmatis kekuasaan dan bukan karena didasarkan orientasi ideologi. Bergabungnya partai-partai berideologi nasionalis dengan partai-partai yang berideologi Islam kedalam satu koalisi adalah bukti dari pragmatisme tersebut. Akibatnya koalisi tidak memiliki arah atau orientasi yang jelas. Karena perbedaan ideologi semestinya berdampak juga terhadap perbedaan visi, strategi perjuangan, moral politik partai, dan juga memiliki perbedaan didalam menyikapi suatu isu. Fenomena ini terlihat dari isu Bank Century dimana partai-partai koalisi berbeda didalam penyikapannya, belum lagi soal kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan. Partai politik cenderung menganut prinsip dua kaki, mencari kira-kira yang paling menguntungkan bagi partainya sendiri.

Praktik tersebut dapat ditiru oleh masyarakat, perilaku munafik tersebut ditiru dan menjadi kebiasaan perilaku masyarakat sehari-hari. Masyarakat tidak diberikan pelajaran mengenai bagaimana berpolitik dengan baik (*high politik*).

Dalam hal memproduksi kebijakan publik, partai politik juga tidak melakukan elaborasi ideologinya. Atau dengan kata lain tidak konsisten dalam memperjuangkan ideologi menjadi kebijakan publik. Terlihat jelas pada proses pembuatan Undang-Undang Sisdiknas UU No 20 Tahun Tahun 2003. Undang-Undang tersebut terdapat isu yang sensitif mengenai isu syariatisasi. Namun partai-partai nasionalis sekuler tidak memberi perlawanan atau pertentangan yang serius terhadap lahirnya undang-undang tersebut. Hal ini terlihat dari pandangan akhir fraksi-fraksi partai nasionalis sekuler yang cenderung mendukung lahirnya Undang-Undang tersebut, meskipun isinya mengarah pada syariatisasi. Ketidakkonsistenan ini mengajarkan kepada masyarakat untuk menjadi manusia yang tidak berprinsip.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) yang bertujuan membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang demokratis, yakni warga negara yang mampu berpartisipasi secara tanggungjawab. Sehingga semestinya partai politik perilaku partai politik dapat dijadikan contoh pendidikan politik yang baik. Meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), serta karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Partai politik semestinya bisa menjadi wahana atau alat dalam

mengusahakan pembentukan warga negara yang baik. Bisa melalui pengajaran langsung, maupun dengan keteladan perilaku yang ditunjukkan partai politik sehari-hari. Namun, sisi idealitas tersebut belum mampu dihadirkan, partai politik saat ini secara perilaku belum memberikan keteladanan mengenai masalah-masalah tersebut. Banyak elite partai yang menjadi bagian dari kejahatan korupsi, yang memberikan dampak pada memori masyarakat bahwa partai politik merupakan bunker koruptor dan bukan alat perjuangan ideologis. Akibatnya saat ini masyarakat menjadi tidak percaya terhadap partai politik, apatis politik. Hal ini berakibat pada gerakan anti partai politik bahkan membenci politik karena dianggap suatu yang kotor. Selain itu tidak mendidik masyarakat untuk membentuk kepribadian yang baik.

Koalisi yang non ideologis atau pragmatis dan cenderung berorientasi pada kekuasaan semata memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat. Dengan tidak menjalankan ideologi, setidaknya partai-partai politik tidak memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk berpolitik yang sesuai dengan koridor moral yang ada dalam ideologi partai. Serta tidak adanya orientasi pada ideologi dalam melahirkan sebuah kebijakan publik, memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Masyarakat akan kehilangan sikap-sikap ideologisnya, dan jiwa perjuangannya untuk memperjuangkan sebuah prinsip. Tetapi lebih mengedepankan popularitas dan citra, dengan kata lain lebih bersifat pragmatis untuk kepentingan diri sendiri. Secara garis besar tidak adanya konsistensi partai politik dalam menjadikan ideologi sebagai orientasi,

maka sebenarnya masyarakat tidak diajarkan cara-cara berpolitik yang berprinsip dari sebuah nilai yang diperjuangkan, melainkan masyarakat diajarkan bahwa berpolitik bukanlah merupakan tugas mulia guna memperjuangkan kesejahteraan masyarakat (*res publica*), melainkan untuk kepentingan diri sendiri dengan mengesampingkan nilai-nilai yang semestinya menjadi pedoman didalam perilaku politiknya. Dan dampak lain adalah masyarakat menjadi benci terhadap politik karena yang dilihat saat ini hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja dan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum, akibatnya masyarakat menjadi apatis terhadap politik dan juga anti terhadap partai politik. Partai politik gagal membentuk tujuan dari pendidikan politik: (1) sosialisasi politik; (2) kepribadian politik; (3) kesadaran politik; (4) partisipasi politik. Dengan kata lain, fungsi pendidikan politik yang menjadi tanggungjawab partai politik saat ini belum dikerjakan secara baik. Dengan perilaku-perilaku partai politik yang cenderung pragmatis dan meninggalkan ideologinya, maka tidak memiliki dampak positif terhadap perkembangan pendidikan politik masyarakat justru menjadi kontraproduktif. Sebagai contoh, untuk mendapatkan suara atau kader loyal bukan dicetak dari proses pembinaan yang massif, namun dengan cara *money politic*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi sosialisasi politik oleh partai politik sebagai upaya melakukan Internalisasi ideologi partai secara umum dilakukan dengan:

a. Sosialisasi politik secara langsung dengan pendidikan politik (*political education*).

Sosialisasi politik secara pendidikan politik (*political education*) dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung antara guru dengan murid. Ideologi partai diajarkan secara tatap muka antara guru dengan murid di kelas-kelas. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan metode pelatihan atau training yang diselenggarakan oleh partai. Partai politik yang mengguna metode pendidikan secara langsung adalah Partai Golongan Karya, Partai Demokrat. Partai Golongan Karya (P Golkar) memberikan pelatihan kepada kader dengan training lima tipologi kader, Partai Demokrat memerikan pendidikan ideologi kepada kader dengan *TFL (Training For Leader)* . Partai Amanat Nasional (PAN) menggunakan training Kader yang wajib diikuti oleh setiap jenjang. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan *Liqo* atau *halaqoh* yang wajib diikuti oleh setiap kader partai.

b. Sosialisasi politik dengan pengalaman politik (*Political experience*)

Internalisasi ideologi partai ke para kader dengan cara menerjunkan langsung kelapangan (praktek secara langsung). Metode ini digunakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan cara para kader-kadernya diperintahkan untuk melakukan kerja-kerja ideologis yaitu dengan program cabang pelopornya. Kader ditugaskan untuk menginventarisir masalah-masalah rakyat kecil dilingkungannya, setelah itu mengadvokasinya untuk dicarikan solusi.

- c. Sosialisasi politik yang dilakukan partai dalam menghasilkan kader-kader yang ideologis sebagian besar belum maksimal. Pendidikan politik kader dalam hal ideologi masih kurang, karena tidak dilakukan secara rutin. Hanya dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dalam kelas dan sifatnya tidak rutin, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melakukan sosialisasi rutin seminggu sekali kepada para kadernya. Partai politik yang memungkinan membentuk kader-kader yang ideologis adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini memiliki perangkat pembinaan kader yang cukup lengkap. Serta pembinaan kader-kadernya dilakukan secara rutin setiap minggu sepanjang menjadi kader partai.

2. Partai politik (PD, P Golkar, PDIP, PKS, PAN) tidak konsisten menjadikan ideologi sebagai orientasi dalam mencari mitra koalisi. Hal tersebut terlihat dari perilaku partai politik didalam membangun koalisi.

Pola yang nampak saat ini adalah:

- a. Latar belakang mengapa partai politik melakukan koalisi bukan karena persamaan ideologi atau persamaan kebijakan publik yang diperjuangkan. Tetapi parti-partai politik saat ini melakukan koalisi hanya ketika akan menghadapi pemilihan pejabat publik. Dengan fenomena tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partai- partai politik berkoalisi hanya untuk mencari kekuasaan semata bukan memperjuangkan ideologi partai. Dengan kata lain tidak berorientasi kepada ideologi.
- b. Koalisi yang dibangun saat ini adalah koalisi pelangi yaitu koalisi partai politik dengan ideologi-ideologi yang berbeda antara partai satu dengan yang lainnya. Bahkan yang jarak ideologinya berlawanan sekalipun. Fenomena di Indonesia yaitu bercampurnya ideologi nasionalis-sekuler dengan ideologi Islam kedalam satu koalisi. Terbentuknya sekretariat gabungan (setgab) adalah salah satu buktinya.
- c. Mudahnya partai politik untuk berganti-ganti mitra koalisi baik dengan partai yang berideologi nasionalis dan partai dengan ideologi

Islam memperlihatkan bahwa ideologi sudah tidak menjadi perhatian dalam menentukan siapakah yang akan menjadi mitra koalisinya.

3. Konsistensi partai politik dalam menjadikan ideologi sebagai orientasi dalam memproduksi kebijakan publik belum dilaksanakan secara maksimal. Partai-partai politik cenderung berorientasi isu apa yang sedang populer daripada ideologi partai. Tidak sesuai kebijakan publik yang diproduksi oleh partai politik dengan ideologi partai nampak dari hadirnya Undang-Undang Sisdiknas (UU No 20 Tahun 2003) yang lebih bercorak Islam. Dalam pandangan akhir mengenai undang-undang ini adalah hampir semua partai politik menyetujui lahirnya undang-undang ini. Termasuk partai-partai politik yang lebih bercorak sekuler pun setuju dengan lahirnya undang-undang ini. Adanya pasal yang mengharuskan setiap sekolah memberikan pelajaran agama sesuai agama setiap murid dan kewajiban sekolah untuk menyediakan guru agama yang sesuai merupakan pasal yang sering disebut dengan “pasal agama”. Pasal agama ini ada didalam rumusan undang-undang sisdiknas versi pemerintah. Padahal saat itu pemerintahan dipimpin oleh presiden Megawati Soekarno Putri dari PDIP yang lebih condong kewarna sekuler secara ideologi. Hal tersebut merupakan bukti bahwa kebijakan publik diproduksi partai politik berorientasi isu populer dan meninggalkan ideologi. Dalam masalah ini Partai Keadilan (sekarang

menjadi PKS) terlihat ideologis karena ikut mendukung disahkannya rancangan undang-undang sisdiknas ini.

4. Pergeseran ideologi partai politik di Indonesia saat ini mengikuti apa yang pernah menjadi *trend* masyarakat eropa menjelang perang dunia kedua, yaitu mulai meninggalkan ideologi ekstrim kanan dan ekstrim kiri guna memperbesar segmen pemilih. Ideologi partai politik mengalami gerakan menuju konvergensi kearah tengah. Awalnya partai politik di Indonesia tahun 1955 memperlihatkan adanya pertentangan ideologi kiri (sekuler) dan kanan (Islam). Namun saat ini pertentangan tersebut nampak semakin mulai menghilang. Partai politik perlahan mulai mengendorkan ikatan ideologinya dan menjadi partai tengah yang bersifat terbuka. Dengan kata lain saat ini kepartaian di Indonesia terjadi *konvergensi* antara ideologi Islam (kanan) dengan Ideologi Sekuler (kiri). Partai-partai di Indonesia bisa dikatakan sedang berhijrah menjadi partai tengah. Ideologi partai digerakan menuju titik tengah konvergensi ideologi.
5. Terhadap dampak pendidikan politik masyarakat, parta-partai politik tidak memberikan contoh yang baik. Anggota partai politik sering menunjukkan perilaku yang melanggar nilai-nilai ideologisnya. Sebagai contoh adalah: banyaknya korupsi yang dilakukan oleh anggota-anggota partai. Dengan meninggalkan ideologi partai, maka perilaku partai politik cenderung menghalalkan segala cara tanpa dituntun oleh nilai-nilai

dari ideologi. Dengan orientasi yang pragmatis maka partai politik cenderung tidak serius melakukan pendidikan politik terhadap anggota partai dan masyarakat umum. Sebagai contoh, untuk mendapatkan suara atau kader loyal bukan dicetak dari proses pembinaan yang massif, namun dengan cara *money politic*.

B. Saran

1. Kepada Parpol
 - a. Partai politik perlu melakukan sosialisasi politik dengan serius. Memberikan pemahaman yang mendalam kepada para kader partai dalam hal ideologi yang di usung partai politik.
 - b. Dalam hal keputusan politik yang berupa pembuatan kebijakan publik partai politik semestinya didasari atas ideologi yang diusung partai. Sehingga masyarakat dapat melihat *positioning* dari partai politik. Karena isu yang diusung partai politik jelas dan konsisten.
 - c. Dalam memilih mitra koalisi partai politik sebaiknya memilih mitra koalisi yang memiliki kesamaan secara ideologi, atau memiliki kedekatan secara ideologi. Supaya koalisi yang dibangun lebih konsisten dan tidak mudah berbeda pendapat dalam menyikapi sebuah isu.
 - d. Partai politik perlu mengoptimalkan peran dan fungsinya, terutama dalam hal memberikan pendidikan politik yang baik kepada

masyarakat. Dengan memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dalam perilaku partai sehari-hari.

- e. Partai politik kedepan perlu mengembangkan partai dengan model partai *cath all* ideologi.

2. Kepada Praktisi, Peneliti atau Aktivis

Hendaknya melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut untuk mengkritisi dan memberikan masukan terhadap perilaku partai politik. Supaya kedepan penyehatan partai politik dapat segera terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (1980). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia.
- Alfian, Alfian. (2009). *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ambardi, Kuskrido. (2009). *Mengungkap Politik Kartel Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied. 2007. *Komunikasi Politik , konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Graaindo Persada.
- Cholisin dkk. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: FISE UNY.
- Cholisin. (2010). *Diktat IKN-PKn*. Universitas Terbuka.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik Komunikasidan Positioning Ideologi politik di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Fukuyama, Francis. (2004). *The End of History and The Last Man*. Yogyakarta: Penerbit Qolam.
- Gaffar, Afan. (2005). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habibie, Bacharuddin Jusuf. (2006). *Detik-Detik Yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Haris, Syamsudin dkk. (2009). *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P. (2004). *Tertib Politik Pada Masyarakat yang sedang Berubah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Jurdi, Syarifuddin. (2008). *Pemikiran Politik Islam Di Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Maliki, Zainuddin. (2004). *Politikus Busuk Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Marijan, Kancung. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar Mas'oe'd dan Cholin Mac Andraws. (2001). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Nasiwan. (2003). *Diskursus Antara Islam Dan Negara Suatu Kajian Tentang Islam Politik Di Indonesia*. Kalimantan Barat: Yayasan Insan Cita Kalimantan Barat.
- Nasiwan. (2007). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta : FISE UNY Press.
- Nasution, Adnan Buyung. (2009). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia Studi Tentang Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Notonagoro. (1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: C.V. Pantjuran Tudjuh.
- Nugroho, Rianto. (2009). *Publik Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Putra, Fadiilah. (2003). *Partai dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rais, Amien. (2008). *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Rifai, Anam dkk. (2010). *Partai Politik Demorasi dan kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Ramses M, Andy.et al. (2009). *Politik Dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

- Rodee, Carlton Clymer. (2008). *Pengantar Ilmu politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rudi, May. (2007). *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaanya*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Scahmandt, Henry J. (2009). *Filsafat Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setijo, Panji. (2009). *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Soemanto, Wasty. (2009). *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiarto, Bima Arya. (2010). *Anti Partai*. Jakarta: Gramata Publising.
- Sudjana, Nana. (2009). *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharno. (2004). *Diktat Sosiologi Politik*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta : PT Grasindo.
- Sutrisno, Slamet. (2006). *Filsafat Pancasila dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syam Firdaus. (2007). *Pemikiran Politik Barat Sejarah, Filsafat, Idiologi, dan Pengaruhnya terhadap dunia ke-3*. Jakarta: bumi Aksara.
- Tim Andromeda. (2009). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Yogyakarta: Andromeda Publising.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Yuda, Hanta. (2010). *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Nogroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kel. Gramedia.

Putra, Fadillah. (2003). *Partai Politik dan Kebijakan Publik, Konfigurasi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Internet

Perolehan suara partai politik pemilu 1999 diambil dari
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42 pada 10 Oktober 2011.

Perolehan suara partai politik pemilu 1971 diambil dari
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40 pada 10 Oktober 2011

Perolehan suara partai politik pemilu 1977-2007 diambil dari
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 pada 10 Oktober 2011.

Perolehan suara Pemilu 1955 diambil dari
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39 pada 10 Oktober 2011.

Perolehan suara pilpres 2004 putaran I diambil dari
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5451&Itemid=76 pada 10 Oktober 2011.

Perolehan suara pilpres 2004 putaran 2 diambil dari
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5532
diambil pada 10 Oktober 2011.

Perolehan suara partai politik pada pemilu 2004 diambil dari
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5340&Itemid=76 pada 10 Oktober 2011.

Perolehan suara Pilpres 2009 diambil dari
<http://mediacenter.kpu.go.id/berita/818-kpu-tetapkan-hasil-rekapitulasi-suara-pilpres.html> pada 10 Oktober 2011.

Perolehan suara partai politik pemilu 2009 diambil dari <http://www.pemiluindonesia.com/pemilu-2009/kpu-tetapkan-hasil-pemilu-legislatif-2009.html> pada 10 Oktober 2011.

Anggaran Dasar Partai Demokrat diambil dari <http://www.demokrat.or.id/wp-content/uploads/2011/07/Anggaran-Dasar.pdf> pada 10 Oktober 2011.

Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat diambil dari <http://www.demokrat.or.id/wp-content/uploads/2011/07/Anggaran-Rumah-Tangga.pdf> Pada 10 Oktober 2011.

Sejarah partai demokrat diambil dari <http://www.demokrat.or.id/sejarah/> pada 10 Oktober 2011

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar diambil dari <http://www.golkar.or.id/pages-tentang/15/ad-art/> pada 10 Oktober 2011.

Perolehan suara partai Golkar pemilu 1971-2007 diambil dari <http://www.golkar.or.id/pages-tentang/18/hasil-pemilu/> pada 10 Oktober 2011.

Visi dan misi partai Golkar diambil dari <http://www.golkar.or.id/pages-tentang/23/visi-misi/> pada 10 Oktober 2011.

Sejarah partai Golkar diambil dari <http://www.golkar.or.id/tentang/sejarah> pada 10 Oktober 2011.

Visi dan misi PDIP diambil dari http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=91 pada 10 Oktober 2011

Piagam perjuangan PDIP diambil dari http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=98 pada 10 Oktober 2011

Dasa prasetya PDIP diambil dari http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=99 pada 10 Oktober 2011

Pengurus PDI diambil dari

http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=86 pada 10 Oktober 2011

Pidato ketua umum PDIP diambil dari

http://www.pdiperjuangan.or.id/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=11&Itemid=130 pada 10 Oktober 2011

Sejarah PKS diambil dari

<http://www.pk-sejahtera.org/content/sejarah-ringkas> pada 10 Oktober 2011.

Piagam Deklarasi PKS diambil dari

<http://www.pk-sejahtera.org/content/piagam-deklarasi> pada 10 Oktober 2011.

Visi dan misi PKS diambil dari

<http://www.pk-sejahtera.org/content/visi-dan-misi> pada 10 Oktober 2011.

Sejarah PAN diambil dari

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional pada 10 Oktober 2011.

Media massa

Harian Kompas, tanggal 22 Maret 2010

Harian Kompas, tanggal 24 Maret 2010

Harian Kompas, tanggal 29 Maret 2010

Harian Kompas, tanggal 20 Maret 2010

Jurnal

Choilisin, (2004), "Moralitas Politik Dalam Pemilu 2004 dan Implikasinya Bagi Pendidikan Kewarganegaraan", Jurnal Civic Volume 1 Nomor 2 Tahun 2004. Hlm.151-165.

Daniel Dhakidae. (2009). "Partai Politik di Persimpangan Jalan" Jurnal Prisma vol 28 Juni 2009. Hlm.87-98.

Undang-Undang

Undang-Undang No 20 Tahun 2003.Tentang Sisdiknas

Undang-Undang No 2 Tahun 2011.Tentang Partai Politik

Dokumen

Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) No 17 Tahun 2006
Tentang Tafsir Asas dan Platform Partai Amanat Nasional.

Risalah Cabang Pelopor Bidang Kaderisasi DPP PDIP, Periode kepengurusan
2010-2015

Rapat Kerja Daerah II, DPD Partai Demokrat Provinsi DIY pada hari minggu, 21
Februari 2010

LAMPIRAN

Wawancara dengan Idham Samawi pada April 2011

Apakah alasan lahirnya PDIP?

Dalam piagam perjuangan PDIP sangat jelas tentang partai ideologi. Platformnya PDIP perjuangan sesuai cita-cita uud 1945 dan Pancasila.

Apakah Orientasi Perjuangan PDIP?

Perkara kadernya tidak tahu maka orangnya yang jelek. Kalau partai jelas ideologi. Dalam kongres 3 bali harus melakukan kerja-kerja ideologis. Jelas PDIP adalah pancasila sebagai ideologinya. Partai mesti mengambil alih tugas-tugas negara dimana tangan-tangan negara tidak mampu menjangkaunya, membantu rakyat miskin, membantu mengadvokasi kepentingan rakyat kecil, pluralisme agama (itulah tugas atau kerja ideologis nyambung dengan Pancasila). Semua partai punya ideologi, bedanya ideologi PDIP itu sebagai ajaran. Kalau ada kader PDIP tidak mengurus rakyat maka yang jelek orangnya. Padahal di Platform itu sudah jelas.

Apa sebenarnya ideologi PDIP dan apa strategi PDIP dalam menginternalisasikan Ideologi kedalam kader-kadernya.?

PDIP membuat program yang diberi nama Cabang Pelopor, sebagai bentuk kerja-kerja ideologis. Ada 65 cabang pelopor harus melakukan kerja-kerja ideologis, turun kebawah membantu rakyat langsung. Tidak ada sekolah atau

pelatihan tentang ideologi. Namun harus bekerja langsung ke bawah. Cabang pelopor membuat peta tantangan permasalahan rakyat. Yang kedua adalah penugasan dengan mengadvokasi semua masalah untuk dicari solusi dan selanjutnya adalah evaluasi. Cabang pelopor ditempatkan pada daerah-daerah yang kepala daerahnya dipegang kader partai.

Apakah PDIP juga melakukan sekolah ideologi?

Strategi PDIP dalam proses ideologisasi tidak dilakukan di dalam kelas-kelas. Dulu pernah ada guru kader aja pindah partai, sekarang ideologisasinya dengan terjun langsung ke bawah memetakan permasalahan rakyat, mengadvokasi permasalahan rakyat. Kita akan melihat siapa kader yang terpanggil. Terjun langsung dengan buku panduan. Program itu adalah program cabang pelopor yang dijadikan program unggulan kami (PDIP).

Apakah Ideologi menjadi orientasi PDIP dalam memilih mitra ideologis?

Semua kerja adalah ukuran ideologi, termasuk pilihan oposisi adalah bagian dari pilihan ideologi karena pemerintahan sekarang kapitalis. Karena ideologi kita saat ini sedang berbeda. Pemerintah cenderung ke neoliberalisme. Dulu pertemuan sebulan sekali tidak ada kerjanya.

Mohon diterangkan tentang Majelis Ideologi?

Majelis ideologi diketuai oleh ketua umum partai. Tugasnya menjadi wasit apakah kerja-kerja atau keputusan-keputusan politik yang tidak sesuai dengan ideologi akan di ingatkan.

Bagaimana proses rekrutmen pejabat publik di PDIP?

Rekrutmen kita mencari orang, siapa yang terpanggil. Bukan didatangi, dan tidak mesti dari dalam PDIP sendiri. Pemilihanya dilakukan dengan kompetisi. Lebih baik PDIP kecil tapi kuat dari pada besar tapi keropos. Untuk menjadi ketua DPC saja harus membayar 2 milyar Itu ada.

Wawancara dengan Kuskrido Ambardi Pada Bulan April 2011

Saat ini ideologi apa yang sedang berkembang dan mempengaruhi kepartaian di Indonesia?

Ideologi yang populer di Indonesia saat ini adalah Islam dan Nasionalis (Pancasila). Kalau ideologi sosialis misalnya peran Negara yang cukup kuat. Ideologi sosialis saat ini tidak pernah menjadi isu besar dalam politik kepartaian Indonesia.

Kalau ideologi PDIP?

Pada tahun 1999 semua partai menjadi seperti sosialis (peduli dengan rakyat kecil) termasuk PDIP. Tapi lambat laun menjadi liberalisasi. Terjadi privatisasi. Setelah Megawati jadi presiden semua kebijakan menjadi kanan, privatisasi terjadi saat kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada yang sosialis, yang ada adalah retorika sosialis. Namun terhadap sosialis sulit untuk di identikan. Yang mudah di identikan adalah Islam dan Non Islam. Yaitu antara yang mengusung Islamisme dan yang menolak Islamisme. Islamisme adalah mengusung ideologi Islam, meskipun bentuknya bukan Negara Islam. Masih ada partai yang mengusung syariatisasi yaitu PKS sebelum 2004, PBB, dan PPP. Selain ketiga partai itu tidak ada yang menuntut diterapkannya syariatisasi baik ditingkat konstitusi maupun dibawah konstitusi. Sebagai contoh adalah UU Pornografi dan beberapa Perda.

Bagaimana Konstitusi partai politik saat ini dalam menerapkan ideologi politik?

Konsistensi partai politik dalam menerapkan ideologi sulit kita dapatkan untuk saat ini. Semua berubah-ubah, yang pro pasar dalam konsisi tertentu bisa anti pasar. Atau sering zig-zag. Kita sulit membedakan kubu ideologi yang konsisten dari awal sampai akhir. Konsistensi antar pemilu saja tidak

ada, bahkan setelah pemilu partai politik sudah tidak konsisten. Sebagai contoh: ketika PPP melakukan kritik terhadap Megawati Soekarno Putri tahun 1999 terkait pemimpin dari wanita, karena itu melanggar yariat Islam. Namun setelah Megawati naik menjadi Presiden Hamzah Haz masuk menjadi Wakil Presiden. Contoh yang kedua adalah P Golkar yang tidak mau berkoalisi dengan PAN, karena isu federalism. Namun setelah Gusdur menjadi Presiden maka semua partai masuk ke dalam kabinet.

Apakah selama 1999- 2009 partai politik masih konsisten menjalankan ideologinya?

Menurut saya, anantara 1999 samapi 2009 ketika perbedaan ideologi kuat didalam pemilu tapi setelah pemilu itu hilang. Jadi tidak ada partai politik yang konsisten dengan ideologinya. Konsistensi mulai terlihat pada PDIP diluar pemerintahan setelah 2004, tapi itu bukan berbasis isu, karena oposisi harus berdasarkan isu penting, kemudian ada oposisi yang berbeda padangan. Akan didalam pemerintahan ataupun diluar pemerintahan. PDIP berada diluar pemerintahan tidak jernih dikarenakan ideologi.

Lalu bagaimana oposisi semstinya?

Kita belum menemukan oposisi yang berbasis isu, dan itu konsisten. Seharusnya ada isu-isu pokok yang mesti di perjuangkan dan digunakan untuk memilih akan diluara atau didalam pemerintahan. Tapi saat ini belum ada isu tersebut. PDIP baru berada diluar pemerintahan namun isunya belum dibangun.

Terkait dengan koalisi, ap[akah koalisi saat ini berbasis pada ideologi?

Saat ini koalisi berbasi pada pragmatisme, apa yang mentaukan koalisi saat ini dan apa yang menjadikan ada paratai menjadi oposisi belum tahu penyebabnya. Tidak ada isu, tapi hanya masalah mendukung dan tidak

terhadap Susilo Bambang Yudoyono. Idealnya berada didalam dan diluar pemerintahan itu ada suatu garis dimana garis yang membedakan ada isu pokok. Dan masing-masing saling berseberangan. Salah satu berda didalam pemerintahan melaksanakan programnya, dan yang diluar pemerintahan memberikan alternatif. Seharusnya kolaisi seperti, namun sekarang kalau ditanya apakah hal itu sudah terjadi dalam sistem politik di Indonesia, maka jawabanya adalah belum.

Bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik?

Semakin banyak tuntutan untuk memenangkan pemilu dan mendapatkan banyak kursi membuat partai politik cenderung memilih jalan pragmatis. Perbedaan yang terjadi tidak ditingkat ideologi tapi deprogram. Namun hal itu pun tidak berjalan. Partai selalu mendua menjadi mitra yang kritis dan tapi juga menjadi bagian dari pemerintahan.

Apakah sekarang partai politik saling berkompetisi untuk memperjuangkan ideologinya?

Kontestasi itu ada pada pemilu namun permasalahanya bukan pada konsistensi itu ada atau tidak, tetapi isi konsistensi tersebut. Sekarang yang ada adalah kontestasi merebut posisi bukan merebut pilihan kebijakan.

Bagaimana konsistensi partai politik dalam memproduk kebijakan publik, khususnya terkait Sisdiknas?

Sisdiknas itu tentang Islam dan Sekuler, tetapi panggung ada kemenangan pihak Isalam tetapi tidak ada sangsinya. Kemenanagan itu tidak penuh.

Apakah sekarang di setiap partai politik tidak ada kader yang ideologis?

Disetiap kubu partai ada yang ideologis, tapi biasanya kalah. Mereka bukan pemain yang mendominasi partai. Mereka yang mendominasi partai adalah

yang mudah kompromi dan yang menganggap ideologi partai politik tidak penting, tidak mementingkan pengembangan program.

Lalu politik kartel itu apa?

Kartel itu untuk menjelaskan kenapa partai-partai berpindah-pindah ideologi, posisi, suka bergerombol seharusnya ada kompetisi. Tetapi setelah pemilu partai-partai menjadi satu group, perilakunya sama, pragmatis, seragam seperti kartel. Kartel itu karena semakin seragamnya partai, tidak ada perbedaan ideologi dan program. Perbedaan itu hanya reorika. Contoh adalah kasus century, tetapi tidak dilanjutkan menjadi alternative kebijakan, hanya korupsi dan tidak korupsi. Seolah-olah kiri tetapi pada akhirnya setuju privatisasi, tidak melihat perbedaan diantara partai-partai.

Partai yang ideal seperti apa?

Lihat dulu kriterianya, kalau kriterianya kerapian organisasi dan ketaatan pemilihnya adalah PKS bias kita kategorikan ideal.

Wawancara Dengan Darul Falah Anggota Majelis Syuro Pusat PKS Periode 2010-2015.

Bagaimana PKS dalam memandang Pancasila?

PKS melakukan Objektifikasi ideologi yang sudah ada. Bukan didominasi secara subjektif dengan penguasa.

Apa yang menjadi ideologi PKS?

PKS adalah menggunakan ideologi Islam.

Bagaimana pandangan PKS dengan syariatisasi?

Mewujudkan masyarakat madani, tidak harus negara islam dibawah kepemimpinan islam.

Apakah PKS bertentangan dengan Pancasila?

PKS sepakat pancasila sebagai ideologi Negara.pks dulu melawan pancasila karena ada penafsiran tunggal.yang diinginkan tidak secara tunggal/ bukan asas tunggal. Tidak bertentangan islam yang terpenting, dan sekarang pertentangan itu tidak ada.

Bagaimana strategi PKS dalam melakukan ideologisasi?

Kader harus mengikuti taklim rutin partai yang dilakukan setiap pekan... disemua jenjang kader. Ada kurikulum disetiap jenjangnya. Semua kegiatan pks yang dikonten saat liqo. Konten liqo ada isinya seperti taklimat, dll.

Apa yang menjadi kriteria PKS dalam memilih pejabat publik?

Untuk pejabat publik harus kader. Atau mengusung yang bukan kader dikarenakan kondisi yang darurat. Kalau bukan kader perlu kriteria yang macam-macam (ada seperti kontra politik).

Mengapa PKS sekarang mendeklarasikan diri menjadi partai terbuka?

Terbuka itu tuntutan aturan, partai politik harus membuka peluang semua bias masuk. Makanya PKS membuka diri. Dan kalau ada pengurus yang non muslim itu sifatnya darurat.

Bagaimana PKS dalam memilih mitra koalisi?

Prinsip musyarokah. Kita memnperhatikan siapa yang akan menang baru kita melakukan kontrak politik , baru kita mendukung. Kemarin kita kontrak dengan SBY bukan partai politik.

Mengapa PKS menyebut dirinya sebagai Partai Dakwah?

PKS itu alat dakwah. Ideologi dulu baru partai politik... paradigmanya adalah dakwah. Dan politik hanyalah salah satu bagianya saja.

